PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



Dr. H. Rudy Mas'ud, SE., ME
Gubernur Kalimantan Timur

Ir. H. Seno Aji, M.Si
Wakil Gubernur Kalimantan Timur

TAHUN

2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

BerAKHLAK

KALTIM
SUKSES
MENUJU
GENERASI
EMAS

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur diharapkan DPRD Provinsi Kalimantan Timur memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mencerminkan Kinerja Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan.

Gubernur Kalimantan Timur selaku Kepala Daerah bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menyadari sepenuhnya akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025, sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Samarinda, 28 Maret 2026

Gubernur Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar xi

BAB I : PENDAHULUAN 1
1. LATAR BELAKANG 1
1.1. DASAR HUKUM 2
1.2. VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH 4
1.2.1. Visi Daerah 4
1.2.2. Misi Daerah 4
1.2.3. Program Unggulan 5
1.3 DATA UMUM DAERAH 6
1.3.1 Data Geografis Wilayah 6
1.3.2 Jumlah Penduduk 11
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk 12
1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Prov. Kaltim 14
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 17
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 18
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 18
BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 20
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 21
2..1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah **21**
2..2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah **24**
2..3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian **28**
3.1 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 30
2..1. Kebijakan Belanja Daerah **31**

2..2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah..... 31
2.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH 34
2.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah..... 34
2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah 36
2.4. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 37
2.5. PERMASALAH DAN SOLUSI LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 38
BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH..... 42
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 42
3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 43
3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi..... 44
3.1.3. Tingkat Kemiskinan..... 46
3.1.4. Indeks Gini 47
3.1.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... 48
3.1.6. Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Ussual* (BAU)..... 49
3.1.7. Indeks Reformasi Birokrasi 51
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024..... 51
3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN 230
3.4 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 236
3.5 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNNYA 580
BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... 638
4.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN..... 638

4.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI 638
4.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 639
4.3.1. Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Di Kalimantan Timur 639
4.3.2.Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur 645
4.4. PERMASALAHAN DAN KENDALA 647
4.5. SARAN DAN TINDAK LANJUT 648
BAB V : PENUTUP 649

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2042 8
Tabel 1.2 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 10
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2025 11
Tabel 1.4 Angka Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur Tahun 2024-2025 13
Tabel 1.5 Jumlah ASN (PNS dan PPPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 15
Tabel 1.6 Rincian Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2025..... 16
Tabel 1.7 Target, Realisasi dan Kontribusi Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025..... 18
Tabel 1.8 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 18
Tabel 1.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 18
Tabel 2.1 Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 26
Tabel 2.2 Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 27
Tabel 2.3 Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Dana Transfer Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024..... 28
Tabel 2.4 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran 2024 29
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 32
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 33
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 34
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 35
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 35
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 36
Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per Urusan Pemerintahan Tahun 2024 37
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 40
Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 43
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2024 (%) 45
Tabel 3.4 Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (persen) 47
Tabel 3.5 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 (jiwa) 48
Tabel 3.6 Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 49
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2024 RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 51

Tabel 3.8 Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur 53
Tabel 3.9 Diagram Garis Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur 54
Tabel 3.10 Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur 55
Tabel 3.11 Diagram Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur 55
Tabel 3.12 Bantuan Operasional Sekolah 57
Tabel 3.13 Gratis Seragam Sekolah 58
Tabel 3.14 Peningkatan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan..... 58
Tabel 3.15 Perencanaan dan Rehabilitasi Sekolah Unggulan 59
Tabel 3.16 Rekapitulasi Akreditasi Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur, 025 66
Tabel 3.17 Persentase Ketersedian Obat Esensial Dan 7 Vaksin Irl 2025..... 71
Tabel 3.18 Pemenuhan Obat Esensial (40 Item) Kalimantan Timur 2020-2024 71
Tabel 3.19 Pemenuhan Vaksin IDL Kalimantan Timur 2020-2024 71
Tabel 3.20 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar (9 Jenis Tenaga Kesehatan) di Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023 75
Tabel 3.21 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar (9 Jenis Tenaga Kesehatan) di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024 75
Tabel 3.22 Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar (9 Jenis Tenaga Kesehatan) di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025 76

Tabel 3.23 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 2023 – 2024 85
Tabel 3.24 Keterwakilan Perempuan Di Parlemen 2023 – 2024 86
Tabel 3.25 Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2024 87
Tabel 3.26 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2021-2025..... 90
Tabel 3.27 Tren produksi perikanan tangkap dan budidaya 2022-2025 94
Tabel 3.28 Luas Tanam Komoditas Pertanian Tanaman Pangan 97
Tabel 3.29 PDRB Sektor Kehutanan Tahun 2025 98
Tabel 3.30 Jumlah Komoditi Tahun 2024-2025 99
Tabel 3.31 Pemberian Bantuan UEP per Jenis Bantuan Tahun 2025 105
Tabel 3.32 BUMDes berbadan hukum per Kabupaten / Kota Tahun 2024 - 2025 106
Tabel 3.33 Fokus Pembinaan Produk Unggulan Desa tahun 2025 ... 106
Tabel 3.34 Penanganan Kawasan Kumuh dan Perbaikan RTLH Tahun 2025 107
Tabel 3.35 Status Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025 108
Tabel 3.36 Rencana Fasilitasi Produk Unggulan Desa di Kabupaten Kukar Tahun 2026..... 109
Tabel 3.37 Rencana Fasilitasi Produk Unggulan Desa di Kabupaten Berau Tahun 2026 110
Tabel 3.38 IKLI 2023-2025 115
Tabel 3.39 Pembobotan Indikator dalam pencapaian IKLI Perhubungan..... 116
Tabel 3.40 Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji ... 117

Tabel 3.41 Persentase Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)... 122
Tabel 3.42 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat (%)..... 123
Tabel 3.43 Rasio Jumlah DI yang terlayani oleh jaringan irigasi..... 123
Tabel 3.44 Capaian Irigasi 125
Tabel 3.45 Presentase Penyediaan Kapasitas Air Baku..... 126
Tabel 3.46 Capaian Penanganan Air Baku Tahun 2025..... 127
Tabel 3.47 Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Perkotaan 128
Tabel 3.48 Penanganan Banjir..... 129
Tabel 3.49 Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota 130
Tabel 3.50 Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penangan Sampah Domestik 132
Tabel 3.51 Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota 133
Tabel 3.52 Persentase Penanganan Infrastruktur Permukiman Di Kawasan Strategis Provinsi 135
Tabel 3.53 Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang ditangani 137
Tabel 3.54 Persentase jumlah kawasan yang ditata..... 139
Tabel 3.55 Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi..... 141
Tabel 3.56 Jenis Layanan SPM 144
Tabel 3.57 Persentase Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan . 145
Tabel 3.58 Persentase Penanganan PSU permukiman 146
Tabel 3.59 Penilaian Skoring Penataan Ruang 148
Tabel 3.60 Skoring Penyelenggaraan Tata Ruang 149
Tabel 3.61 Jumlah KK Berlistrik 151
Tabel 3.62 37 Desa Program Lisdes..... 153
Tabel 3.63 Perolehan Peringkat PROPERLINK Usaha

dan/atau Kegiatan 2025 158
Tabel 3.64 Nilai Persepsi Interval SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan..... 191
Tabel 3.65 Faktor Pendorong Dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit Oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 Pada Setiap Aspek ... 195
Tabel 3.66 Predikat dan Interpretasi Nilai Akuntabilitas Kinerja 213
Tabel 3.67 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan 237
Tabel.3.68 Jawaban Atas Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025 581
Tabel 4.1 Realisasi Sumber Dana Tugas Pembantuan (APBN) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 641
Tabel 4.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025..... 643
Tabel 4.3 Realisasi Dana Tugas Pembantuan (APBN) Kabupaten Tahun 2025 646

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 7
Gambar 1.2 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur... 8
Gambar 1.3 Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara 9
Gambar 1.4 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 10
Gambar 1.5 Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 (Unreviu) 19
Gambar 2.1 Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 39
Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 43
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 44
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Manusia Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 46
Gambar 3.4 Indeks Gini Kalimantan Timur Tahun 2021-2025..... 47
Gambar 3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021-2025 48
Gambar 3.6 Persentase Penurunan Emisi dari BAU Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 49
Gambar 3.7 Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 51
Gambar 3.8 Dasbord ATS Provinsi Kalimantan Timur..... 60
Gambar 3.9 Cakupan Usia Harapan Hidup 2020 - 2025 62
Gambar 3.10 Tren Kematian Ibu di Provinsi Kalimantan Timur 2017 - 2025 64

Gambar 3.11 Capaian UHC dan Keaktifan Kepesertaan 2021 - 2025 65
Gambar 3.12 Tren Cakupan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alkes di Rumah Sakit dengan Score Pemenuhan >60%, 2020 - 2025 79
Gambar 3.13 Capaian Pemenuhan Kasus (Treatment Coverage) (%) 68
Gambar 3.14 Capaian Keberhasilan Pengobatan (Treatment Succes Rate) (%)..... 69
Gambar 3.15 Tren Kematian Bayi 0 – 12 Bulan Di Provinsi Kalimantan Timur 73
Gambar 3.16 Cakupan Puskesmas Dengan 9 Jenis Nakes Di Provinsi Kalimantan Timur, 2020 - 2025 74
Gambar 3.17 Tren Cakupan Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alkes di Puskesmas dengan Score Pemenuhan >60%, 2026 76
Gambar 3.18 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2025 77
Gambar 3.19 Capaian Indikator Status Gizi Balita sampai dengan TW IV Tahun 2025 80
Gambar 3.20 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kalimantan Timur 84
Gambar 3.21 Tren Produksi Ternak Tahun 2022 - 2025 91
Gambar 3.22 LPE Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020 - 2024 95
Gambar 3.23 Tren Nilai Tukar Petani (NTP) 2020 - 2025..... 97
Gambar 3.24 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata 102

Gambar 3.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2025 104
Gambar 3.26 Indeks Keparahan Kemiskinan 2025 104
Gambar 3.27 Tingkat Inflasi (year on year) 112
Gambar 3.28 Kemantapan Jalan 120
Gambar 3.29 Trend Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sd 2025 (rumus lama) dan Tahun 2025 (rumus baru) 156
Gambar 3.30 Perbandingan Capaian Nasional dan Capaian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 156
Gambar 3.31 Peta Pemantauan Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Kualitas Air 157
Gambar 3.32 Trend Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Timur 163
Gambar 3.33 Perbandingan Capaian Nasional dan Capaian Prov. Kaltim Tahun 2025 164
Gambar 3.34 Peta Pemantauan Kualitas Air Laut 164
Gambar 3.35 Trend Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Timur 170
Gambar 3.36 Peta Pemantauan Kualitas Udara 170
Gambar 3.37 Perbadingan Capaian Nasional Dan Capaian Prov. Kaltim 2025 171
Gambar 3.38 Indeks Kualitas Laha Provinsi Kalimantan Timur 175
Gambar 3.39 Perbandingan Capaian Nasional dan Capaian Prov. Kaltim Tahun 2025 176
Gambar 3.40 Nilai Sistem Merit Tahun 2023 192
Gambar 3.41 Nilai SPBE 2025 Berdasarkan Aspek SPBE 208
Gambar 3.42 Sebaran Nilai SPBE 208 – 2025 berdasarkan Domain SPBE 209
Gambar 3.43 Capaian Rata – Rata Indeks SPBE Nasional 209

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025 dirancang sebagai kewajiban dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 17 yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud berkenaan dengan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaanya, serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya. Hasil dari pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan berupa capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan diatasnya serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.

Penyusunan LKPJ merujuk pada kebijakan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang telah ditetapkan dan dianggarkan pada Tahun 2025 dengan berpedoman pada penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Gubernur akan menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi DPRD tersebut, ditindaklanjuti oleh Gubernur sebagai bahan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran berjalan dan tahun

anggaran berikutnya serta dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta kebijakan strategis lainnya.

1.1 DASAR HUKUM

1. Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025, beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang menjadi dasar penyusunan tersebut sebagai berikut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur merupakan wilayah administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan Gubernur pertama Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Kalimantan Timur sebelumnya merupakan salah satu Karesidenan dari Propinsi Kalimantan. Sesuai dengan aspirasi rakyat pulau terbesar di Nusantara ini, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi 3 (tiga) provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Bedasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur, dijelaskan dalam pasal (1) bahwa Provinsi Kalimantan Timur adalah bagian dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda sedangkan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten dan 3 (tiga) Kota, dengan rician sebagai berikut :

1. Kabupaten Paser dengan ibukota Tana Paser.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong.
3. Kabupaten Berau dengan ibukota Tanjung Redeb.
4. Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar.
5. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta.

6. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam.
7. Kabupaten Mahakam Ulu dengan ibukota Ujoh Bilang.
8. Kota Balikpapan dengan ibukota Balikpapan.
9. Kota Samarinda dengan ibukota Samarinda.
10. Kota Bontang dengan ibukota Bontang.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakter potensi sumber daya alam berupa hutan tetap, hutan produksi, hutan lindung, hutan konversi, perkebunan, dan bahan galian berupa batu alam, batu bara, dan minyak bumi. Karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

1.2 VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH

1.2.1 Visi Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, Bapak Dr. H. Rudy Mas'ud S.E., M.E. dan Bapak Ir. H. Seno Aji, S.E., M.Si, telah ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu **Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas** yang mengandung makna, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa "Semua Bisa Sukses". Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu membawa masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berakhlak mulia.

1.2.2 Misi Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi;

5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.6 (enam)

Misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang dirumuskan tersebut telah sejalan dengan 8 (delapan) Asta Cita RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dan 8 (delapan) misi RPJPD Tahun 2025-2045.

1.2.3 Program Unggulan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Hasil dari pelaksanaan program unggulan ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinisian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada program-program kerja yang telah menjadi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Program Unggulan Gratispol, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Generasi Emas, yaitu:

1. Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA hingga S3;
2. Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas;
3. Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting;
4. Gratis Internet di Setiap Desa;
5. Gratis Seragam Sekolah
6. Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah;
7. Gratis Umroh dan Perjalanan Religi bagi Petugas Rumah Ibadah;

Program Unggulan Jospol, terdiri dari 9 (sembilan) arah kebijakan unggulan yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses, yaitu:

1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;

2. Pengembangan teknologi dan inovasi di sektor perikanan, kelautan, industri dan layanan publik;
3. Peningkatan insentif pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, pesantren, serta penjaga rumah ibadah;
4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;
5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan;
7. Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan, jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional;
8. Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;
9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta;

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

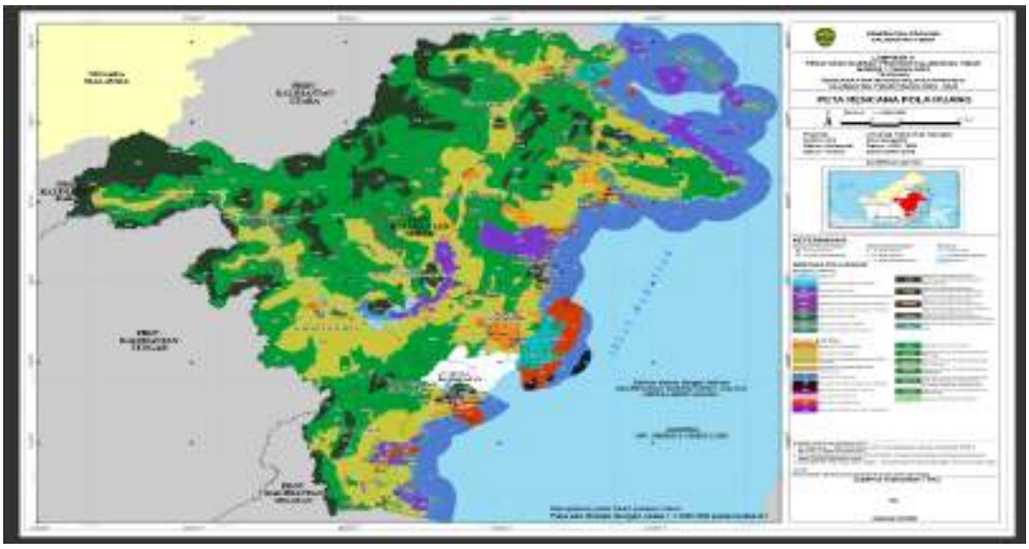
Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak antara 2^0 37’ 12.99” Lintang Utara (LU) dan – $2^0$28’ 19.31” Lintang Selatan (LS), 113^0 50’ 3.61-119^0 14’ 13.06” Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.113 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha.

Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Gambar 1.1
Peta Rencana Tata Ruang Tata Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042



Sumber: Perda No. 1 tahun 2023 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2023-2042

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Gambar 1.2
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: Bappeda Provinsi Kaltim, RPD 2024-2026

Pada gambar 1.2 menjelaskan, Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, terbagi 2 kawasan yaitu kawasan lindung seluas 2.975.994 ha dan kawasan budidaya seluas 6.925.495 ha. Kawasan lindung terdiri dari badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi (perikanan, permukiman, pertanian), kawasan hutan adat, kawasan

lindung geologi, kawasan ekosistem mangrove, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan hutan produksi) dan kawasan pencadangan konservasi di laut sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri dan kawasan transportasi.

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi 16,407 Juta Ha, dimana wilayah IKN Nusantara seluas 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha.

Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut Kabupaten/Kota dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

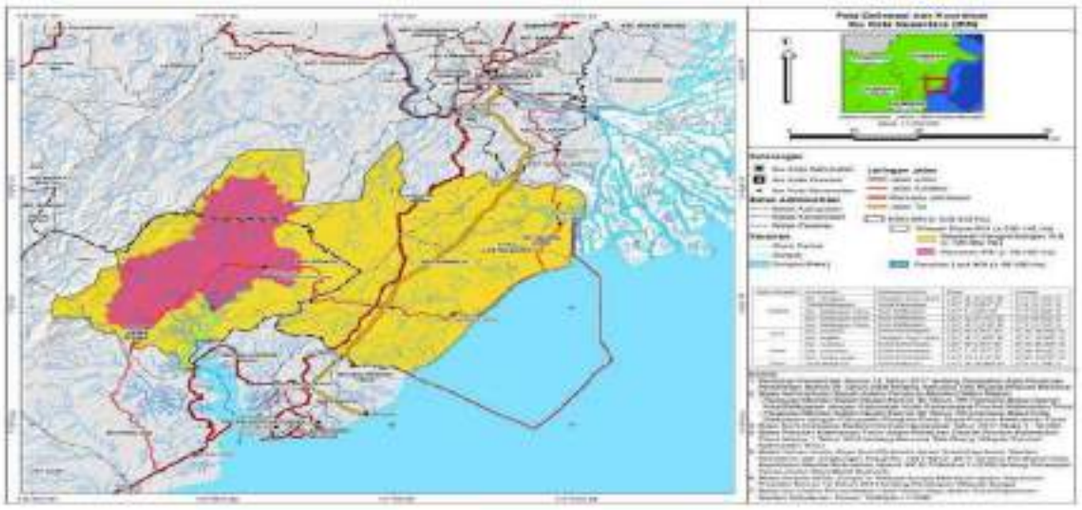
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2042

No.	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Kabupaten Paser	1.104.646	10	144
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.529.239	20	237
3	Kabupaten Berau	2.137.135	13	110
4	Kabupaten Kutai Barat	1.361.117	16	194
5	Kabupaten Kutai Timur	3.122.720	18	141
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	203.254	4	54
7	Kabupaten Mahakam Ulu	1.849.224	5	50
8	Kota Balikpapan	51.023	6	34
9	Kota Samarinda	71.678	10	59
10	Kota Bontang	16.077	3	15
KALIMANTAN TIMUR		**15.344.552**	**105**	**1.038**

Sumber : ***RTRW Provinsi Kaltim, 2024-2042***

Tabel 1.1 diatas menjelaskan bahwa bersumber dari dokumen Rencana tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2042 bahwa luas wilayah Kalimantan Timur yang terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten dan Kota sebesar 15.344.552 Ha dengan jumlah Kecamatan sebanyak 105 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.038.

Gambar 1.3
Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara



Sumber: Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Undang–undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi pusat pertumbuhan baru untuk Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 256.142 hektare. Sementara Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara memiliki luas kurang lebih 56.180 hektar, terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 1.4
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



Sumber : BPBD Prov. Kaltim, 2025

Provinsi Kalimantan Timur beribukota Samarinda memiliki luas wilayah 126.981,279 km2. Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 7 Kabupaten dan 3 Kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai 4.267,6 ribu jiwa (BPS Kalimantan Timur, 2025)

Provinsi Kalimantan Timur dilalui lajur lipatan dan sesar naik yang menunjukkan aktivitas tektonik yang signifikan kearah Timur. Topografi pada Provinsi Kalimantan Timur di dataran rendah yang umumnya terletak di sepanjang aliran Sungai, seperti Sungai Mahakam. Pegunungan tersebar di bagian Barat Provinsi, dengan banyaknya kemiringan lereng yang curam. Secara Klimatologi, curah hujan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 sebesar 1.827,50 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 100 hari dan Tingkat penyinaran matahari sebesar 46%.

Berdasarkan hasil verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2025 di Tingkat Kabupaten/Kota, diperoleh hasil pengukuran Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2025 pada Provinsi Kalimantan Timur memiliki kelas risiko sedang dengan nilai sebesar 117,73 dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,57.

Tabel 1.2
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	IKD	IRB
1	Kabupaten Paser	0.35	136.60
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	0.69	106.40
3	Kabupaten Berau	0.67	155.27
4	Kabupaten Kutai Barat	0.33	140.51
5	Kabupaten Kutai Timur	0.47	200.10
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	0.50	88.54
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0.51	103.74
8	Kota Balikpapan	0.71	89.43
9	Kota Samarinda	0.86	71.48
10	Kota Bontang	0.57	85.25

Sumber : *BPBD Prov. Kaltim 2025*

Keterangan: Hasil Penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024

Pada tabel diatas menjelaskan tentang capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang terdapat pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025.

Hasil penilaian rata-rata Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebesar 0,57 (nilai) tersebut, melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,53 (nilai) atau mengalami peningkatan 0,04 *point* dari nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 yaitu sebesar 0,53 (nilai). hasil penilaian IKD tertinggi diperoleh BPBD Kota Samarinda sebesar 0,86 (nilai), BPBD Kota Balikpapan sebesar 0,71 (nilai), dan BPBD Kutai Kartanegara sebesar 0,69 (nilai). Hal tersebut berpengaruh pada penurunan nilai IRB Provinsi kalimantan Timur tahun 2025 menjadi 117,73 (nilai), dari

target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 sebesar 131,64 – 136,11. Namun hasil penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dihitung oleh BNPB menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan tahun 2021, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan target IRB pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 – 2029 dan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024 yang masih menggunakan *baseline* pada komponen bahaya dan komponen kerentanan tahun 2013.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada Tahun 2024 sebesar 4.123.303 jiwa dan terus meningkat Semester II Tahun 2025 sebesar 4.194.958 jiwa. Sehingga terdapat peningkatan sebesar 2,8%.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Semester II Tahun 2025

No.	KAB/KOTA	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabupaten Paser	163.068	151.965	315.033
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	425.928	391.412	817.340
3	Kabupaten Berau	163.632	144.388	308.020
4	Kabupaten Kutai Barat	100.143	90.535	190.678
5	Kabupaten Kutai Timur	248.235	216.059	464.294
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	106.346	99.110	205.456
7	Kabupaten Mahakam Ulu	21.395	18.699	40.094
8	Kota Balikpapan	391.248	374.804	766.052
9	Kota Samarinda	454.205	439.180	893.385
10	Kota Bontang	100.538	94.068	194.606
Kalimantan Timur		**2.174.738**	**2.020.220**	**4.194.958**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2025

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2025 menurut jenis kelamin, bahwa penduduk Laki-laki sebanyak 2.174.738 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu sebesar 2.020.220 jiwa.

Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, maka wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini terdiri dari 7 Kabupaten dan 3 Kota yaitu :

1. Kabupaten Paser dengan ibukota Tana Paser;
2. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong;
3. Kabupaten Berau dengan ibukota Tanjung Redeb;
4. Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar;
5. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota Sangatta;
6. Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam;
7. Kabupaten Mahakam Ulu dengan ibukota Ujoh Bilang;
8. Kota Balikpapan dengan ibukota Balikpapan;
9. Kota Samarinda dengan ibukota Samarinda;
10. Kota Bontang dengan ibukota Bontang.

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 jika disandingkan dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2%. Kabupaten Kutai Timur merupakan Pertumbuhan Penduduk Tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 3,33%, sedangkan Mahakam Ulu pertumbuhan penduduk paling rendah sebesar 0,95%. Secara Jumlah Penambahan Penduduk Tertinggi untuk Kabupaten Kutai Timur sebanyak 15.444 jiwa dan untuk Kota Samarinda sebanyak 12.160 jiwa, sedangkan secara Jumlah Penambahan Penduduk terendah untuk Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 379 jiwa dan untuk Kota Bontang sebanyak 2.795 jiwa.

Penjelasan akan disajikan lebih lanjut pada table 1.4 dibawah ini :

Tabel 1.4
Angka Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Timur Tahun 2024-2025

NO.	KABUPATEN/KOTA	DATA PENDUDUK													
		Tahun 2024					Tahun 2025					Angka Pertambahan Penduduk			
		LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	Angka Pertumbuhan Penduduk
1	KABUPATEN PASER	160.276	52	149.391	48	309.667	163.068	52	151.965	48	315.033	2.792	2.574	5.366	1,70
2	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	420.744	52	386.220	48	806.964	425.928	52	391.412	48	817.340	5.184	5.192	10.376	1,27
3	KABUPATEN BERAU	158.927	53	140.078	47	299.005	163.632	53	144.388	47	308.020	4.705	4.310	9.015	2,93
4	KABUPATEN KUTAI BARAT	98.069	53	88.512	47	186.581	100.143	53	90.535	47	190.678	2.074	2.023	4.097	2,15
5	KABUPATEN KUTAI TIMUR	240.268	54	208.582	46	448.850	248.235	53	216.059	47	464.294	7.967	7.477	15.444	3,33
6	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	104.765	52	97.302	48	202.067	106.346	52	99.110	48	205.456	1.581	1.808	3.389	1,65
7	KABUPATEN MAHAKAM ULU	21.192	53	18.523	47	39.715	21.395	53	18.699	47	40.094	203	176	379	0,95
8	KOTA BALIKPAPAN	387.112	51	370.306	49	757.418	391.248	51	374.804	49	766.052	4.136	4.498	8.634	1,13
9	KOTA SAMARINDA	448.161	51	433.064	49	881.225	454.205	51	439.180	49	893.385	6.044	6.116	12.160	1,36
10	KOTA BONTANG	99.151	52	92.660	48	191.811	100.538	52	94.068	48	194.606	1.387	1.408	2.795	1,44
TOTAL		**2.138.665**	**52**	**1.984.638**	**48**	**4.123.303**	**2.174.738**	**52**	**2.020.220**	**48**	**4.194.958**	**36.073**	**35.582**	**71.655**	**2**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Kaltim, 2026

1.3.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, dengan 9 (sembilan) Biro :
    1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
    2) Biro Kesejahteraan Rakyat;
    3) Biro Hukum;
    4) Biro Perekonomian;
    5) Biro Administrasi Pembangunan;
    6) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
    7) Biro Umum;
    8) Biro Administrasi Pimpinan; dan
    9) Biro Organisasi
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas berjumlah 22 (dua puluh dua) :
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2) Dinas Kesehatan;
        - Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie dengan Klasifikasi A;
        - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan Klasifikasi A;
        - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dengan Klasifikasi A;
        - Rumah Sakit Mata dengan Klasifikasi C; dan
        - RSUD KORPRI dengan Klasifikasi D.
    3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
    4) Dinas Sosial;
    5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    6) Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    7) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    8) Dinas Lingkungan Hidup;
    9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    10) Dinas Perhubungan;
    11) Dinas Komunikasi dan Infromatika;
    12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    13) Dinas Pemuda dan Olahraga;
    14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    15) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
    16) Dinas Kehutanan;
    17) Dinas Kelautan dan Perikanan;
    18) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    19) Dinas Pariwisata;
    20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    21) Dinas Perkebunan; dan
    22) Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan berjumlah 9 (sembilan) :
    1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Badan Pendapatan Daerah;
3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4) Badan Kepegawaian Daerah;
5) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9) Badan Penghubung.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025 adalah berjumlah 9.295 orang jika disandingkan dengan Tahun 2024 sebanyak 9.502 orang, sedangkan jumlah PPPK (P3K) Tahun 2025 adalah sebanyak 11.605 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Jumlah ASN (PNS dan PPPK)
Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Jenis ASN	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	I/a	1	0	1
		I/b	2	0	2
		I/c	10	0	10
		I/d	24	0	24
		II/a	115	39	154
		II/b	54	29	83
		II/c	318	169	487
		II/d	285	162	447
		III/a	671	485	1.156
		III/b	748	814	1.562
		III/c	474	556	1.030
		III/d	952	1.325	2.277
		IV/a	446	348	794
		IV/b	403	464	867
		IV/c	158	218	376
		IV/d	16	5	21
		IV/e	3	1	4
	Jumlah PNS		**4.680**	**4.615**	**9.295**
2	PPPK	I	31	18	49
		II	1	1	2
		III	36	14	50
		IV	5	3	8
		V	1.730	1.186	2.916
		VI	1	0	1
		VII	520	933	1.453
		VIII	1	0	1
		IX	2.939	3.601	6.540
		X	190	372	562
		XI	10	12	22
		XIV	1	0	1
	Jumlah PPPK		**5.465**	**6.140**	**11.605**
Jumlah ASN (PNS dan PPPK)			**10.145**	**10.755**	**20.900**

Sumber : BKD Prov. Kaltim, 2025

Tabel 1.5 menjelaskan bahwa berdasarkan sumber dari Badan Kepegawaian daerah Provinsi Kalimantan Timur bahwa, Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebanyak 20.900 orang yang terdiri dari 9.295 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11.605 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kotrak (PPPK).

Tabel 1.6
Rincian Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil)
berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Kantor Gubernur		3	0	0	**3**
1	Sekretariat Daerah	Pendukung	3	0	0	**3**
	- Biro Administrasi Pembangunan	Pendukung	5	6	12	**23**
	- Biro Administrasi Pimpinan	Pendukung	5	5	24	**34**
	- Biro Hukum	Pendukung	4	8	8	**20**
	- Biro Kesejahteraan Rakyat	Pendukung	5	4	6	**15**
	- Biro Organisasi	Pendukung	4	9	8	**21**
	- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pendukung	5	6	18	**29**
	- Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pendukung	3	32	14	**49**
	- Biro Perekonomian	Pendukung	5	6	11	**22**
	- Biro Umum	Pendukung	3	4	79	**86**
2	Inspektorat	Pengawasan	5	67	49	**121**
3	Badan kepegawaian Daerah	Penunjang	10	38	25	**73**
4	Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Pemerintahan	6	8	24	**38**
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wajib Pelayanan Dasar	5	11	19	**35**
6	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	50	3	220	**273**
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penunjang	6	19	17	**42**
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang	15	3	79	**97**
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	7	20	17	**44**
10	Badan Penghubung Jakarta	Penunjang	3	0	14	**17**
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	7	8	62	**77**
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pilihan	8	19	39	**66**
13	Dinas Kehutanan	Pilihan	78	145	286	**509**
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pilihan	19	12	82	**113**
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5	2	1	**8**
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	8	0	11	**19**
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	4	9	2	**15**
18	Dinas Kesehatan	Wajib Pelayanan Dasar	30	73	68	**171**
	- RSJD Atma Husada Mahakam	UOBK Kesehatan	11	111	26	**148**
	- RSUD Abdul Wahab Sjahranie	UOBK Kesehatan	12	661	145	**818**
	- RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	UOBK Kesehatan	11	403	138	**552**
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5	19	30	**54**
20	Dinas Lingkungan Hidup	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7	23	25	**55**

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	19	68	105	**192**
22	Dinas Pariwisata	Pilihan	6	12	18	**36**
23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perum Rakyat	Wajib Pelayanan Dasar	33	23	219	**275**
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7	7	20	**34**
25	Dinas Pemuda dan Olahraga	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	11	12	59	**82**
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5	16	12	**33**
27	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	29	3797	372	**4198**
28	Dinas Perhubungan	Wajib Bukan Pelayanan Dasar	10	10	67	**87**
29	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Pilihan	9	25	17	**51**
30	Dinas Perkebunan	Pilihan	15	21	29	**65**
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan Pilihan	7	37	18	**62**
32	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pilihan	13	19	39	**71**
33	Dinas Sosial	Wajib Pelayanan Dasar	29	15	97	**141**
34	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	20	63	63	**146**
35	Satuan Polisi Pamong Praja	Wajib Pelayanan Dasar	8	27	78	**113**
36	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pendukung	5	8	46	**59**
Jumlah PNS			**583**	**5894**	**2818**	**9295**

Sumber: BKD Prov. Kaltim, 2025

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.**17.735.007.281.245,00** atau 92,61%. Adapun target sebesar Rp.**19.149.234.532.603,00** dan realisasi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi		Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
	Murni	Perubahan	Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	10.035.157.739.563,00	9.566.413.121.680,00	8.773.440.352.046,00	91,71	49,47
Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296,00	9.277.648.428.533,00	8.672.180.152.238,00	93,47	48,90
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.050.395.141,00	305.172.982.390,00	289.386.776.961,00	94,82	1,63
Jumlah	**20.100.000.000.000,00**	**19.149.234.532.603,00**	**17.735.007.281.245,00**	**92,61**	

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar Rp19.372.142.373.472,84 atau tercapai 89,28%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
Belanja Operasional		**9.956.825.775.767,62**	**8.694.789.208.737,97**	**87,32**
1	Belanja Pegawai	3.802.102.068.967,95	3.445.626.583.155,71	90,62
2	Belanja Barang dan Jasa	5.410.502.474.364,67	4.559.903.297.219,26	84,27
3	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	1.709.617.600,00	17,09
4	Belanja Hibah	710.045.732.435,00	665.052.710.763,00	93,66
5	Belanja Bantuan Sosial	24.175.500.000,00	22.497.000.000,00	93,06
Belanja Modal		**4.880.766.312.956,38**	**4.265.596.189.768,87**	**87,39**
Belanja Tidak Terduga		**101.800.545.408,00**	**54.460.000.000,00**	**53,49**
Belanja Transfer		**6.757.465.039.971,00**	**6.357.296.974.966,00**	**94,07**
Jumlah Belanja Daerah		**21.696.857.674.103,00**	**19.372.142.373.472,84**	**89,28**

Sumber Data: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pada Tahun 2025 pengeluaran pembiayaan untuk PT. BPD Kaltim Kaltara sebesar 0%. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No.	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan		2.597.623.141.500,00	2.597.623.141.500,20	100,00
	-	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	2.597.623.141.500,00	2.597.623.141.500,20	100,00

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	-	-
	- Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000,00	-	-
	Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	2.547.623.141.500,00	2.597.623.141.500,20	101,96
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	960.488.049.272,36	-

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Gambar 1.5
Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**19.149.234.532.603,00**	**17.735.007.281.245,00**	**92,61**	**22.084.696.501.917,39**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**9.566.413.121.680,00**	**8.773.440.352.046,00**	**91,71**	**10.239.889.614.105,39**
4.1.01	Pajak Daerah	7.937.566.254.869,00	6.888.387.426.692,70	86,78	8.571.499.366.555,80
4.1.02	Retribusi Daerah	1.114.869.349.428,00	1.247.937.529.327,30	111,93	1.100.891.467.508,59
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	377.458.223.635,00	368.004.360.121,26	97,49	237.697.555.597,37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.519.293.748,00	269.111.035.904,74	197,12	329.801.224.443,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**9.566.413.121.680,00**	**8.773.440.352.046,00**	**91,71**	**10.239.889.614.105,39**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**9.277.648.428.533,00**	**8.672.180.152.238,00**	**93,47**	**11.698.786.393.340,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	11.696.120.652.840,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	9.946.322.921.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.009.520.102.500,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	209.814.629.949,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	530.462.999.391,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.554.590.339.533,00	7.073.436.879.500,00	93,63	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.049.286.349.000,00	971.429.651.903,00	92,58	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.357.074.000,00	605.898.954.835,00	92,87	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**9.256.233.762.533,00**	**8.650.765.486.238,00**	**93,45**	**11.696.120.652.840,00**
4.2.01.06	Insentif Fiskal	21.414.666.000,00	21.414.666.000,00	100,00	2.665.740.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**21.414.666.000,00**	**21.414.666.000,00**	**100,00**	**2.665.740.500,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**9.277.648.428.533,00**	**8.672.180.152.238,00**	**93,47**	**11.698.786.393.340,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**305.172.982.390,00**	**289.386.776.961,00**	**94,82**	**146.020.494.472,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	28.361.111.193,00	18.671.285.000,00	65,83	22.834.925.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	276.811.871.197,00	270.715.491.961,00	97,79	123.185.569.472,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**305.172.982.390,00**	**289.386.776.961,00**	**94,82**	**146.020.494.472,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**19.149.234.532.603,00**	**17.735.007.281.245,00**	**92,61**	**22.084.696.501.917,39**
5	**BELANJA DAERAH**	**21.696.857.674.103,00**	**19.372.142.373.472,84**	**89,28**	**20.463.583.151.615,72**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**9.956.825.775.767,62**	**8.694.789.208.737,97**	**87,32**	**9.336.790.243.607,75**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.802.102.068.967,95	3.445.626.583.155,71	90,62	3.225.822.553.360,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.410.502.474.364,67	4.559.903.297.219,26	84,27	4.898.722.386.376,95
5.1.04	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00	1.709.617.600,00	17,09	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	710.045.732.435,00	665.052.710.763,00	93,66	1.195.068.203.870,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	24.175.500.000,00	22.497.000.000,00	93,05	17.177.100.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**9.956.825.775.767,62**	**8.694.789.208.737,97**	**87,32**	**9.336.790.243.607,75**
5.2	**BELANJA MODAL**	**4.880.766.312.956,38**	**4.265.596.189.768,87**	**87,39**	**4.870.009.542.680,97**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	120.295.392.848,00	105.174.546.207,00	87,43	78.009.159.889,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.198.745.948.464,34	1.077.873.923.763,00	89,91	1.142.602.008.686,76
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.229.787.982.190,04	955.008.010.952,87	77,65	1.963.235.930.500,64
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.281.997.668.216,00	2.082.120.462.869,00	91,24	1.612.446.622.172,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.714.026.920,00	24.333.757.193,00	98,46	41.747.926.804,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.225.294.318,00	21.085.488.784,00	83,58	31.967.894.628,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	JUMLAH BELANJA MODAL	**4.880.766.312.956,38**	**4.265.596.189.768,87**	**87,39**	**4.870.009.542.680,97**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**101.800.545.408,00**	**54.460.000.000,00**	**53,49**	**64.230.807.314,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	101.800.545.408,00	54.460.000.000,00	53,49	64.230.807.314,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**101.800.545.408,00**	**54.460.000.000,00**	**53,49**	**64.230.807.314,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**6.757.465.039.971,00**	**6.357.296.974.966,00**	**94,07**	**6.192.552.558.013,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.696.713.889.971,00	4.312.085.824.966,00	91,81	4.391.448.912.082,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.053.251.150.000,00	2.037.711.150.000,00	99,24	1.801.103.645.931,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**6.757.465.039.971,00**	**6.357.296.974.966,00**	**94,07**	**6.192.552.558.013,00**
	JUMLAH BELANJA	**21.696.857.674.103,00**	**19.372.142.373.472,84**	**89,28**	**20.463.583.151.615,72**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa pada Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur memiliki Anggaran pendapatan sebesar Rp19.149.234.532.603,00 dengan realisasi sebesar RP17.735.007.281.245,00 atau sebesar 92,61%, sedangkan rincian Belanja dengan anggaran Rp21.696.857.674.103,00 dan realisasi belanja sebesar Rp19.372.142.373.472,84 atau sebesar 89,28%.

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Timur Tahun 2024-2026. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rencana Pembangunan Daerah melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya pada Periode Tahun 2024-2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Pemerintah Provinsi Kalimanta Timur melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Perangkat Daerah (PD) melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RKPD yang diikuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dengan memperhatikan amanat peraturan tersebut, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Semester I RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024,

dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menjunjukan adanya ketidak sesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksistim;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
c. Terjadi perubahan yang mendasar dan/atau;
d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

Perubahan atau Pembaharuan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenkelatur program sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dapat langsung disesuaikan pada rencana kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.

Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 semula sebesar Rp20.100.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp19.149.234.532.603 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp950.765.467.397, sedangkan untuk Anggaran Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang semula sebesar Rp20.950.000.000.000 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp21.696.857.674.103 atau peningkatan anggaran sebesar Rp746.857.674.103.

2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Transfer. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Melakukan kajian untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
2. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait kebijakan-kebijakan yang berlaku.
3. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;

4. Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri pada seluruh Wajib Pungut di wilayah Kalimantan Timur;
6. Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
7. Pembaharuan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
8. Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD.
9. Peningkatan peran dan fungsi kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan menghadirkan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam peningkatan pengetahuan (knowledge) terhadap regulasi pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima;
10. Optimalisasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
12. Meningkatkan koordinasi dalam kontribusi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Strategi peningkatan kebijakan pendapatan Dana Transfer melalui Upaya-upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui stimulasi ekonomi daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor dan PPh badan;
2. Akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam Pendapatan Transfer; dan
3. Evaluasi Kinerja DBH SDA dan Pajak bersama Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, Dinas ESDM Provinsi Kaltim, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim secara berkala.
4. Sosialisasi secara berkala mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
5. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak RI sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;

6. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi; dan
7. Meningkatkan koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Bapenda Kabupaten/Kota Se - Kalimantan Timur antara lain :
   - Koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan bagi hasil PNBP dari Sektor Minerba dan Sektor Kehutanan yaitu PNBP Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebagai sumber pendapatan baru dan obyek pendapatan lainnya sesuai wewenang Provinsi.
   - Melakukan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA Minerba dan DBH Pajak serta Bedah Kertas Kerja Lifting Migas untuk mengetahui realisasi PNBP dan DBH Daerah.
   - Melakukan Rekonsiliasi Dana Transfer Ke Daerah bersama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kaltim dan KPPN Samarinda dalam rangka menyamakan data realisasi penerimaan negara tahun berjalan
   - Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemerintah kabupaten/kota terkait perhitungan potensi produktivitas lahan Perkebunan sawit sebagai bahan dasar proyeksi penerimaan DBH Sawit tahun berjalan dan tahun berikutnya.
   - Koordinasi penyaluran fasilitas treasury deposit facility bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas
   - Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Pajak terkait penerimaan PBB P5L (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minerba, Pertambangan Pabum, Pertambangan Migas dan Sektor lainnya) terkait pemenuhan kepatuhan dan kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui :
   a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
   b. Pelaksanaan pendataan atas potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah baru
   c. Pengembangan sistem operasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. Peningkatan fasilitas dan sarana serta kualitas SDM pelayanan secara bertahap;
   e. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi khususnya secara digital

f. Pengembangan sistem pembayaran digital memanfaatkan e-commerce dan fintech seperti Gojek, Tokopedia, Linkaja, Dana;
g. Program Pemberian Keringanan pembayaran pajak untuk memberikan insentif kepada wajib pajak sebagai stimulus pendapatan daerah berupa penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk proses daftar ulang tahunan, pembebasan Bea Balik Nama Kepemilikan kedua dan seterusnya serta pemberian diskon pajak bagi yang membayar sebelum jatuh tempo;
h. Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Taat Pajak melalui kegiatan Gebyar Pajak
i. Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi di lingkungan organisasi;
j. Upaya revitalisasi BUMD dilakukan dengan memperbaiki manajemen secara profesional, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, memberikan kemudahan dalam prosedur pelayanan bagi konsumen/nasabah/klien/mitra usaha, serta mengoptimalkan fungsi badan pengawas sehingga BUMD beroperasi sesuai ketentuan, memiliki daya saing, dan dipercaya oleh lembaga perbankan;
k. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; serta
l. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan serta dengan kepolisian dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemungutan dan pelayanan serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.
m. Koordinasi dengan Perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam perhitungan keuntungan bersih.

2.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai aturan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 secarakeseluruhan sebesar 92,61% dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan TimurTahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi		Kontribusi terhadap Pendapatan(%)
	Murni	Perubahan	Rp	%	
Pendapatan Asli Daerah	10.035.157.739.563,00	9.566.413.121.680,00	8.773.440.352.045,14	91,71	49,47
Pendapatan Transfer	9.862.791.865.296,00	9.277.648.428.533,00	8.672.180.152.238,00	93,47	48,90
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.050.395.141,00	305.172.982.390,00	289.386.776.961,00	94,83	1,63
Jumlah	**20.100.000.000.000,00**	**19.149.234.532.603,00**	**17.735.007.281.244,10**	**92,61**	

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp9.566.413.121.680,00 sedangkan realisasinya tercapai sebesar Rp8.773.440.352.045,14 atau 91,71% dari target yang telah ditetapkan.

Pada Pendapatan Transfer, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp9.277.648.428.533,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp8.672.180.152.238,00 atau 93,47% dari target yang ditetapkan.

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp305.172.982.390,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp289.386.776.961,00 atau 94,83% dari target yang ditetapkan.

Jumlah target setelah perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp19.149.234.532.603,00 sedangkan untuk realisasi tercapai sebesar Rp17.735.007.281.244,10 atau sebesar 92,61%.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, Realisasi dan Kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi		Kontribusi terhadap PAD (%)
	Murni	Perubahan	Rp	%	
Pajak Daerah	8.400.000.000.000,00	7.937.566.254.869,00	6.888.387.426.692,70	86,78	78,51
Retribusi Daerah	1.070.333.040.395,00	1.114.869.349.428,00	1.247.937.529.327,60	111,93	14,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	449.309.792.556,00	377.458.223.635,00	368.004.360.121,26	97,49	4,19
Lain-lain PAD YangSah	115.514.906.612,00	136.519.293.748,00	269.113.135.903,58	197,12	3,07
Jumlah	**9.862.791.865.296,00**	**9.566.413.121.680,00**	**8.773.440.352.046,00**	**91,71**	

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Pada Pajak Daerah, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp7.937.566.254.869,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp6.888.387.426.692,70 atau 86,78% dari target yang ditetapkan.

Pada Retribusi Daerah, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp1.114.869.349.428,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp1.247.937.529.327,60 atau 111,93% dari target yang ditetapkan.

Pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp377.458.223.635,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp368.004.360.121,26 atau 97,49% dari target yang ditetapkan.

Pada Lain-lain PAD Yang Sah, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp136.519.293.748,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp269.113.135.903,58 atau 197,12% dari target yang ditetapkan.

Jumlah target setelah perubahan pada Pajak Daerah, Retribus Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah yaitu sebesar Rp9.566.413.121.680,00 untuk sedangkan untuk realisasi tercapai sebesar Rp8.773.440.352.046,00 atau 91,71%.

Dana Bagi Hasil , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Insentif Daerah. Kontribusi masing-masing rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 disajikan pada table di bawah ini :

Tabel 2.3.
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer ProvinsiKalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi		Kontribusi terhadap Pendapatan Transfer (%)
	Murni	Perubahan	Rp	%	
Dana Bagi Hasil	8.120.244.188.296,00	7.554.590.339.533,00	7.073.436.879.500,00	93,63	81,56
Dana Alokasi Umum	1.068.787.337.000,00	1.049.286.349.000,00	971.429.651.903,00	92,58	11,20
Dana Alokasi Khusus Fisik	72.197.874.000,00	72.197.874.000,00	51.666.088.879,00	71,56	0,60
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	580.147.800.000,00	580.159.200.000,00	554.232.865.956,00	95,53	6,39
Insentif Fiskal	21.414.666.000,00	21.414.666.000,00	21.414.666.000,00	100,00	0,25
Jumlah	9.862.791.865.296,00	9.277.648.428.533,00	8.672.180.152.238,00	93,47	

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Pada Dana Bagi Hasil, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp7.554.590.339.533,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp7.073.436.879.500,00 atau 93,63% dari target yang ditetapkan.

Pada Dana Alokasi Umum, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp1.049.286.349.000,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp971.429.651.903,00 atau 92,58% dari target yang ditetapkan.

Pada Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp72.197.874.000,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp51.666.088.879,00 atau 71,56% dari target yang ditetapkan.

Pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp580.159.200.000,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp554.232.865.956,00 atau 95,53% dari target yang ditetapkan.

Pada Insentif Fiskal, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan yaitu sebesar Rp21.414.666.000,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp21.414.666.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan.

Jumlah target setelah perubahan pada Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Insentif Daerah yaitu sebesar Rp9.277.648.428.533,00 sedangkan untuk realisasi tercapai sebesar Rp8.672.180.152.238,00 atau 93,47%.

Pendapatan Daerah pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan setelah perubahan sebesar Rp305.172.982.390,00 dan realisasinya tercapai 94,83%. Kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4.
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Lain-lain Pendapatan DaerahYang Sah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi		Kontribusi terhadap Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah (%)
	Murni	Perubahan	Rp	%	
Pendapatan Hibah	13.864.392.517,00	28.361.111.193,00	18.671.285.000,00	65,83	6,45
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	188.186.002.624,00	276.811.871.197,00	270.715.491.961,00	97,79	93,55
Jumlah	202.050.395.141,00	305.172.982.390,00	289.386.776.961,00	94,83	

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

2.1.3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan meliputi :

1. Daya beli masyarakat yang masih belum membaik sehingga tingkat penjualan dari asosiasi kendaraan terhadap kendaraan bermotor belum terstimulus pasca-pemulihan ekonomi;
2. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaran masih kurang untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Masih tingginya jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) sehingga berpengaruh terhadap besaran tunggakan pajak dan masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
4. Kendala insfrastruktur jaringan di masing-masing daerah sehingga pemanfaatan layanan kemudahan seperti e-Samsat ataupun Payment Point Online Bank (PPOB) dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah;
5. Terlambatnya penetapan pagu definitif alokasi Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Pusat;
6. Regulasi penyaluran Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang tidak pasti dan sering berubah sehingga mempengaruhi kinerja Pendapatan Daerah dari Komponen Dana Transfer.

Adapun solusi untuk pemecahan masalah pada pendapatan daerah, meliputi :

1. Mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak melalui Program Penghapusan Denda PKB dan BBNKB untuk proses daftar ulang tahunan, pembebasan Bea Balik Nama Kepemilikan kedua dan seterusnya, serta pemberian

diskon pajak bagi yang membayar sebelum jatuh tempo;

2. Melaksanakan sosialisasi kepada pemilik kendaraan bermotor salah satunya melalui operasi gabungan dengan mitra Bapenda (Kepolisian dan Jasa Raharja);
3. Pengembangan layanan pembayaran pajak melalui pilihan channel/kanal pembayaran pajak berbasis digital;
4. Membangun sistem informasi digital guna mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
5. Melakukan audit pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Wajib Pungut (WAPU) yang beroperasi di Kalimantan Timur, khususnya terkait distribusi penjualan BBM Industri di sektor pertambangan;
6. Menggali pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil, serta optimalisasi tim pendapatan dari sektor retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah untuk melakukan monitoring dan survey potensi Lain-Lain PAD Yang Sah;
7. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi daerah melalui upaya penggalian potensi yang ada maupun potensi yang baru;
8. Melakukan koordinasi dengan badan usaha milik daerah untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal;
9. Meningkatkan sinergitas kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah melalui perjanjian kerjasama untuk terlibat secara intensif; dan
10. Melakukan penyelarasan data antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, yang menjadi salah satu strategi untuk mendongkrak pendapatan negara dari PPh pasal 21 dan PPh pasal 25/29.
11. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan terkait penyealuran dana transfer.

2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Halini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencana anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaranke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Angggaran 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terutama merespon Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja.

Sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian target indikator makro pembangunan, maka berdasarkan belanja prioritas, alokasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada :

1. Program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan pemerintahan pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan; serta penunjang urusan pemerintahan sejumlah 5 (lima) urusan;
2. Pendukungan terhadap program Sustainable Development Goals (SDGs), kemiskinan dan pemenuhan janji gubernur;
3. Pendukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023;
4. Penggunaan dana fungsi pendidikan 20 (dua puluh) % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
5. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 (sepuluh) % dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 (sepuluh) % dari total belanja APBD diluar gaji dan tidak hanya berkenaan dengan pembiayaan pada

urusan kesehatan melainkan pada urusan non kesehatan yang didalamnya terdapat fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;

6. Penggunaan dan fungsi infrastruktur 10 (sepuluh) % dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Bantuan keuangan Kabupaten/Kota, bantuan desa, hibah, bantuan sosial dan subsidi;
8. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat dan Pajak Rokok;
9. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
10. Pemberian penghargaan bagi altet berprestasi; dan
11. Revitalisasi cabang dinas dan satuan pelayanan baru dan tertentu yang kondisinya memerlukan rehabilitasi.

2.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah yaitu; Belanja Operasi; Belanja Modal; Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Alokasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebelum Perubahan sebesar Rp20.950.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp21.696.857.674.103,00 setelah Perubahan mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp746.857.674.103,00 atau 3,56%. Perubahan ini terjadi pada jenis belanja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Operasi	9.390.879.440.369,00	9.956.825.775.767,62	8.694.789.208.737,97	87,32
BelanjaModal	4.667.457.468.440,00	4.880.766.312.956,38	4.265.596.189.768,87	87,39
BelanjaTidak Terduga	174.965.591.911,00	101.800.545.408,00	54.460.000.000,00	53,49
Belanja Transfer	6.716.697.499.280,00	6.757.465.039.971,00	6.357.296.974.966,00	94,07
JUMLAH	**20.950.000.000.000,00**	**21.696.857.674.103,00**	**19.372.142.373.472,84**	**89,28**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

   Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp9.390.879.440.369,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp9.956.825.775.767,62 sedangkan Realisasi Belanja Operasi pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 sebesarRp8.694.789.208.737,97 atau 87,32% dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Pegawai;	3.749.475.911.228,00	3.802.102.068.967,95	3.445.626.583.155,71	90,62
Belanja Barang dan Jasa;	4.916.292.223.573,00	5.410.502.474.364,67	4.559.903.297.219,26	84,27
Belanja Subsidi;	1.759.399.648,00	10.000.000.000,00	1.709.617.600,00	17,09
Belanja Hibah	695.691.405.920,00	710.045.732.435,00	665.052.710.763,00	93,66
Belanja Bantuan Sosial	27.660.500.000,00	24.175.500.000,00	22.497.000.000,00	93,05
JUMLAH	**9.390.879.440.369,00**	**9.956.825.775.767,62**	**8.694.789.208.737,97**	**87,32**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

2. Belanja Modal

   Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp4.667.457.468.440,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran2025 dialokasikan sebesar Rp4.880.766.312.956,38 sedangkanRealisasi Belanja Modal pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.265.596.189.768,87 atau 87,39% dari target yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
BelanjaTanah;	143.923.647.282,00	120.295.392.848,00	105.174.546.207,00	87,43
Belanja Peralatan dan Mesin;	732.086.800.521,00	1.198.745.948.464,34	1.077.873.923.763,00	89,91
Belanja Gedung dan Bangunan;	1.491.369.694.343,00	1.229.787.982.190,04	955.008.010.952,87	77,65
Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi;	2.254.885.125.850,00	2.281.997.668.216,00	2.082.120.462.869,00	91,24
Belanja modal aset tetap lainnya.	24.497.486.268,00	24.714.026.920,00	24.333.757.193,00	98,46
Belanja modal aset lainnya.	20.694.714.176,00	25.225.294.318,00	21.085.488.784,00	83,58
JUMLAH	**4.667.457.468.440,00**	**4.880.766.312.956,38**	**4.265.596.189.768,87**	**87,39**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

3. Belanja Tidak Terduga

   Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp174.965.591.911,00 dan pada APBD Perubahan sebesar Rp101.800.545.408,00 dengan realisasi sebesar Rp54.460.000.000,00 atau 53,49%

4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.716.697.499.280,00 dan APBD Perubahan dialokasikansebesar Rp6.757.465.039.971,00 direalisasikan sebesar Rp6.357.296.974.966,00 atau 94,08%.

   Adapun rincian Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

   a. Belanja Bagi Hasil;

      Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.312.085.824.966,00 berdasarkan Kabupaten/Kota selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja BagiHasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.663.446.349.280,00	4.696.713.889.971,00	4.312.085.824.966,00	91,81
JUMLAH	**4.663.446.349.280,00**	**4.696.713.889.971,00**	**4.312.085.824.966,00**	**91,81**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.037.711.150.000,00 selengkapnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	2.053.251.150.000,00	2.053.251.150.000,00	2.037.711.150.000,00	99,24
JUMLAH	**2.053.251.150.000,00**	**2.053.251.150.000,00**	**2.037.711.150.000,00**	**99,24**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

2.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah danbelanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiappenerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupunpada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pengeluaran pembiayaan, mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 masih sama seperti halnya pada kebijakan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu :

a. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);
b. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi pemerintah daerah;
c. Pemerintah daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan, tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan dan lain-lain;
d. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian; dan
e. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan obligasi daerah.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	%
	Murni	Perubahan	Rp	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	900.000.000.000,00	2.597.623.141.500,00	2.597.623.141.500,20	100,20
Jumlah	**900.000.000.000,00**	**2.597.623.141.500,00**	**2.597.623.141.500,20**	100,20

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp900.000.000.000,00 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp2.597.623.141.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.597.623.141.500,20 atau 100,20%.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pengeluaraan Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun 2025		Realisasi	%
	Murni	Perubahan	Rp	
Penyertaan Modal	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0	0
Jumlah	**50.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**	**0**	**0**

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 pada Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di anggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp50.000.000.000,00 namun tidak terealisasi dikarenakan berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 setiap penyertaan modal harus ditetapkan dengan Perda dan dari hasil kesepakatan rapat dengan DPRD, bahwa akan dibuat terlebih dahulu perseroda yang menyebutkan secara rinci beberapa pemenuhan penyertaan modal pertahunnya sampai modal dasar terpenuhi, sehingga dengan tidak adanya Perda tersebut maka tidak dapat direalisasikan .

2.4. ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar Rp21.746.857.674.103, dengan rincian anggaran dan realisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan sebagai sebagai berikut:

Tabel. 2.12
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi kalimantan Timur
Per Urusan Pemerintahan Tahun 2025

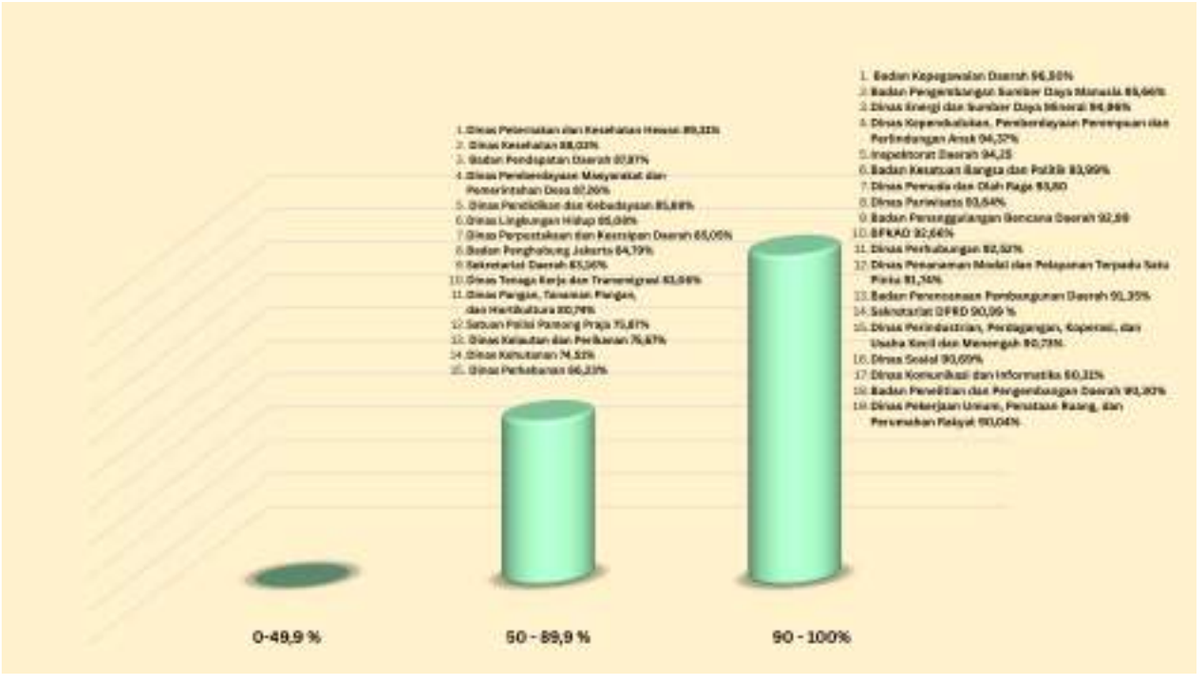
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5	**Belanja Daerah**	**21.746.857.674.103,00**	**19.372.142.373.472,80**	**89,08**
5.1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**10.214.814.716.197,00**	**8.975.494.745.779,93**	**87,87**
5.1.01	Pendidikan	3.747.312.069.958,00	3.211.114.727.356,86	85,69
5.1.02	Kesehatan	2.666.973.900.607,00	2.347.904.547.937,07	88,03
5.1.03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.616.624.732.906,00	3.256.366.732.094,00	90,04
5.1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	43.903.817.945,00	33.310.876.596,00	75,87

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
5.1.06	Sosial	140.000.194.781,00	126.968.099.796,00	90,69
5.2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**1.239.704.827.489,00**	**1.113.297.182.384,21**	**89,80**
5.2.07	Tenaga Kerja	113.211.189.639,00	94.031.331.804,00	83,06
5.2.08	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	33.197.890.854,00	31.329.442.156,00	94,37
5.2.09	Pangan	129.455.797.722,00	104.526.440.877,21	80,74
5.2.11	Lingkungan Hidup	40.108.105.080,00	34.125.838.392,00	85,08
5.2.13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	63.312.505.926,00	55.249.004.304,00	87,26
5.2.15	Perhubungan	199.460.159.664,00	184.537.927.512,00	92,52
5.2.16	Komunikasi & Informatika	167.749.485.970,00	151.501.118.267,00	90,31
5.2.18	Penanaman Modal	39.713.400.290,00	36.433.951.293,00	91,74
5.2.19	Kepemudaan Dan Olahraga	409.999.448.019,00	384.566.438.289,00	93,80
5.2.23	Perpustakaan	43.496.844.325,00	36.995.689.490,00	85,05
5.3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**1.311.803.669.397,00**	**1.056.475.058.036,60**	**80,54**
5.3.25	Kelautan Dan Perikanan	116.048.728.971,00	87.813.128.261,00	75,67
5.3.26	Pariwisata	37.833.071.550,00	35.425.121.139,00	93,64
5.3.27	Kehutanan	648.169.851.192,00	482.927.277.473,52	74,51
5.3.28	Energi Dan Sumber Daya Mineral	199.079.370.561,00	189.043.018.375,00	94,96
5.3.29	Perindustrian	102.871.946.856,00	93.335.205.755,00	90,73
5.3.30	Peternakan dan Kesehatan Hewan	131.347.111.882,00	117.299.586.595,00	89,31
5.3.31	Perkebunan	76.453.588.385,00	50.631.720.438,08	66,23
5.4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**1.339.027.961.807,00**	**1.149.519.996.584,93**	**85,85**
5.4.01	Sekretariat Daerah	862.829.334.913,00	717.498.952.907,93	83,16
5.4.02	Sekretariat DPRD	455.808.998.436,00	414.732.163.105,00	90,99
5.4.03	Badan Penghubung Kaltim Jakarta	20.389.628.458,00	17.288.880.572,00	84,79
5.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**7.396.586.177.581,00**	**6.847.298.351.051,17**	**92,57**
5.5.01	Perencanaan	61.189.097.427,00	55.897.393.159,00	91,35
5.5.02	Keuangan	7.005.663.263.363,00	6.491.269.350.880,00	92,66
5.5.03	Kepegawaian	47.027.107.760,00	45.380.854.357,00	96,50
5.5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	70.298.180.785,00	67.248.473.453,00	95,66
5.5.05	Penelitian Dan Pengembangan	27.825.197.409,00	25.126.822.801,00	90,30
5.5.06	Bapenda	184.583.330.837,00	162.375.456.401,17	87,97
5.6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**87.988.655.636,00**	**82.930.833.676,00**	**94,25**
5.6.01	Inspektorat	87.988.655.636,00	82.930.833.676,00	94,25
5.8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**156.931.665.996,00**	**146.955.967.960,00**	**93,64**
5.8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	102.017.635.944,00	95.890.562.194,00	93,99
5.8.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.914.030.052,00	51.065.405.766,00	92,99

Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Gambar 2.1

Realisasi Keuangan dan Fisik SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber: BPKAD Prov. Kaltim, 2025

Gambar diatas menjelaskan bahwa dari 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, terdapat 19 (sembilan belas) Perangkat Daerah yang serapannya mencapai 90-100%, 15 (lima belas) Perangkat Daerah yang serapannya 50-89,99% dan tidak ada Perangkat Daeerah yang serapan realisasinya 0-49,99%.

2.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah yaitu :

1. Menunggu revisi regulasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait kewenangan.
2. Adanya harga Pengadaan barang/jasa melebihi pagu dan adanya keterlambatan pengiriman oleh pihak penyedia dan keterbatasan waktu anggaran dan perubahan jadwal.
3. Adanya perubahan regulasi/kebijakan dari kementerian/lembaga dimana saat ini persidangan dilakukan dengan *hybrid* yaitu melalui persidangan langsung dan melalui sistem *e-court* (persidangan elektronik)

4. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, tapi Honorarium narasumber dan pembahas belum dapat dibayarkan karena dianggap sebagai tugas dan fungsi.
5. Adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah pusat terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang telah dianggarkan yang tidak diikuti dengan percepatan pergeseran ataupun tidak cukup wakyu untuk mengajukan perubahan anggaran.
6. Kinerja pihak penyedia tidak optimal;
7. Keterlambatan kontrak pada kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil; dan kegiatan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Proses pelaksanaan pengadaan dilaksanakan pada bulan Juli dan akhir kontrak pada bulan Desember.
8. Adanya Penyesuaian lokasi dan pada pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik dan perluasan pembangunan jaringan listrik PLN pada wilayah/desa yang belum berlistrik 24jam.
9. Adanya kegiatan yang tidak dapat direaliasikan menyesuaikan dengan faktor alam dan terbatasnya SDM pelakasana sehingga beberapa kegiatan kordinasi tidak dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran kas.
10. Perencanaan kurang matang, terlihat dari kegiatan yang batal (masterplan, DED, alat kesehatan) dan harus dialihkan ke tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analis permasalahan pada Dimensi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaa, dan Monitoring Evaluasi (Monev) tahun 2025 dapat jelaskan bahwa tantangan utama Pembangunan daerah tidak hanya bersifat sektoral, tetapi merupakan akumulasi dari kelemahan tata kelola yang saling berkaitan sepanjang siklus program dan anggaran.

1. Dimensi Perencanaan masih menghadapi permasalahan mendasar, terutama terkait ketidaksiapan perencanaan awal, ketidak singkronan dengan regulasi dan kewenangan, serta rendahnya kesiapan teknis pengadaan, yang berdampak pada batal atau tertundanya pelaksanaan kegiatan.
2. Dimensi Penganggaran menunjukan bahwa ketepatan alokasi anggaran awal belum optimal, tercermin dari tingginya pergeseran anggaran dan penyesuaian anggaran sepanjang tahun, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan inefisiensi serta resiko sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
3. Dimensi Pelaksanaan merupakan sumber permasalahn paling dominan dan kompleks dengan berbagai hambatan yang meliputi perubahan regulasi,

keterbatasan sumberdaya manusia, kendala system informasi, ketergantungan antar kegiatan dan pihak lain serta factor eksternal seperti kondisi sosial dan alam, yang secara signifikan menghambat program realisasi fisik dan keuangan.

4. Dimensi Monev, meskipun jumlah permasalahannya relatif lebih kecil, menunjukan kelemahan dalam konsistensi pemutakhiran data realisasi fisik, yang berpotensi melemahkan fungsi pengendalian, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data.

b. Solusi Permasalahan sebagai berikut :

1. Penguatan system perencanaan dan penganggaran, dengan meningkatkan koordinasi antar unit dalam tahap perencanaan dan penganggaran; dan menggunakan metode perencanaana berbasis kinerja untuk efisiensi penggungaan anggaran. Pada perencanaan, perlu lebih detail memastikan anggaran yang dialokasikan tetap sasaran untuk pembangunan daerah, dengan memperhatikan belanja dan metode yang akan dilaksanakan.
2. Membuat edaran kepada Perangkat Daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA/DPA, agar tidak mengalokasikan anggaran honorarium kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi.
3. Menyusun belanja yang adaptasi terhadap berbagai perubahan regulasi agar kegiatan bisa dilaksanakan di lapangan dengan baik.
4. Pejabat pengadaan maupun pelaksana teknis kegiatan agar mempersiapkan kegiatan dengan baik serta memilih penyedia yang kredibel dan memiliki kemampuan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
5. Kepada perangkat daerah agar segera melakukan pengajuan pergeseran dan perubahan kegiatan apabila ada perubahan kebijakan terkait efesiensi maupun regulasi yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari impact dan outcome. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Realisasi dan Target yang telah dicapai berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
INDIKATOR KINERJA TUJUAN						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,79	79,05	79,39	**100.43**
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,19	6,28-6,58	4,53	**72.13**
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,05-5,67	5,17	**100.00**
4	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,310-0,321	0,312	**100.00**
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,19	81,7	**101.88**
6	Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU)	Persen	38,59	27,53	38,59	**140,17**
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16 (A)	85,84 (A)	85,16	**99.21**
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
8	Prevalensi Stunting	Persen	22,2	19,80	15,94	**124.22**
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,60-5,14	5,18	**99.22**
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,41	67,64	61,41	**90.78**
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	5,92	8,39	8,78	**104.64**
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	12,14	12,39	12,78	**103.14**

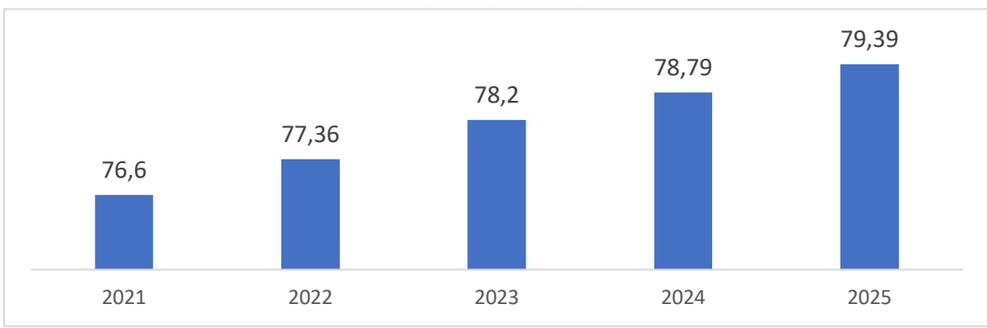
Sumber: BPS Prov. Kaltim, Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Prov. Kaltim, 2025

Tabel 3.1 menjelaskan pada tahun 2025 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai realisasi di atas 100 persen dan 7 (tujuh) IKU yang belum mencapai target. Penjelasan masing-masing Capaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya.

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat. IPM mempertimbangkan tiga dimensi utama: kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan per kapita. Di Provinsi Kalimantan Timur, IPM cenderung menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, IPM Kalimantan Timur tercatat sebesar 76,61. Namun, pada tahun 2020, IPM sedikit menurun menjadi 75,94, kemungkinan akibat dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pada tahun 2021, IPM kembali meningkat menjadi 76,60, melanjutkan peningkatannya pada tahun 2022 sampai 2024 lalu mencapai 79,39 pada tahun 2025. Pada tahun yang sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional adalah sebesar 75,90. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur, dengan kemajuan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Gambar 3.1
Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur
Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

Tabel 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Paser	73,34	73,85	74,56	75,13	75,85
2	KUBAR	72,31	73,16	73,97	74,76	75,38
3	KUKAR	74,69	75,31	75,95	76,57	77,25
4	KUTIM	74,15	74,69	75,33	75,9	76,48
5	Berau	75,69	76,24	76,71	77,17	77,72
6	PPU	73,01	73,56	74,33	74,94	75,82
7	MAHULU	68,36	69,17	70,02	70,79	71,53
8	Balikpapan	81,07	81,49	82,03	82,62	83,23

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
9	Samarinda	81,05	81,72	82,61	83,11	83,53
10	Bontang	80,65	81,00	81,63	82,49	83,04

Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

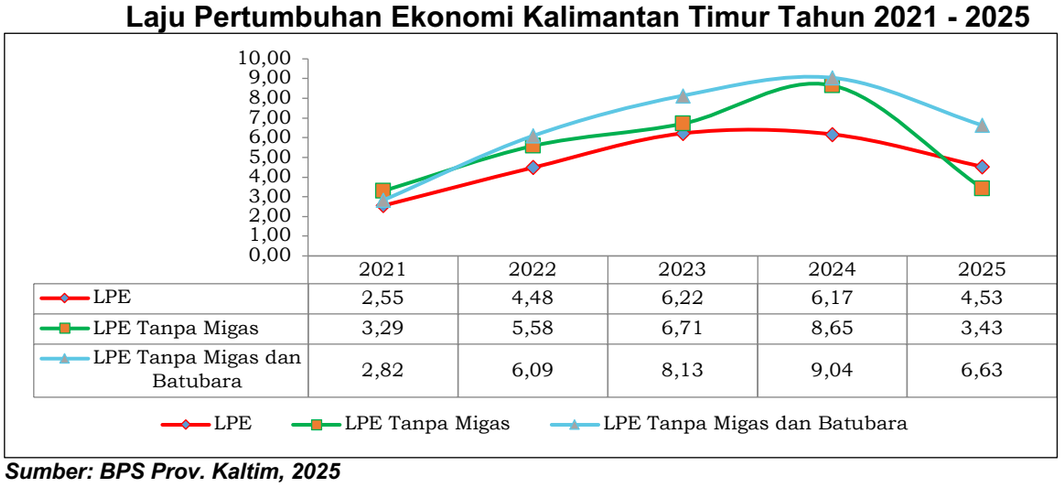
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Kalimantan Timur menunjukkan adanya disparitas antara daerah dengan capaian tinggi dan rendah dalam kurun waktu 2021 hingga 2025. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda menjadi daerah dengan capaian IPM tertinggi, secara konsisten mencatat angka di atas 80. Hal ini mencerminkan bahwa kedua kota ini memiliki kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih baik dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur. Kinerja positif ini bisa jadi didorong oleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang lebih luas.

Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu mencatat IPM terendah dibandingkan daerah lain, dengan angka yang masih jauh di bawah rata-rata provinsi. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun, kesenjangan dengan daerah perkotaan seperti Balikpapan dan Samarinda masih cukup signifikan. Rendahnya capaian IPM di Mahakam Ulu dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif di daerah dengan capaian IPM rendah untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Timur.

3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
LPE	2,55	4,48	6,22	6,17	4,53
LPE Tanpa Migas	3,29	5,58	6,71	8,65	3,43
LPE Tanpa Migas dan Batubara	2,82	6,09	8,13	9,04	6,63

Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan. Namun, pada tahun 2025, LPE Kalimantan Timur mengalami penurunan mencapai 4,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,17 persen.

Penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dipengaruhi oleh melemahnya kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi penopang utama struktur ekonomi daerah. Penurunan permintaan dan harga komoditas batu bara di pasar global berdampak langsung pada kinerja ekspor dan nilai tambah regional. Selain itu, moderasi aktivitas konstruksi seiring selesainya sebagian tahapan awal pembangunan Ibu Kota Nusantara turut menahan akselerasi pertumbuhan. Kondisi tersebut diperkuat oleh efek basis (base effect) dari capaian pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun sebelumnya, sehingga secara agregat menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan sangat cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 30,68 persen dan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025 (%)

No	KAB/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025*)
1	Paser	5,39	1,10	1,38	3,77	1,66
2	KUBAR	4,19	4,78	5,82	7,57	4,99
3	KUKAR	2,68	3,70	5,13	5,62	3,33
4	KUTIM	-0,89	5,58	7,71	9,82	1,91
5	Berau	5,36	3,95	5,44	7,28	0,93
6	PPU	-1,69	14,49	29,85	30,68	8,93
7	MAHULU	1,27	0,91	2,80	3,60	5,55
8	Balikpapan	4,57	4,96	6,49	3,23	9,73
9	Samarinda	2,78	6,60	8,62	8,66	5,71
10	Bontang	1,60	2,46	4,16	-2,51	3,45

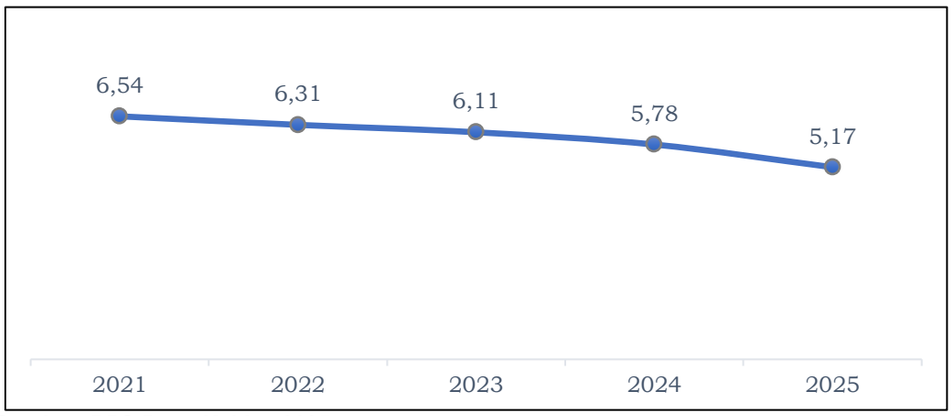
Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Indikator ini sangat penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu daerah, serta berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Angka kemiskinan yang rendah biasanya menunjukkan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sementara angka yang tinggi dapat menjadi indikasi perlunya intervensi lebih lanjut.

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menurun. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mencapai 6,54 persen dan menurun pada tahun 2025 menjadi sebesar 5,17 persen. Angka kemiskinan ekstrem Kalimantan Timur juga mengalami penurunan mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Gambar 3.3
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021 – 2025



Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

Penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur tahun 2025 dipengaruhi oleh membaiknya kinerja perekonomian daerah yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi di sektor unggulan. Kenaikan harga komoditas utama seperti batu bara, sawit, dan hasil pertanian turut meningkatkan pendapatan rumah tangga berpendapatan rendah, terutama di wilayah perdesaan. Selain itu, terbukanya lapangan kerja seiring proyek strategis dan pembangunan wilayah, termasuk dampak lanjutan pengembangan IKN, membantu menurunkan jumlah pengangguran. Faktor lain yang berperan adalah penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang semakin tepat sasaran berkat perbaikan basis data, sehingga mampu menahan kerentanan masyarakat miskin dan mendorong sebagian rumah tangga keluar dari garis kemiskinan.

Tabel 3.4
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Paser	9,73	9,43	9,11	8,63	8,13
KUBAR	10,24	10,2	9,72	9,56	8,72
KUKAR	7,99	7,96	7,61	7,28	6,72
KUTIM	9,81	9,28	9,06	8,81	8,07
Berau	5,88	5,65	5,54	5,08	4,44
PPU	7,61	7,25	6,97	6,69	5,78
MAHULU	11,9	11,55	11,38	10,75	10,09
Balikpapan	2,89	2,45	2,31	2,23	1,97
Samarinda	4,99	4,85	4,81	4,30	3,45
Bontang	4,62	4,54	4,11	3,74	3,21
KALTIM	6,54	6,31	6,11	5,78	5,17

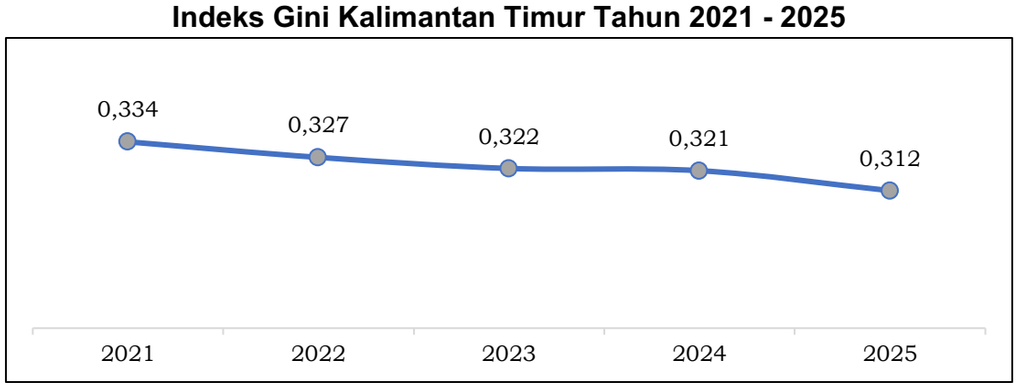
Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

Perkembangan persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Kaltim juga menunjukan penurunan di Tahun 2025. Jika dilihat dari capaiannya daerah perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Capaian kemiskinan tertinggi masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu 10,09 persen. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

3.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah. Indeks Gini memiliki rentang nilai antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dimana nilai yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, sedangkan nilai yang mendekati 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Gambar 3.4
Indeks Gini Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025



Sumber: BPS Prov. Kaltim, 2025

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,334 di tahun 2021 menjadi 0,312 di tahun 2025. Penurunan Indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2025 mencerminkan semakin meratanya distribusi pengeluaran penduduk, yang dipengaruhi oleh turunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya daya beli kelompok berpendapatan rendah. Pertumbuhan

ekonomi yang relatif inklusif, didukung peningkatan pendapatan dari sektor-sektor utama serta penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran, mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga 40 persen terbawah. Kondisi ini memperkecil kesenjangan pengeluaran antar kelompok pendapatan dan tercermin pada menurunnya Indeks Gini di Kalimantan Timur.

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel 3.5
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024 (jiwa)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,290	0,288	0,282	0,292	0,271
2	KUBAR	0,338	0,317	0,300	0,277	0,266
3	KUKAR	0,294	0,283	0,269	0,284	0,307
4	KUTIM	0,325	0,328	0,304	0,336	0,283
5	Berau	0,300	0,377	0,352	0,327	0,317
6	PPU	0,292	0,263	0,274	0,299	0,258
7	MAHULU	0,259	0,270	0,288	0,330	0,285
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,334	0,323	0,324
9	Samarinda	0,324	0,322	0,346	0,323	0,33
10	Bontang	0,405	0,340	0,324	0,299	0,33

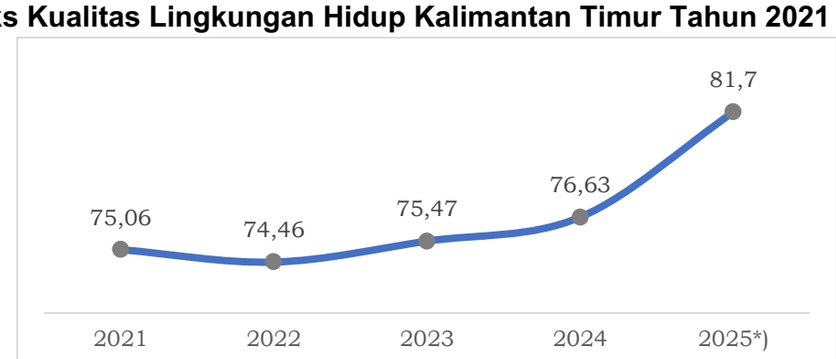
Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025

****Catatan : Data Realisasi Final dirilis pada Semester I 2026***

3.1.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat ekstraktif menyebabkan peningkatan risiko kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Timur, dimana dapat mencerminkan dampak dari aktivitas ekonomi serta efektivitas program dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan.

Gambar 3.5
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2025



Keterangan : *) Angka Sementara
Sumber: DLH Prov. Kaltim, 2025

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2021 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2025 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Tabel 3.6
Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2025

Indeks	2021	2022	2023	2024	2025*)
IKA	51,92	53,02	52,64	52,64	71,18
IKU	88,84	87,59	89,64	91,43	87,12
IKL	82,21	81,85	83,86	84,03	88,63
IKAL	85,4	81,45	81,36	85,16	85,04

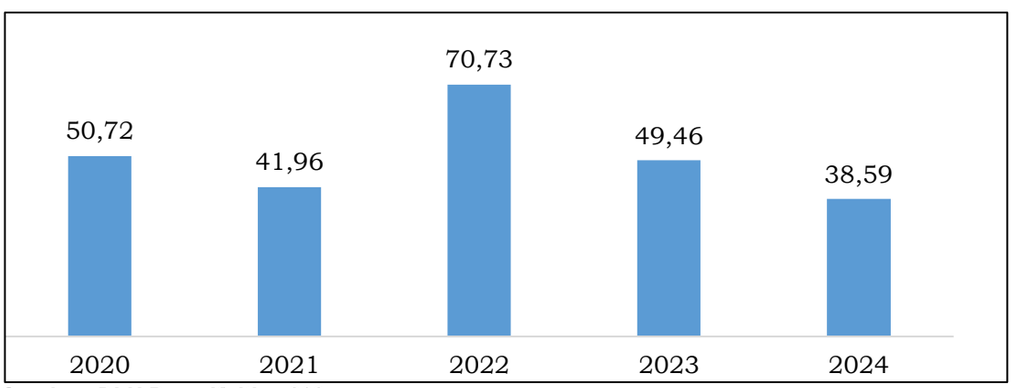
*Ket : *) Angka Sementara; Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025*

3.1.6 Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Ussual* (BAU)

Pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencapai penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 49,46% dibandingkan dengan skenario *Business As Usual* (BAU). Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), yang sebelumnya memperkirakan penurunan emisi sebesar 29,33% dari BAU. Selain itu, pada tahun 2024, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melaporkan bahwa penurunan emisi GRK sektor kehutanan mencapai 31 juta ton CO_2 ekuivalen, melebihi target komitmen Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) sebesar 22 juta ton CO_2 ekuivalen.

Data lebih lanjut mengenai persentase penurunan emisi dari BAU dapat diakses melalui dataset yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup indikator kinerja utama terkait emisi GRK. Capaian tersebut menunjukkan komitmen dan upaya serius Provinsi Kalimantan Timur dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, sejalan dengan target nasional dan kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim global.

Gambar 3.6
Persentase Penurunan Emisi dari BAU Kalimantan Timur
Tahun 2020 - 2024



Sumber: DLH Prov. Kaltim, 2025

3.1.7 Indeks Reformasi Birokrasi

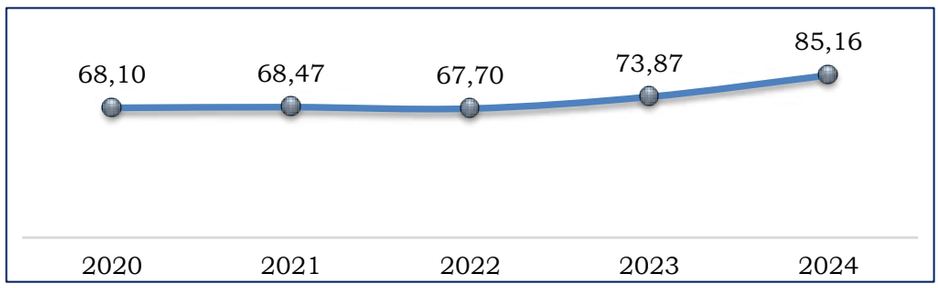
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB adalah sebagai berikut :

1) Responsivitas Birokrasi, yaitu : Birokrasi lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat;
2) Reformasi Pelayanan Publik, yaitu : Pembenahan pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan sesuai kebutuhan masyarakat;
3) Efektivitas Alokasi Anggaran, yaitu : Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat perbaikan pendidikan dan akses ke layanan dasar;
4) Pelayanan Berbasis Teknologi, yaitu : Alokasi anggaran digunakan secara efektif dan mendukung program prioritas, mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada rakyat;
5) Pengelolaan ASN, yaitu : Memastikan disiplin dan produktivitas aparatur, serta melaksanakan peningkatan kompetensi;
6) Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran, yaitu : Penegakan hukum, terutama dalam mencegah korupsi di birokrasi. Pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam alokasi anggaran;
7) Percepatan Implementasi Kebijakan, yaitu : Implementasi kebijakan yang telah dirumuskan dengan cepat dan efektif;
8) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga, yaitu : Memperkuat sinergitas dan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam hal pengentasan kemiskinan, pembangunan nasional, dan swasembada pangan serta energi.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kota.

Progres capaian RB juga dapat dilihat melalui Indeks RB. Indeks RB menggambarkan tingkat kemajuan pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada gambar di bawah ini disajikan grafik nilai Indeks RB selama lima tahun terakhir.

Gambar 3.7
Indeks Reformasi Birokrasi Kalimantan Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi KALTIM, 2024

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan regulasi yang berbeda. Evaluasi Reformasi Birokrasi sebelum tahun Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sedangkan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan peraturan turunannya, terdapat perubahan mekanisme, instrumen, dan hasil penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja pada seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2024 berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2025
RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**79,05**	**79,39**	**100,43**
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf	**Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**14,12**	**14,04**	**99,43**
	Rata-rata lama sekolah	**Tahun**	**10,21**	**10,10**	**98,92**

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
Pendidikan Masyarakat					
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,17	75,28	100,15
	Prevalensi Stunting	%	19,80	15,94	124,22
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,60-5,14	5,18	99,22
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,64	61,41	90,78
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,28-6,58	4,53	72,13
	Tingkat Kemiskinan	%	5,05-5,67	5,17	100
	Indeks Gini	Indeks	0,310-0,321	0,312	100
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	%	6,40-7,20	6,63	100
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,74	0,83	89,16
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,12	0,18	66,67
	Tingkat inflasi	%	2,5±1	2,68	107,20
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,39	8,78	104,64
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,19	81,7	101,88
	Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU)	%	27,53	38,59	140,17
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,41	71,26	99,79
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	86,50	86,18	99,63
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	87,22	94,80
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,43	88,63	100,23
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* (BAU)	%	24,40	22,59	92,58
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	12,39	12,78	103,14
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,84 (A)	85,16	99,21
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,30	87,79	101,72
	Sistem Merit	Nilai	275,00	271,00	98,54
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,85	4,13	107,27
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	80,01	77,82	97,26
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3,726	3,288	88,24

Sumber : RKPDP Prov. Kaltim, 2025

Penjelasan Tabel diatas dapat diuraikan menurut sasaran-sasaran yang menunjang tercapainya Tujuan 1, adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat.
Indikator : Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tidak akan lepas dari upaya peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, yang dalam hal ini keberhasilan capaiannya dapat diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Melalui Indikator ini diharapkan akan memberikan gambaran hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan Pendidikan, memperluas cakupan penerima layanan Wajib belajar 12 Tahun, memenuhi ketersediaan tenaga Pendidikan dan kependidikan serta memenuhi semua Sarana dan Prasarana di setiap Satuan Pendidikan.

HLS didefenisikan sebagai lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu, dan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2025 yaitu 14,04 dengan target 14,12 dan persentase capaian 99,43%. Terjadi peningkat dari tahun sebelum dimana tahun 2024 realisasi 14,03 dan tahun 2023 realisasi 14,02. Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional 13,30 tahun 2025 kenaikan cukup signifikan, jadi Harapan lama sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional.

Tidak hanya Harapan Lama Sekolah provinsi yang melebihi capaian nasional. Harapan Lama Sekolah beberapa Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan dari tahun 2023 hingga tahun 2025. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur

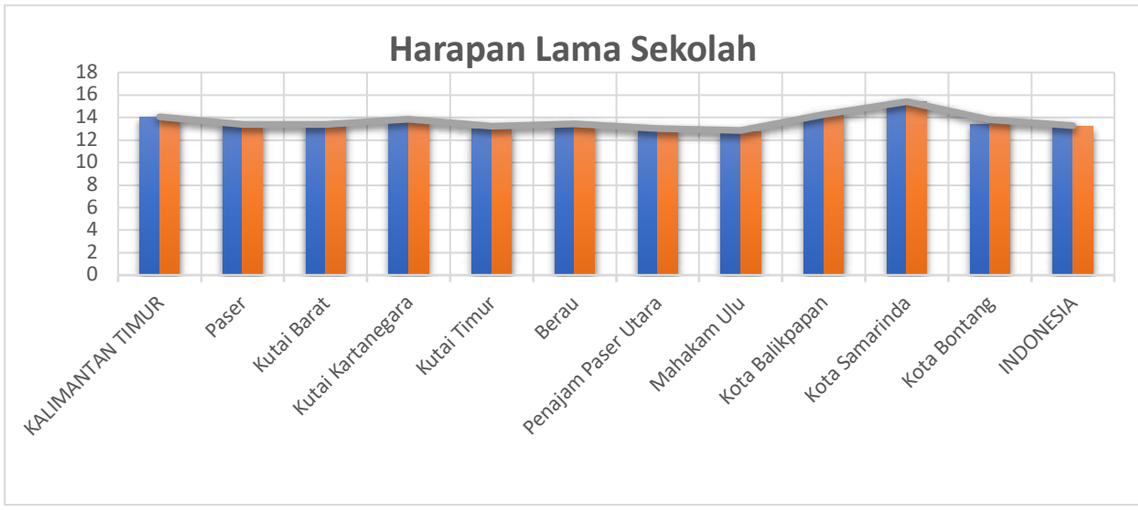
Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2023	**2024**	**2025**
KALIMANTAN TIMUR	14,02	14,03	14,04
Paser	13,37	13,38	13,39
Kutai Barat	13,25	13,36	13,40
Kutai Kartanegara	13,64	13,65	13,85
Kutai Timur	13,01	13,02	13,22

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2023	**2024**	**2025**
Berau	13,36	13,37	13,44
Penajam Paser Utara	12,86	12,87	13,00
Mahakam Ulu	12,63	12,78	12,85
Kota Balikpapan	14,24	14,25	14,26
Kota Samarinda	15,39	15,4	15,41
Kota Bontang	13,43	13,73	13,80
INDONESIA	13,15	13,21	13,30

Sumber : Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 3.9

Diagram Garis Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Pada tabel diatas bisa kita lihat bahwa capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding tahun 2025, namun ada beberapa Kab/Kota yang capaiannya dibawah capaian nasional yaitu Kabupaten Kutai Timur, Panajam Paser Utara dan Mahakam Ulu.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal. RLS tidak termasuk tahun yang diulang. RLS digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. RLS juga digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pada tahun 2025 realisasi capaian Tingkat Rata-rata Lama Sekolah 10,10 dari target 10,21 dengan persetase capaian 98,92%. Terjadi peningkat dari tahun sebelum dimana tahun 2024 realisasi 10,02 dan tahun 2023 realisasi 9,99. Capaian Rata-rata Jika dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Nasional 9,07 Rata-

rata Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai diatas rata-rata Nasional.

Pencapaian pada Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dari setiap kab/kota maupun provinsi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun dibandingkan capaian nasional Kabupaten Panajam Paser Utara dan Mahulu dibawah capaian nasional. Data capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

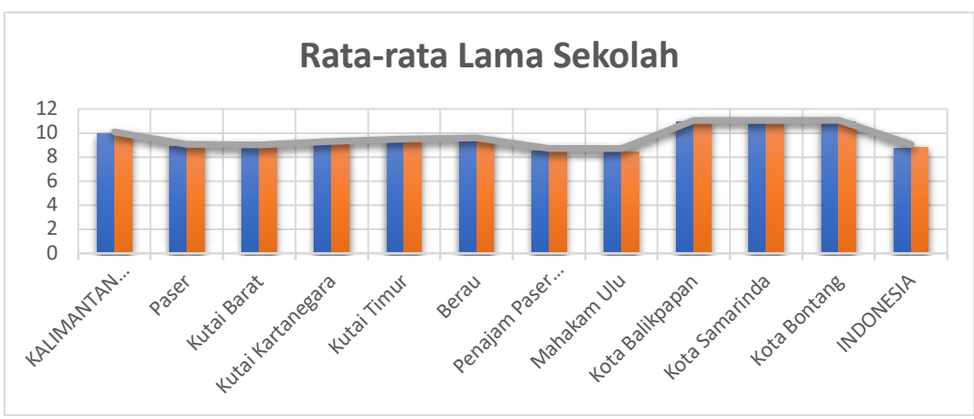
Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2023	**2024**	**2025**
KALIMANTAN TIMUR	9,99	10,02	10,10
Paser	8,91	8,92	9,04
Kutai Barat	8,85	8,89	9,01
Kutai Kartanegara	9,26	9,27	9,28
Kutai Timur	9,45	9,47	9,48
Berau	9,56	9,57	9,58
Penajam Paser Utara	8,53	8,57	8,72
Mahakam Ulu	8,49	8,5	8,71
Kota Balikpapan	10,93	10,99	11,04
Kota Samarinda	10,93	10,95	11,04
Kota Bontang	10,92	10,97	11,03
INDONESIA	8,77	8,85	9,07

Sumber: Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Pada tabel diatas capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 hingga tahun 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan signifikan diperoleh Kabupaten Mahakam Ulu dengan kenaikan di angka rata-rata pertahun sebesar 0,11 tahun meskipundibanding dengan capaian nasional masih dibawah capaian nasional.

Tabel 3.11
Diagram Data capaian RLS pada Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Data capaian HLS pada Provinsi Kalimantan Timur

Strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan usia Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang menjadi faktor pendorong antara lain :

1. Komitmen pemerintah provinsi Kaltim dalam penganggaran dan pelaksanaan SPM.
2. Pendataan anak yang tidak bersekolah dan putus bersekolah.
3. Pemerataan Pelayanan Pendidikan Negeri dan Swasta.
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan.
5. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. Penyediaan serta pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan secara proporsional.
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan (termasuk GTK) serta mendorong pendidikan unggul secara bertahap.
9. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
10. Pemenuhan Wajib Belajar 13 Tahun.
11. Pemberian biaya sekolah yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga sampai Tingkat Sekolah Menengah.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan khususnya pada lulusan Sekolah Menengah tentang Perguruan Tinggi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mempunyai beberapa program unggulan sebagai upaya implementasi faktor pendukung tersebut yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Berikut beberapa program unggulan tersebut :

1. GRATISPOL GRATIS BERSEKOLAH SMA/SMK/SLB/MA

   Pada Tahun Anggaran 2025, Program Gratis Bersekolah SMA/SMK/SLB/MA ini merupakan program prioritas Gubernur yang berkaitan dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendanaan program tersebut melalui pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan operasional non-personalia sekolah dalam rangka mendukung proses belajar mengajar dan meringankan beban biaya pendidikan peserta didik.

   Secara umum, BOS bertujuan untuk :

   a. Menjamin terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
   b. Mengurangi atau menghapus pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik.
   c. Mendukung pemerataan akses pendidikan.
   d. Meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah.

   Dana BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah seperti :

   a. Pengadaan buku dan bahan ajar.
   b. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
   c. Pemeliharaan sarana dan prasarana ringan.
   d. Pembayaran honor tenaga pendidik non-ASN (sesuai ketentuan).
   e. Kegiatan administrasi dan manajemen sekolah.

Dengan demikian, Bantuan Operasional Sekolah merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan operasional sekolah sekaligus mendukung program pendidikan gratis dan peningkatan mutu Pendidikan. Untuk hasil kinerja dari program GRATIS BERSEKOLAH ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12

Bantuan Operasional Sekolah

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)		
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan	Keterangan
Terpenuhinya Biaya Sekolah SMA/SMK/SLB/MA Kaltim Secara Gratis	Jumlah Siswa Penerima Manfaat Gratispol SMA/SMK/SLB/MA	181.663 siswa	631.743.474.983	181.561 siswa	465.708.510.095	99,94%	75,31%	Bosnas dan Besda Sebanyak 572 sekolah
		170.204 Siswa	305.924.434.000	170.204 Siswa	300.044.700.720	100%	98,08%	BOSNAS 481 Sekolah dari jumlah 481 sekolah
		181.663 Siswa	325.819.040.983	181.563 Siswa	295.203.699.601	99,93%	90,6%	BOSDA 572 Sekolah dari jumlah 575 sekolah

Sumber : Disdik 2025

Target penerima manfaat ditetapkan sebanyak 181.663 siswa dengan capaian 181.561 atau 99,94%, yang berarti hampir seluruh sasaran telah terpenuhi. Secara lebih rinci, pada komponen BOSNAS, target dan realisasi jumlah siswa sama yaitu 170.204 siswa (100%). Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana BOSNAS berjalan sangat efektif. Program ini mencakup 481 sekolah dari total 481 sekolah, sehingga seluruh sekolah sasaran telah terlayani meskipun jika dilihat jumlah siswa penerima manfaat masih selisih seperti perubahan data penerima, perpindahan siswa, atau kendala administratif dalam proses verifikasi. Terdapat sekolah Swasta yang masuk dalam perhitungan pengalokasi anggaran kemudian saat dilakukan verifikasi dan pengumpulan data syarat tidak terpenuhi seperti sekolah tidak mengusulkan kepada dinas Pendidikan yaitu SMAS Widya Praja Samarinda (tutup operasional), terdapat sekolah yang bermasalah dengan Yayasan sehingga dana BOSP daerah tidak disalurkan seperti. SMK MIGAS INSAN KAMIL BALIKPAPAN) perubahan nama Yayasan, SMK PARTI LOA KULU (Lokasi sekolah masih dalam pengusulan Pembangunan), terdapat sekolah yang sudah di SK kan, tetapi tidak dapat disalurkan seluruh nya (hanya disalurkan pada tahap I) karena tidak adanya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 2 Sekolah yaitu SMA RAHMATULLAH MARANG KAYU, dan SMK NURUL KHAERAT LIL MUHIBBIN dan tidak adanya SDM administrasi pada 2 sekolah yaitu SMA Evans Indonesia Kota Bangun dan SMA Al Muhajirin Muara Badak

2. GRATISPOL GRATIS SERAGAM

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program Gubernur GRATIS SERAGAM atau bisa disebut dengan penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik jenjang SMA/SMK/SLB/MA dengan indikator kinerja atau dengan sasaran penerimanya seluruh peserta didik kelas X untuk

sekolah menengah dan untuk sekolah khusus pada kelas 1 untuk SDLB, kelas 7 untuk SMPLB dan kelas 10 untuk SMALB. Berikut tabel capaian atau jumlah target dan realisasi dari kinerja dan keuangan untuk program GRATIS SERAGAM :

Tabel 3.13
Gratis Seragam Sekolah

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)	
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan
Tersedianya Seragam Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah peserta didik SMA/SMK/SLB/MA yang mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis	65.004 siswa	65.004.000.000	63.718 siswa	60.466.821.620	98,02 %	93,02 %

Target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 65.004 siswa dengan capaian 63.718 siswa atau sebesar 98,02% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, terdapat selisih sebanyak 1.286 siswa (1,98%) yang belum terlayani dikarenakan pada saat proses perencanaan dan penganggaran, target yang ditetapkan dengan memperhitungkan kenaikan 2% sehingga pada saat realisasi, proses pengajuan data penerima Seragam Sekolah dari Satuan Pendidikan hanya 63.718 siswa.

3. JOSSPOL PENINGKATAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH

Program JOSSPOL-3. Peningkatan Insentif Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah. Tujuan dari pada program ini untuk mensejahterakan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan peningkatan penerimaan insentif dengan tambahan untuk pendidik yang sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.500.000. dengan tambahan sebesar Rp. 500.000. Berikut tabel capaian atau jumlah target dan realisasi dari kinerja dan keuangan untuk program Peningkatan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah :

Tabel 3.14
Peningkatan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)	
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan
Peningkatan Insentif Guru Sekolah SMA/SMK/SLB/MA	Jumlah Guru SMA/SMK/SLB/MA Swasta yang mendapatkan tambahan insentif	4.677 Guru	70.074.000.000	4.559 Guru (Tw 4)	55.335.000.000	97,48 %	78,97 %

Dari tabel diatas program Peningkatan Insentif Guru Sekolah SMA/SMK/SLB/MA Swasta memiliki indikator kinerja berupa jumlah guru yang mendapatkan tambahan insentif. Target yang ditetapkan sebanyak 4.677 guru dengan capaian 4.559 guru atau sebesar 97,48% dari target. Terdapat selisih sebanyak 118 guru (2,52%) yang belum terealisasi dikarenakan adanya tenaga pendidik yang mutasi dan mengundurkan diri.

4. JOSSPOL PERENCANAAN DAN REHABILITASI SEKOLAH UNGGULAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan timur melaksanakan program Gubernur JOSSPOL-6. PERENCANAAN DAN REHABILITASI SEKOLAH UNGGULAN. Terdapat 3 sekolah yang dijadikan target rehabilitasi untuk menunjang sekolah unggulan yaitu, SMAN 10 Samarinda, SMAN 3 Tenggarong dan SMAN 2 Sangatta Utara. Berikut tabel capaian atau jumlah target dan realisasi dari kinerja dan keuangan untuk program Perencanaan dan Rehabilitasi Sekolah Unggulan ;

Tabel 3.15

Perencanaan dan Rehabilitasi Sekolah Unggulan

Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Capaian (%)	
		Target	Alokasi Pagu (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan (Rp)	Kinerja	Keuangan
Peningkatan kualitas sekolah unggulan	Jumlah sekolah unggulan yang direhabilitasi	3 paket	2.994.326.960	3 paket	1.938.123.601	100 %	64,73 %

Berdasarkan data tabel di atas, program Peningkatan kualitas sekolah unggulan telah dilaksanakan dengan target rehabilitasi sekolah unggulan sebanyak 3 paket telah tercapai sepenuhnya (100%).

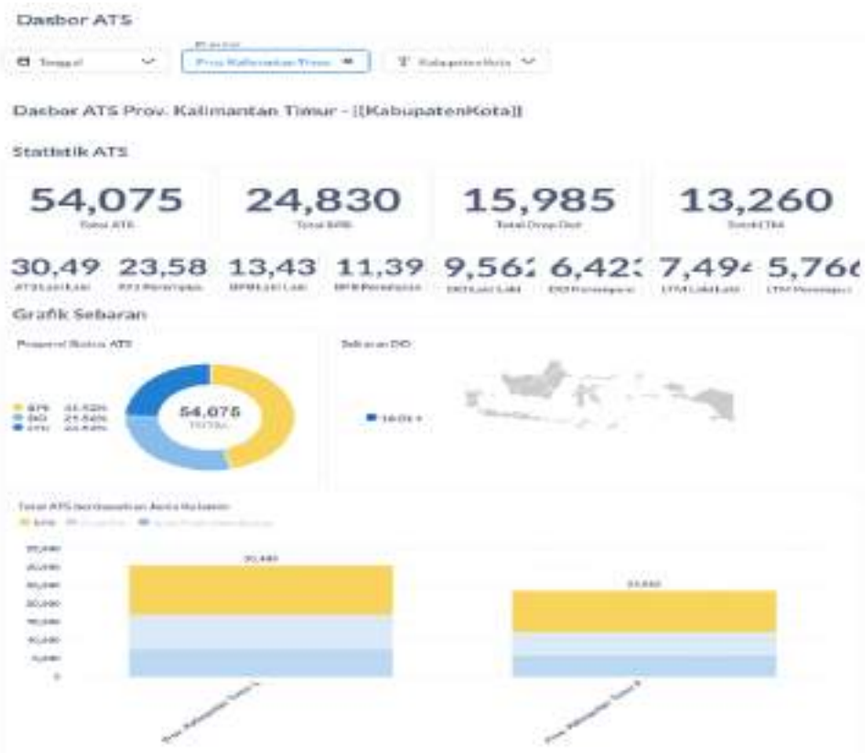
Ketercapaian dari harapan lama sekolah yang belum mencapai 100% dari target dikarenakan beberapa faktor utama yang menghambat ketercapaian diantaranya masih adanya anak-anak tidak sekolah maupun anak-anak yang putus sekolah. Berdasarkan data pada Dasbor ATS Provinsi Kalimantan Timur, total Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat sebanyak 54.075 anak. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 24.830 anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), 15.985 anak Drop Out (DO), dan 13.260 anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Jika dilihat dari proporsinya, kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB) merupakan yang paling dominan dengan persentase sekitar 45,92% dari total ATS. Selanjutnya, kategori Drop Out (29,56%) dan Lulus Tidak Melanjutkan (24,52%). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama ATS di Kalimantan Timur masih didominasi oleh anak yang belum pernah mengakses pendidikan formal.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah ATS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. ATS laki-laki tercatat sekitar 30.493 anak, sedangkan ATS perempuan sekitar 23.582 anak. Pola ini juga terlihat pada kategori BPB, DO, dan LTM, di mana jumlah laki-laki cenderung lebih banyak dibanding perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa permasalahan ATS di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup signifikan, terutama pada kelompok anak yang belum pernah bersekolah dan pada anak laki-laki. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi yang lebih terarah, baik melalui peningkatan akses pendidikan dasar maupun program penjangkauan kembali bagi anak putus sekolah.

Gambar 3.8

Dasbor ATS Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/.

Selain dari permasalahan anak tidak sekolah diatas, masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah diantaranya sebagai berikut :

1. Masih adanya anak tidak sekolah ataupun anak yang lulus tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan bebera faktor dibawah ini:
   a. Ekonomi keluarga.
   b. Tidak mau bersekolah
   c. Tidak ada biaya
   d. Sekolah yang jauh dari rumah
   e. Sudah cukup dengan Pendidikan yang dimiliki saat ini
   f. Menikah/ mengurus rumah tangga
   g. Mengalami kekerasan / perundungan / trauma disekolah
   h. Bekerja
   i. Pengaruh lingkungan
   j. Beranggapan sekolah tidak penting
   k. Tidak memiliki seragam sekolah
   l. Tidak memiliki akte kelahiran
   m. Masalah Kesehatan / peyandang disabilitas
2. Belum optimalnya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan untuk kemudahan akses terhadap pendidikan.
3. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan kurangnya

daya tampung sekolah terhadap lulusan jenjang SMP.

4. Belum optimalnya pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran melalui metode pengajaran, hasil belajar siswa, dan pemanfaatan teknologi.
5. Ketersediaan buku teks dan nonteks yang berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar masih belum mencukupi di beberapa satuan pendidikan.
6. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat praktik untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi belum memadai di sejumlah sekolah.

Untuk itu perlu upaya tindak lanjut sebagai upaya perbaikan antara lain :

1. Memastikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal meliputi Pemenuhan pelayanan Dasar Serta Pemenuhan Mutu pelayanan dasar Pendidikan.
2. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal pada seluruh daerah pada provinsi Kalimantan timur terutama pada daerah terdepan, terpencil dan terisolir (3T).
3. Meningkatkan Promosi Pendidikan kepada Masyarakat melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Memperluas jangkauan wilayah terutama daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang di nilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa
5. Pemenuhan Ruang Kelas Baru dan membangun Unit sekolah baru untuk menampung daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia
6. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan terutama pada satuan pendidikan yang teridentifikasi mengalami kerusakan.
7. Memperkuat program akses pendidikan dengan mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak yang belum bersekolah melalui pendekatan lintas sektor.
8. Peningkatan sosialisasi dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu diupayakan agar tidak ada anak yang terhambat akses pendidikannya.
9. Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan dalam Literasi dan Numerasi Untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi.
10. Fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, pendampingan dan pengembangan kompetensi, serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis asesmen secara berkala.
11. Penguatan kurikulum dan penggunaan media pembelajaran yang efektif juga menjadi bagian dari strategi ini Memenuhi Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan

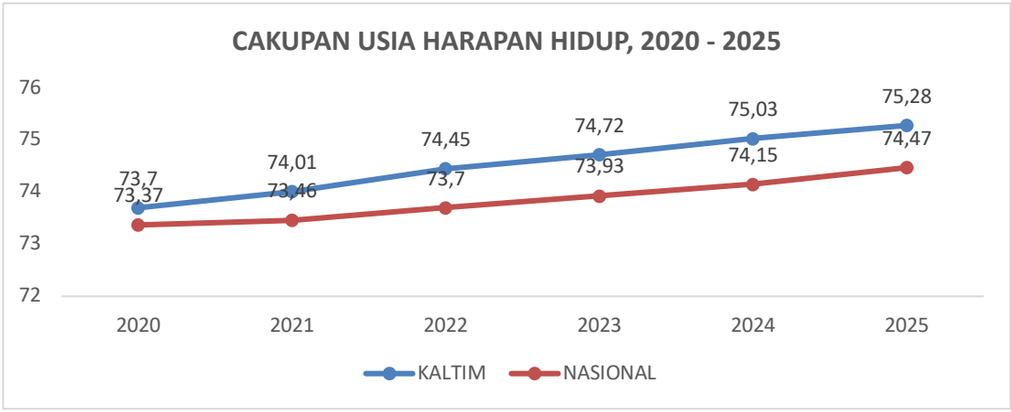
12. Melakukan perencanaan kebutuhan pendidik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk rekruitmen dan distribusi tenaga pendidik yang merata sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
13. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan juga diprioritaskan untuk menjaga motivasi dan kualitas pengajaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator : Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan merupakan indikator utama pembangunan kesehatan,yang menggambarkan apakah pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan secara umum dan derajat kesehatan secara khusus. Usia Harapan Hidup (UHH) menjadi indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi mortalitas, akses pelayanan kesehatan, kualitas layanan, serta perlindungan pembiayaan kesehatan.

Gambar 3.9



Sumber data : BPS diolah Dinas Kesehatan

Secara nasional, UHH Indonesia pada tahun 2025 mencapai 74,47 tahun, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan UHH nasional ini mencerminkan dampak positif dari penguatan sistem kesehatan, terutama melalui perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Meskipun demikian, capaian UHH nasional masih dipengaruhi oleh kesenjangan antarwilayah, terutama terkait keterbatasan akses layanan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di daerah tertentu.

Dalam konteks tersebut, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2025, UHH Kalimantan Timur tercatat sebesar 75,28 tahun, lebih tinggi dari UHH nasional dan telah mencapai 100,14 persen dari target yang ditetapkan 75,17. Capaian ini melanjutkan tren peningkatan UHH secara konsisten sejak tahun 2020, yang menunjukkan bahwa

pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Posisi UHH Kalimantan Timur yang berada di atas nasional menggambarkan bahwa secara umum penduduk memiliki peluang hidup yang lebih baik, didukung oleh akses pelayanan kesehatan yang relatif luas dan sistem kesehatan daerah yang cukup kuat.

Peningkatan UHH di Kalimantan Timur erat kaitannya dengan keberhasilan menurunkan angka kematian pada kelompok rentan, khususnya kematian ibu dan bayi. Jumlah kematian ibu menunjukkan penurunan yang signifikan hingga tahun 2025. Penurunan kematian ibu berkontribusi besar terhadap peningkatan UHH karena mengurangi kehilangan tahun kehidupan pada usia produktif dan mencerminkan membaiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan maternal. Di sisi lain, meskipun secara jangka menengah angka kematian bayi cenderung menurun dibandingkan periode awal dekade, masih terdapat fluktuasi pada tahun terakhir yang memerlukan perhatian. Mengingat kematian bayi memiliki dampak yang sangat besar terhadap rata-rata usia harapan hidup, pengendalian indikator ini tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan peningkatan UHH.

Faktor lain yang berperan penting dalam capaian UHH Kalimantan Timur adalah tingginya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional. Universal Health Coverage di Kalimantan Timur telah melampaui 100 persen, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk telah terlindungi oleh skema jaminan kesehatan. Tingginya cakupan JKN ini memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, serta menurunkan hambatan finansial dalam memperoleh layanan kesehatan. Dengan akses yang lebih baik, risiko keterlambatan penanganan penyakit dapat ditekan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan mortalitas dan peningkatan UHH.

Selain aspek pembiayaan, mutu pelayanan kesehatan juga menjadi faktor penting yang mendukung capaian UHH. Seluruh Puskesmas di Kalimantan Timur telah terakreditasi, yang mencerminkan pemenuhan standar mutu pelayanan, tata kelola fasilitas kesehatan, serta keselamatan pasien. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer berperan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan mutu layanan ini berkontribusi terhadap menurunnya kematian yang dapat dicegah dan pada akhirnya mendorong peningkatan usia harapan hidup.

Dukungan terhadap capaian UHH juga terlihat dari ketersediaan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan dan logistik kesehatan. Sebagian besar Puskesmas di Kalimantan Timur telah memenuhi standar minimal jenis tenaga kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan relatif optimal. Meskipun belum seluruh fasilitas memenuhi standar secara penuh, ketersediaan tenaga kesehatan pada mayoritas Puskesmas tetap berkontribusi terhadap peningkatan

cakupan dan kualitas layanan kesehatan yang berdampak pada outcome kesehatan masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan capaian yang melampaui target nasional. Ketersediaan obat dan vaksin yang memadai menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan, mendukung upaya pencegahan penyakit, serta mencegah terjadinya komplikasi yang berpotensi meningkatkan angka kematian.

Secara keseluruhan, capaian UHH Kalimantan Timur yang berada di atas rata-rata nasional mencerminkan sinergi berbagai faktor pendukung, mulai dari penurunan kematian ibu dan bayi, tingginya cakupan JKN, mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang terjaga melalui akreditasi, hingga ketersediaan tenaga kesehatan serta obat dan vaksin. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan harapan hidup penduduk, sekaligus menjadi modal penting untuk mempertahankan dan meningkatkan UHH pada tahun-tahun berikutnya.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong dari capaian usia harapan hidup diantaranya :

1. Angka Kematian Ibu / Jumlah Kematian Ibu

Gambar 3.10



Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tren data kematian ibu di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2025, terlihat adanya fluktuasi yang cukup tajam pada awal periode, diikuti dengan penurunan yang konsisten pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 92 kasus, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 168 kasus. Peningkatan tajam ini mencerminkan dampak situasi krisis kesehatan pada periode tersebut, yang berpotensi berkaitan dengan terganggunya akses pelayanan kesehatan ibu, keterlambatan rujukan, serta tekanan sistem kesehatan secara umum.

Memasuki tahun 2022, jumlah kematian ibu menurun drastis menjadi 73 kasus, menunjukkan adanya pemulihan sistem pelayanan kesehatan dan penguatan kembali layanan kesehatan ibu dan anak pasca periode krisis. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan menjadi 83 kasus, yang mengindikasikan bahwa upaya penurunan kematian ibu masih menghadapi tantangan dan belum sepenuhnya stabil. Faktor-faktor seperti kualitas pelayanan obstetri, kepatuhan

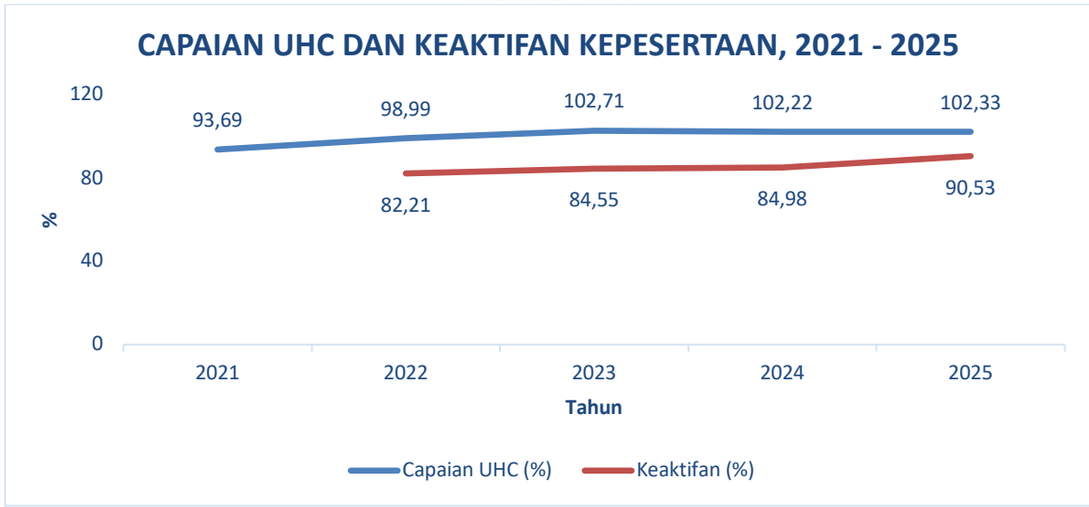
terhadap standar rujukan, serta kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan masih memerlukan perhatian berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kematian ibu kembali menurun menjadi 71 kasus, dan penurunan ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian 52 kasus, yang merupakan angka terendah dalam periode pengamatan. Penurunan yang konsisten pada dua tahun terakhir ini mencerminkan perbaikan yang semakin nyata dalam pelayanan kesehatan ibu, termasuk penguatan layanan antenatal dan persalinan, peningkatan sistem rujukan, serta perbaikan koordinasi lintas fasilitas pelayanan kesehatan.

Secara keseluruhan, tren kematian ibu di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan arah perbaikan yang kuat dalam jangka menengah, meskipun sempat mengalami lonjakan pada awal periode. Penurunan signifikan pada tahun 2024–2025 menjadi indikator positif keberhasilan intervensi kesehatan ibu dan anak. Capaian ini memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), mengingat kematian ibu berdampak langsung pada kehilangan tahun kehidupan pada usia produktif. Namun demikian, fluktuasi yang pernah terjadi menunjukkan bahwa upaya penurunan kematian ibu perlu terus dijaga dan diperkuat agar tren penurunan ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

2. Kepesertaan JKN

Gambar 3.11



Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan grafik capaian Universal Health Coverage (UHC) dan keaktifan kepesertaan JKN tahun 2021–2025, terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan **kinerja yang sangat baik dalam aspek cakupan kepesertaan**, disertai dengan **peningkatan bertahap pada tingkat keaktifan peserta**. Pada tahun 2021, capaian UHC tercatat sebesar **93,69 %**, kemudian meningkat signifikan menjadi **98,99 % pada tahun 2022**. Sejak tahun 2023 hingga 2025, capaian UHC telah melampaui **100 %**, dengan capaian masing-masing sebesar **102,71 % (2023)**, **102,22 % (2024)**, dan **102,33 % (2025)**. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir

seluruh penduduk Provinsi Kalimantan Timur telah terdaftar sebagai peserta JKN, termasuk adanya pembaruan dan penyesuaian data kependudukan.

Sementara itu, tingkat **keaktifan kepesertaan JKN** juga menunjukkan tren peningkatan yang positif, meskipun masih berada di bawah capaian UHC. Pada tahun 2022, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar **82,21 %**, kemudian meningkat menjadi **84,55 % pada tahun 2023** dan **84,98 % pada tahun 2024**. Pada tahun 2025, keaktifan kepesertaan meningkat lebih signifikan hingga mencapai **90,53 %**. Peningkatan keaktifan ini mengindikasikan membaiknya kemampuan dan kesadaran peserta dalam mempertahankan status kepesertaan aktif, sehingga perlindungan kesehatan yang diberikan oleh JKN dapat dimanfaatkan secara optimal.

Perbedaan antara capaian UHC yang telah melampaui 100 % dengan tingkat keaktifan kepesertaan yang masih berada di bawah angka tersebut menunjukkan bahwa **tantangan utama bukan lagi pada pendaftaran peserta**, melainkan pada **menjaga keberlanjutan kepesertaan aktif**. Peserta yang tidak aktif berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan, terutama pada kelompok masyarakat rentan dan pekerja sektor informal. Oleh karena itu, meskipun capaian UHC telah sangat baik, efektivitas perlindungan kesehatan masih sangat ditentukan oleh tingkat keaktifan peserta.

Capaian UHC dan peningkatan keaktifan kepesertaan JKN di Provinsi Kalimantan Timur menjadi **hal penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat**, karena memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan dan menurunkan hambatan finansial. Kondisi ini berkontribusi positif terhadap pengendalian penyakit dan penurunan mortalitas, yang pada akhirnya mendukung peningkatan Usia Harapan Hidup. Namun demikian, upaya menjaga dan meningkatkan keaktifan kepesertaan tetap perlu menjadi perhatian utama agar manfaat UHC dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

3. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 3.16
Rekapitulasi Akreditasi Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS INDUK	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI PARIPURNA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI UTAMA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI MADYA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI DASAR	JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI	JUMLAH PUSKESMAS TIDAK TERAKREDITASI	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI
1	PASER	19	19	0	0	0	19	0	100
2	KUTAI KARTANEGARA	32	26	6	0	0	32	0	100
3	BERAU	21	19	2	0	0	21	0	100
4	KUTAI BARAT	19	13	6	0	0	19	0	100
5	KUTAI TIMUR	21	17	4	0	0	21	0	100
6	PENAJAM PASER UTARA	11	9	2	0	0	11	0	100
7	MAHAKAM ULU	6	4	2	0	0	6	0	100
8	KOTA BALIKPAPAN	27	24	3	0	0	27	0	100
9	KOTA SAMARINDA	26	26	0	0	0	26	0	100

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PUSKESMAS INDUK	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI PARIPURNA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI UTAMA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI MADYA	JUMLAH PUSKESMAS AKREDITASI DASAR	JUMLAH PUSKESMAS TERAKREDITASI	JUMLAH PUSKESMAS TIDAK TERAKREDITASI	PERSENTASE PUSKESMAS TERAKREDITASI
10	KOTA BONTANG	6	6	0	0	0	6	0	100
	KALIMANTAN TIMUR	**188**	**163**	**25**	**0**	**0**	188	**0**	100

Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan rekapitulasi akreditasi Puskesmas tahun 2025, seluruh **188 Puskesmas di Provinsi Kalimantan Timur telah terakreditasi (100%)**, tanpa adanya Puskesmas yang tidak terakreditasi. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Kalimantan Timur telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan, baik dari aspek tata kelola, pelayanan klinis, maupun keselamatan pasien.

Ditinjau menurut tingkat akreditasi, sebagian besar Puskesmas telah mencapai **status Paripurna**, yaitu sebanyak **163 Puskesmas**, sementara **25 Puskesmas** berada pada **status Utama**. Tidak terdapat Puskesmas dengan status Madya maupun Dasar. Kondisi ini mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan primer di Kalimantan Timur yang relatif baik dan merata, dengan dominasi capaian akreditasi tertinggi.

Secara wilayah, seluruh kabupaten/kota menunjukkan capaian **100 persen Puskesmas terakreditasi.** Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah Puskesmas Paripurna terbanyak, sedangkan Kota Samarinda dan Kota Bontang seluruh Puskesmasnya telah berstatus Paripurna. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer telah dilaksanakan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota, meskipun jumlah dan sebaran Puskesmas berbeda antarwilayah.

Capaian akreditasi Puskesmas tahun 2025 menjadi **faktor penting** dalam peningkatan mutu layanan kesehatan dasar di Provinsi Kalimantan Timur. Akreditasi yang menyeluruh dan didominasi status Paripurna diharapkan berdampak positif terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta keselamatan pasien, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Usia Harapan Hidup.

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Rumah Sakit

Gambar 3.12



Sumber data : Dinas Kesehatan

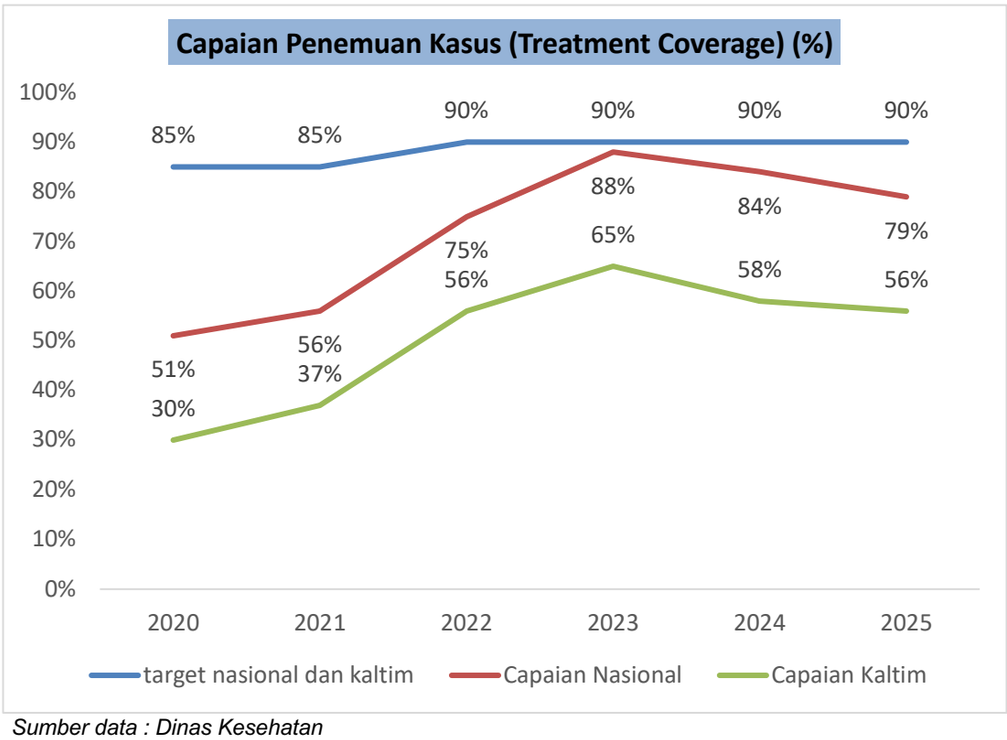
Berdasarkan data dari aplikasi **ASPAK,** cakupan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (alkes) di rumah sakit Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2020–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik. Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan rumah sakit yang memperoleh **skor pemenuhan > 60 %,** di mana rumah sakit dengan skor tersebut dianggap telah memiliki sarana, prasarana, dan alkes yang cukup. Persentase capaian provinsi diperoleh dari perbandingan jumlah rumah sakit dengan skor >60 % terhadap total seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2020, cakupan rumah sakit dengan pemenuhan sarana dan alkes yang memadai mencapai **74 %**, namun menurun menjadi **53 % pada tahun 2021**. Penurunan ini menunjukkan belum optimalnya pemenuhan sarana dan alkes pada seluruh rumah sakit. Selanjutnya, capaian meningkat kembali menjadi **72 % pada tahun 2022, 83 % pada tahun 2023,** dan mencapai **90 % pada tahun 2024**, yang mencerminkan perbaikan bertahap dalam pemenuhan sarana, prasarana, dan alkes rumah sakit. Pada tahun 2025, cakupan sedikit menurun menjadi **83 %**, namun tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi.

Meningkatnya cakupan rumah sakit dengan pemenuhan sarana, prasarana, dan alkes yang memadai mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan. Ketersediaan sarana dan alat kesehatan yang cukup memungkinkan rumah sakit memberikan pelayanan yang lebih optimal, sehingga berkontribusi terhadap penurunan risiko komplikasi dan kematian. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan **Usia Harapan Hidup (UHH)** di Provinsi Kalimantan Timur.

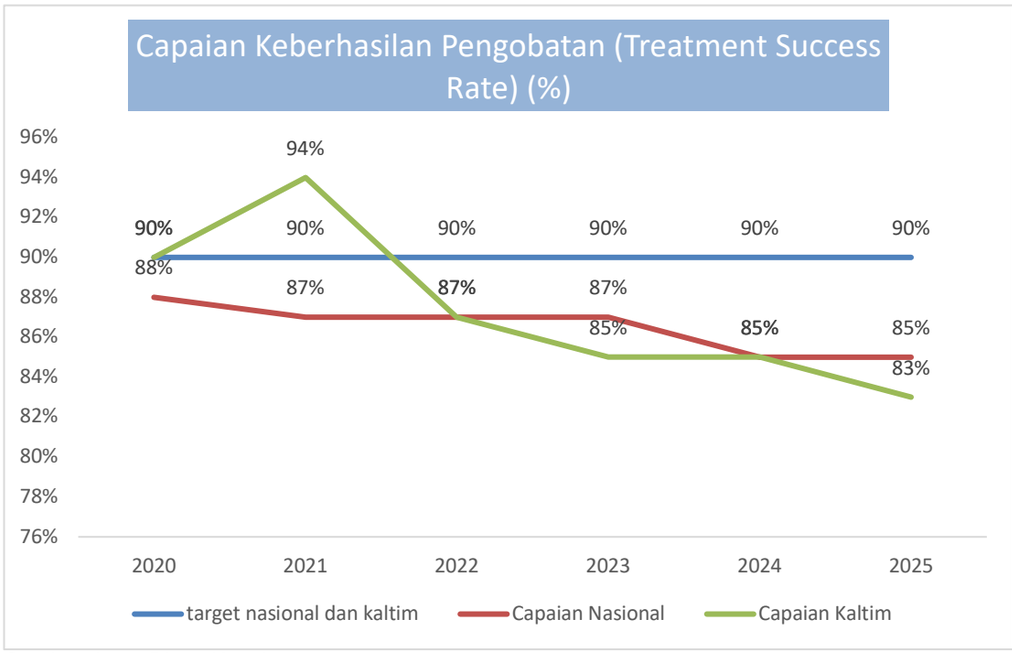
5. Penyakit Menular (Tuberkulosis)

Gambar 3.13



Sumber data : Dinas Kesehatan

Gambar 3.14



Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tren capaian penanggulangan Tuberkulosis (TBC) hingga tahun 2025, terlihat bahwa kinerja program menunjukkan perbaikan pada beberapa aspek kunci, khususnya dalam penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan, meskipun masih menghadapi tantangan struktural yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Dari sisi penemuan kasus (Treatment Coverage), target nasional dan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebesar 85% pada tahun 2020–2021 dan meningkat menjadi 90% sejak tahun 2022 hingga 2025. Secara nasional, capaian penemuan kasus menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 51% pada tahun 2020 menjadi 88% pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan kembali pada 84% tahun 2024 dan 79% tahun 2025. Sementara itu, capaian Provinsi Kalimantan Timur juga menunjukkan peningkatan dari 30% pada tahun 2020 menjadi 65% pada tahun 2023, namun kembali menurun pada 58% tahun 2024 dan 56% tahun 2025. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam penemuan kasus, capaian Kalimantan Timur masih berada di bawah target yang ditetapkan dan di bawah capaian nasional, sehingga berpotensi menahan efektivitas pengendalian TBC secara keseluruhan.

Perbaikan capaian penemuan kasus tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor pendorong. Upaya percepatan hibah alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang dimulai sejak tahun 2024 dan dilanjutkan secara bertahap hingga tahun 2025 telah berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas diagnosis TBC. Ketersediaan alat TCM mempercepat proses konfirmasi kasus dan memperluas jangkauan penemuan kasus, khususnya pada kasus TBC sensitif obat maupun TBC resisten obat. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan, terutama tenaga klinis dalam aspek pembaruan tata laksana pengobatan TBC, turut berperan dalam menurunkan kesalahan terapi dan meningkatkan kualitas pelayanan pasien.

Faktor pendorong lainnya adalah semakin kuatnya kerja sama lintas program dan lintas sektor, termasuk dengan Organisasi Penyintas TBC. Kolaborasi ini memperkuat pemantauan pasien, terutama dalam memastikan kepatuhan minum obat secara teratur. Pendekatan berbasis komunitas tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran pasien untuk menjalani pengobatan hingga tuntas. Hal ini tercermin pada capaian keberhasilan pengobatan (Treatment Success Rate) yang relatif stabil dan mendekati target. Pada tingkat nasional, TSR berada pada kisaran 85–88% selama periode 2020–2025. Di Provinsi Kalimantan Timur, TSR bahkan sempat melampaui target pada tahun 2021 (94%), meskipun kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 83% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pasien dan mutu tatalaksana telah membaik, keberlanjutan keberhasilan pengobatan masih memerlukan penguatan.

Di sisi lain, capaian program TBC hingga tahun 2025 masih dihadapkan pada beberapa faktor penghambat utama. Rendahnya penemuan kasus aktif menjadi tantangan paling signifikan, yang menunjukkan masih adanya kasus TBC di masyarakat yang belum terdeteksi dan belum mendapatkan pengobatan. Hal ini diperberat oleh belum optimalnya keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama fasilitas kesehatan swasta, dalam jejaring penanggulangan TBC. Keterbatasan pelaporan dan rujukan kasus dari sektor swasta berpotensi menyebabkan underreporting dan memperlambat upaya pemutusan rantai penularan.

Selain itu, masih terdapat pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan sesuai standar, yang berdampak langsung terhadap penurunan angka keberhasilan pengobatan pada tahun-tahun terakhir. Ketidakpatuhan pengobatan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, mobilitas pasien, efek samping obat, serta keterbatasan pemantauan berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya menurunkan capaian TSR, tetapi juga meningkatkan risiko penularan lanjutan dan munculnya TBC resisten obat, yang pada akhirnya dapat memperberat beban penyakit dan berdampak negatif terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Program TBC di Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan kemajuan melalui peningkatan kapasitas diagnosis, perbaikan kualitas pengobatan, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Namun demikian, capaian penemuan kasus yang masih di bawah target serta penurunan keberhasilan pengobatan pada periode akhir menunjukkan bahwa tantangan pengendalian TBC masih signifikan. Kondisi ini berpotensi menjadi faktor penghambat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan Usia Harapan Hidup apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

6. Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL

Tabel 3.17
Persentase Ketersedian Obat Esensial Dan 7 Vaksin Irl 2025

No	Kab/Kota	Ketersediaan	Th 2025	Satuan
1	Paser	Dinkes	87.8	%
		Puskesmas	91.8	
2	Kutai Kartanegara	Dinkes	96	%
		Puskesmas	82	
3	Berau	Dinkes	79.5	%
		Puskesmas	74.8	
4	Kutai Barat	Dinkes	75.3	%
		Puskesmas	75.3	
5	Kutai Timur	Dinkes	91.8	%
		Puskesmas	85	
6	Penajam Paser Utara	Dinkes	96	%
		Puskesmas	82	
7	Mahakam Ulu	Dinkes	87.8	%
		Puskesmas	80	
8	Kota Balikpapan	Dinkes	87.8	%
		Puskesmas	82.3	
9	Kota Samarinda	Dinkes	91.8	%
		Puskesmas	92.5	
10	Kota Bontang	Dinkes	78.3	%
		Puskesmas	85	
Total Kalimantan Timur		**Dinkes**	**87**	**%**
		Puskesmas	**83**	

Sumber data : Dinas Kesehatan

Tabel 3.18
Pemenuhan Obat Esensial (40 Item) Kalimantan Timur 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	% Ketersediaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Samarinda	100	98.95	100	95.48	100
2	Balikpapan	100	100	99.17	100	100
3	Bontang	100	100	100	100	100
4	Kutai Kartanegara	98.18	100	100	98.94	100
5	Kutai Timur	85.32	92.64	92.01	98.81	100
6	Kutai Barat	99.12	100	98.25	95.07	100
7	Paser	100	100	93.97	98.43	100
8	Penajam Paser Utara	96.21	100	98.49	99.24	100
9	Berau	95.83	100	100	99.58	100
10	Mahakam Ulu	81.94	100	100	98.33	100
Rata-Rata Provinsi Kalimantan Timur		**95.66**	**99.15**	**98.18**	**98.38**	**100**

Sumber data : Dinas Kesehatan

Tabel 3.19
Pemenuhan Vaksin IDL Kalimantan Timur 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	% Ketersediaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Samarinda	100	88.14	92.83	98.43	89.43
2	Balikpapan	100	100	98.53	98.81	88.59
3	Bontang	100	100	100	96.38	90.51
4	Kutai Kartanegara	99.22	98.44	99.45	97.28	85.2
5	Kutai Timur	90.83	99.6	93.59	97.52	87.84
6	Kutai Barat	98.25	91.67	89.47	96.06	88.33
7	Paser	97.81	96.03	96	97.97	89.73
8	Penajam Paser Utara	91.64	99.24	100	96.85	86.89
9	Berau	93.13	96.03	91.25	96.04	88.23
10	Mahakam Ulu	98.33	100	95.83	98.49	94.47
Rata-Rata Provinsi Kalimantan Timur		**96.92**	**96.92**	**95.70**	**97.38**	**88.92**

Sumber data : Dinas Kesehatan

Untuk indikator terintegrasi baru 2025: Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan 7 vaksin IRL mencapai 83%, melampaui target nasional 65% (capaian 127,69%). Ini pendorong kuat karena memastikan layanan dasar (pengobatan dan imunisasi rutin) berjalan tanpa gangguan stok. Dari sisi sebaran, capaian Puskesmas bervariasi (misalnya Samarinda 92,5% tertinggi, sedangkan Berau 74,8% dan Kutai Barat 75,3% terendah pada level Puskesmas). Selain itu, tren ketersediaan obat esensial 40 item menunjukkan perbaikan sangat kuat sampai mencapai 100% rata-rata provinsi pada 2024. Ini menjadi fondasi stabilitas layanan dan pendorong tidak langsung UHH melalui pengendalian penyakit dan komplikasi.

7. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi

Berdasarkan realisasi anggaran program unggulan tahun 2025, pembangunan dan penguatan rumah sakit tingkat Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan **kemajuan yang signifikan**, khususnya dalam peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit daerah strategis. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah provinsi dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan dan meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pada **RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS)** sebagai rumah sakit rujukan utama provinsi, telah dilaksanakan **pengadaan alat kesehatan sebanyak 78 unit** dengan capaian fisik **100 %** dan realisasi keuangan mencapai **97,32 %.** Pemenuhan alat kesehatan ini mendukung peningkatan kapasitas layanan rawat jalan, rawat inap, IGD, IBS, dan rekam medis, sehingga memperkuat peran RSUD AWS dalam menangani kasus-kasus rujukan, termasuk kasus kegawatdaruratan dan penyakit dengan kompleksitas tinggi.

Sementara itu, pada **Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur**, telah dilaksanakan kegiatan **pematangan lahan parkir** dengan capaian fisik **100%** dan realisasi keuangan **96,71%.** Kegiatan ini mendukung peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas pasien serta pengunjung rumah sakit. Peningkatan sarana pendukung ini menjadi bagian penting dalam penguatan layanan kesehatan mata yang bersifat spesialistik, sehingga mendorong peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Untuk **RSUD Aji Muhammad Sulaiman (AMS),** telah diselesaikan **penyusunan Feasibility Study, Masterplan, dan Detail Engineering Design (DED)** dengan capaian fisik **100%** dan realisasi keuangan **74,83 %.** Penyelesaian dokumen perencanaan ini menjadi landasan strategis bagi pengembangan infrastruktur rumah sakit ke depan, guna meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berbeda dengan rumah sakit lainnya, pada **RSUD Kutai Barat**, kegiatan **penyusunan Feasibility Study, Masterplan, dan DED** belum terealisasi pada tahun

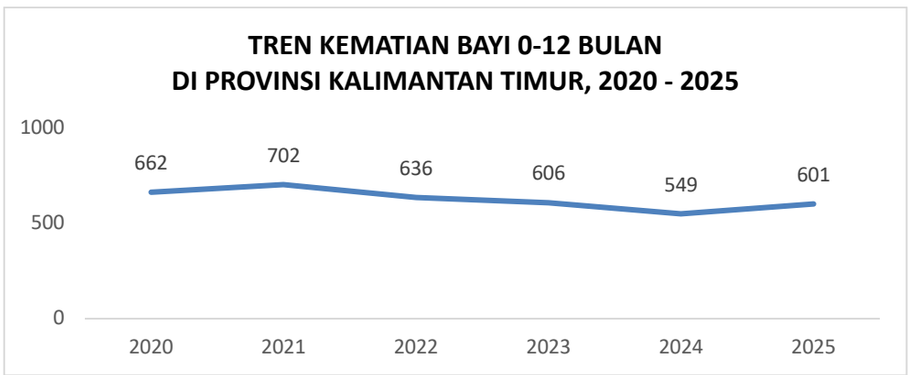
2025 dengan capaian fisik dan keuangan **0%**. Kondisi ini disebabkan oleh belum selesainya proses penetapan lahan yang masih dalam tahap pengajuan hibah. Belum terlaksananya kegiatan ini menunjukkan adanya kendala administratif dan kesiapan lahan yang berdampak pada tertundanya pengembangan rumah sakit di wilayah dengan tantangan geografis yang cukup besar.

Pembangunan dan penguatan rumah sakit di tingkat provinsi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas layanan kesehatan rujukan. Pengadaan alat kesehatan dan penguatan sarana prasarana rumah sakit rujukan provinsi mendukung peningkatan kualitas pelayanan, mempercepat penanganan pasien, serta menurunkan risiko komplikasi dan kematian. Namun demikian, keterlambatan pembangunan RSUD Kutai Barat menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti, mengingat peran strategis rumah sakit tersebut dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah barat Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam upaya peningkatan usia harapan hidup, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya :

1. Jumlah Kematian Bayi

Gambar 3.15



Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan data tren kematian bayi usia 0–12 bulan di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2025, terlihat bahwa jumlah kematian bayi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun hingga tahun 2024, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025. Pada tahun 2020, jumlah kematian bayi tercatat sebanyak 662 kasus, kemudian meningkat menjadi 702 kasus pada tahun 2021. Peningkatan ini sejalan dengan kondisi tekanan sistem kesehatan pada periode tersebut, yang berpotensi berdampak pada akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk layanan persalinan dan perawatan neonatal.

Memasuki tahun 2022, jumlah kematian bayi menurun menjadi 636 kasus, dan penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 menjadi 606 kasus. Tren penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam pelayanan kesehatan bayi, termasuk penguatan pelayanan neonatal, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta membaiknya sistem rujukan. Pada tahun 2024,

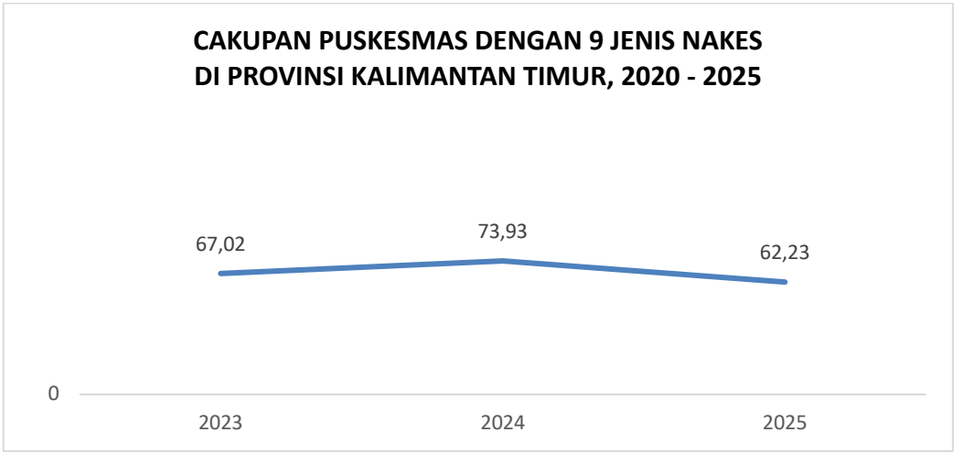
jumlah kematian bayi kembali menurun signifikan menjadi 549 kasus, yang merupakan angka terendah selama periode pengamatan. Capaian ini mengindikasikan efektivitas intervensi kesehatan bayi dan balita yang semakin baik.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan kembali menjadi 601 kasus, meskipun angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan periode 2020–2023. Kenaikan ini menjadi sinyal peringatan bahwa upaya penurunan kematian bayi belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap berbagai faktor, seperti kualitas layanan neonatal, kesinambungan pelayanan pascapersalinan, status gizi ibu dan bayi, serta cakupan dan ketepatan waktu imunisasi dasar.

Secara keseluruhan, tren kematian bayi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan dalam jangka menengah, namun disertai dengan fluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Mengingat kematian bayi memberikan dampak yang sangat besar terhadap Usia Harapan Hidup, kenaikan jumlah kematian bayi pada tahun 2025 berpotensi menjadi faktor penghambat dalam peningkatan UHH apabila tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan layanan kesehatan ibu dan bayi, terutama pada periode neonatal dan tahun pertama kehidupan, tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan peningkatan UHH di Kalimantan Timur.

2. Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Gambar 3.16



Sumber data : Dinas Kesehatan

Indikator program SDMK terkait presentase puskesmas terpenuhi 9 jenis nakes, dengan target capain program (Target Nasional) sebesar 83% puskesmas tersedia 9 jenis nakes. Pemenuhan standar ketenagaan minimal di puskesmas sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di fasilitas kesehatan tingkat dasar. Standar minimal tenaga kesehatan di puskesmas terdiri dari 9 jenis tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, Farmasi, Kesmas, Kesling, Gizi, ATLM).

Pada Tahun 2025 target Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebesar 1.620 orang atau sebanyak 180 Puskesmas (95,7%), Capaian sampai dengan Desember 2025 sebesar 117 Puskesmas atau 1.053 orang (65%). Capaian tersebut turun jika dibandingkan tahun 2024 dengan capaian 139 Puskesmas atau 1.251 orang (77,22%).

Pada tahun 2025 masih ada 71 puskesmas yang belum terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya, kebutuhan terbanyak adalah dokter gigi sebanyak 20 puskesmas belum tersedia dokter gigi. puskesmas paling banyak belum terpenuhi 9 jenis nakes berada di kabupaten Berau sebanyak 6 puskesmas dari 21 puskesmas di Kabuapten Berau yang belum terpenuhi 9 jenis nakesnya.

Faktor yang mempengaruhi tren penurunan capaian antara lain Mutasi Jabatan Fungsional, pegawai pensiun yang belum ada penggantinya, habis kontrak tenaga penugasan khusus, ketersediaan formasi jabatan yang menyebabkan pindah tugas.

Tabel 3.19
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar (9 Jenis Tenaga Kesehatan) di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Total	Lengkap	Belum Lengkap	%
1	KAB. PASER	19	17	2	89.47
2	KAB. KUTAI KARTANEGARA	32	21	11	65.63
3	KAB. BERAU	21	16	5	76.19
4	KAB. KUTAI BARAT	19	5	14	26.32
5	KAB. KUTAI TIMUR	21	8	13	38.10
6	KAB. PENAJAM PASER UTARA	11	6	5	54.55
7	KAB. MAHAKAM ULU	6	2	4	33.33
8	KOTA BALIKPAPAN	27	25	2	92.59
9	KOTA SAMARINDA	26	20	6	76.92
10	KOTA BONTANG	6	6	0	100.00
		188	126	62	67,0212766

Sumber data : Dinas Kesehatan

Tabel 3.20
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar (9 Jenis Tenaga Kesehatan) di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2024

No.	Kabupaten/Kota	Total	Lengkap	Belum Lengkap	%
1	KAB. PASER	19	18	1	94.74
2	KAB. KUTAI KARTANEGARA	32	26	6	81.25
3	KAB. BERAU	21	14	7	66.67
4	KAB. KUTAI BARAT	19	7	12	36.84
5	KAB. KUTAI TIMUR	21	12	9	57.14
6	KAB. PENAJAM PASER UTARA	11	8	3	72.73
7	KAB. MAHAKAM ULU	6	2	4	33.33
8	KOTA BALIKPAPAN	27	24	3	88.89
9	KOTA SAMARINDA	26	23	3	88.46
10	KOTA BONTANG	6	5	1	83.33
		188	139	49	73,93617021

Sumber data : Dinas Kesehatan

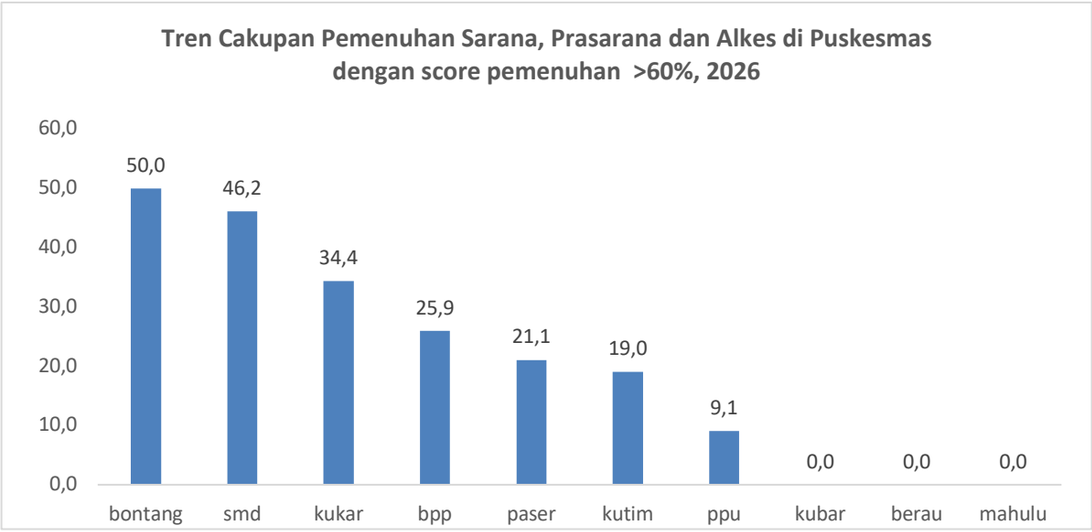
Tabel 3.21
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi Standar (9 Jenis Tenaga Kesehatan) di Puskesmas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2025

No.	Kabupaten/Kota	Total	Lengkap	Belum Lengkap	%
1	KAB. PASER	19	18	1	94.74
2	KAB. KUTAI KARTANEGARA	32	21	11	65.63
3	KAB. BERAU	21	8	13	38.10
4	KAB. KUTAI BARAT	19	12	7	63.16
5	KAB. KUTAI TIMUR	21	11	10	52.38
6	KAB. PENAJAM PASER UTARA	11	4	7	36.36
7	KAB. MAHAKAM ULU	6	2	4	33.33
8	KOTA BALIKPAPAN	27	20	7	74.07
9	KOTA SAMARINDA	26	15	11	57.69
10	KOTA BONTANG	6	6	0	100.00
	Jumlah	188	117	71	62,23

Sumber data : Dinas Kesehatan

3. Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alkes di Puskesmas

Gambar 3.17



Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan data cakupan pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas dengan skor pemenuhan di atas 60 % pada tahun 2026, terlihat adanya **kesenjangan capaian yang cukup lebar antar kabupaten/kota** di Provinsi Kalimantan Timur. Puskesmas yang memiliki skor >60 % dianggap telah memenuhi standar minimal sarana, prasarana, dan alkes yang dinilai melalui aplikasi pemantauan yang digunakan.

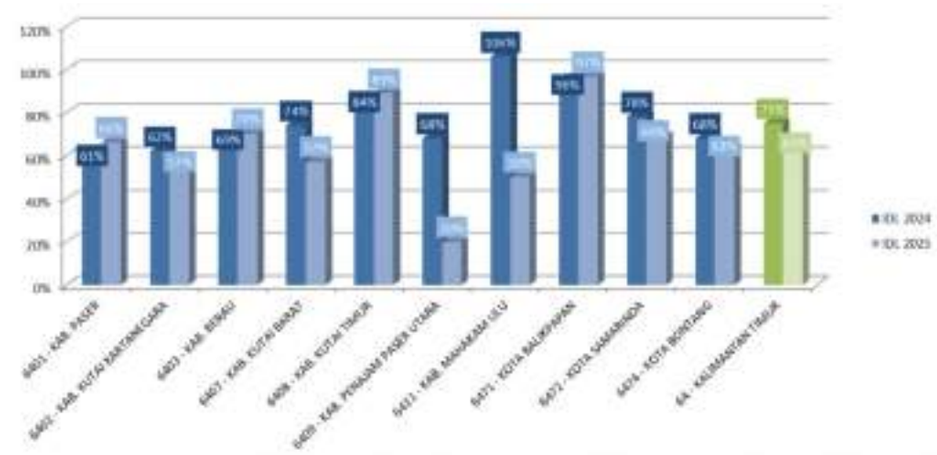
Kota Bontang mencatat capaian tertinggi dengan **50%** Puskesmas memenuhi skor di atas 60%, diikuti oleh Kota Samarinda sebesar **46,2%.** Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi berikutnya dengan capaian **34,4%,** sementara Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mencapai **9,1%.** Kabupaten Paser dan Kutai Timur berada pada kisaran menengah dengan capaian masing-masing **21,1%** dan **19,0 %,** sedangkan Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten

Mahakam Ulu belum terdapat Puskesmas yang mencapai skor pemenuhan di atas 60 %.

Rendahnya cakupan pemenuhan sarana, prasarana, dan alkes Puskesmas di sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan bahwa **pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama belum merata**. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas dan kelengkapan pelayanan kesehatan dasar, terutama pada wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Puskesmas yang belum memenuhi standar sarana dan alkes berisiko mengalami keterbatasan dalam pelayanan promotif, preventif, dan kuratif dasar, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pengendalian penyakit menular. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan, **pemenuhan sarana, prasarana, dan alkes Puskesmas masih menjadi tantangan utama** dalam penguatan layanan kesehatan primer di Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan antarwilayah ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar kualitas pelayanan kesehatan dasar dapat meningkat secara lebih merata dan berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta mendukung peningkatan Usia Harapan Hidup.

4. Keberhasilan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Gambar 3.18
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2024 - 2025



Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terlihat adanya **variasi capaian antarwilayah** serta **perubahan capaian antara tahun 2024 dan 2025**. Capaian IDL Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar **65%**, mengalami **penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 75%.** Penurunan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan imunisasi dasar lengkap pada bayi belum sepenuhnya stabil dan masih menghadapi tantangan dalam pencapaian sasaran di seluruh wilayah.
Pada tingkat kabupaten/kota, sebagian daerah menunjukkan **peningkatan capaian IDL**, seperti Kota Balikpapan dan Kabupaten Mahakam Ulu, sementara daerah lain

mengalami **penurunan cukup signifikan**, terutama Kabupaten Penajam Paser Utara yang pada tahun 2024 mencatat capaian tinggi namun menurun tajam pada tahun 2025. Perbedaan capaian ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan imunisasi, baik dari sisi akses pelayanan, ketersediaan logistik vaksin, maupun efektivitas pencatatan dan pelaporan imunisasi.

Masih terdapat kabupaten/kota dengan capaian IDL di bawah target, yang berpotensi meningkatkan risiko kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesakitan dan kematian pada bayi dan balita. Mengingat kematian pada usia dini memiliki pengaruh besar terhadap Usia Harapan Hidup, penurunan capaian IDL pada tahun 2025 berpotensi menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan UHH di Provinsi Kalimantan Timur.

Guna mengatasi kendala yang ada, upaya perbaikan ditahun berikutnya yang akan dilakukan diantaranya :

1. Upaya perbaikan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dari tingkat pusat hingga kelurahan/desa guna mendorong penemuan kasus secara aktif, optimalisasi pemanfaatan alat TCM di setiap fasilitas kesehatan untuk meningkatkan deteksi kasus, menambah jumlah kader dan penguatan kader di setiap desa/kelurahan yang berperan dalam penemuan kasus TBC.
2. Mengoptimalkan pemenuhan tenaga kesehatan melalui pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dan Redistribusi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan kabupaten kota Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dalam memenuhi ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin IRL dilakukan melalui beberapa pendekatan terpadu, yaitu :
    a. Memperkuat sistem distribusi logistik ke wilayah pedalaman dan terpencil melalui penjadwalan distribusi berbasis klaster wilayah, pemanfaatan moda transportasi alternatif (sungai, udara perintis), serta kerja sama lintas sektor dan pihak ketiga untuk mempercepat waktu tempuh pengiriman.
    b. Dari sisi kapasitas penyimpanan, akan dilakukan pemenuhan bertahap sarana cold chain berupa kulkas medis berstandar nasional di seluruh Puskesmas, disertai perencanaan kebutuhan berbasis jumlah dan jenis vaksin agar mampu menampung minimal 7 jenis vaksin secara bersamaan.
    c. Penguatan sistem manajemen inventaris melalui penguatan sistem pencatatan dan pelaporan stok obat dan vaksin secara digital dan real time, meningkatkan kapasitas SDM pengelola logistik kesehatan, serta pelaksanaan stok opname rutin dan rekonsiliasi data antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
    d. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan vaksin IRL dari Pemerintah Pusat, akan diupayakan untuk diatasi melalui penguatan fungsi

perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, advokasi percepatan distribusi ke pusat, serta penyusunan skema buffer stock terbatas di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan, sebagaimana yang telah diterapkan pada pengelolaan obat esensial.

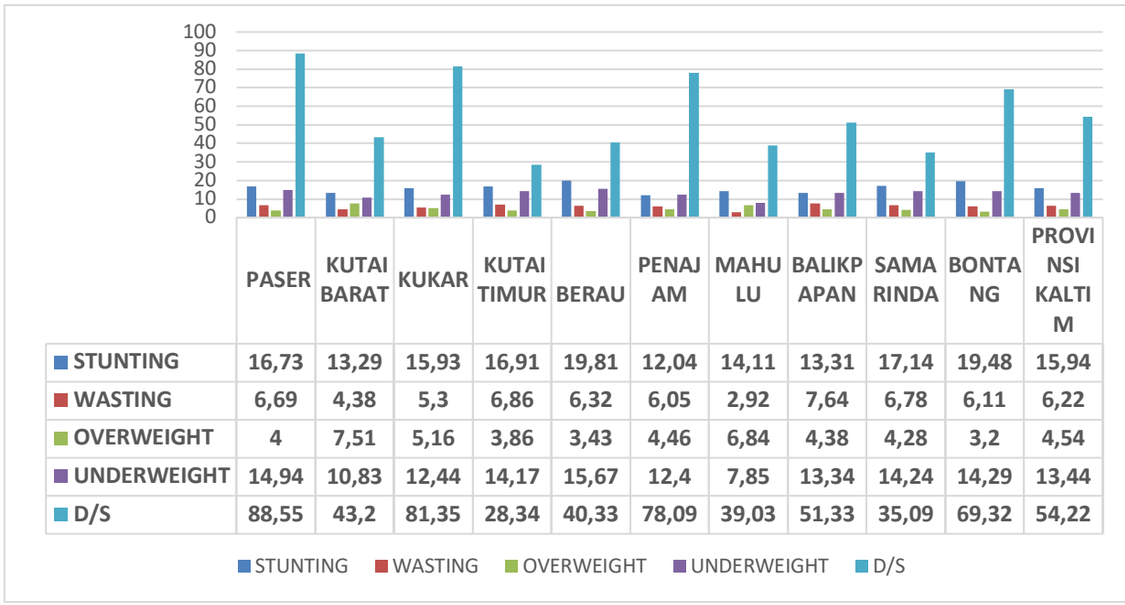
a. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting menggambarkan persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Berdasarkan data realisasi capaian tahun 2022–2025 yang bersumber dari rekapitulasi data balita stunting dan dihimpun secara rutin melalui aplikasi **SiGizi Terpadu** menunjukkan bahwa upaya penanganan dan intervensi stunting telah menunjukan tren penurunan prevalensi. Pada tahun 2022, prevalensi stunting tercatat sebesar 23,9%, kemudian menurun menjadi 22,9% pada tahun 2023, atau mengalami penurunan sebesar 1% berdasarkan hasil **Survei Kesehatan Indonesia**. Selanjutnya, hasil survei capaian tahun 2024 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 22,2%, atau kembali menurun sebesar 0,7%. Pada tahun 2025 tidak dilakukan survei penilaian status gizi, sehingga pemantauan capaian dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan rutin menggunakan **SiGizi Kesga (E-PPGBM Terpadu)**, dengan hasil prevalensi stunting tercatat sebesar 15,94%. Data indikator balita stunting menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pada Kabupaten Paser, Kutai Timur, Berau, Kota Samarinda dan Bontang, masih memiliki capaian prevalensi di atas capaian provinsi yang sebesar 15,94%.

Gambar 3.19

Capaian Indikator status Gizi Balita sampai dengan TW IV tahun 2025



	PASER	KUTAI BARAT	KUKAR	KUTAI TIMUR	BERAU	PENAJAM	MAHULU	BALIKPAPAN	SAMARINDA	BONTANG	PROVINSI KALTIM
STUNTING	16,73	13,29	15,93	16,91	19,81	12,04	14,11	13,31	17,14	19,48	15,94
WASTING	6,69	4,38	5,3	6,86	6,32	6,05	2,92	7,64	6,78	6,11	6,22
OVERWEIGHT	4	7,51	5,16	3,86	3,43	4,46	6,84	4,38	4,28	3,2	4,54
UNDERWEIGHT	14,94	10,83	12,44	14,17	15,67	12,4	7,85	13,34	14,24	14,29	13,44
D/S	88,55	43,2	81,35	28,34	40,33	78,09	39,03	51,33	35,09	69,32	54,22

Sumber data : Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel diatas diperoleh analisis capaian kinerja Provinsi Kalimantan Timur terkait status gizi balita (stunting) pada tahun 2025 sebesar 15,94% dengan rincian Kab. Berau 19,81%, Kota Bontang 119,48%, Kab. Kutai Timur 16,91%, Kota Samarinda 17,14%, Kutai Kartanegara 15,93%, Kab. Paser 16,73%, Kab.PPU 12,04%, Kab. Kutai Barat 12,86%, Kota Balikpapan 12,41%, Kab. Mahakam Ulu 10,65%. Data Capaian pada Indikator Kesehatan Ibu Anak (KIA) yang merupakan salah satu penyebab terjadinya Stunting pada Balita,menunjukkan bahwa Capaian K6 (Kunjungan Ibu Hamil yang ke 6 x),masih di bawah target.Capaian tahun 2023 77.49 % dari target 80 %. Capaian tahun 2024 sejumlah 71.59 % dari target 80 %, dan Capaian tahun 2025 65.10 % dari target 80 %.

Faktor pendorong dalam penanganan stunting yaitu melalui terlaksananya Program Prioritas diantaranya :

1. Pelatihan Konseling Menyusui Tingkat Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya ASI eksklusif untuk pertumbuhan anak.
2. Pemberian Makanan Tambahan Pangan Lokal pada Balita bermasalah Gizi dan Ibu Hamil KEK yang dilakukan oleh puskesmas.
3. Pelatihan Bagi Pelatih untuk Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rapat Lintas Sektor-lintas Program Terkait Percepatan Perbaikan Gizi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur, dan kegiatan orientasi kemitraan CSR bidang kesehatan dalam rangka mendukung penurunan stunting.
5. Rapat Lintas Sektor-lintas Program Terkait Percepatan Perbaikan Gizi Tingkat kabupaten / Kota.

6. Workshop Pekan Asi Se Dunia Tingkat Provinsi berkaitan dengan peningkatan kesadaran, edukasi, dan advokasi mengenai pentingnya Air Susu Ibu (ASI) bagi kesehatan ibu dan bayi.
7. Pertemuan Evaluasi Program Gizi Tingkat Provinsi untuk melihat capaian indikator gizi masing - masing Kab/Kota.
8. Bimtek dan Verifikasi Penilaian Kinerja dalam Rangka KP2S Se-Kalimantan Timur.
9. Pengadaan Alat Antropometri Kit untuk mendukung kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta penilaian status gizi masyarakat.
10. Peningkatan kapasitas Kader dengan kegiatan: Sarasehan kader posyandu tk Prov. Kaltim dan kegiatan di Tk kab/kota melakukan pelatihan peningkatan 25 kompetensi keterampilan Kader.
11. Peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan Surveilans Gizi guna Mengidentifikasi masalah gizi di masyarakat.
12. Peningkatan kapasitas kader dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan pada balita di posyandu.
13. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemberian Konseling dan edukasi Pemberian Makanan Pemberian Makanan Bayi dan Anak, Konseling Menyusui, Pencegahan dan Tatalaksana Gizi buruk pada balita.
14. Penyediaan media edukasi gizi berupa Food Model, Banner dll.
15. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pada sasaran anak sekolah yang bertujuan untuk mencegah faktor resiko terjadinya stunting dengan melakukan kegiatan aksi bergizi yang didalamnya memuat :
    a. edukasi makanan gizi seimbang
    b. merutinkan aktifitas fisik
    c. percontohan makanan gizi seimbang dengan makan bersama
    d. konsumsi tablet tambah darah bersama pada remaja putri

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan gizi balita hingga saat ini antara lain belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi pada balita bermasalah gizi, skrining dan pemeriksaan rutin ibu hamil, serta dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menimbang balita di posyandu yang tercermin dari capaian D/S tahun 2024 sebesar 48,33% (di bawah Target Nasional 85% dan Target Provinsi 65%) serta tahun 2025 yang masih 54,22% (di bawah target 80%). Kemudian tingginya beban kerja petugas gizi di puskesmas dalam menangani masalah gizi pada berbagai sasaran seperti remaja, ibu hamil, dan balita di wilayah kerjanya karena terbatasnya jumlah petugas.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan dalam penanganan stunting, yaitu :

1. Rapat Lintas Sektor-lintas Program Terkait Percepatan Perbaikan Gizi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota dengan salah satu fokusnya

yaitu pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menimbang balita di posyandu dan pemeriksaan rutin ibu hamil.

2. Untuk mengatasi tingginya beban kerja petugas gizi karena keterbatasan jumlah petugas gizi di Puskesmas, upaya yang akan dilakukan yaitu melalui penguatan strategi delegasi dan digitalisasi agar penanganan tidak *bottleneck*, misalnya melalui penerapan :

   a. Task Shifting (Pengalihan Tugas): Melatih perawat atau bidan desa untuk melakukan skrining gizi dasar, sehingga petugas gizi puskesmas hanya fokus pada kasus rujukan berat (balita gizi buruk/stunting persisten).

   b. Digitalisasi Pelaporan (E-PPGBM Real-time): Mengintegrasikan pelaporan hasil penimbangan langsung dari Posyandu ke sistem digital untuk mengurangi beban administrasi manual petugas gizi.

   c. Telekonsultasi Gizi: Membuka kanal konsultasi via WhatsApp atau aplikasi untuk remaja dan ibu hamil guna mengurangi beban tatap muka yang tidak mendesak.

3. Melaksanakan kegiatan orientasi kemitraan CSR bidang kesehatan dalam rangka mendukung penurunan stunting.
4. Pelatihan Gizi Bencana Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan untuk mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan lansia) pada daerah yang terdampak.
5. Pelatihan Bagi Pelatih untuk Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 3 : Menurunnya tingkat pengangguran

Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator untuk mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pada data sesuai dengan Berita Resmi Statistik menunjukkan bahwa terjadi kenaikan 0,04 % Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2025 dibanding Tahun 2024. Lonjakan pencari kerja yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pekerjaan yang tersedia mempengaruhi kenaikan tersebut. Dibanding 3 tahun terakhir, Tingkat Pengangguran terbuka mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar 0,17 % dan meningkat ditahun 2025 sebesar 0,04 % dengan capain 99,22 %. Beberapa proyek besar seperti IKN dan Pertamina RDMP Tahap 1 yang telah selesai mengakibatkan beberapa masyarakat yang tadinya bekerja harus kembali mencari pekerjaan baru bersaing dengan para pencari kerja baru dan ini sifatnya situasional dan jumlahnya cukup signifikan mencapai lebih dari 50 %. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi ada pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur dikarenakan merupakan sentra-sentra ekonomi terbesar Kalimantan Timur penyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tertinggi sehingga pencari kerja berbondong-bondong

mencari pekerjaan di lokasi tersebut. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Timur masih diatas Rata – Rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesr 4,85%.

Beberapa faktor pendorong dalam upaya pecapaian kinerja antara lain :

1. Tetap terus berupaya memfasilitasi pelatihan – pelatihan berbasis kompetansi yang dilakukan agar para pencari kerja memiliki skill untuk diserap di pasar kerja serta membuka lapangan usaha baru dengan penambahan 15 calon instruktur dari BKD.
2. Lanjutan penempatan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur agar para pencari kerja mendapatkan kesempatan di magangkan setelah mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi.
3. Adanya sumbang data melalui Kegiatan Informasi Pasar Kerja pada Badan Statistik Nasional Provinsi Kalimantan Timur sehingga potensi pengurangan pengangguran dapat dihitung secara lebih cermat dan komprehensif adalah sebagai berikut:
    a. Pencari kerja terdaftar, lowongan kerja terdaftar dan penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin;
    b. Pencari kerja terdaftar menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin;
    c. Upah Minimun Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
    d. Jumlah yang di latih di UPTD. BLKI Provinsi Kalimantan Timur;
    e. Jumlah Perusahaan di Wilayah Kalimantan Timur berdasarkan WLKP Online (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan).
4. Melakukan Pembinaan Produktivitas pada Perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari para pekerja agar dapat selalu berkesesuaian dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan.
5. Mendorong kondusifitas pada perusahaan melalui PP (Peraturan Perusahaan) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) sehingga memperkecil kemungkinan dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak.
6. Pengawasan norma-norma ketenagakerjaan juga turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja yang berkualitas.

Disamping faktor pendorong tersebut, tentunya ada faktor kendala antara lain :
Kurangnya minat para pencari kerja berpendidikan pada skala pekerja rendah maupun usaha mandiri melalui Rencana Tenaga Kerja serta lebih minat pada sektor formal. perusahaan-perusahaan, sehingga peluang usaha tersebut diambil pekerja dari luar Kalimantan Timur.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya perbaikan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam menyelaraskan kembali Program/ Kegiatan yang mendukung penyerapan tenaga kerja terkait Rencana Tenaga Kerja.
2. Melanjutkan kerja sama dengan Perusahaan untuk dapat menerima Para Pencari Kerja yang telah dilatih untuk dapat di magangkan pada Perusahaan – Perusahaan.
3. Diversifikasi rencana tenaga kerja dengan memasukkan Program Pekerja Hijau dan Energi Hijau sehingga terbuka peluang baru dalam mendongkrang penurunan tingkat Pengangguran Terbuka. Rencana tenaga kerja hijau terkait dengan pemanfaatkan tenaga kerja dalam menghijaukan kembali bumi Kalimantan Timur yg dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan seperti reboisasi, mangrove, maupun maintenance panel surya pada perusahaan-perusahan yang belum dialiri listrik PLN.
4. Membuat suatu sistem informasi pasar kerja secara digital yang dapat diakses oleh seluruh warga Kalimantan Timur sehingga memudahkan dalam mendapatkan pekerjaan.
5. Melakukan himbauan kepada perusahaan terkait (*Corporate Social Responsibility)* CSR dalam meningkatkan produktivitas warga sekitar. Melakukan TNA (*Training Need Analysis*) dan TMT (*Tailor Made Training*) agar latihan yang dilakukan *Matching* atau cocok dengan yang diperlukan oleh pasar kerja.

Sasaran 4 : Meningkatnya daya saing perempuan

Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran dalam capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu :

1. Sumbangan pendapatan perempuan;
2. Keterlibatan perempuan di parlemen;
3. Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, teknisi.

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2024 tergambar dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 3.20
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Kalimantan Timur,



Sumber Data : BPS Kaltim, 2024

Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender pada Tahun 2025 adalah sebesar 61,41. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 68,96 ada terjadi penurunan secara signifikan sebesar 7,55 poin. Pencapaian tersebut masih dibawah target nasional. Kondisi tersebut disebabkan turunnya nilai secara signifikan sebesar 12,73 pada komponen keterlibatan perempuan diparlemen, disebabkan keterwakilan perempuan di parlemen jauh dari target 30%. Walaupun ada kenaikan pada komponen sumbangan pendapatan perempuan sebesar 0,28 dan perempuan sebagai tenaga professional sebesar 3,62 tetapi kenaikan tersebut kecil dibandingkan penurunan pada komponen keterlibatan perempuan diparlemen.

Berdasarkan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa amanat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2030, pada tahun 2025 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender. Sehingga pada tahun 2025, data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) secara resmi tidak lagi di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3.23
Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 2023 - 2024

No.	Kabupaten / Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	
		2023	2024
1.	PASER	23,75	24,13
2.	KUTAI BARAT	27,17	27,19
3.	KUTAI KARTANEGARA	24,34	24,38
4.	KUTAI TIMUR	18,70	18,71
5.	BERAU	17,88	18,19
6.	PENAJAM PASER UTARA	25,53	25,73
7.	MAHAKAM ULU	28,15	28,39
8.	BALIKPAPAN	27,13	27,56
9.	SAMARINDA	30,93	31,34
10.	BONTANG	17,90	17,80
KALIMANTAN TIMUR		24,57	24,85
INDONESIA		37,29	37,31

Sumber Data : BPS Kaltim, 2024

Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada Tahun 2024 meningkat sebesar 0,28 dari Tahun 2023 sebesar 24,57 menjadi 24,85. Capaian tersebut masih dibawah target nasional. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan untuk peningkatan kapasitas sebagai

pelaku usaha UMKM perempuan berupa legalitas usaha yaitu NIB dan sertifikasi halal ke daerah Kab/Kota. Kerjasama dengan Lembaga akademisi Universitas UINSI Samarinda untuk pengembangan pemberdayaan perempuan di bidang usaha (ekonomi). Meningkatnya perempuan sebagai pelaku usaha (UMKM) mampu mengungkit persentase nilai pada komponen sumbangan pendapatan perempuan.

Tabel 3.24
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN 2023 - 2024

No.	Kabupaten / Kota	Perempuan di Parlemen (%)	
		2023	2024
1.	PASER	23,33	20,00
2.	KUTAI BARAT	16,00	20,00
3.	KUTAI KARTANEGARA	15,56	26,67
4.	KUTAI TIMUR	12,50	15,00
5.	BERAU	16,67	20,00
6.	PENAJAM PASER UTARA	4,00	4,00
7.	MAHAKAM ULU	45,00	40,00
8.	BALIKPAPAN	22,73	26,67
9.	SAMARINDA	15,56	8,89
10.	BONTANG	8,00	4,00
KALIMANTAN TIMUR		21,82	12,73
INDONESIA		22,14	22,46

Sumber data : BPS Kaltim, 2024.

Pada komponen keterwakilan Perempuan di Parlemen, Keterlibatan Perempuan di Parlemen dipengaruhi oleh persentase atau jumlah perempuan yang menduduki kursi sebagai anggota legislatif baik disingkat Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Persentase keterwakilan perempuan di parleman pada Tahun 2024 sebesar 21,82 mengalami penurunan drastis sebesar 9,09 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 12,73. Persentase keterwakilan perempuan di parleman Kalimantan Timur masih dibawah target nasional. Kondisi ini disebabkan keterwakilan perempuan di parlemen jauh dari target 30%. Hal tersebut dipengaruhi beberapa factor, diantaranya;

1. Biaya politik tinggi;
2. Minim dukungan partai politik;
3. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota parlemen perempuan;
4. Tidak ada kewenangan intervensi oleh DP3A Provinsi dan Kab/Kota.

Tabel 3.25
Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi;
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2024

No.	Kabupaten / Kota	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	
		2023	2024
1.	PASER	51,44	51,94
2.	KUTAI BARAT	47,73	54,16
3.	KUTAI KARTANEGARA	52,45	53,41
4.	KUTAI TIMUR	45,65	58,38
5.	BERAU	44,77	49,25
6.	PENAJAM PASER UTARA	58,37	57,26
7.	MAHAKAM ULU	47,76	46,54
8.	BALIKPAPAN	47,64	52,33
9.	SAMARINDA	45,26	46,51
10.	BONTANG	50,14	46,97
KALIMANTAN TIMUR		48,03	51,65
INDONESIA		49,53	50,13

Sumber data : BPS Kaltim, 2024.

Perempuan sebagai Tenaga Profesional, dipengaruhi oleh persentase sebagai tenaga profesional atau proporsi perempuan yang berada/menduduki posisi sebagai managerial sebagai pengambil keputusan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Capaian pada komponen tersebut pada Tahun 2024 sebesar 51,65 mengalami kenaikan sebesar 3,62 dibandingkan capaian Tahun 2023 48,03. Capaian telah melebihi target nasional.

A. Faktor pendorong

Dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender, hal-hal yang menjadi faktor pendorong diantaranya :

1. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K.288/2019 tentang Penggerak Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur.
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 474.24/K.503/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta (NGO seperti GIZ, YKAN, Yayasan Bumi, USAID SEGAR, WWF, Landesa,), organisasi

perempuan untuk bersama melakukan implementasi PUG kepada masyarakat.

5. Peran Lembaga Masyarakat dalam rangka peningkatan pemberdayaan Perempuan dibidang ekonomi, politik, hukum dan sosial di Kalimantan Timur (PW 'Aisyiyah, Muslimat NU, Salimah, IWAPI, KPPI, Mom Preneurs, Himpunan Perempuan Katolik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Persatuan Perempuan Lintas Agama Kaltim).
6. Komitmen yang terjalin dan terlaksana dari tim penggerak PUG di Provinsi yaitu DKP3A, Bappeda, BPKAD dan Inspektorat serta dukungan dari pokja PUG, focal point.
7. Kerjasama dengan lembaga akademisi (perguruan tinggi) UINSI Samarinda dengan melakukan Pendampingan kepada UMKM perempuan yang belum memilki legalitas usaha (NIB) menjadi memilki, serta pendampingan mendapatkan sertifikasi halal.
8. Kerjasama dengan Pengurus Wilayah Aisyiyah Kalimantan Timur Sinergitas Penguatan Kapasitas Perempuan, Ketahanan Keluarga Dan Perlindungan Anak.
9. Kerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur dalam rangka meyebarluaskan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur hingga ke pelosok pedalaman untuk memberikan pemahaman pentingnya kesetaraan gender dalam seluruh sektor pembangunan.
10. Telah dilaksanakan sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) terhadap 37 (tiga puluh tujuh) perangkat daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilakukan penguatan terhadap tugas dan fungsi Tim Driver dan koordinasi/sinkronisasi dan penyelarasan program kegiatan yang akan dilakukan terhadap Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

B. Faktor penghambat

1. Masih adanya diskriminasi gender (stereotif, subordinari, marginalisasi) bahwa perempuan itu harus dirumah, harus mengurus anak dan rumah tangga merupakan bagian dari faktor terbesar penyebab terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan gender, bahkan perempuan bekerjapun masih dibebani dengan beban ganda antara mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.
2. Belum optimalnya pelaksanaan PUG/PPRG pada lembaga pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota.
3. Sering bergantinya pejabat penanggung jawab program Stranas PUG/PPRG akan menyulitkan penerapan program tersebut.
4. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengarusutamaan gender dan pelaksanaannya, dan perubahan nomenklatur kelembagaan.

5. Keterwakilan perempuan di parlemen yang masih rendah, kaltim 20% dari 30%. Ini dikarenakan DKP3A Prov. Kaltim tidak dapat melakukan intervensi ke Partai Politik untuk pemenuhan 30% keterwakilan Perempuan.
6. Belum pernah dilakukan kegiatan yang memfokuskan pada perempuan sebagai tenaga profesional dengan alasan belum adanya defenisi yang jelas tentang batasan perempuan sebagai tenaga profesional.
7. Bahwa biaya politik bagi perempuan itu mahal, bahkan tidak mendapat support dari pasangannya, perempuan yang duduk di partai seringkali hanya sebagai pelengkap, bukan pada posisi pertama (hak kursi lebih diberikan kepada anggota laki laki) dan sering terjadi pergantian antar waktu (PAW) bagi anggota parlemen Perempuan.
8. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa mengintervensi terkait perempuan sebagai tenaga professional khususnya di sektor swasta.
9. Peran dan partisipasi perangkat daerah dalam peningkatan program kegiatan responsif gender yang di identifikasi dari besaran Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim masih rendah.
10. Potensi Anggaran Responsif Gender (ARG) tidak sebanding dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang di ARG-kan di setiap perangkat daerah.
    a. Capaian ARG Kaltim Tahun 2022 = 11,96%
    b. Capaian ARG Kaltim Tahun 2023 = 14,31%
    c. Capaian ARG Kaltim Tahun 2024 = 30,34%

    Capain tersebut tidak sebanding dengan jumlah APBD Prov. Kaltim.
11. IDG tidak hanya menjadi capaian program DP3A semata, akan tetapi harus didukung oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
12. Sumbangan Pendapatan laki – laki lebih tinggi dibandingkan sumbangan pendapatan Perempuan disebabkan kondisi iklim dan geografis Kalimantan Timur lebih di dominasi oleh sektor pertambangan (batubara), sektor perkebunan (sawit) serta kehutanan akibatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki–laki.

Tujuan 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran 5 : Terwujudnya diversifikasi ekonomi

Indikator : LPE Non Migas dan Batubara

Provinsi Kalimantan Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dimana hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri dalam bentuk belum diolah. Komoditi unggulan di Kalimantan Timur adalah batu bara, migas, dan kelapa sawit. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur menjadi yang terbesar di wilayah Kawasan Timur

Indonesia. Tercatat pada Tahun 2024 kontribusi PDRB Kalimantan Timur terhadap nasional sebesar 3,09 persen sehingga menjadikan Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) non migas dan batubara ini menggambarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri non migas dan non batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna mendorong kontribusi PDRB pada sektor industri non migas dan non batubara yaitu melalui :

1. Peningkatan peran Kalimantan Timur sebagai Mitra dan Superhub ekonomi IKN;
2. Pengembangan industri hilir;
3. Peningkatan produksi perikanan terutama perikanan hasil budidaya;
4. Peningkatan produksi komoditas perkebunan unggulan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada dan kakao);
5. Pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan ditahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi pada sektor non migas dan batubara yaitu antara 6,40 – 7,20%. Untuk realisasi Tahun 2025 yaitu sebesar 6,63% atau dengan persentase capaian kinerja 100%.

Sektor-sektor yang menjadi pendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara di Kalimantan Timur Tahun 2025

1. Industri Pengolahan

Tabel 3.26

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), Tahun 2021-2025

No	Industri Pengolahan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Industri Makanan dan Minuman	10.468,67	10.973,01	11.406,65	11.832,98	12.975,72
2	Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	70,9	77,25	82,23	86,49	-
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	17,5	17,71	17,53	18,06	18,70
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus; dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	2.364,25	2.361,91	2.155,79	2.240,82	2.307,06
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3.029,99	3.227,24	3.365,43	3.681,74	3.861,78
7	Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional	14.105,29	14.768,53	15.328,48	16.800,63	18.394,33
8	Industri Karet; Barang dari Karet dan Plastik	140,19	153,85	158,97	164,2	178,15
9	Industri Barang Galian bukan Logam	551,53	586,65	658,74	1.241,62	1.590,46
10	Industri Logam Dasar	-	-	-	613,07	606,22

11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	679,92	724,98	770,81	796,88	855,82
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	133,33	139,70	150,36	152,65	163,32
13	Industri Alat Angkutan	878,1	918,35	956,24	1.009,15	1.023,41
14	Industri Furnitur	363,72	397,58	424,70	430,41	465,48
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	187,66	194,48	220,08	238,62	262,17
Total		**32.991,05**	**34.541,24**	**35.696,01**	**39.307,32**	**42.702,62**

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur

Untuk Tahun 2025 terjadi peningkatan PDRB menjadi sebesar 42.702,62 miliar dari tahun sebelumnya 39.702,32 miliar. Ada penambahan PDRB sebesar 3.395,3 miliar dengan LPE industri non migas 8,64. Beberapa faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

a. Ekspansi hilirisasi industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) yang optimal sepanjang Tahun 2025;
b. Peningkatan investasi domestik di sektor industri pengolahan;
c. Kebijakan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Program Unggulan Jospol 1 berupa Pembangunan Rumah Produksi Bersama Pakan Ternak;
d. Kebijakan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Program Unggulan Jospol 4 berupa pelatihan dan bantuan alat kepada 1000 pelaku usaha.

Salah satu faktor penghambat dalam peningkatkan PDRB industri pengolahan adalah keterbatasan diversifikasi subsektor industri pengolahan, terutama industri berteknologi menengah-tinggi. Sehingga perlu adanya diversifikasi struktur industri pengolahan diantaranya dengan mendorong industri turunan dan lanjutan dari CPO.

2. Peternakan

Gambar 3.21



	PRODUKSI DAGING (TON)	PRODUKSI TELUR (TON)	PRODUKSI ANEKA TERNAK LAINNYA (TON)
TAHUN 2022	74.279,18	15.594,32	
TAHUN 2023	75.903,93	10.858,99	166,62
TAHUN 2024	82.051,09	13.542,52	175,61
TAHUN 2025	83.462,18	13.671,83	189,03

Sumber Data : Dinas Peternakan Keswan Prov.Kaltim 2025

Tren produksi ternak 2022-2025

Untuk Tahun 2025 terjadi kenaikan semua produksi ternak (daging, telur dan aneka ternak lainnya) yang mendorong LPE sektor peternakan sebesar 6,94**.. Faktor-faktor pendukung kenaikan PDRB sektor peternakan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Faktor Produksi dan Peningkatan Populasi

- Pertumbuhan Populasi dan Produktivitas:

  LPE dipengaruhi secara langsung oleh peningkatan jumlah populasi ternak serta produktivitasnya di lapangan. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas pada budidaya unggas dan aneka ternak seperti lebah kelulut dan burung walet.
- Penerapan Teknologi

  Inovasi teknologi seperti sistem kandang tertutup (closed house) pada ayam pedaging/petelur serta penggunaan teknologi tepat guna lainnya membantu menekan Harga Pokok Produksi (HPP) dan meningkatkan efisiensi.
- Pengembangan Perbibitan

  Keberhasilan menghasilkan bibit berkualitas, seperti sapi yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB), turut meningkatkan bobot potong ternak dan produksi daging secara keseluruhan.

b. Pemanfaatan Lahan dan Sarana Prasarana

- Integrasi Sapi-Sawit

  Pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di Kaltim untuk integrasi ternak sapi memberikan sumber pakan dan area penggembalaan yang efisien.
- Lahan Eks Tambang

  Optimalisasi lahan pascatambang yang telah direklamasi sebagai kawasan budidaya peternakan (termasuk model mini ranch) menjadi solusi atas keterbatasan lahan hamparan luas.
- Infrastruktur Pendukung

  Pembangunan sarana seperti irigasi perpompaan, embung, dan unit pengolahan pakan mendukung ketersediaan air dan pakan yang berkelanjutan.

c. Sinergi dan Kesehatan Hewan

- Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

  Sinergi antara pemerintah, akademisi, kelompok ternak, dan pihak swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
- Pelayanan Kesehatan Hewan

  Penguatan fungsi Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan), klinik hewan, serta program vaksinasi yang masif untuk mencegah penyakit seperti PMK dan LSD menjaga stabilitas produksi ternak.
- Pemberdayaan Desa Korporasi

  Pengembangan model Desa Korporasi Ternak (DKT) bertujuan meningkatkan keterampilan kelembagaan peternak agar dapat mengelola usaha secara profesional dan berbasis teknologi.

Kenaikan PDRB sektor peternakan yang tidak signifikan, dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

a. Masalah Produksi dan Produktivitas

- Keterbatasan Bibit dan Indukan

  Populasi dasar belum mencukupi kebutuhan, terutama kurangnya ketersediaan sapi betina produktif yang menjadi "mesin produksi" ternak.
- Tingginya Angka Kematian Pedet

  Manajemen pemeliharaan yang masih tradisional dan pola ekstensif menyebabkan angka kematian anak sapi (pedet) masih cukup tinggi.
- Kualitas Genetik dan Reproduksi

  Mutu genetik ternak masih rendah serta pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) sering terkendala oleh pasifnya petugas maupun kurangnya pelaporan kebuntingan dari peternak.
- Penerapan Teknologi

  Penggunaan teknologi peternakan tepat guna, seperti sistem kandang tertutup (*closed house*), belum optimal merata di seluruh level peternak.

b. Kesehatan Hewan dan SDM

- Wabah Penyakit

  Munculnya penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Lumpy Skin Disease* (LSD), dan *Avian Influenza* (AI) sangat menghambat produksi dan lalu lintas ternak.
- Keterbatasan SDM Teknis

  Kurangnya tenaga medis veteriner (dokter hewan), paramedik, dan inseminator di lapangan menyebabkan pembinaan kepada peternak tidak maksimal.
- Regenerasi Peternak

  Rendahnya minat generasi milenial untuk terjun ke subsektor peternakan dan kecenderungan masyarakat lebih fokus pada sektor pertambangan atau perkebunan.

Agar dapat meningkatkan PDRB sektor peternakan secara signifikant pada Tahun 2026, beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Produksi dan Populasi Ternak

- Optimalisasi Reproduksi

  Mempercepat peningkatan populasi melalui program Inseminasi Buatan (IB) yang lebih masif, penanganan gangguan reproduksi, serta penyelamatan sapi betina produktif agar tidak dipotong.
- Penyediaan Bibit Berkualitas

  Mendorong produksi semen beku dari pejantan unggul dan menjamin ketersediaan bibit ternak yang bersertifikat (ber-SKLB) untuk meningkatkan bobot potong dan daya saing.
- Intensifikasi Kelahiran

Melakukan pendampingan intensif untuk menurunkan angka kematian pedet (anak sapi) melalui pemberian nutrisi khusus pada induk bunting.

b. Kesehatan Hewan dan Biosekuriti

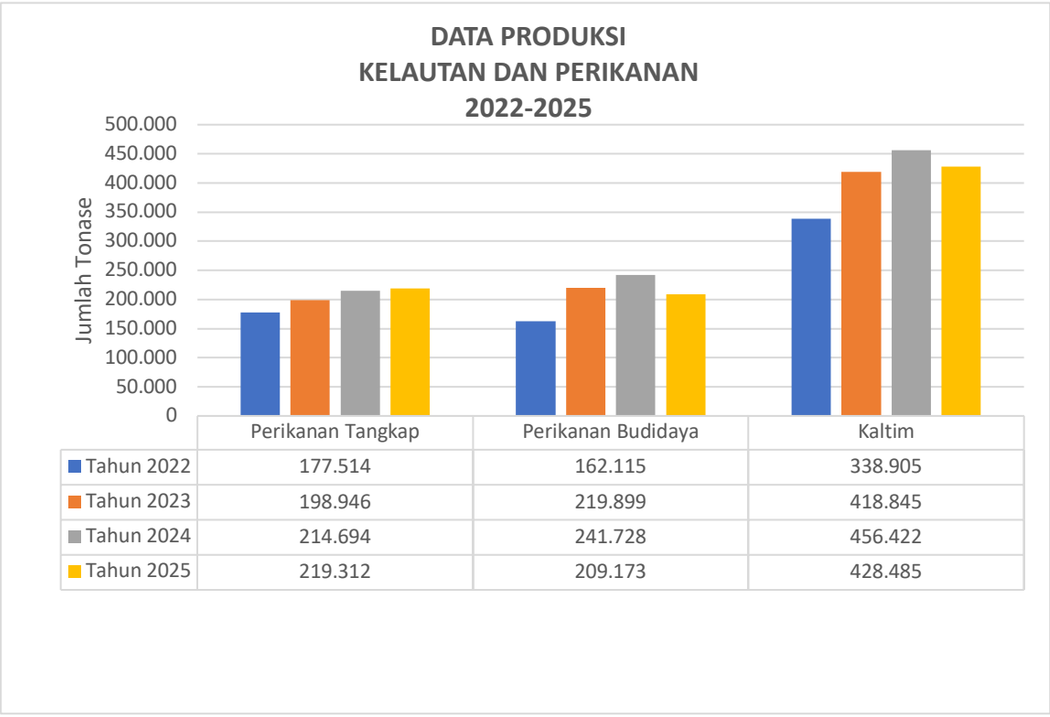
- Pencegahan Penyakit Menular

  Memperkuat cakupan vaksinasi rutin untuk penyakit strategis seperti PMK, LSD, Jembrana, dan Avian Influenza.
- Penguatan Infrastruktur Kesehatan

  Meningkatkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), laboratorium veteriner, dan pos pemeriksaan hewan (*checkpoint*) di wilayah perbatasan untuk mengawasi lalu lintas ternak secara ketat.
- Sertifikasi Produk

  Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) guna menjamin produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

3. Sektor Perikanan



	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Kaltim
Tahun 2022	177.514	162.115	338.905
Tahun 2023	198.946	219.899	418.845
Tahun 2024	214.694	241.728	456.422
Tahun 2025	219.312	209.173	428.485

Tabel 3.27
Tren produksi perikanan tangkap dan budidaya 2022-2025
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Kaltim, 2025

Pada tabel menunjukkan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2025 menjadi sebesar 219.312 ton dibandingkan Tahun 2023 produksi perikanan tangkap hanya 214.694 ton dengan LPE mencapai 9,96**. Pemberian bantuan sarana perikanan tangkap, jumlah armada kapal, alat tangkap dan teknologi penangkapan yang lebih modern meningkatkan volume tangkapan dan produktivitas nelayan. Sebaliknya untuk produksi perikanan budidaya pada Tahun 2025 menurun menjadi 209.173 ton, sehingga upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2026 untuk dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah dengan percepatan

infrastruktur dengan melakukan rehabilitasi tambak dan pembangunan sarana prasarana budi daya ramah lingkungan. Dampak iklim dan lingkungan, yaitu perubahan iklim mempengaruhi pola tangkap nelayan dan produktivitas tambak adalah salah faktor yang mengakibatkan menurunnya produksi perikanan.

4. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Gambar 3.22



Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Dari gambar 3.22 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 hanya mencapai -4,45% kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi -1,64% dan menurun pada tahun 2023 menjadi -3,51% kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 2,49% dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,87%. Pada sub sektor hortikultura pada tahun 2021 mencapai menjadi 0,92% namun pada tahun 2022 menurun menjadi -0,51%, kemudian meningkat kembali tahun 2023 menjadi 1,84%, tahun 2024 kembali meningkat menjadi 2,01% dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 3,29%.

Untuk sub sektor tanaman pangan tahun 2025 mencapai 4,87% sedangkan realisasi nasional sebesar 9,94% sehingga dapat dikatakan realisasi provinsi Kalimantan Timur lebih kecil daripada realisasi nasional. Untuk Hortikultura tahun 2025 mencapai 3,29% sedangkan realisasi nasional sebesar 3,57% sehingga dapat dikatakan realisasi provinsi Kalimantan Timur lebih kecil daripada realisasi nasional.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku menurut data BPS mencapai Rp. 889.02,55 Miliar dan yang berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai Rp. 85.163,03 Miliar atas dasar harga berlaku tahun 2025. Struktur PDRB sektor pertanian luas pada tahun 2025 mencapai 9,58% dari total PDRB, bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,62%. Pertumbuhan PDRB Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di pengaruhi oleh jumlah produksi, luas panen serta produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2025 sub sektor tanaman pangan mencapai 1.665,8 Milyar sedangkan tahun 2024 PDRB sub sektor tanaman pangan sebesar 1.547,80 Milyar sehingga dapat dikatakan meningkat 7,63%.PDRB sub Sektor Hortikultura tahun 2025 sebesar 3.213,1 Milyar sedangkan tahun 2024 sebesar 2.964,14 Milyar sehingga dapat dikatakan meningkat 8,4%. Subsektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian sehingga subsektor tanaman pangan dan hortikultura memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan pangan seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Beberapa faktor pendorong dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura antara lain:

1. Perluasan areal tanam tanaman hortikultura terutama di daerah yang berpotensi tinggi, Perluasan areal tanaman Buah Nanas dan Naga
   - Nanas

     Tahun 2024, Jumlah populasi tanaman nanas = 2.422.703 Pohon atau seluas 97 Hektar. Tahun 2025, Jumlah populasi tanaman nanas = 5.824.979 Pohon atau seluas 233 Hektar sehingga dapat dikatakan terjadi kenaikan luas tanam baru sebesar 140,43%.
   - Buah Naga

     Tahun 2024, Jumlah populasi tanaman buah naga = 157.104 Pohon atau seluas 157 Hektar. Tahun 2025, Jumlah populasi tanaman buah naga = 268.626 pohon atau seluas 269 Hektar sehingga dapat dikatakan terjadi kenaikan luas tanam baru sebesar 70,99%
2. Peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit
3. Peningkatan kemampuan petani melalui pelatihan dan pendampingan
4. Melakukan gerakan pengendalian hama penyakit pada tanaman pangan dan hortikultura
5. Faktor penghambat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sector tanaman pangan dan hortikultura yaitu :
6. Keterbatasan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian
7. Penggunaan benih yang bukan merupakan benih unggul bersertifikat
8. Menurunnya areal tanam tanaman hortikultura pada sebagian besar komoditas hortikultura
9. Menurunnya areal tanam tanaman pangan, dapat terlihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.28
Luas Tanam Komoditas Pertanian Tanaman Pangan

No.	Komoditi	2024	2025	Persentase
1.	Padi	71.804,17	62.034,04	-13,61
2.	Jagung	5.397,68	2.714,41	-49,71
3.	Kedelai	26,47	7,80	-70,53
4.	Kacang Tanah	461,12	245,61	-46,74
5.	Kacang Hijau	68,11	20,50	-69,90
6.	Ubi Kayu	1.996,88	1.341,92	-32,80
7.	Ubi Jalar	726,38	484,14	-33,35
Jumlah Luas Tanam		**80.480,81**	**66.848,42**	**-16,94**

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura pada Tahun 2026, diantaranya sebagai berikut :

1. Perbaikan infrastruktur pertanian salah satunya dengan melakukan optimalisasi lahan pertanian
2. Peningkatan kemampuan SDM Pertanian dengan melakukan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian serta meningkatkan akses ke informasi dan teknologi pertanian,
3. Peningkatan akses penggunaan benih bersertifikat dan pupuk yang berkualitas

Gambar 3.23

Tren Nilai Tukar Petani (NTP) 2020-2025



Sumber Data : Dinas Pangan TPH Prov.Kaltim, 2025

Berdasarkan Tabel 85, diketahui bahwa :

1. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan tahun 2025 sebesar 102,17 Indeks, sedangkan tahun 2024 sebesar 102,94 Indeks sehingga Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan mengalami penurunan sebesar 0,75%.
2. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura tahun 2025 sebesar 118,27 Indeks, sedangkan tahun 2024 sebesar 113,63 Indeks sehingga Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura mengalami peningkatan sebesar 4,08%.

Kondisi ini dipengaruhi diantaranya adanya perluasan areal tanam tanaman pangan dan hortikultura terutama di daerah yang berpotensi tinggi, peningkatan

penggunaan benih unggul bersertifikat yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit dan pemberian bantuan alat mesin pertanian dan sarana pendukung pertanian, serta pendampingan pasca panen kepada petani dan pekebun.

5. Sektor Kehutanan

Berdasarkan data realisasi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, realisasinya telah melebih target sesuai pada tabel berikut :

Tabel 3.29
PDRB Sektor Kehutanan Tahun 2025

No	Unit Usaha	PDRB sektor Kehutanan Tahun 2025		
		Realisasi (m^3)	Harga Berlaku	Total Rp.
1	Hutan Alam	890.558,31	1.700.000,00	8.582.513.291.000
2	Hutan Tanaman	3.867.671,85		
3	Non Kehutanan	290.307,07		
Jumlah		**5.048.537,23**		

Sumber Data : Dinas Kehutanan Prov.Kaltim, 2025

Tahun 2025 LPE sektor kehutanan adalah -0,49. Kondisi ini dikarenakan adanya penurunan produksi hasil hutan kayu dan belum maksimalnya pemanfaatan hasil hutan lainnya selain kayu. Untuk Tahun 2026 untuk mendorong pertumbuhan LPE sektor kehutanan perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan multi usaha kehutanan dalam rangka optimalisasi pemanfatan hutan, mendorong optimalisasi hilirisasi produk hasil hutan.

6. Sub Setor Perkebunan

LPE sektor perkebunan sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi komoditas perkebunan, karena produksi merupakan komponen utama pembentuk nilai tambah dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). LPE sub sektor perkebunan Tahun 2025 adalah 9,40% dan meningkat signifikan dari tahun sebelumnya Tahun 2024 yang mencapai 1,77%.

Kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sub sektor perkebunan dipengaruhi oleh produksi dan harga jual komoditi Perkebunan yang meliputi;

1. Produksi

Kenaikan LPE dipengaruhi oleh meningkatnya produksi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan lada. Hal ini didukung oleh penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, penggunaan benih unggul, serta peningkatan praktik pemeliharaan tanaman oleh pekebun. Data produksi komoditi perkebunan tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 258.126 ton.

2. Harga komoditi

Peningkatan harga komoditas perkebunan di pasar domestik maupun internasional turut mendorong kenaikan nilai tambah sektor perkebunan. Harga yang lebih baik meningkatkan pendapatan pekebun dan memperbesar kontribusi sektor ini terhadap PDRB. Berdasarkan informasi dari BPS harga jual kakao naik sampai 70% karena tingginya permintaan dari luar negeri demikian juga halnya

harga komoditi kelapa sawi, dimana rata-rata harga TBS selama tahun 2025 mencapai Rp. 3.233,39,- naik 18,52% dari rata-rata tahun 2024 Rp. 2.728,24,-.

Tabel 3.30
Jumlah Komoditi Tahun 2024-2025

No.	Komoditi	Produksi (Ton)	
		2024	2025
I	**Tanaman Tahunan**		
1	Kelapa Sawit	19.730.667	19.999.894
2	Karet	81.939	70.906
3	Kakao	969	1.030
4	Kelapa Dalam	9.115	9.822
5	Lada	5.667	4.797
6	Kopi	125	124
7	Aren	504	571
8	Kemiri	208	175
9	Panili	2	3
10	Cengkeh	2	1
11	Pala	5	5
12	Sagu	10	12
13	Kelor	1	-
II	**Tanaman Semusim**		
1	Tebu	1	-
Jumlah		**19.829.215**	**20.087.341**

7. Dari aspek pelayanan perizinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil Konferensi Pers yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI pada hari Kamis, 15 Januari 2026 realisasi investasi pada tahun 2025 di Provinsi Kalimantan Timur untuk realisasi investasi pada Sektor Non Migas dan Non Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 59,29 triliun rupiah.



TAHUN	TARGET INVESTASI (Rp. Triliun)	REALISASI INVESTASI PMA (Rp. Triliun)	REALISASI INVESTASI PMDN (Rp. Triliun)	TOTAL PMA & PMDN (Rp. Triliun)	CAPAIAN (%)
2021	32,53	7,19	24,43	31,63	97,23
2022	35,00	10,76	24,58	35,34	101,71
2023	35,67	13,92	35,67	49,59	139,02
2024	36,06	15,77	34,09	49,86	138,27
2025	37,14	12,41	46,88	59,29	159,64

Dari data tersebut diatas, terjadi peningkatan realisasi investasi dari Tahun 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh beberapa faktor, seperti :

1. Dalam rangka mendukung pengembangan hilirisasi industri di Kalimantan Timur dan memberikan gambaran arah penanaman modal Kaltim kepada calon investor, DPMPTSP Provinsi Kaltim di tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Workshop Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Sosialisasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah, Bimbingan Teknis Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO), Bimbingan Teknis Potensi Investasi Regional (PIR), penyusunan Kajian Grand Desain Investasi Kalimantan Timur, serta penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi mitra IKN.
2. Pemberian insentif bagi investor yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada pemerintah provinsi dalam bentuk insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan
3. Optimalisasi upaya promosi investasi melalui kegiatan pertemuan Mahakam Investment Forum (MIF), High Level Meeting Regional Investor Relations Unit (HLM RIRU), Sosialisasi Permeninvest Nomor 3 Tahun 2025 di Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu, serta Coaching Clinic;
4. Kerjasama dengan Mitra Swasta: Kolaborasi dengan mitra swasta dan pihak ketiga (seperti KADIN) membantu memperluas jangkauan promosi, terutama melalui pelaksanaan webinar, forum investasi, dan pameran investasi;
5. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai dampak dari sosialisasi dan bimtek yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

Faktor penghambatnya :

1. Kurangnya Minat Investor Asing: Meskipun promosi dilakukan secara gencar, minat dari investor asing belum menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya informasi dan sinkronisasi terkait data-data yang ada di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, ketidaksiapan dan kurangnya ketersediaan luas lahan serta sarana atau fasilitas penunjang, juga ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi keputusan investasi;
2. Meskipun telah rutin diselenggarakan sosialisasi dan bimtek terkait pelaporan LKPM, masih cukup banyak pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal
3. Kondisi Jalan dan Transportasi, sarana telekomunikasi, keterbatasan teknologi dan fasilitas pendukung lainnya yang masih belum memadai

menjadi hambatan serius bagi investor yang perlu mengakses lokasi investasi dengan lancar.

4. Industri hilirisasi sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi dan ketidakpastian pasar dibandingkan dengan ekspor bahan mentah yang lebih stabil, sehingga mengurangi minat investor untuk melakukan diversifikasi sektor.

Upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2026

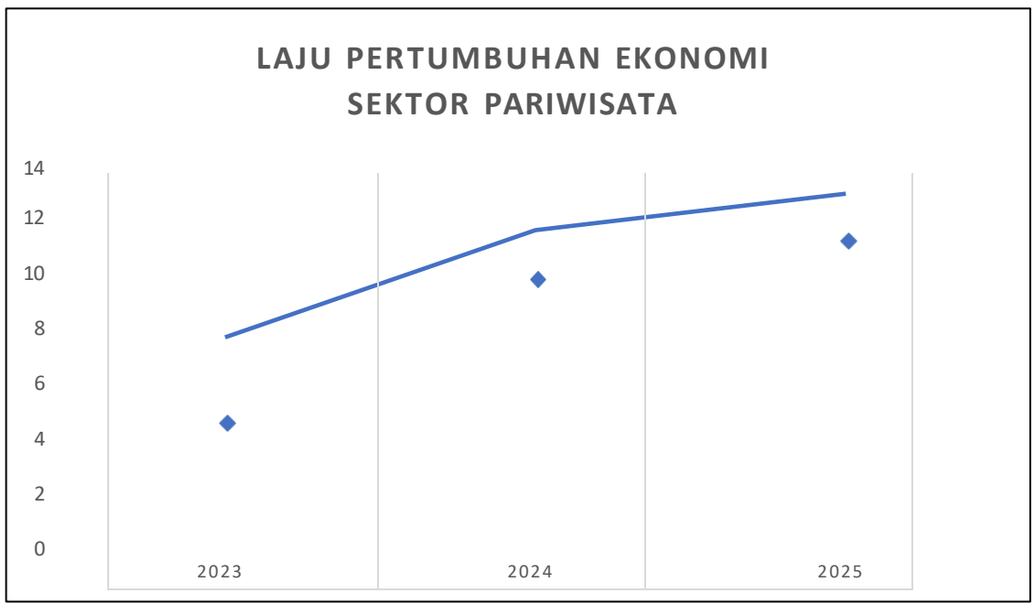
1. Melakukan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur sebagai master plan dalam penyusunan arah kebijakan investasi untuk menghasilkan pemetaan potensi dan peluang investasi yang akurat, terintegrasi, dan siap ditawarkan
2. Peningkatan Kualitas Konten Promosi
   Mengoptimalkan kualitas materi promosi dengan data yang lebih akurat dan menarik, untuk meningkatkan minat investor potensial;

8. Sektor Pariwisata

Pada indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata, besaran nilai realisasi diambil dari besaran nilai pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Lapangan usaha tersebut diambil sebagai nilai kontribusi sektor pariwisata karena lapangan usaha tersebut merepresentasikan pengeluaran wisatawan yang dominan, mudah diukur secara statistik, serta memberikan gambaran yang kuat tentang aktivitas ekonomi pariwisata.

BPS menggunakan *Tourism Satellite Account (TSA)* untuk menghitung kontribusi pariwisata, secara eksplisit memasukkan pengeluaran wisatawan untuk akomodasi dan jasa makan dan minum sebagai komponen penting.

Gambar 3.24
Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata



Pada tahun 2025, indikator laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan tertinggi diantara capaian kinerja berdasarkan lapangan usaha dengan realisasi mencapai 13,03 melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 7,41. mengalami pertumbuhan tertinggi Jika dilihat dari tren beberapa tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2023 realisasi tercatat sebesar 7,69, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 11,67, dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi 13,03.

Keberhasilan tersebut didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain :

1. Penguatan kebijakan dan perencanaan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan arah pembangunan ekonomi daerah;
2. Peningkatan promosi dan daya tarik destinasi melalui berbagai kegiatan pemasaran dan event strategis;
3. Penambahan infrastruktur dan layanan pendukung wisata yang meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas;
4. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat turut memperkuat ekosistem pariwisata;
5. Partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan.

Faktor-faktor penghambat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Daya beli dan jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif;
2. Infrastruktur dan aksesibilitas destinasi yang belum optimal;

3. Kapasitas manajerial dan kompetensi SDM yang terbatas;
4. Kualitas layanan dan standar usaha yang belum merata.

Upaya Tahun 2026 :

Sebagai tindak lanjut untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, diperlukan upaya perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi :

1. Meningkatkan promosi destinasi secara terpadu dan berkelanjutan, memperluas segmentasi pasar wisata, serta memperkuat penyelenggaraan event daerah guna menjaga stabilitas kunjungan sepanjang tahun;
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk peningkatan aksesibilitas destinasi, perbaikan fasilitas pendukung, dan pengembangan konektivitas transportasi wisata;
3. Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan peningkatan kompetensi SDM guna memperkuat daya saing dan produktivitas sektor;
4. Mendorong penerapan standar pelayanan usaha, sertifikasi usaha pariwisata, serta pelatihan peningkatan kualitas layanan bagi pelaku usaha akomodasi dan kuliner.

Sasaran 6 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin

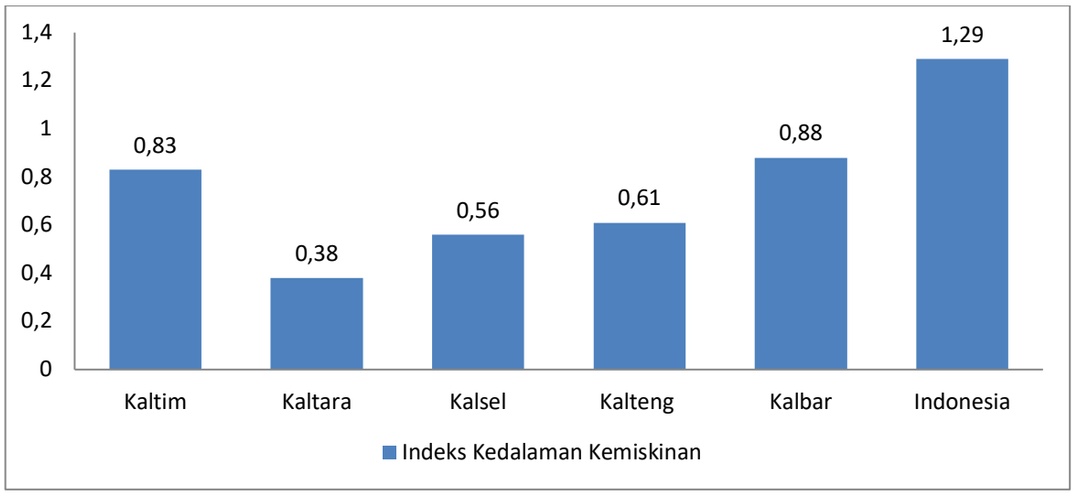
Indikator : Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, serta penciptaan lapangan usaha produktif yang berkelanjutan. Guna mengukur capaian kinerja dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan yang secara perhitungan dilakukan oleh BPS. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang mana semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan, berdasarkan target tahun 2025 yang sebesar 0,74 %, dapat teralisasi 0,83 % atau dengan persentase capaian 89,16%, dan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan berdasarkan target tahun 2025 yang sebesar 0,12 %, dapat teralisasi 0,18 % atau dengan persentase capaian 66,67 %.

Gambar 3.25

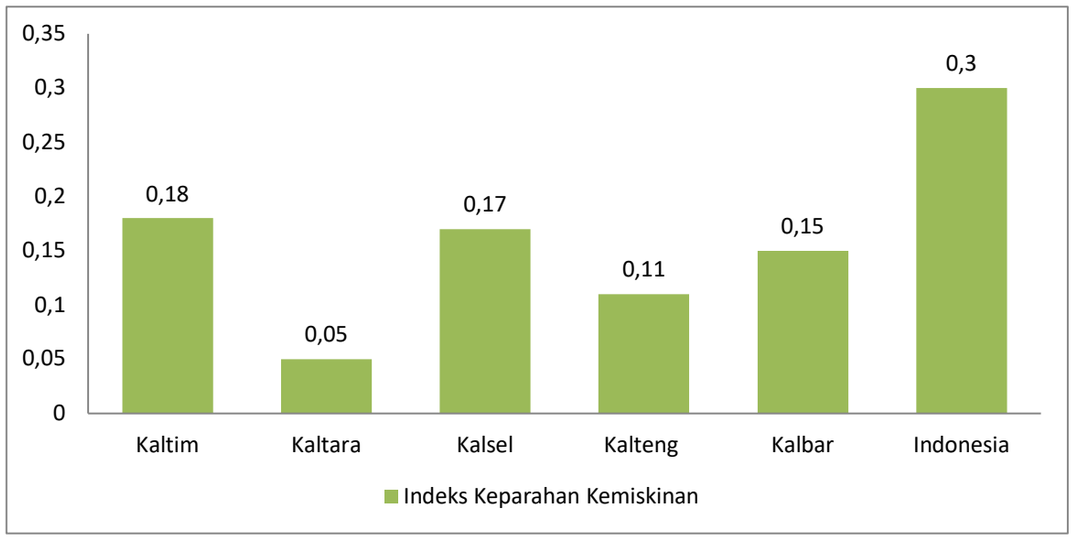
Indeks Kedalaman Kemiskinan 2025



Sumber data : BPS, 2025

Gambar 3.26

Indeks Keparahan Kemiskinan 2025



Sumber data : BPS, 2025

Target sasaran penerima bantuan masyarakat miskin tahun 2025 menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) dengan mengacu Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) digunakan sebagai basis data utama untuk menyalurkan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Jika dikaitkan dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2025, maka capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan diantaranya dipengaruhi oleh :

1. Program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, tetap dilakukan walaupun terdapat penurunan jumlah orang yang menerima bantuan, dimana pada tahun 2024 sebanyak 8.764 orang, di 2025 menjadi 5.795 orang. Bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan provinsi diberikan kepada :
   1) Penyandang disabilitas: 4.944 orang
   2) Veteran 128 orang
   3) Janda Veteran 245 orang
   4) lansia terlantar 478 0rang
2. Terlaksananya pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Ekonomi produktif (UEP) dengan jumlah sebanyak 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana jumlah ini meningkat dari tahun 2024 yang sebanyak 1.000 KPM.

Tabel 3.31

Pemberian Bantuan UEP per Jenis Bantuan tahun 2025

No	Jenis Bantuan	JUMLAH KPM
1	Makanan	**240**
2	Minuman	**305**
3	Gorengan	**280**
4	Sembako	**320**
5	Pembuatan Kue	**245**
6	Ternak Ayam	**110**
		1500

Sumber data : Dinsos, 2025

3. Meningkatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki badan hukum, dimana pada tahun 2024 sebanyak 327 BUMDes menjadi 417 BUMDes di tahun 2025. BUMDes yang memiliki badan hukum memiliki kelebihan diantaranya, menjadi prioritas dalam pemberian bantuan dari Pemerintah, memiliki kemudahan akses ke sumber pendanaan, meningkatkan kepercayaan mitra dan lain sebagainya, sehingga kedepan akan didorong lebih banyak lagi Bumdes yang memiliki badan hukum, yang harapannya melalui Bumdes yang berkembang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat lokal maupun memperluas cakupan pemasaran produk lokal desa sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 3.32

BUMDes berbadan hukum per Kabupaten / Kota tahun 2024 - 2025

No	Kabupaten	2024	2025
1.	Berau	39	37
2.	Kutai Barat	36	43
3.	Kutai Kartanegara	109	133
4.	Kutai Timur	48	67
5.	Paser	59	72
6.	Penajam Paser Utara	19	21
7.	Mahakam Ulu	17	44
Jumlah		327	417

Sumber data : DPMPD Prov.Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan kapasitas BUMDes, diantaranya melalui pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi pengelola BUMDes dengan fokus pada Pelatihan Perencanaan Bisnis, Pengelolaan Keuangan dan Digital Marketing Bagi Pengelola BUMDes di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian juga telah dilakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam pengembangan usaha BUMDes (Berupa mesin penggiling padi, mesin pencacah kompos, mesin pengolah coklat) serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna yang digunakan untuk meningkatkan hasil produk unggulan Desa.

Tabel 3.33

Fokus Pembinaan Produk Unggulan Desa tahun 2025

Desa	Nama Produk Unggulan Desa
Uko	Sambal Takalo
Lung Anai	Coklat LA
Sepaso Timur	Amplang Bengalon
Tepian Batang	Kerajinan Purun
Selangkau	Pruti Books
Argo Mulyo	Batik Semoy

Sumber data : DPMPD Prov.Kaltim

4. Telah terbit Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 48 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan kawasan kumuh, dimana penerima bantuan tidak lagi dibatasi hanya berada di wilayah kawasan kumuh dengan luas 10 - 15 Ha dan besaran bantuan tidak lagi dengan nilai maksimal Rp. 25.000.000,00, namun akan disesuaikan dengan harga material masing-masing daerah di Kalimantan Timur.
5. Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi penduduk miskin / rentan miskin, guna mengurangi kantong kawasan kumuh tahun 2025 dapat teralisasi sesuai target, yaitu :

Tabel 3.34

Penanganan Kawasan Kumuh dan Perbaikan RTLH tahun 2025

No	Kegiatan	Target	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	48,58 hektar	115,92 hektar
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1000 unit	1000 unit

Sumber data : Dinas PUPR Prov.Kaltim

Adapun rincian realisasi dari penanganan kawasan kumuh antara lain:

a. Kawasan Gg. Buaya dan Pasar Lama, Kab. Penajam Paser Utara, 8.81 Ha
b. Kawasan Kerok Laut dan Kayu Api, Kab. Penajam Paser Utara, 6.36 Ha
c. Kawasan Tanjung Harapan, Kab. Penajam Paser Utara, 9.31 Ha
d. Kawasan Simpang Raya-Sumber Sari (Kutai Barat II), Kab. Kutai Barat, 47.26 Ha
e. Kawasan Melak Ulu-Melak Ilir (Kutai Barat III), Kab. Kutai Barat, 11.72 Ha
f. Kawasan Kel. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, 2.77 Ha
g. Kawasan Long Ikis, Kab. Paser, 10.13 Ha
h. Kawasan Muara Komam, Kab. Paser, 11.91 Ha
i. Kawasan Tg. Limau Gn. Elai & Bontang Baru, Kota Bontang, 7.65 Ha

Target dan realisasi kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tahun 2025 tersebar di 10 Kabupaten / Kota, dengan rincian capaian yang ditangani pada tiap Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

a. Kota Samarinda : 100 Unit
b. Kota Balikpapan : 50 Unit
c. Kota Bontang : 100 Unit
d. Kabupaten Kutai Kartanegara : 100 Unit
e. Kabupaten Kutai Barat : 100 Unit
f. Kabupaten Mahakam Ulu : 50 Unit
g. Kabupaten Penajam Paser Utara : 150 Unit
h. Kabupaten Paser : 150 Unit
i. Kabupaten Kutai Timur : 100 Unit
j. Kabupaten Berau : 100 Unit

Dalam berjalannya upaya pengentasan kemiskinan, terdapat beberapa hal yang masih menjadi faktor penghambat, diantaranya :

1. Efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kesiapan dan kelengkapan data usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota masih belum optimal, antara lain ditandai dengan kurangnya keaktifan dalam melaporkan pembaruan data penerima bantuan, khususnya terkait penerima

yang meninggal dunia atau pindah domisili. Selain itu, ketelitian petugas pengelola data masih perlu ditingkatkan, karena masih ditemukan data ganda serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak aktif. Di samping itu, belum seluruh penyandang disabilitas terakomodasi dalam data pada aplikasi SIDABEBAGI.

3. Beberapa indikator kekumuhan yang memberikan skor tinggi pada suatu kawasan sering kali menghadapi kendala dalam penanganannya. Salah satu contoh adalah indikator penyediaan air minum, yang sering menjadi penyumbang utama tingginya skor kumuh. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh belum tersedianya sumber air baku yang memadai di kawasan tersebut, sehingga upaya peningkatan layanan air minum tidak dapat dilakukan secara optimal.
4. Adanya penurunan status desa maju di tahun 2025 dikarenakan metode penetapan status desa yang berubah dari menggunakan Indeks Desa Membangun yang menggunakan 3 komponen penilaian (sosial, ekonomi,lingkungan), menjadi menggunakan Indeks Desa yang menggunakan 6 komponen penilaian (Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesbilitas, Tata Kelola Pemerintahan Desa).

Tabel 3.35

Status Desa di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2025

Tahun	Status Desa				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2023	209	364	263	5	0
2024	262	380	195	4	0
2025	262	342	233	4	0

Sumber data : DPMPD Prov.Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam rangka pengentasan kemiskinan, sehingga guna mengatasi kendala yang ada, upaya perbaikan ditahun berikutnya yang akan dilakukan yaitu :

1. Memfasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten dalam memasarkan produk unggulan desa dengan fokus fasilitasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

Tabel 3.36

Rencana Fasilitasi Produk Unggulan Desa di Kabupaten Kukar

Tahun 2026

No	Lokasi	Potensi Pengembangan Kawasan	Produk Unggulan
1	Desa Semangko	Agroindustri	Pertanian, Perikanan, Pariwisata
2	Desa Sebuntal	Agroindustri	Pertanian, Perikanan, Pariwisata
3	Desa Santan Ulu	Agroindustri	Pertanian, Perikanan, Pariwisata
4	Desa Perangat Baru	AGROWISATA PIR LESTARI	Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
5	Desa Makartai	AGROWISATA PIR LESTARI	Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
6	Desa Perangat Selatan	AGROWISATA PIR LESTARI	Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
7	Desa Bunga Putih	AGROWISATA PIR LESTARI	Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
8	Desa Sambera Baru	AGROWISATA PIR LESTARI	Perkebunan, Pertanian, Pariwisata
9	Desa Embalut	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
10	Desa Bangun Rejo	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
11	Desa Manunggal Jaya	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
12	Desa Karang Tunggal	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
13	Desa Bukit Raya	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
14	Desa Tanjung Batu	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
15	Desa Loa Lepu	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
16	Desa Kartabuana	AGROEKOWISATA SEPARI SEJAHTERA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
17	Desa Buana Jaya	AGROEKOWISATA SEPARI SEJAHTERA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata

18	Desa Bukit Pariaman	AGROEKOWISATA SEPARI SEJAHTERA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
19	Desa Suka Maju	AGROEKOWISATA SEPARI SEJAHTERA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
20	Desa Separi	AGROEKOWISATA SEPARI SEJAHTERA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
21	Desa Manunggal Daya	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
22	Desa Sumber Sari	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
23	Desa Mekar Jaya	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
24	Desa Bunga Jadi	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
25	Desa Panca Jaya	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
26	Desa Sidomukti	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata
27	Desa Cipari Makmur	PANGAN LESTARI BENUA TUHA	Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pariwisata

Sumber data : DPMPD Prov.Kaltim

Tabel 3.37

Rencana Fasilitasi Produk Unggulan Desa di Kabupaten Berau

Tahun 2026

No	Lokasi	Potensi Pengembangan Kawasan	Produk Unggulan
1	Kampung Pulau Derawan	Agrowisata Perikanan	Perikanan dan Pariwisata
2	Kampung Tanjung Batu	Agrowisata Perikanan	Perikanan dan Pariwisata
3	Kampung Teluk Semanting	Agrowisata Perikanan	Perikanan dan Pariwisata

4	Kampung Kasai	Agrowisata Perikanan	Perikanan dan Pariwisata
5	Kampung Pegat Batumbuk	Agrowisata Perikanan	Perikanan dan Pariwisata

Sumber data : DPMPD Prov.Kaltim

2. Memfasilitasi dalam penyelesaian batas desa dalam rangka meningkatkan pembangunan kawasan perdesaan yaitu bahwa Pembangunan kawasan perdesaan memerlukan kerjasama antar desa (inter-desa) dalam mengembangkan pusat pertumbuhan terpadu.
3. Upaya peningkatan koordinasi pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan rapat koordinasi lintas pengampu kepentingan serta para pendamping. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal.
4. Membentuk Tim Data yang bertugas melakukan verifikasi data usulan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Selain itu, SOP Bantuan Sosial Tunai (BST) Individu perlu di reviu sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, sehingga pemutakhiran data bersama Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat lebih cepat dan menjadi dasar dalam penetapan Keputusan Gubernur.
5. Pada pelaksanaan BST Individu Tahun 2026, prioritas diberikan kepada penyandang disabilitas bedridden, yaitu individu yang hanya dapat beraktivitas di tempat tidur dan seluruh aktivitas hariannya bergantung pada bantuan orang lain.
6. Melakukan relokasi rumah di lokasi-lokasi bukan fungsi permukiman dan melakukan kajian teknis untuk pemanfaatan sumber air baku alternatif, seperti air permukaan, air hujan (rainwater harvesting), atau air tanah dangkal yang memenuhi standar kualitas sebagai upaya pengembangan sumber air baku alternatif.

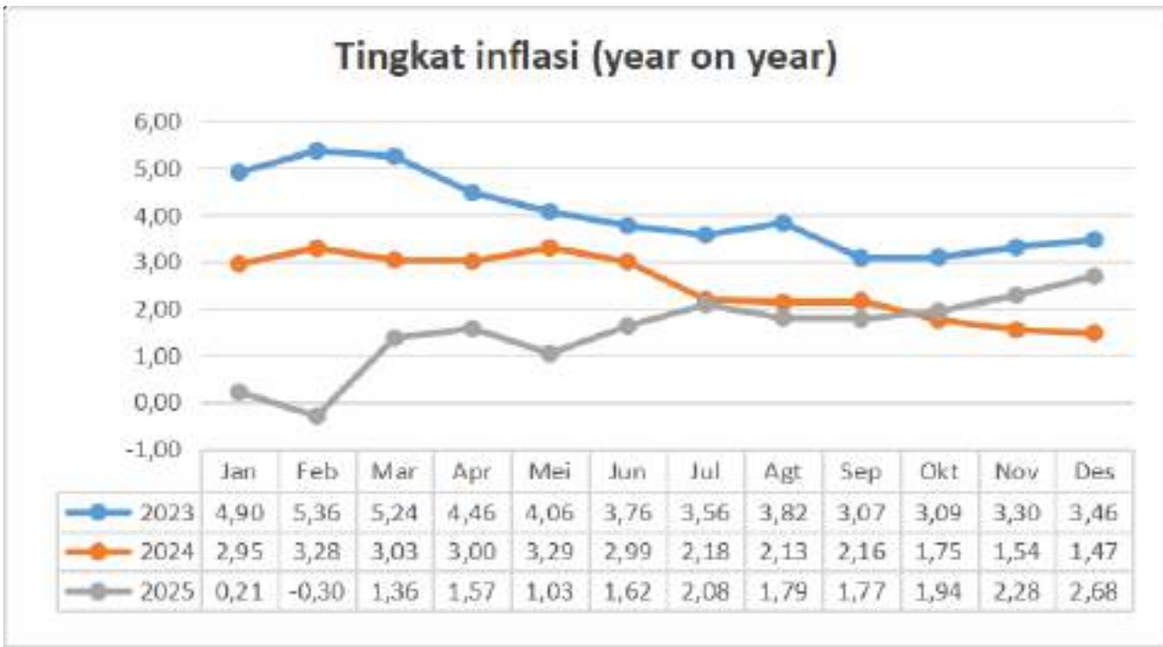
a. Tingkat Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika inflasi meningkat , maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Sesuai target yang ditetapkan yaitu 2,5±1 (2,5% dengan deviasi sebesar 1,0%), maka tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar 2,68 persen berada dalam rentang target yang ditetapkan 1,5–3,5 persen atau (2,5 ± 1 persen).Posisi realisasi inflasi yang berada di sekitar nilai tengah target menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih dapat dikelola secara terkendali tanpa menimbulkan risiko deflasi maupun lonjakan harga yang berlebihan. Dibandingkan dengan realisasi inflasi nasional sebesar

2,92%, maka inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar 2,68 % masih lebih rendah. Capaian ini menunjukkan bahwa inflasi Kalimantan Timur Tahun 2025 tidak hanya memenuhi target daerah, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, sekaligus mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang stabil dan berdaya tahan terhadap berbagai dinamika eksternal.

Gambar 3.27



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2023	4,90	5,36	5,24	4,46	4,06	3,76	3,56	3,82	3,07	3,09	3,30	3,46
2024	2,95	3,28	3,03	3,00	3,29	2,99	2,18	2,13	2,16	1,75	1,54	1,47
2025	0,21	-0,30	1,36	1,57	1,03	1,62	2,08	1,79	1,77	1,94	2,28	2,68

Sumber data : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dibandingkan dengan capaian 2 tahun sebelumnya, inflasi Kalimantan Timur Tahun 2025 menunjukkan tren kenaikan yang terukur dan terkendali. Pada Tahun 2024, inflasi tercatat relatif rendah sebesar 1,47 persen, sementara Tahun 2023 inflasi berada pada level 3,46 persen, mendekati batas atas target nasional. Dengan demikian, inflasi Tahun 2025 berada pada posisi moderat, lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024 namun lebih rendah dari tekanan inflasi yang terjadi pada Tahun 2023.

Faktor pendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mencapai Tingkat Inflasi Tahun 2025 sesuai target yang ditetapkan adalah melalui implementasi kebijakan strategi 4K, yaitu : Strategi Keterjangkauan Harga, Strategi Ketersediaan Pasokan, Strategi Kelancaran Distribusi dan Strategi Komunikasi Efektif. Strategi 4K yang diimplementasikan adalah sebagai berikut :

1. Harga Komoditas Strategis yang Relatif Stabil

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar secara rutin menjadi faktor pendorong dalam menjaga daya beli masyarakat serta menahan laju kenaikan harga komoditas strategis pada periode rawan inflasi. Keberadaan Kios SIGAP sebagai instrumen stabilisasi harga di lapangan juga memperkuat efektivitas intervensi harga, sehingga masyarakat memiliki alternatif akses terhadap komoditas dengan harga yang lebih terkendali.

2. Ketersediaan Pasokan yang Terkendali

Faktor pendorong utama dalam aspek ketersediaan pasokan adalah konsistensi pelaksanaan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis di pasar dan distributor, serta pemetaan surplus dan defisit antar kabupaten/kota. Langkah ini meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan dan memungkinkan koordinasi distribusi yang lebih terarah.

Selain itu, terjalinnya kerja sama dengan daerah sentra produksi dan perdagangan antar pulau turut menjaga kontinuitas pasokan bahan pokok, sehingga risiko kelangkaan yang dapat memicu lonjakan harga dapat diminimalkan

3. Upaya pengendalian distribusi yang berjalan secara berkelanjutan

Pemantauan jalur distribusi, dukungan subsidi ongkos angkut, serta optimalisasi mekanisme distribusi bahan pokok membantu menjaga kelancaran arus barang antarwilayah. Upaya ini berkontribusi dalam menekan disparitas harga dan mengurangi risiko gejolak akibat hambatan logistik. Koordinasi lintas sektor dalam memastikan ketersediaan bahan bakar dan kelancaran transportasi juga menjadi faktor pendukung stabilitas distribusi.

4. Koordinasi Kebijakan yang Konsisten dan Terarah

Pelaksanaan High Level Meeting dan rapat koordinasi secara rutin meningkatkan konsistensi kebijakan pengendalian inflasi antar pemangku kepentingan. Edukasi publik dan himbauan kepala daerah turut membantu menjaga ekspektasi inflasi masyarakat serta mencegah perilaku konsumsi yang berpotensi memicu gejolak harga.

Faktor Penghambat antara lain :

1. Gejolak harga masih terjadi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional/musiman meskipun intervensi telah dilakukan.
2. Ketepatan waktu intervensi harga di beberapa wilayah masih perlu ditingkatkan.
3. Ketergantungan pasokan dari luar daerah masih relatif tinggi sehingga stabilitas harga sensitif terhadap gangguan eksternal.
4. Pemanfaatan data pasokan untuk pengambilan keputusan distribusi belum sepenuhnya optimal.
5. Disparitas harga antarwilayah masih terjadi akibat efisiensi logistik yang belum merata.
6. Koordinasi dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data terintegrasi.

Pengelolaan ekspektasi masyarakat pada periode rawan masih perlu diperkuat.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain :

Strategi Keterjangkauan Harga

Melanjutkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar secara terjadwal dan mengoptimalkan peran Kios SIGAP sebagai instrumen stabilisasi harga.

Mengoptimalkan pemanfaatan data hasil monitoring sebagai dasar koordinasi distribusi dan pengambilan kebijakan.

Strategi Kelancaran Distribusi

Melanjutkan monitoring harga dan pasokan secara rutin, pemetaan surplus/defisit antar wilayah, serta penguatan kerja sama pasokan dengan daerah sentra produksi.

Mengoptimalkan pemanfaatan data hasil monitoring sebagai dasar koordinasi distribusi dan pengambilan kebijakan.

Strategi Kelancaran Distribusi

Melanjutkan pemantauan jalur distribusi, subsidi ongkos angkut, serta pemeliharaan akses distribusi yang telah ada.

Menguatkan koordinasi distribusi lintas sektor melalui mekanisme yang telah berjalan.

Strategi Komunikasi Efektif

Melanjutkan pelaksanaan High Level Meeting dan rakor secara konsisten dengan pemanfaatan data monitoring yang lebih optimal.

Melanjutkan edukasi publik dan himbauan kepala daerah serta tokoh masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar

Indikator : Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur dasar di Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta pada memberikan dukungan yang baik terhadap tumbuhnya pusat-pusat produksi pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan di Kalimantan Timur. Ketersediaan perumahan yang layak huni, air baku dan air minum bersih, serta listrik, dan disertai dengan infrastruktur jalan dan jembatan, serta fasilitas perhubungan pelayaran, menjadi perhatian penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang termuat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dikuatkan oleh infrastruktur yang memadai, menjadi denyut nadi transformasi ekonomi hijau Kalimantan Timur. Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Rangkaian pembangunan yang terintegrasi sangat diharapkan realisasinya sehingga setiap kawasan ekonomi dapat terhubung dan saling mendukung. Tak hanya sampai disana, pemenuhan infrastruktur dasar ini melalui Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) tentu akan mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih baik.

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan cara mengukur bagaimana kepuasan masyarakat atas pembangunan yang telah dilakukan. Nilai Indeks

Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Provinsi Kalimantan Timur diperoleh dengan pembagian bobot 3 (tiga) perangkat daerah yang berkontribusi pada pencapaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), antara lain Dinas Perhubungan dengan bobot 15 %, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat dengan bobot 70 % dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan bobot 15 %.

Tabel 3.38

IKLI 2023 - 2025

PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	BOBOT	2023				2024				2025		
			TARGET	SKOR	CAPAIAN	SKOR	TARGET	SKOR	CAPAIAN	SKOR	TARGET		SKOR
DISHUB	IKLI PERHUBUNGAN	15	79,18	1.187,70	73,71	1.105,67	84,44	1.266,60	79,27	1.189,05	87,52	87,62	1.314,30
PUPR & PERA	IKLI PUPR	70	69,43	4.860,31	69,43	4.860,31	71,91	5.033,78	75,17	5.261,62	85,78	85,78	6.004,60
ESDM	Persentase Kelurahan/ Desa yang teraliri listrik 24 jam	15	73,71	1.105,67	95,18	1.427,70	95,70	1.435,50	95,89	1.438,35	96,40	97,09	1.456,35
		100		7.153,68		7.393,68		7.735,88		7.889,03			8.775,25
		Skor/100	71,54		73,94		77,36		78,89		87,75		
		IKLI	7,26		7,39		7,74		7,89		8,78		
		Kategori			Baik								

Nilai Indeks	Kategori
1-4	Buruk
≥5-6	Sedang
≥7-8	Baik
≥9-10	Sangat Baik

Target RPD	8,38
Capaian 2025	8,78

Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah 8,78 dengan kategori Baik, melebihi target yang ditentukan 8,38 dengan capaian 104,77 %. Dalam 3 tahun terakhir pencapaian mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2024 realisasi 7,89 dan tahun 2023 7,39.

Dalam kontribusi pencapaian masing-masing Perangkat Daerah memiliki indikator yang menunjang dengan pencapaian antara lain :

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dinas Perhubungan

Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah 87,52 dari target 87 dengan persentase capaian 100,59%. Realisasi IKLI Perhubungan mengalami peningkatan dari 3 (tiga) tahun terakhir, tahun 2024 realisasi 84,19 dan tahun 2023 realisasi 73,71%.

Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan adalah komposit dari Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan Angkutan Antar

Kota Dalam Provinsi (AKDP); Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1000 Keberangkatan Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP dan Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian. Dimana mengabungkan 3 (tiga) program yang ada, antara lain Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran dan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian dengan rincian pembobotan sebagai berikut :

Tabel 3.39

Pembobotan Indikator dalam pencapaian IKLI Perhubungan

SEKTOR	INDIKATOR	FORMULASI	BOBOT	2025		Capaian 2025	
				TARGET (%)	SKOR	CAPAIAN (%)	SKOR
LLAJ	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	Pembobotan Ratio Kecelakaan di Jalan Provinsi, V/C Ratio, Ratio Trayek AKDP dan Capaian SPM Terminal	5	86.00	5,590.00	86.01	5,590.65
	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 ribu Keberangkatan	Persentase Capaian Penurunan Jumlah Kecelakaan AKDP/1.000 Keberangkatan	0	99.50	995.00	100.50	1,005.00
Pelayaran	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	Trayek Eksisting/Target Trayek SDP (Kebutuhan Trayek SDP)	20	98.00	1,960.00	97.80	1,956.00
Pengembangan & Perkeretaapian	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	Persentase Progres Penetapan Jaringan Perkeretaapian	5	45.00	225.00	40.00	200.00
			100				8,751.65
	IKLI DINAS PERHUBUNGAN				**87**		**87.52**

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Bobot IKLI Perhubungan sebesar 15% terhadap IKLI Provinsi Kalimantan Timur dimana IKLI Perhubungan mempunyai *crosscutting* program dengan Dinas Pekerjaan umum terkait dengan Infrastruktur Jalan.

Beberapa hal yang dilakukan dalam upaya pencapaian antara lain :

1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi melalui Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi.

2. Melakukan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan melihat Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji, dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.40
Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji

NO	URAIAN	NILAI KELAIKAN/TAHUN		
		Bobot	2025	Skor
1	Prasarana UPPKB	40	86.11	3444
2	Prasarana Terminal	10	77	770
3	Sarana Angkutan (Rampchek)	40	180	7200
4	Perusahaan Angkutan (SMK)	10	70	700
		100		121.1

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan pada tahun 2025, tercatat 17 badan usaha telah memperoleh izin penyelenggaraan.
4. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi melalui Perencanaan Multimoda yang tersedia dengan pekerjaan sebagai berikut :

- Studi Review Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Kalimantan Timur.
- Kajian Perencanaan Teknis Layanan Angkutan Umum Massal Koridor Sanga-Sanga Samarinda.
- Sosialisasi Multimoda.

5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebanyak 216 Unit.
6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sebanyak 320 Unit.
7. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dengan melihat Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal).
8. Penerbitan Izin Trayek secara elektronik beserta inspeksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan sebanyak 96 Unit.

9. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi Berupa Dokumen Data dan Informasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas antar Kab/Kota Dalam Wilayah Provinsi
10. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas terhadap 113 Badan Usaha, sebanyak 70 Dokumen Rekomendasi Perizinan Baru dan 43 Dokumen Rekomendasi Perizinan Penyesuaian/Migrasi.
11. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional melalui Rehabilitasi Dermaga Sungai Tering Kalimantan Timur.
12. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian melalui komulatif pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 hingga tahun 2025, pekerjaan yang dilaksanakan yaitu :
    - Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Kalimantan Timur dengan bobot dokumen 20% yang telah dilaksanakan pada tahun 2023
    - Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian dengan bobot dokumen 10% yang telah dilaksanakan pada tahun 2024
    - Adanya Pergub RIPKA dengan bobot dokumen sebesar 10% yang telah ada pada tahun 2024
    - Studi FS Trase 1 Perkeretaapian dengan bobot 5% yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025 namun ditunda karena efisiensi anggaran.

Keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan tentukan beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Pemasangan dan pengadaan fasilitas keselamatan jalan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga angka kecelakaan di jalan provinsi.
2. Kondisi jalan provinsi yang laik dipasang fasilitas perlengkapan jalan.
3. Adanya upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan angkutan umum dengan rutin melakukan kegiatan *rampcheck* dan sosialisasi ke perusahaan angkutan.
4. Perlunya menumbuhkan pemahaman akan kesadaran pentingnya penerapan tata kelola keselamatan lalu lintas salah satunya yaitu dengan mengadakan kegiatan forum keselamatan.
5. Adanya kewenangan provinsi untuk Angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten/kota dalam Provinsi.
6. Adanya kemauan dari setiap UPPKB yang ada di Provinsi Kaltim untuk meningkatkan aspek pelayanan dan teknis guna meningkatkan akreditasinya.

7. Semua proses dilaksanakan secara online baik surat menyurat maupun perizinan melalui oss, sehingga mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha.

Disamping faktor pendukung tersebut, tentunya terdapat beberapa faktor kendala yang juga berpengaruh antara lain :

1. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B ditunda karena adanya efisiensi anggaran.
2. Pelaksanaan pembangunan gedung terminal ditunda karena adanya efisiensi anggaran.
3. Pelaksanaan pekerjaan studi Kelayakan Jalur Kereta Api Lintas Layanan Tenggarong Bandara APT. Pranoto Samarinda atau kajian terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
4. Belum optimalnya pelaksanaan sosialiasi keselamatan ke semua pengampu dan pengguna layanan transpotasi.
5. Kapasitas dan kompetensi SDM yang belum merata.

Untuk itu, akan dilakukan upaya-upaya perbaikan yang akan datang melalui :

1. Rutin melakukan rampcheck kendaraan angkutan umum sebagai salah satu langkah mengurangi jumlah angka kecelakaan.
2. Meningkatkan standar pelayanan minimal yang ada di Terminal Tipe B.
3. Pemeliharaan rutin dan rehabilitasi sarana prasarana.
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
5. Melakukan survey kebutuhan fasilitas keselamatan jalan ruas jalan provinsi yang perlu/prioritas dipasang fasilitas keselamatan jalan.
6. Membuat Jadwal Pelaksanaan Penegakkan Hukum ODOL yang lebih intensif.
7. Memperbanyak kegiatan sosialisasi keselamatan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas dijalan serta mengurangi angka laka lantas di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Menginventarisir dan menjadwalkan untuk melakukan pengawasan/tinjauan lapangan terhadap Rekomendasi Andalalin yang sudah lebih dari 2 tahun.
9. Mengusulkan pelaksanaan pembangunan gedung terminal sungai kunjang dapat terealisasi di tahun 2026.
10. Mengusulkan anggaran untuk Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B di tahun 2026.

B. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Pencapaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat adalah 85,78 sesuai dengan target sehingga capaian yang diperoleh 100 %. Beberapa indikator yang berpengaruh terhadap pencapaian antara lain :

1. Persentase Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)

Jalan mantap merupakan gabungan dari jalan yang berkondisi baik dan sedang. Kemantapan jalan dapat diukur dengan menghitung perbandingan antara panjang jalan mantap dengan panjang jalan secara keseluruhan. Perhitungan Rasio Kemantapan Jalan Adalah total Panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang dibagi total Panjang jalan provinsi dikali 100%. Capaian indikator rasio kemantapan jalan provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat sebesar 81,41%, kemudian meningkat menjadi 82,21% pada tahun 2024. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 85,83% dengan capaian 99,53 %, yang menunjukkan adanya akselerasi penanganan jalan provinsi baik melalui kegiatan peningkatan, rehabilitasi, maupun pemeliharaan rutin dan berkala.

Capaian indikator rasio kemantapan jalan provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana dari target sebesar 86,23 persen, realisasi yang dicapai adalah 85,83 persen atau mencapai 99,54 persen. Fokus perbaikan jalan meliputi kawasan pesisir, peningkatan ruas jalan di kawasan ekonomi, Kutai Timur, dan Berau. Ruas-ruas tersebut antara lain ruas jalan dondang – simpang Samboja, ruas jalan Simpang 4 Kaliorang – Bts. Berau, ruas jalan Bts. Kutim – Talisayan, ruas jalan Talisayan – Tanjung Redeb.

Indikator Rasio Kemantapan Jalan Provinsi merupakan indikator dari Program Penyelenggaraan Jalan, yang didalamnya terdapat sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan dan Pemeliharaan Jalan untuk mendukung capaian indikator Program tersebut.

Gambar 3.28

Kemantapan Jalan



Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Tingkat kemantapan jalan provinsi di Kalimantan Timur pada tahun 2025 yang telah mencapai 85,83% menunjukkan capaian kinerja yang positif dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penanganan jalan yang dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kondisi jalan mantap tersebut mengindikasikan bahwa

intervensi pembangunan, peningkatan kapasitas struktur jalan, serta kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala telah berjalan relatif optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan infrastruktur transportasi. Dengan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan peningkatan persentase jalan provinsi mantap di setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, menurunkan tingkat kerusakan jalan, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Target tersebut sekaligus menjadi tantangan kinerja yang memerlukan konsistensi pendanaan, ketepatan prioritas penanganan ruas strategis, serta penguatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar tren peningkatan kemantapan jalan dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.

Beberapa hal sebagai faktor pendorong dalam pencapaian indikator antara lain :

1. Koordinasi yang baik antar stakeholder sebagai upaya *crosscutting* dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas PUPR Kabupaten/Kota.
2. Alokasi penyelenggaraan jalan cukup besar.
3. Mengoptimalkan UPTD 1, 2 dan 3 dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan untuk menjaga kemantapan jalan.

Hal-hal yang berpengaruh dan menajdi kendala dalam upaya pencapaian antara lain :

1. Pada saat penetapan target kemantapan jalan di dokumen perencanaan, DPUPR PERA Bersama BAPPEDA masih menggunakan SK Gubernur Kaltim Nomor 622/K.295/2018 tahun 2018 sedangkan pada saat perhitungan capaian tahun 2025 menggunakan SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.597/2023 tahun 2023. Sehingga terdapat deviasi realisasi capaian disebabkan perbedaan jumlah ruas dan total panjang keseluruhan jalan provinsi.
2. Kondisi jalan aspal yang rentan mengalami kerusakan diakibatkan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melintas di jalan provinsi, sehingga terjadi kerusakan pada jalan yang sebelumnya kondisi mantap (baik/sedang).
3. Adanya titik-titik tertentu yang saling berdekatan sehingga tidak dapat diaspal per titik mempengaruhi panjang pemeliharaan jalan.

Guna mengatasi kendala yang ada, upaya perbaikan ditahun berikutnya yang akan dilakukan diantaranya :

Penentuan skala prioritas penanganan ruas jalan provinsi yang kondisinya tidak mantap.

1. Koordinasi yang lebih intens dengan para stakeholder.
2. UPTD tetap melakukan pekerjaan pemeliharaan rutin dan berkala pada ruas jalan provinsi yang sudah mantap agar tidak kembali rusak.
3. Menambah sub kegiatan rehabilitasi jalan pada bidang Bina Marga untuk mendukung pencapaian kemantapan jalan.

Tabel 3.41

Persentase Rasio Kemantapan Jalan Provinsi (%)

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
82,09%	85,83%	100%

Sumber data : DPUPR PERA Prov. Kaltim (Survey database kondisi jalan provinsi), 2025

Faktor Penghambat dalam pencapaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi :

1. Kondisi jalan aspal yang rentan mengalami kerusakan diakibatkan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Loading) yang melintas di jalan provinsi, sehingga terjadi kerusakan pada jalan yang sebelumnya kondisi mantap (baik/sedang).
2. Adanya titik-titik tertentu yang saling berdekatan sehingga tidak dapat diaspal per titik mempengaruhi panjang pemeliharaan jalan.

Upaya perbaikan di tahun berikutnya dalam pencapaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk meningkatkan kondisi jalan yang ada, yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat menjadi baik (mantap).
2. Berkordinasi dengan perangkat daerah yang lain terkait kendaraan ODOL yang masih melintas pada jalan Provinsi.

2. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat (%)

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jas Konstruksi meliputi :

a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
b. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan melalui kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli, dimana peserta pelatihan melibatkan masyarakat jasa konstruksi salah satunya pengguna jasa, penyedia jasa dan lainnya.

Capaian kinerja Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 62,58% dari target 60,13% dengan persenatse capaian 104,07 %. Dari 3 tahun terakhir realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi 49,97% 3dan tahun 2023 realisasi 41,70%.

Tabel 3.42

Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat (%)

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
60,13 %	62,58 %	104,07

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Berdasarkan informasi pada website Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/grafik-jumlah-bu-tkk) jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat di Kalimantan Timur adalah 21.593 orang dengan jumlah kepemilikan SKK adalah 30.709 SKK (1 orang bisa memiliki lebih dari 1 SKK), yang terdiri dari 8.595 orang dengan kualifikasi ahli dan 22.114 orang kualifikasi teknisi/analis dan operator.

Terdapat data Jumlah Penduduk Bekerja Sektor Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur menurut Pendidikan yang ditamatkan adalah 147.736 orang, terdiri dari 12.398 Perguruan Tinggi dan 135.338 SD s/d SMA Sederajat berdasarkan Surat Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur nomor: B-122/64000/VS.630/2025 tanggal 23 Januari 2025, sehingga masih terdapat GAP Tenaga Kerja Konstruksi yang belum bersertifikat sebesar 126.143 orang atau 85,38% yang didominasi oleh tingkat pendidikan SD - SMA sederajat (tenaga teknisi/analis dan operator).

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dalam pencapaian antara lain :

1. Adanya penguatan pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah TKK terlatih pada Tahun 2024 sebanyak 7.083 orang menjadi 12.578 orang di Tahun 2025.
2. Peningkatan partisipasi pelaku jasa konstruksi dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi Kalimantan Timur dari yang semula 14.175 orang di Tahun 2024 menjadi 20.099 orang di Tahun 2025 sebagai faktor pendorong peningkatan capaian tersebut.
3. Pendaftaran penyelenggaraan pelatihan melalui Sistem Informasi Bina Kontruksi yang dibatasi pada pendaftar dari masyarakat dengan KTP Kalimantan Timur kualifikasi Ahli. Keterbukaan informasi publik Bidang Bina Konstruksi tersedia melalui media sosial Instagram (@bikon_dpuprperakaltim) dan website SIBIKON (https://sibikon-dpuprpera.kaltimprov.go.id/) yang memuat informasi mengenai jadwal pelatihan TKK Kualifikasi Ahli yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi media pendaftaran calon peserta pelatihan dan juga terkait informasi-informasi Jasa Konstruksi lainnya seperti data Masyarakat Jasa Konstruksi Provinsi Kaltim (data TKK bersertifikat, data Badan Usaha Jasa Konstruksi, dll).

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh Peringkat 1 Sutami Awards dalam Kategori Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kinerja Terbaik dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sehingga mendapatkan reward berupa Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi *Fresh Graduate* dengan target 500 orang yang dibagi dalam dua tahun anggaran yaitu Tahun 2025 dan 2026. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 251 orang dan 249 orang dinyatakan kompeten dan mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang berlaku selama 1 (satu) Tahun.

Disamping faktor pendukung tersebut terdapat pula faktor penghambat antara lain :

1. Masih terdapat 2 Kabupaten/Kota yang belum membentuk kelembagan dalam melaksanakan Sub Urusan Jasa Konstruksi sehingga belum optimalnya pelaksanaan sub urusan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang - undangan.
2. Kurang optimalnya jika pelaksanaan pembinaan kepada unsur masyarakat jasa konstruksi jika dilakukan secara online / zoom.
3. Kurang efisiennya jika penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kualifikasi ahli dilaksanakan secara online / zoom.
4. Ketersediaan tempat penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kualifikasi ahli yang belum bisa terakomodir sepenuhnya.
5. Ketersediaan tempat penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kualifikasi ahli buat di kabupaten/kota yang belum memiliki e-purchasing.
6. Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli

Untuk itu perlu langkah-langkah perbaikan kedepannya dengan :

1. Melakukan pembinaan kelembagaan sub urusan jasa konstruksi pada masyarakat jasa konstruksi Kalimantan Timur
2. Pelatihan dan sertifikasi kualifikasi fresh graduate akan tetap dilaksanakan
3. Pelatihan dan sertifikasi instruktur konstruksi kompeten
4. Laporan tahunan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan tepat waktu
5. Memberikan penghargaan tiap tahun kepada kabupaten/kota sub urusan jasa konstruksi pada Hari Bakti Pekerjaan Umum setiap tanggal 3 Desember.

3. Rasio Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terlayani oleh jaringan irigasi

Pengembangan sektor pertanian tidak lepas dari upaya penyediaan sarana irigasi dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor vital dalam keberhasilan dalam penyediaan pangan yang berkualitas.Luas Irigasi Kewenangan Provinsi Yang dilayani oleh Jaringan Irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi

dan dipelihara/luas DI kewenangan provinsi. Hal ini untuk menjamin ketersediaan air baku mengairi petak sawah / daerah irigasi dengan membangun bendung, bendungan, saluran pembawa, saluran pembuang dan pintu air. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan luasan lahan pertanian yang beririgasi dengan capaian kinerja Luas sawah yang terlayani jaringan Irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi.Capaian rasio JUmlah Daerah Irigasi yang terlayani oleh jaringan irigasi tahun 2025 adalah 65,18% dari target 62,97% sehingga persentase capaian103,5%1. Dari 3 tahun terakhir Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi 64,62% dan tahun 2023 realisasi 61,21%.

Tabel 3.43

Rasio Jumlah DI yang terlayani oleh jaringan irigasi

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
62,97	65,18	103,51%

Sumber data : DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Peningkatan realisasi dengan target terhadap Indikator Rasio Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terlayani oleh jaringan irigasi terjadi karena adanya rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan serta pembangunan jaringan baru pada wilayah potensial, sehingga fungsi layanan irigasi semakin optimal.

Tabel 3.44

Capaian Irigasi

No	Paket	Target Outcome	Rencana Panjang (m)	TW IV OUTCOME	TW IV OUTPUT
		Ha	m	Ha	m
1	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Biatan Kab. Berau	10	764	9,8	762
2	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Labaran Kab. Berau	26	764	5,8	200
3	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Merancang Kab. Berau	26	784	7,4	400
4	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Semurut Buyung - Buyung Kab. Berau	27	764	4,9	175
5	Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Sulliran Kab. Paser	20	90	11,3	2524
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Sebulu Kab. Kutai Kartanegara	20	90	2,5	203
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kaliorang Kab. Kutai Timur (PERGESERAN 3)	20	5275,9	13,6	4800
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Selanghau Kab. Kutai Timur (PERGESERAN 3)	20	9694,5	14,8	3800
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Tabalar Muara Kab. Berau (PERGESERAN 3)	20	6794,07	16,0	1457,5
TOTAL		189	25004,47	87	14121,5
AKUMULASI	9983,74			10070,74	
PERSEN	15451			65,18	

Sumber data : DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Capaian ini didukung oleh perencanaan berbasis kebutuhan dan kondisi eksisting, serta koordinasi yang baik antar stakeholder yaitu dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV dan V (BWS), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikulutra Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, peran aktif P3A/GP3A/IP3A dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi turut menjaga keberlanjutan layanan, sehingga secara keseluruhan mampu meningkatkan rasio jumlah DI yang terlayani secara efektif dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang menjadi pendorong capaian tersebut antara lain :

1. Koordinasi yang baik dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikulutra Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi.
3. Peran kelembagaan pengelola irigasi (P3A, Poktan, Gapoktan) dan koordinasi lintas pihak dalam menjaga keberlanjutan layanan.

Disamping faktor pendukung tersebut, beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Permasalahan sosial dengan petani terkait buka tutup pintu saluran irigasi pada saat pembangunan konstruksi, bencana alam sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan fisik.
2. Keterlambatan Proses pelaksanaan Lelang/Pengadaan.

Untuk itu perlu langkah-langkah perbaikan kedepannya dengan :

1. Penyiapan Readiness Criteria lebih dini sebelum pelaksanaan konstruksi.
2. Persiapan pelaksanaan lelang lebih dini.

4. Presentase penyediaan kapasitas air baku

Informasi air baku didapatkan dari data ketersediaan dan kebutuhan air kab/kota. Pembangunan infrastruktur untuk penambahan kapasitas air baku untuk air bersih antara lain Pembangunan bendung dan sumur dalam melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air.

Tabel 3.45

Presentase Penyediaan Kapasitas Air Baku

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
80,15	84,67	105,64

Sumber data : DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Capaian Presentase penyediaan kapasitas air baku sebesar 84,67% dari target 80,15% sehingga persentase realisasi pencapaian 105,64 %. Dari 3 tahun terakhir Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi 80,07, dan tahun 2023 realisasi 79,16%.

Peningkatan realisasi dengan target terhadap Indikator Persentase Penyediaan Kapasitas Air Baku terjadi karena adanya pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur air baku seperti bendung, sumur dalam, intake, dan jaringan transmisi, serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber air yang ada.

Tabel 3.46

Capaian Penanganan Air Baku Tahun 2025

No	Paket	Target Outcome	Jumlah (unit)	TW IV OUTCOME	TW IV OUTPUT
		l/dtk			
1	Pembangunan Sumur Dalam Kab. Kutai Kartanegara	20	2	10	2
2	Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Desa Tani Bhakti Kecamatan Samboja Barat	20	3	2	3
3	PEMBANGUNAN SUMUR BT 8 DESA SUKA RAHMAT KAB. KUTAI TIMUR (ABT)	5	1	2	1
4	PEMBANGUNAN SUMUR BT 17 DESA SEPASO TIMUR KAB. KUTAI TIMUR (ABT)	5	1	2	1
5	PEMBANGUNAN SUMUR BT 14 DESA SEPASO BARAT KAB. KUTAI TIMUR (ABT)	5	1	2	1
6	PEMBANGUNAN SUMUR BT 26 DESA SEPASO BARAT KAB. KUTAI TIMUR (ABT)	5	1	2	1
7	PEMBANGUNAN SUMUR BT 5 DESA SEPASO BARAT (MAKO POLSEK BENGALON) KAB. KUTAI TIMUR (ABT)	5	1	2	1
8	Lanjutan Penyediaan Air Baku Kota Bontang	200	1		1
9	Lanjutan Penyediaan Air Baku Wilayah Selatan (Balikpapan, PPU dan Paser) (PERGESERAN)	19	5	10	3
10	Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Kota Bontang	100	1		1
11	Optimalisasi Intake Karang Asam Kota Samarinda	0	1	500	1
12	Pembangunan Intake Lempake Tepian Kota Semarinda	4		100	1
TOTAL		388	18	632	17
AKUMULASI	11011			11643	
PERSEN	13751,05			84,67	

Sumber data : DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian melalui pembangunan sumur dalam dan bor di Kutai Kertanegara, Kutai Timur, lanjutan penyediaan air baku di Bontang, Balikpapan, PPU, Paser, Pembangunan pipa transmisi di Bontang, optimalisasi intake dan pembangunan intake di Samarinda.
Capaian ini didukung oleh koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan PDAM/BUMD sebagai operator layanan air bersih, sehingga perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan kapasitas air baku dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang menjadi pendorong capaian tersebut antara lain :

1. Alokasi anggaran APBD serta kebijakan pengembangan penyediaan air baku.
2. Koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan.
3. Sinergi antara pemerintah daerah dengan PDAM/BUMD dalam pemanfaatan kapasitas air baku.
4. Dukungan data dari pemerintah daerah setempat.

Disamping faktor pendukung tersebut, beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Permasalahan Sosial di Lapangan yang sering mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan fisik,

2. Keterlambatan Proses Lelang/Pengadaan,
3. Permasalahan lahan yang belum clear and clean sehingga kegiatan fisik yang berbarengan dengan pelaksanaan pembebasan lahan

Untuk itu perlu langkah-langkah perbaikan kedepannya dengan :

1. Penyiapan Readiness Criteria lebih dini sebelum pelaksanaan konstruksi.
2. Persiapan pelaksanaan lelang lebih dini.

5. Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan

Salah satu sektor strategis pembangunan di Kalimantan Timur yang keberadaanya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian adalah Sumber Daya Air, dimana salah satu fokusnya adalah upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir.Adapun akar masalah dari permasalahan ini yaitu minimnya pengendalian banjir serta kualitas pengawasan sungai dan pantai.Melalui indikator ini tergambar luasan genangan banjir di perkotaan yang berkurang.

Tabel 3.47
Persentase Pengurangan Luas Genangan Banjir Perkotaan

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
81,81	92,87	113,52 %

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Capaian Persentase pengurangan luasan genangan banjir perkotaan sebesar 92,87% dari target 81,81% sehingga persentase realisasi capaian 113,52%. Dari 3 tahun terakhir Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi 83,54% dan tahun 2023 realisasi 61,71%.

Capaian tersebut melalui Normalisasi Sungai Sangatta, Marangkayu, Tumbit (Berau), Sungai Kandolo Kutai Timur, Normalisasi sungai dan pengendali banjir baik baru maupun lanjutan sungai di Samarinda, Balikpapan, penguatan tebing sungai Karang Asam Besar, Kota Samarinda.

Tabel 3.48

Penanganan Banjir

No	Paket	Target Outcome	Panjang	TW IV OUTCOME	TW IV OUTPUT
		Ha	Km	Ha	M
1	Lanjutan Normalisasi Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Samarinda	10	1,233	27,5	5500
2	Lanjutan Normalisasi Sungai Sangatta	10	0,715	1,5	500
3	Lanjutan Pengendalian Banjir Sistem Sungai Bontang	10	0,357	2	
4	Lanjutan Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Karangasam Besar Kota Samarinda	10	0,179	3,7	740
5	Normalisasi Sungai Tumbit Kab. Berau	10	0,199	39	7800
6	Normalisasi Sungai Kewersingan Provinsi Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kab. Kutai Timur	10	0,178	8,5	1700
7	Normalisasi Sungai Marangkayu (PERSEBERAN)	10	1,34	35	7000
8	Lanjutan Normalisasi Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Samarinda (ABT)	10	0,02	0	
9	Normalisasi Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Balikpapan (ABT)	10	0,67	5	1000
TOTAL		90	5,489	122,2	24040
AKUMULASI	255,13	2024	2025	377,33	
PERSEN	2071,53		147	92,87	
	406,5				

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Capaian ini didukung oleh koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan PDAM/BUMD sebagai operator layanan air bersih, sehingga perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan kapasitas air baku dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang menjadi pendorong capaian tersebut antara lain :

1. Sinergi dengan pemerintah kab/kota untuk menyelesaikan permasalahan sosial.
2. Tersedianya data sebaran banjir di seluruh kab/kota.

Disamping faktor pendukung tersebut, beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Permasalahan Sosial di Lapangan yang sering mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan fisik, faktor alam seperti curah hujan tinggi.
2. Keterlambatan Proses Lelang/Pengadaan,

Untuk itu perlu langkah-langkah perbaikan kedepannya dengan :

3. Penyiapan Readiness Criteria lebih dini sebelum pelaksanaan konstruksi.
4. Persiapan pelaksanaan lelang lebih dini.
5. Melakukan penambahan atau perbaikan infrastruktur pengendali banjir .
6. Melaksanakan upaya kolaboratif terkait penyelesaian pembebasan lahan untuk pengembangan sistem pengendali luapan air sungai.
7. Mengoptimalkan fungsi bendali, folder dan drainase.
8. Melakukan pengerukan untuk mengurangi sedimentasi dan penyempitan sungai

Secara umum upaya perbaikan terkait indikator Rasio Jumlah DI yang terlayani oleh jaringan irigasi, Persentase penyediaan kapasitas air baku, Persentase pengurangan luas genangan banjir perkotaan antara lain :

1. Kejelasan regulasi pengelolaan pada wilayah sungai sesuai kewenangannya.
2. Kejelasan regulasi luasan kewenangan pengelolaan irigasi dan rawa sesuai kewenangannya.
3. Peningkatan koordinasi antar sektor terkait.
4. Penyiapan lahan.
5. Tindaklanjut pelaksanaan operasional terhadap sarana dan prasarana yang dibangun untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja infrastruktur.
6. Percepatan pelaksanaan lelang atau seleksi.
7. Sosialisasi dan pelibatan kelembagaan pada tingkat masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Ketepatan penjadwalan pelaksanaan kegiatan.

6. Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota

Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota menggambarkan Upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka menjalankan tahapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum sektor air minum, yang mana menjadi urusan wajib pemerintah daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat melalui Permendagri No. 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023. Capaian kinerja dari indikator ini disusun oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan *adjustment* pembobotan 4 tahapan SPM (Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana, dan Pelaksanaan Pemenuhan SPM).

Tabel 3.49
Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
83,40	81,29	97,47%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Realisasi capaian tahun 2025 adalah 81,29% dengan target 83,40% sehingga persentase realisasi capaian 97,47%. Dari 3 tahun terakhir Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi 59,77% sedangkan tahun 2023 baseline dan target masih mengacu RPJMD 2009-2023. Indikator capaian untuk tahun 2022 yaitu persentase capaian akses air minum layak perpipaan, hal ini berbeda dengan indikator capaian pada tahun 2023 (sebagai *baseline*) dan 2024 yaitu persentase kesiapan infrastruktur air curah lintas

kabupaten/kota sehingga realisasi capaian tidak dapat ditampilkan.Pada tahun 2023 target persentase kesiapan infrastruktur air curah lintas kabupaten/kota sebesar 36,45%, dimana realisasi 2023 juga sebesar 36,45% sehingga persentase capaian 100%.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mentargetkan penyiapan 5 unit SPAM Regional (Indominco, Marangkayu, Longkali, Sukarahmat dan Mahakam), serta pembangunan 2 unit SPAM Regional (Indominco dan Marangkayu), mulai dari pemenuhan seluruh dokumen perencanaan sampai dengan pembangunan. Sehubungan dengan efisiensi anggaran dan atas pertimbangan teknis kesiapan SPAM, maka terdapat beberapa kegiatan/pekerjaan yang sebelumnya telah ditargetkan namun tidak bisa dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian kinerja 2025, kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Lingkungan dan DPPT SPAM Regional Sukarahmat;
2. Pembentukan UPTD SPAM Regional (terisinya dan pengangkatan pejabat pada struktur organisasi UPTD SPAM);
3. Fasilitasi pembangunan intake, transmisi, dan IPA Regional Marangkayu (oleh Pusat); dan
4. Pembangunan JDU SPAM Regional Marangkayu.

Beberapa hal yang menjadi pendorong dalam upaya capaian tersebut antara lain :

1. Terbitnya PP No. 02 Tahun 2018, Permendagri No. 100 Tahun 2018, dan Permen PU No. 29 Tahun 2018 terkait SPM (Standar Pelayanan Minimum) sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat mulai memprioritaskan pembangunan disektor air minum.
2. Terbentuknya pokja (kelompok kerja) AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) Kalimantan Timur yang menjadikan wadah dalam berkoordinasi dan berintegrasi antar perangkat daerah terkait dalam meningkatkan capaian disektor air minum di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kerjasama pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi keterbatasan air baku di kabupaten/kota.
4. Adanya Dokumen RISPAM (Rencana Induk SIstem Penyediaan Air Minum) Kab/Kota.
5. Meningkatnya kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) kabupaten/kota melalui Bimtek(Bimbingan Teknis) SPM (Standar Pelayanan Minimum).
6. Adanya UPTD SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Provinsi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan.

Disamping faktor pendukung tersebut, beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Masih minimnya data sektoral terkait kebutuhan SPAM regional.
2. Data layanan Air Minum Non PDAM masih sulit dikumpulkan.

3. Penyelenggara Air Minum Kab/Kota (PDAM) masih kesulitan mengendalikan NRW (*Non Revenue Water*) yaitu air yang diproduksi PDAM tetapi tidak sampai ke pelanggan dan kualitas perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang disusun oleh PDAM belum sepenuhnya baik.
4. Krisis sumber air baku di beberapa wilayah.
5. Faktor geografis menyulitkan penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) JP (Jaringan Perpipaan) di beberapa Kabupaten/Kota (Kubar, Kutim, Kukar dan Berau).

Upaya perbaikan dalam pencapaian antara lain :

1. Melakukan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyamakan perhitungan capaian terkait baseline data sektoral agar pelaksanaan lebih optimal. 4 tahapan SPM (Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana, dan Pelaksanaan Pemenuhan SPM.
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong PDAM(Perusahaan Daerah Air Minum) didaerahnya masing-masing dalam hal peningkatan pelayanan.

7. Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik

Kesiapan Infrastruktur Persampahan Lintas Kabupaten/Kota dalam penanganan Sampah Domestik menggambarkan upaya Pemerintah Provinsi dalam menjalankan salah satu kewenangan pengelolaan persampahan regional sesuai UndangUndang No. 23 Tahun 2014. Seiring dengan meningkatnya timbulan sampah domestik, pemerintah daerah terus melakukan penguatan infrastruktur melalui pembangunan dan peningkatan kapasitas/fasilitas pengelolaan sampah menuju standar pengelolaan yang lebih ramah lingkungan secara bertahap. Sebagai upaya awal, sejak tahun 2023, Pemerintah Provinsi sedang menargetkan pemenuhan dokumen perencanaan Pembangunan Infrastruktur pengelolaan sampah regional dan penyiapan *readiness criteria* lainnya untuk melayani Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dapat terpenuhi sampai tahun 2029, sehingga akan dimulai Pembangunan infrastruktur persampahan regional setelah tahun 2029.

Tabel 3.50
Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan
Dalam Penangan Sampah Domestik

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
25	25	100%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Tahun 2025 capaian kinerja 25% dan mengalami peningkatan dari proses bertahap tahun sebelumnya, tahun 2024 realisasi capaian 17,50%. Peningkatan tersebut dikarenakan sejak tahun 2023-2024 Pemerintah Provinsi telah berproses melaksanakan tahapan legalisasi dokumen Rencana Induk Persampahan Regional, melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024. Sebagai tindak lanjut Rencana Induk tersebut, Pemerintah Provinsi telah menyusun dokumen Feasibility Study Infrastruktur Persampahan Regional Samarinda dan Kutai Kertanegara tahun 2025.

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam upaya pencapaian antara lain :

1. Melakukan koordinasi intensif antar pihak terkait, seperti upaya percepatan penyelesaian dokumen perencanaan.
2. Melaksanakan bimbingan teknis persampahan yang rutin tahunan dilaksanakan sejak tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota, hal ini agar bisa memberikan pengetahuan terkait pengelolaan sampah di masing-masing daerah sesuai kewenangannya.
3. Bercrosscutting dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih optimal pengelolaan sampai sesuai kewenangannya sebagai upaya mitigasi.

Disamping faktor pendorong tersebut terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Ketersediaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan belum optimal sehingga proses ini dilaksanakan secara bertahap.
2. Kesiapan pihak lain dalam pemenuhan syarat-syarat teknis dan administrasi, ehingga jika pekerjaan yang menjadi target akan dilaksanakan tetap berjalan, maka akan berdampak pada terhambatnya penyelesaian pekerjaan itu sendiri.
3. Perbedaan persepsi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota mengenai pengelolaan sampah regional, dimana sebagian daerah menganggap regionalisasi pengelolaan sampah akan menjadi beban tambahan di Kabupaten/Kota.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengupaykan tahapan-tahap dapat berjalan dengan baik sehingga syarat administrasi dan teknis dapat segera terpenuhi.
2. Melakukan sosialisasi dan penyamaan penyamaan persepsi agar dapat menciptakan dukungan penyelenggaraan persampahan regional dari Kabupaten/Kota.

8. Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota

Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota

menggambarkan Upaya Pemerintah Provinsi dalam rangka menjalankan tahapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum sektor Air Limbah Domestik, yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2023. Capaian kinerja dari indikator ini disusun oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan adjustment pembobotan 4 tahapan SPM (Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana, dan Pelaksanaan Pemenuhan SPM).

Tabel 3.51
Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Domestik
Lintas Kabupaten/Kota

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
42	40	95,23%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Realisasi capaian Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota tahun 2025 adalah 40 % dengan capaian 95,23 % dari target yang ditetapkan 42 %. Dalam 3 tahun terakhir realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 realisasi 32,50 sedangkan tahun 2023 baseline dan target mengacu dokumen RPJMD 2019–2023.

Pada tahun 2025 telah ditargetkan penyiapan 1 unit SPALD Regional (Samarinda - Kutai Kartanegara), mulai dari pemenuhan *readiness criteria* dokumen perencanaan hingga penyiapan kelembagaan pengelola SPALD Regional dan penyusunan Dokumen Andalalin dan Finalisasi Dokumen AMDAL untuk SPALD Regional Samarinda - Kutai Kartanegara sebagai persiapan pemenuhan.

Faktor Pendorong dalam upaya pencapaian antara lain melakukan koordinasi intensif antar pihak terkait, seperti upaya percepatan penyelesaian dokumen perencanaan SPALD Regional serta melakukan evaluasi, monitoring, dan advokasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota yang tentunya dapat mendorong serta memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan air limbah domestik regional oleh provinsi.

Disamping faktor pendorong tersebut terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

1. Efisiensi anggaran sehingga salah satu persyaratan tidak dapat dipenuhi antara lain Penyusunan Kajian Akademik Pembentukan Lembaga Pengelola SPALD Regional.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, sehingga persepsi masyarakat terhadap program pemerintah yang berkaitan dengan air limbah masih minim sekali mendapatkan dukungan seperti penolakan

sebagian masyarakat untuk lokasi yang direncanakan menjadi tempat Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain mengupayakan sosialisasi penyamaan persepsi agar dapat menciptakan dukungan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik regional dari masyarakat maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat dipastikan untuk penganggarannya.

9. Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi

Penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi merupakan indikator yang diperuntukkan khusus untuk capaian penanganan infrastruktur layanan dasar air minum di Kabupaten/Kota (non regional) yang sasaran outcomenya berasal dari rumah tanggga di wilayah permukiman di Kawasan strategis provinsi. Penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi merupakan indikator yang diperuntukkan khusus untuk capaian penanganan infrastruktur layanan dasar air minum di Kabupaten/Kota (non regional) yang sasaran outcomenya berasal dari rumah tanggga di wilayah permukiman di Kawasan strategis provinsi.

Tabel 3.52
Persentase penanganan infrastruktur permukiman
di kawasan strategis provinsi

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
75	138	184%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi merupakan indikator yang diperuntukkan khusus untuk capaian penanganan infrastruktur layanan dasar air minum di Kabupaten/Kota (non regional) yang sasaran outcomenya berasal dari rumah tanggga di wilayah permukiman di Kawasan strategis provinsi.

Realisasi capaian tahun 2025 adalah 138 % denga capaian 184 % melebihi dari target 75 %. Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 sebesar 50%, sedangkan tahun 2023 baseline dan target penanganan mengacu dokumen RPJMD 2019–2023. Awalnya upaya optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi, yaitu 1 Unit SPAM Merancang (Kab. Berau) dan 1 Unit JDU SPAM Babulu (Kab. PPU). Pada pelaksanaannya terjadi perubahan strategi penanganan dengan dibatalkannya optimalisasi SPAM Merancang (Kab. Berau) yang kemudian

memungkinkan penanganan SPAM lainnya untuk dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia, sehingga menghasilkan lebih banyak output/outcome penanganan, unit penanganan SPAM ini meliputi :

a. JDU SPAM Babulu, Kab. PPU.
b. SPAM Sungai Kapih, Kota Samarinda (Pengganti Alokasi SPAM Merancang).
c. JDU SPAM Loa Bakung, Kota Samarinda (Pengganti Alokasi SPAM Merancang).
d. JDU SPAM Kel. Air Putih, Kota Samarinda (Pengganti Alokasi SPAM Merancang).
e. Booster SPAM Loa Bakung, Kota Samarinda (Pengganti Alokasi SPAM Merancang).
f. JDU SPAM Km.8 Balikpapan (Tambahan);
g. DMA SPAM Balikpapan Timur.
h. DMA SPAM Balikpapan Utara; dan
i. JDU SPAM Gn. Stelling, Kota Samarinda.

Beberapa hal yang menajdi faktor pendukung antara lain :

1. Penyediaan air minum merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang masuk kedalam jenis pelayanan dasar yang harus diterima setiap warga negara sehingga harus diprioritaskan. Hal ini didukung oleh regulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Program Pengembangan Permukiman penanganan SPAM (non regional) di Kawasan Strategis Provinsi mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
2. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui program dan usulan penanganan SPAM yang bisa dilaksanakan melebihi target.

Adapun faktor penghambat antara lain :

1. Ketersediaan alokasi anggaran menjadi salah satu hal yang menghambat target pelaksanaan pekerjaan.
2. Beberapa pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan sedikit banyaknya disebabkan oleh kesiapan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan pemenuhan syarat-syarat teknis dan administrasi, sehingga bila pekerjaan yang menjadi target akan dilaksanakan tetap berjalan, maka akan berdampak pada terhambatnya penyelesaian pekerjaan itu sendiri.
3. Adanya batasan deleniasi wilayah yang hanya boleh masuk dalam kawasan strategis provinsi, sehingga tidak bisa semua wilayah dapat ditangani.
4. Dukungan pemenuhan *readiness criteria* oleh usulan Kabupaten/Kota yang belum terpenuhi, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilaksanakan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain :

1. Optimalisasi anggaran dengan skala prioritas terkait SPM.
2. Lebih awal dalam menyiapkan pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi.
3. Mengkoordinasikan pembagian urusan antara provinsi dan kab/kota.
4. Mendorong Kabupaten/Kota dalam pemenuhan readiness criteria.

10. Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang ditangani

Gedung strategis provinsi yang ditangani yang tersebar di Kabupaten/Kota antara lain kantor pemerintahan provinsi, fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, gedung penunjang penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi terbagi dalam beberapa sub kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi KalimantanTimur yaitu Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Tabel 3.53
Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang ditangani

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
83,58	81,84	97,92%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Realisasi capaian tahun 2025 adalah 81,84% dengan target 83,58 % sehingga persentase capaian 97,92%. Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 sebesar 56,66%, sedangkan tahun 2023 baseline dan target penanganan mengacu dokumen RPJMD 2019–2023. Capaian menunjukkan bahwa sebagian besar bangunan strategis yang menjadi kewenangan provinsi telah berada pada kondisi laik fungsi operasional. Penanganan gedung tidak hanya berupa pembangunan baru, tetapi juga rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan standar keselamatan bangunan sebagai upaya memaksimalkan kegiatan pemerintahan dan masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari baik yang memiliki fungsi khusus dan penting untuk kepentingan nasional, seperti bangunan dengan tingkat keamanan dan rahasia tinggi.

Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi terbagi dalam beberapa sub kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi KalimantanTimur yaitu Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi dan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Dalam rangka efisiensi/pengurangan/pergeseran anggaran Pemerintah Daerah tahun 2025, maka beberapa pekerjaan yang ditargetkan tidak bisa dilaksanakan, yakni meliputi :

1. Lanjutan Pembangunan Gedung RSJD Atma Husada Mahakam.

2. Pembangunan Kawasan ex Temindung.
3. Perencanaan Perluasan Lahan Parkir Rumah Sakit Mata di Jalan M. Yamin Samarinda.
4. Perencanaan Perluasan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda.

Beberapa hal yang menjadi pendorong dalam upaya pencapaian antara lain

Penetapan wilayah Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara menjadi faktor pendorong paling dominan terhadap meningkatnya penanganan gedung strategis provinsi. Dampak langsung terhadap kebutuhan bangunan provinsi seperti

- Meningkatnya aktivitas pemerintahan pusat dan daerah
- Meningkatnya kebutuhan koordinasi antar instansi
- Meningkatnya mobilitas ASN dan masyarakat
- Meningkatnya kebutuhan pelayanan administrasi regional

Fungsi Pemerintah Provinsi tidak lagi hanya sebagai pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pemerintah wilayah penyangga ibu kota negara, sehingga :

- Kantor pelayanan provinsi harus representative.
- Fasilitas pelayanan public harus memenuhi standar nasional.
- Gedung pemerintahan harus siap mendukung operasional IKN.

Dengan demikian kebutuhan penanganan bangunan strategis meningkat signifikan sejak 2022–2025. Konsekuensinya jumlah unit layanan provinsi bertambah → kebutuhan ruang layanan meningkat → gedung layanan harus ditangani (dibangun/rehabilitasi). Artinya, indikator ini terdorong oleh ekspansi fungsi pelayanan pemerintah provinsi, bukan semata program pembangunan fisik sehingga dilakukan percepatan – percepatan dengan tetap memperhatikan tepat guna dan tepat mutu dalam pekerjaan konstruksi.

Faktor yang dapat menghambat pencapaian tidak hanya bersifat teknis konstruksi, tetapi juga struktural, fiskal, dan kelembagaan. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting untuk dapat mendukung seluruh kegiatan pembangunan Gedung untuk kepentingan strategis provinsi. Ketersediaan alokasi anggaran menjadi salah satu hal yang menghambat target pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga kesiapan teknis lahan seperti keterbatasan lahan milik pemerintah provinsi,status tanah belum bersertifikat, tumpang tindih aset pemerintah, penetapan lokasi pembangunan, status lahan, dokumen – dokumen pendukung pembangunan seperti feasibility study, andalalin, ukl-upl dan amdal juga menjadi faktor penting dalam suatu pembangunan Gedung serta beberapa pekerjaan yang belum bisa dilaksanakan sedikit banyaknya disebabkan oleh kesiapan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan pemenuhan syarat-syarat teknis dan administrasi.

Hal ini menyebabkan keterlambatan pembangunan gedung baru, proyek harus melalui proses administrasi pertanahan terlebih dahulu, peningkatan waktu perencanaan teknis (DED).

Bangunan pemerintah saat ini wajib memenuhi berbagai standar:

- Keselamatan konstruksi
- Ketahanan gempa
- Ramah disabilitas
- Efisiensi energy (greenbuilding)
- Standar pelayanan publik

Akibatnya :

- Perencanaan teknis lebih kompleks.
- Waktu perencanaan lebih panjang.
- Biaya konstruksi meningkat

Hal tersebut membatasi jumlah gedung yang dapat diselesaikan dalam satu tahun.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain :

Memperbaiki kualitas perencanaan agar kegiatan fisik tidak terlambat pelaksanaan dengan melakukan :

- Penyusunan DED (Detail Engineering Design) dan dokumen lingkungan lebih awal (pre-construction activity);
- Penetapan lokasi pembangunan sejak tahap RKPD;
- penyusunan asset mapping gedung pemerintah provinsi berbasis kondisi bangunan (good–minor–major damage).

Pemerintah Provinsi juga akan mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan di alokasi anggaran yang terbatas dalam pembangunan Gedung untuk kepentingan strategis provinsi agar tetap secara efektif dan efisien dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

11. Persentase jumlah kawasan yang ditata (%)

Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Timur difokuskan pada penguatan peran sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pembangunan mulai diarahkan pada pengembangan kawasan perkotaan yang layak huni dan berdaya saing. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kegiatan penataan kawasan kota, penataan ruang publik dan pengendalian tata ruang.

Tabel 3.54

Persentase jumlah kawasan yang ditata

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
66,67	65,78	98,66%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Realisasi capaian tahun 2025 adalah 65,78% dari target 66,67% dengan persentase capaian 98,66%. Realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2024 realisasi 48,99% /dan tahun 2023 16,67%. Hal ini menunjukkan sebagian besar kawasan prioritas provinsi telah masuk tahap penataan, baik melalui pembangunan infrastruktur kawasan, peningkatan kualitas lingkungan, terbuka publik.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian antara lain :

Adanya dokumen perencanaan ruang wilayah yang menjadi dasar legal penataan kawasan, yaitu:

- RTRW Provinsi,
- Rencana kawasan strategis provinsi,
- Pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota.

Keberadaan dokumen tersebut mendorong:

- Kepastian lokasi pembangunan,
- Pengendalian alih fungsi lahan,
- Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik kawasan.

Artinya, kegiatan penataan kawasan dapat dilaksanakan karena sudah memiliki dasar perencanaan spasial yang jelas.

Faktor penghambat dalam pencapaian antara lain :

1. Walaupun capaian indikator menunjukkan tren positif, sampai dengan tahun 2025 masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi optimalisasi penataan kawasan yang bersifat multidimensi terkait kewenangan, fiskal, teknis, dan spasial. Sebagian besar kawasan perkotaan berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Peran provinsi lebih banyak pada koordinasi lintas wilayah, kawasan strategis provinsi, dan pengendalian tata ruang regional. Akibatnya penataan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah kabupaten/kota, dan penataan kawasan lintas wilayah membutuhkan kesepakatan bersama yang memakan waktu.
2. Penataan kawasan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, dan pengembang swasta. Sehingga permasalahan yang muncul adalah perbedaan prioritas pembangunan, perbedaan rencana tata ruang, dan sinkronisasi program belum optimal.

Upaya perbaikan yang dilakukan

1. Optimalisasi Koordinasi dan kesepakatan dalam penambahan jumlah kawasan yang ditata.
2. Meningkatkan kualitas, keterpaduan, dan keberlanjutan kawasan. Banyak kegiatan gagal terlaksana karena perencanaan teknis belum siap saat penganggaran sehingga berupaya seluruh kawasan prioritas wajib memiliki DED

lebih awal.

12. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Mengembangkan infrastruktur dasar permukiman dan bangunan guna mendukung terciptanya kawasan permukiman yang layak huni, sehat, produktif, berwawasan lingkungan serta ramah terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus, merupakan salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan fokus untuk menurunkan luasan kawasan kumuh. Indikator ini menggambarkan luas kawasan kumuh di 10 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang ditangani secara bersama oleh pusat dan daerah dimana sumber datanya berasal dari SK terupdate Kawasan Permukiman Kumuh oleh Walikota/Bupati di Provinsi Kalimantan Timur.

Luas kawasan kumuh yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi terhadap luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi. Lokasi kawasan kumuh mengacu pada Surat Keputusan tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disahkan oleh Bupati / Walikota di Provinsi Kalimantan Timur, yang mana kewenangan Provinsi adalah kawasan dengan luasan kumuh di antara 10 - 15 Ha sesuai yang tercantum di dalam Surat Keputusan tersebut.

Terdapat 7 indikator yang menyebabkan suatu kawasan dikatakan kumuh, antara lain:

a. Kondisi Bangunan Gedung
b. Kondisi Jalan Lingkungan
c. Kondisi Drainase Lingkungan
d. Kondisi Penyediaan Air Minum / Air Bersih
e. Kondisi Pengelolaan Air Limbah
f. Kondisi Pengelolaan Persampahan
g. Kondisi Proteksi Kebakaran

Dari beberapa indikator tersebut seperti pengelolaan persampahan, perlu adanya koordinasi antar Stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya agar penanganan kawasan kumuh dapat diatasi secara optimal.

Tabel 3.55
Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
76,87	113,26	148,13%

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Realisasi capaian pengurangan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi tahun 2025 adalah 113,26 %, melampaui target yang ditetapkan 76,87% dengan

persentase capaian 148,13%. Kenaikan ini cukup signifikan yaitu 57,77 % dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya penambahan kawasan kumuh di luar target. Tahun 2024 realisasi 55,49 % dan tahun 2023 realisasi 56,84%. Tahun 2023 dengan 2024 terdapat perbedaan baseline dan perhitungan karena tahun 2023 baseline dan target penanganan kawasan kumuh mengacu pada dokumen RPJMD 2019 - 2023.

Realisasi untuk kawasan samboja di tahun 2025 ditiadakan karena termasuk dalam wewenang otorita IKN sehingga pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan penanganan.

Luas keseluruhan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi, berdasarkan SK Bupati / Walikota *updated* Tahun 2022 adalah 203.84 Ha. SK yang digunakan adalah yang ter-update pada tahun 2022 dikarenakan untuk mengunci luasan total agar menjadi pedoman dalam menetapkan target pada penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026.

Target kawasan kumuh yang ditangani di tahun 2025 sebagai berikut:

a. Kawasan Samboja Kutai Kartanegara, 12.97 Ha
b. Kawasan Muara Badak Kutai Kartanegara, 12.98 Ha
c. Kawasan Besiq Kutai Barat, 11.60 Ha
d. Kawasan Tanjung Limau (Gunung Elai) Bontang, 11.03 Ha

Luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

a. Kawasan Muara Komam Paser, 11.91 Ha
b. Kawasan Long Ikis Paser, 10.13 Ha
c. Kawasan Maridan I Penajam Paser Utara, 1.29 Ha
d. Kawasan Maridan II Penajam Paser Utara, 7.52 Ha
e. Kawasan Penajam I Penajam Paser Utara, 6.36 Ha
f. Kawasan Penajam II Penajam Paser Utara, 9.31 Ha
g. Kawasan Muara Badak Kutai Kartanegara, 2.77 Ha
h. Kawasan Melak Ulu Kutai Barat, 4.55 Ha
i. Kawasan Melak Ilir 1 Kutai Barat, 7.17 Ha
j. Kawasan Simpang Raya 1 Kutai Barat, 13.22 Ha
k. Kawasan Simpang Raya 2 Kutai Barat, 10.44 Ha
l. Kawasan Sumber Sari 1 Kutai Barat, 13.49 Ha
m. Kawasan Sumber Sari 2 Kutai Barat, 10.11 Ha
n. Kawasan Tanjung Limau (Gunung Elai) Bontang, 7.65 Ha

Persentase target = B/A x 100% = 76.87%

Persentase capaian = C/A x 100% = 113.26%

Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong pencapaian antara lain :

1. Seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Kalimantan Timur telah mengesahkan SK kumuh sehingga dapat dilakukan penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah Provinsi. Penanganan oleh Pemerintah Provinsi didasari pada

luasan yang tercantum pada SK, jika luasan kumuh berada di antara 10 - 15 Ha, maka lokasi kumuh tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

2. Merupakan program prioritas sehingga dapat diakomodir penanganan dan penganggarannya.
3. Adanya penambahan luasan kawasan kumuh yang ditangani yang semula hanya 4 kawasan menjadi14 kawasan.

Adapun faktor yang dapat menjadi hambatan terkait Indikator kumuh yang memberikan skor kumuh tinggi pada suatu kawasan terkadang sulit ditangani seperti kondisi penyediaan air minum salah satu indikator yang memberikan skor kumuh tinggi, namun pada kawasan tersebut belum tersedianya sumber air baku. Disamping itu beberapa daerah di Kalimantan Timur untuk penyediaan air minum bisa jadi bersumber dari alam karena memang culture.

Upaya-upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain lebih mengoptimalkan 1. Koordinasi dengan pihak terkait serta lebih mendefenisikan operasional terkait indikator yg berpengaruh pada luasan kumuh secara lebih spesifik sehingga baseline dapat dilakukan secara real di lapangan.

13. Persentase penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM Bidang Perumahan Rakyat meliputi 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Program Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka antara lain untuk pengurangan kawasan kumuh 10 – 15 Ha, penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman, pengurangan perumahan yang beradadi daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya, dan/atau pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM Perumahan terdiri dari dua jenis layanan yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban bencana
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah.

Tabel 3.56

Jenis Layanan SPM

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
-	**Kategori Indeks Pencapaian SPM**	**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			**(80%)**	**80 %**
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	0	0	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				**20 %**
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi	Jumlah Mutu yang harus dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu yang dilayani / terpenuhi	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100 %
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**				**100 %**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar			**(80%)**	**80 %**
		Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. Jumlah Penerima Yang Harus dilayani	0	0	0	100 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar			**(20%)**	**20 %**
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani/dipenuhi				100 %
	1 Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	10	10	0	100 %

Sumber : https://spm.bangda.kemendagri.go.id/

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan masih dalam Tahap 1-3 dari 4 tahap Penerapan SPM yaitu pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan kebutuhan. Dari tahap tersebut, diperoleh data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan kebutuhan pada 10 Kab/Kota sehingga capaian 100 % dari target 10

Kabupaten/Kota. Untuk ke tahap 4 yaitu implemntasi tergantung dari 3 tahapan tersebut, sehingga jenis layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi masih jumlah yang harus dan dilayani 0 sehingga capaian 100 %, begitu juga fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Capaian SPM Perumahan Rakyat 100% karena tidak ada penetapan bencana oleh Gubernur dan tidak ada penetapan warga negara yang direlokasi akibat program pemerintah provinsi.

Tabel 3.57

Persentase Penyelenggaraan SPM Bidang Perumahan

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
25	25	100

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Capaian indikator Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan Tahun 2025 adalah 25% dari target 25 % sehingga persentase realisasi capaian 100%. Pada target RPD 2024 – 2026, indikator ini ditargetkan tercapai 47,89%, namun pada saat penganggaran tahun 2025, target berubah menjadi 25% karena terdapat anggaran pelaksanaan SPM Perumahan yang dihilangkan dengan beberapa pertimbangan teknis.

Adapun faktor pendorong dalam pencapaian antara lain dengan adanya kebijakan terkait Penerapan SPM bidang Perumahan Provinsi yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar.

Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan yaitu :

1. Perubahan perencanaan. Pada saat penyusunan dokumen RPD Provinsi Kaltim tahun 2024-2026, direncanakan dilakukan relokasi rumah akibat program pemerintah provinsi sebanyak 100 unit dengan target kinerja program 47.89%. Namun, pada saat penganggaran tahun 2025 rencana relokasi rumah tersebut tidak dianggarkan karena belum adanya kesiapan lahan lokasi relokasi oleh pemerintah Kota Samarinda dan Kabupaten Berau. Hal ini mengakibatkan target kinerja program turun menjadi 25%.
2. Bersifat situasional sehingga agak kesulitan menghitung rencana kebutuhan.
3. Validitas data.
4. Definisi operasional masih bersifat umum.

5. Kendala teknis terkait kepemilikan rumah dan rencana lahan serta lainnya.

Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain dengn melakukan koordinasi secara optimal dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait validitas data, defenisi operasional serta perencanaan relokasi rumah di lokasi rawan bencana yang diusulkan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Serta mengusulkan relokasi rumah di lokasi-lokasi bukan fungsi permukiman.

14. Persentase Penanganan PSU Permukiman

PSU Permukiman adalah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk perumahan, meliputi jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penerangan jalan, yang wajib disediakan pengembang untuk menciptakan hunian layak huni, sehat, aman, dan nyaman bagi penghuni, seringkali didukung program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ini adalah komponen penting dalam pengembangan kawasan permukiman, memastikan kualitas hidup penghuni terpenuhi.

Komponen Utama PSU :

- Prasarana: Jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, dan jaringan air limbah.
- Sarana: Taman, tempat ibadah, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya.
- Utilitas: Jaringan listrik (termasuk Penerangan Jalan Umum/PJU).

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintah provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman terkait PSU yaitu menyelenggarakan PSU permukiman.

Tabel 3.58

Persentase Penanganan PSU permukiman

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
52,57	74,58	141,87

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Realisasi capaian tahun 2025 adalah 74,58 % dari target 52,57 % dengan persentase capaian 141,87 %. Hal ini karena jumlah lokasi permukiman yang ditangani PSU pada penganggaran tahun 2025, lebih banyak daripada jumlah lokasi permukiman yang direncanakan. Indikator ini mulai ada di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Adapun Permukiman yang dilengkapi PSU adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan PSU Permukiman Desa Makarti RT. 09 Kab. Kutai Kartanegara

2. Peningkatan PSU Permukiman Loa Bakung Kota Samarind
3. Peningkatan PSU Permukiman Bukit Pinang Raya 2 RT. 13 dan Menuju RUPBASAN Bukit Pinang Kota Samarinda
4. Peningkatan PSU Permukiman Jalan Perintis RT. 32 dan Jalan Perjuangan Gg. Perjuangan 1 RT. 37 Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda
5. Peningkatan PSU Permukiman Jalan Karyo Kampung Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat
6. Peningkatan PSU Permukiman Jalan RT. 9 Kampung Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat
7. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Jalan Perjuangan RT. 03 Kel. Nenang dan Kel. Penajam Kab. Penajam Paser Utara (Pergeseran 2)
8. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Kel. Pejala RT. 03 Kab. Penajam Paser Utara
9. Peningkatan PSU Permukiman Poros Trans Kampung Kamal Kel. Sanipah Kab. Kutai Kartanegara

Faktor pendorong dalam pencapaian dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penambahan lokasi permukiman yang dapat ditangani PSU. Adapun faktor yang dapat menghambat antara lain beberapa paket yang dilakukan pergeseran sehingga pekerjaan menjadi sedikit terlambat dilaksanakan meskipun demikian seluruh pekerjaan dapat diselesaikan di dalam tahun anggaran berjalan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain proses pengadaan dan koordinasi dengan pihak terkait lebih awal dilaksanakan agar penyerapan anggaran tidak terlalu lama.

15. Skoring Penyelenggaraan Tata Ruang

Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan skoring penataan ruang diantaranya karena telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042, didukung dengan adanya Rancangan Peraturan Gubernur tentang Insentif dan Disinsentif Penataan Ruang, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Bontang – Kutai Kartanegara, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempa dan Danau Kaskade Mahakam, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kota Samarinda – Kota Balikpapan, tersusunnya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek tahunan, tersusunnya dokumen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang, terlaksananya Audit Tata Ruang serta berbagai kegiatan pembinaan.

Tabel 3.59

Penilaian Skoring Penataan Ruang

No.	Kinerja	Target	Capaian	Persentase	Keterangan
1.	Aspek Perencanaan	41,23	41,23	100%	
2.	Aspek Pemanfaatan	26,73	26,72	96,43%	
3.	Aspek Pengendalian	15,94	15,93	15,93	

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Skoring Penyelanggaraan Penataan Ruang merupakan nilai yang mencerminkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang ini yang meliputi Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomo 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang diperoleh dari hasil evaluasi dari penilaian tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi dari hasil pemantauan dengan indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri dari aspek pengaturan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang, dan aspek pelaksanaan penataan ruang yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan perencanaan, pemafaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penilaian pada aspek Pengaturan Penataan Ruang merupakan evaluasi terhadap ketersediaan produk hukum bidang Penataan Ruang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila produk hukum belum tersedia, dilakukan penilaian terhadap proses penyusunan dan/atau legalisasi produk hukum bidang Penataan Ruang tersebut. Penilaian pada aspek Pembinaan Penataan Ruang proses evaluasi terhadap kinerja aspek Pembinaan Penataan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan/atau penyusunan bentuk-bentuk Pembinaan Penataan Ruang. Penilaian pada aspek Perencanaan Tata Ruang dilakukan terhadap kinerja aspek Perencanaan Tata Ruang merupakan pengawasan terhadap ketersediaan dokumen RTR dan kelengkapan muatan RTR.

Penilaian pada aspek Pemanfaatan Ruang dilakukan terhadap kinerja aspek Pemanfaatan Ruang merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan KKPR dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. Penilaian pada aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan dilakukan terhadap penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang terdiri atas penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK, penilaian perwujudan

RTR, pemberian Insentif dan Disinsentif, pengenaan Sanksi Administratif, dan penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Tingkat kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi :

a. Tingkat kinerja baik (nilai 80-100) dalam hal sebagian besar indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan tinggi;
b. Tingkat kinerja sedang (nilai 50-79), dalam hal sebagian indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan sedang; dan
c. Tingkat kinerja buruk (nilai 0-49), dalam hal sebagian besar indikator kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak terpenuhi, selanjutnya diberi predikat kepatuhan rendah.

Tabel 3.60

Skoring Penyelenggaraan Tata Ruang

Tahun 2025		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
83,90	83,88	99,98

Sumber data: DPUPR PERA Prov. Kaltim, 2025

Pada tahun 2025, skoring penyelengaraan penataan ruang mencapai nilai 83,88% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,90% dengan persentase realisasi capaian 99,98%. Realisasi capaian ini meningkat dari tahun 2024 yang realisasinya 83,20 namun realisasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023. Tahun 2023 realisasi 83,63%. Tren penurunan pencapaian tahun 2024 dari tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2023, perhitungan kinerja penataan ruang dilakukan dengan menggunakan perhitungan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN tahun 2016. Perhitungan tersebut yang digunakan untuk menghitung target skoring penyelenggaraan penataan ruang tahun 2019 – 2023 yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas PUPR-PERA Tahun 2019 – 2023. Sedangkan pada tahun 2024, dilakukan perhitungan ulang dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, yang di dalamnya mengatur terkait Pengawasan Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang. Perhitungan tersebut yang digunakan untuk menghitung target skoring penyelenggaraan penataan ruang tahun 2023 – 2025 yang tertuang dalam RPD dan Renstra Dinas PUPR-PERA Tahun 2024 - 2026.

Realisasi pada indikator Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang tahun 2025 dibawah target karena terdapat 2 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:

a. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (tidak dapat terlaksana karena tidak terdapat permohonan penerbitan KKPR Berusaha yang merupakan kewenangan provinsi (lintas kabupaten/kota);
b. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang (tidak dapat terlaksana karena tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa penataan ruang).

Capaian nasional untuk indikator skoring penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Laporan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi setiap 2 tahun sekali. Pelaksanaan penilaian terakhir dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga untuk tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian oleh Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2024, capaian nasional berdasarkan Laporan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi adalah 89,64 dengan predikat kinerja baik, dan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan peringkat ke 6 dari 38 Provinsi di Indonesia. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Laporan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2022, Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai sebesar 84,14 dengan peringkat ke 8 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian antara lain :

a. Adanya dukungan pendanaan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
b. Adanya dukungan data/informasi dari Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan;
c. Dukungan pimpinan dan keterlibatan aparatur pelaksana kegiatan mendorong tercapainya target output dan realisasi program sesuai perencanaan.

Adapun faktor penghambat antara lain :

a. Terdapat 2 sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (tidak dapat terlaksana karena tidak terdapat permohonan penerbitan KKPR Berusaha yang merupakan kewenangan provinsi (lintas kabupaten/kota) dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang (tidak dapat terlaksana karena tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa penataan ruang).
b. Data spasial dan nonspasial yang belum sepenuhnya mutakhir, terintegrasi, dan seragam antarinstansi.
c. Pelaksanaan beberapa kegiatan bergantung pada ketersediaan data dan koordinasi dengan instansi lain.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan :

a. Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan yang lebih realistis dan berbasis prioritas, serta mengoptimalkan penganggaran agar selaras dengan target kinerja dan kapasitas pelaksanaan;

b. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait serta pemerintah kabupaten/kota sejak tahap perencanaan;
c. Melakukan pengaturan jadwal kegiatan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan waktu pelaksanaan dalam satu tahun anggaran;
d. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan guna mengidentifikasi hambatan sejak dini dan melakukan langkah korektif secara tepat waktu.

C. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 3.61
Jumlah KK Berlistrik

Tahun 2024		
Target	**Realisasi**	**% Capaian**
1,341,910	1.360.638	107,56

Sumber data: Dinas ESDM Prov. Kaltim, 2025

Jumlah KK Berlistrik adalah jumlah kepala keluarga (KK) yang sudah mendapat akses dan pelayanan listrik, baik dari sumber PLN maupun non PLN. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas listrik kepada masyarakat. Dengan semakin meratanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik yang dibangun oleh PT PLN (Persero) maupun pemerintah, tentunya masyarakat akan semakin mudah memasang listrik sehingga jumlah KK berlistrik bertambah atau meningkat. Di tahun 2025 realisasi KK berlistrik yang dicapai, yaitu sebanyak 1.360.638 KK, melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 1.341,910 KK dengan persenatase capaian 107,56%. Terdapat peningkatan capaian dari tahun 2024 sejumlah 54.034 KK dan tahun 2023-2024 sejumlah 1255013 KK.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaiamana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu; pembangunan sarana penyediaan Tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; pembangunan Tenaga Listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan pembangunan listrik perdesaan. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), khususnya APDAL Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan bagi 904 KK di daerah

terisolasi dan jauh dari jaringan eksisting PLN di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Berau, Kutai Timur, Paser dan Kutai Kertanegara, serta pekerjaan perluasan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik di beberapa dusun/RT pada Tahun 2024 dan 2025 yang sudah terkoneksi dengan jaringan listrik yang bersumber dari PT. PLN (Persero), sehingga masyarakat di sekitar jaringan listrik dapat menjadi pelanggan listrik. Pada tahun 2025, telah dibangun perluasan jaringan distribusi tenaga listrik di 16 desa di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan dana APBD.

Beberapa faktor pendorong dalam pencapaian antara lain :

1. Energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, sehingga secara mandiri banyak terjadi penambahan jumlah Kepala Keluarga/ Rumah Tangga yang menjadi pelanggan listrik PLN.
2. Pertumbuhan/ penambahan jumlah sambungan listrik di wilayah perkotaan atau di wilayah-wilayah yang sudah ada jaringan PLN. Pertumbuhan pelanggan di sektor perkotaan merupakan kontribusi paling besar dalam kenaikan Rasio Elektrifikasi.
3. Adanya program sambungan listrik bagi masyarakat pada tahun 2025, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur, APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sambungan listrik dari program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta, dimana untuk program sambungan listrik melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2025 terpasang 2.900 Sambungan Rumah, sedangkan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM telah menyambung listrik bagi 2.316 KK.

Faktor yang mengahambat pencapaian antara lain :

1. Untuk meningkatkan KK berlistrik diperlukan pembangunan jaringan listrik baru dan perluasan jaringan listrik, yang mana hal tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar.

   Sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 PT. PLN (Persero) tidak mendapatkan pembiayaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN), mengakibatkan melambatnya percepatan program Listrik Perdesaan (Lisdes). Sedangkan Program Lisdes pada 2025 baru dikucurkan di bulan Oktober 2025 melalui Kementerian ESDM, sehingga diperkirakan akan selesai di bulan Maret 2026, dimana di Provinsi Kalimantan Timur akan menambah 37 Desa yang akan dilistriki oleh PLN melalui program tersebut, sehingga jumlah desa berlistrik non PLN akan berkurang dari jumlah saat ini sebanyak 109 desa menjadi 72 desa.

Tabel 3.62

37 Desa Program Lisdes

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Muara Lesan	Kelay	BERAU
2	Lesan Dayak	Kelay	BERAU
3	Panaan	Kelay	BERAU
4	Mapulu	Kelay	BERAU
5	Long Gelawang	Laham	MAHAKAM ULU
6	Muara Ratah	Laham	MAHAKAM ULU
7	Danum Paroy	Laham	MAHAKAM ULU
8	Delang Kerohong	Long Pahangai	MAHAKAM ULU
9	Long Pakaq	Long Pahangai	MAHAKAM ULU
10	Long Pakaq Baru	Long Pahangai	MAHAKAM ULU
11	Batoq Kelo	Long Bagun	MAHAKAM ULU
12	Lamin Pulut	Kenohan	KUTAI KARTANEGARA
13	Lamin Telihan	Kenohan	KUTAI KARTANEGARA
14	Senambah	Muara Bengkal	KUTAI TIMUR
15	Mulupan	Muara Bengkal	KUTAI TIMUR
16	Tepian Langsat	Bengalon	KUTAI TIMUR
17	Mawai Indah	Batu Ampar	KUTAI TIMUR
18	Himba Lestari	Batu Ampar	KUTAI TIMUR
19	Beno Harapan	Batu Ampar	KUTAI TIMUR
20	Mugi Rahayu	Batu Ampar	KUTAI TIMUR
21	Pelawan	Sangkulirang	KUTAI TIMUR
22	Tepian Terap	Sangkulirang	KUTAI TIMUR
23	Mandu Dalam	Sangkulirang	KUTAI TIMUR
24	Mandu Pantai Sejahtera	Sangkulirang	KUTAI TIMUR
25	Saka	Sangkulirang	KUTAI TIMUR
26	Peridan	Sangkulirang	KUTAI TIMUR
27	Rantau Buta	Batu Sopang	PASER
28	Rantau Layung	Batu Sopang	PASER
29	Kiaq	Siluq Ngurai	KUTAI BARAT
30	Tendiq	Siluq Ngurai	KUTAI BARAT
31	Kenyanyan	Siluq Ngurai	KUTAI BARAT
32	Muara Ponaq	Siluq Ngurai	KUTAI BARAT
33	Rikong	Siluq Ngurai	KUTAI BARAT
34	Abit	Mook Manaar Bulatn	KUTAI BARAT
35	Gunung Bayan	Muara Pahu	KUTAI BARAT
36	Muara Ohong	Jempang	KUTAI BARAT
37	Sentalar	Nyuatan	KUTAI BARAT

Sumber data: Dinas ESDM Prov. Kaltim, 2025

2. Terdapat Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang wilayah usahanya mencakup 5 (lima) desa di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Desa Tanjung Manis, Perupuk, Susuk Luar, Marukangan dan Susuk Tengah, yang menyebabkan PT. PLN (Pesero) tidak dapat membangun jaringan listrik di dalam wilayah tersebut, sehingga masyarakat di desa tersebut belum bisa menikmati layanan listrik PLN.
3. Masih terdapat sistem *isolated* (PLTD/ULD) yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) yang mengalami kekurangan daya listrik, sehingga terbatas untuk pengembangan kelistrikan di lokasi dengan sistem *isolated* tersebut.
4. Belum semua dusun/RT dari Desa yang sudah berlistrik PLN dapat terjangkau jaringan listrik, sehingga masih perlu perluasan jaringan listrik hingga ke dusun/RT.

5. Masih adanya tuntutan ganti rugi lahan atau kompensasi tanam tumbuh dari oknum masyarakat terhadap kegiatan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik yang melalui tanah mereka.
6. Lokasi yang tersebar, jarak yang jauh dan kondisi jalan yang sangat sulit untuk dilewati kendaraan untuk mobilisasi material jaringan distribusi tenaga listrik PT. PLN (Persero).
7. Masih terdapat kawasan pemukiman yang masuk ke dalam kawasan konservasi hutan yang mengakibatkan kesulitan dalam pembangunan jaringan distibusi di lokasi tersebut.

Upaya perbaikan yang dilakukan

1. Perlunya dukungan pendanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun APBN melalui Kementerian ESDM dalam rangka mempercepat program pembangunan listrik perdesaan
2. Dukungan Program sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu dari Pemerintah dan program CSR/ kontribusi swasta.
3. Perlunya dukungan dari pemerintah Kabupaten dalam membuka/memperbaiki akses jalan menuju lokasi desa-desa yang belum berlistrik PLN.
4. Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam rangka pendataan rumah tangga yang belum berlistrik yang berada dekat dengan lokasi jaringan PT. PLN (Persero).
5. Terus meningkatkan sinergisitas dan koordinasi dengan pihak terkait (Kemeterian ESDM, PT. PLN (Persero), pemerintah dan masyarakat setempat, dan swasta) dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pencapaian target rasio elektrifikasi (KK berlistrik).
6. Membutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten dalam membuka/perbaikan akses jalan menuju desa-desa yang belum berlistrik PLN.

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 8 : Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan

Indikator : Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKA dihitung dengan menggabungkan beberapa parameter kualitas air yang krusial yang sudah ditetapkan oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) meliputi:

a. Derajat Keasaman (pH): Tingkat asam atau basa air.
b. DO (*Dissolved Oxygen*): Oksigen terlarut yang dibutuhkan makhluk hidup air.
c. BOD (*Biological Oxygen Demand*): Jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai zat organik.
d. COD (*Chemical Oxygen Demand*): Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat kimia.

e. TSS (*Total Suspended Solids*): Zat padat yang tersuspensi dalam air.
f. Kadar Nitrat dan Fosfat: Indikator pencemaran dari limbah pertanian atau domestik.

Target Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 adalah 71,41 dengan realisasi 71,26 atau dengan persentase capaian 99,79 %. Perhitungan IKA untuk tahun 2025 menggunakan hasil pengembangan IKA berbasis formulasi dari *National Sanitation Foundation - Water Quality Index* (NSF - WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Perhitungan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, pada lampiran III. Berikut kategori angka rentang untuk rumus baru dan rumus lama:

- **Kategori angka rentang rumus Baru** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Baik	85 < x < 100
Sedang	60 < x < 85
Kurang	0 < x < 60

- **Kategori angka rentang rumus Lama** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Sangat Baik	90 < x < 100
Baik	70 < x < 90
Sedang	50 < x < 70
Kurang	25 < x < 50
Sangat Kurang	0 < x < 25

Visualisasi data Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kalimantan Timur dari hasil pemantauan pada Sungai dan/atau Danau tahun 2021 sd 2025 yang dihitung menggunakan metode perhitungan Indeks Kualitas Air berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 (Rumus Lama) digunakan untuk menghitung pada tahun 2021 sd 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 (Rumus Baru) digunakan untuk tahun 2025 saja, berikut dapat disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 3.29

Trend Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sd 2025 (rumus lama) dan Tahun 2025 (rumus baru)

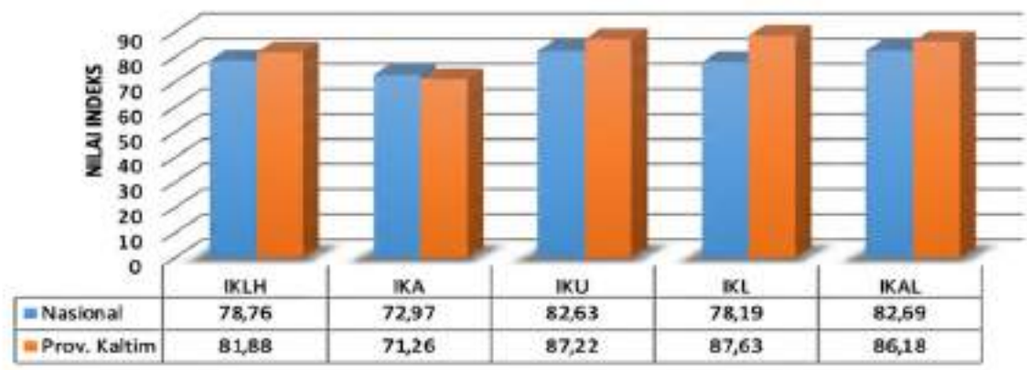


Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 71,26, angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 72,97, hal ini disebabkan oleh tren peningkatan kualitas air yang lebih signifikan di berbagai provinsi lain di Indonesia, yang secara efektif menaikkan standar capaian nasional.

Gambar 3.30

Perbandingan Capaian Nasional dan Capaian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025



Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Kondisi capaian Indeks Kualitas Air (IKA) di Provinsi Kalimantan Timur 71,26 Timur atau dalam kategori Sedang dipengaruhi oleh adanya akumulasi pencemaran dari aktivitas industri, pertambangan batu bara, limbah domestik, serta alih fungsi lahan yang masif. Kondisi ini membuat sungai-sungai besar, seperti Mahakam, Segah, Kelay dan lain-lain didominasi status mutu air nya adalah Cemar Ringan. Berikut beberapa kondisi yang mempengaruhi kualitas air di Kalimantan Timur :

1. Aktivitas Pertambangan Batu Bara dan Lubang Tambang: Pertambangan, terutama batu bara, menjadi salah satu kontributor terbesar kerusakan ekologis. Aktivitas ini menghasilkan limbah pencucian yang asam, keruh, dan mengandung logam berat (seperti arsen dan kromium) yang masuk ke badan air. Lubang bekas tambang sering kali dibiarkan dan berpotensi merusak air tanah serta sungai di sekitarnya.
2. Tingginya Total Suspended Solids (TSS) dan Sedimentasi: Kegiatan pembukaan lahan (deforestasi) dan pertambangan menyebabkan erosi tanah yang masif, meningkatkan sedimen atau TSS di sungai.
3. Limbah Domestik dan Sampah: Padatnya pemukiman di sepanjang bantaran sungai dan danau, khususnya di Samarinda, Kutai Kartanegara dan Berau memiliki kontribusi langsung pada pencemaran air. Seperti limbah domestik, sampah rumah tangga, dan kotoran manusia langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang memadai.
4. Kandungan Fecal Coliform yang Tinggi: Hasil studi menunjukkan bahwa air di Kalimantan, sering kali terpapar polusi *fecal coliform* (bakteri tinja) yang melebihi baku mutu, menandakan sanitasi yang kurang.
5. Karakteristik Alami (Air Gambut): Kalimantan Timur memiliki kawasan air gambut yang secara alami bersifat asam dan berwarna coklat, sehingga memerlukan pengolahan khusus untuk menjadi air bersih.

Gambar 3.31

Peta Pemantauan Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Kualitas Air



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Faktor pendorong capaian Indeks Kualitas Air diantaranya :

1. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pencemaran sungai lintas kab/kota

   Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pencemaran sungai lintas kabupaten/kota di Kalimantan Timur difokuskan pada penguatan kolaborasi sektor untuk menjaga kualitas air dan habitat endemik, seperti pesut Mahakam. Upaya ini mencakup wilayah sungai strategis yang melintasi Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, hingga Kota Samarinda. Melalui

Program Kali Bersih (PROKASIH), pemerintah daerah melakukan implementasi pembersihan dan pelestarian sungai guna memastikan fungsi air tetap terjaga sesuai peruntukannya bagi masyarakat luas.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui pengawasan ketat terhadap pelaku usaha yang memiliki perizinan operasional di sekitar zona riparian untuk mencegah risiko pencemaran serta pendangkalan. Sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menjadi kunci dalam menegakkan kepatuhan izin usaha tersebut. Langkah ini dinilai sangat krusial, tidak hanya untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk menjamin distribusi manfaat lingkungan yang adil bagi masyarakat lokal di sepanjang aliran Sungai Mahakam.

2. Penanganan pencemaran air berskala Provinsi

   Penanganan pencemaran air berskala provinsi di Kalimantan Timur difokuskan pada kejadian pencemaran air dari semua sektor pelaku usaha, khususnya di wilayah Das Sungai Mahakam dengan menerapkan pendekatan kajian pencemaran lingkungan.

3. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui kegiatan PROPERLINK (Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah).

   Program Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah menunjukkan peningkatan ketaatan perusahaan terhadap baku mutu air, dengan penegakan hukum bagi peringkat merah/hitam dan pembinaan untuk mencapai peringkat biru. Program ini mendorong evaluasi ketaatan, seperti pengelolaan limbah cair dan pemantauan air secara berkala, guna meningkatkan kualitas air sungai serta lingkungan. Pada periode Tahun 2024 - 2025 dilaksanakan pada 278 Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah perolehan peringkat sebagai berikut:

Tabel 3.63

Perolehan Peringkat PROPERLINK Usaha dan/atau Kegiatan 2025

No.	Peringkat	Jumlah
1.	Emas	15 Usaha dan/atau Kegiatan
2.	Hijau	40 Usaha dan/atau Kegiatan
3.	Biru	183 Usaha dan/atau Kegiatan
4.	Merah	40 Usaha dan/atau Kegiatan
5.	Hitam	(Tidak ada)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

4. Pelaksanaan Program Kali Bersih berupa kegiatan bersih-bersih sampah sungai

   Fokus Program Kali Bersih di tahun 2025 yaitu untuk mendukung program "Kaltim Bersih Sampah 2025". Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, DLH Kota/Kabupaten, komunitas, dan pihak swasta. Berikut adalah progres dan kegiatan utama bersih-bersih sungai di Kalimantan Timur :

   a. Gerakan Perahu Ketinting: Secara konsisten mengadakan aksi "Gerakan Perahu Ketinting Pungut Sampah" di sepanjang Sungai Karang Mumus. Pada awal Desember 2025, kegiatan ini berhasil mengangkat setidaknya 1,1 ton sampah dari sungai.
   b. Susur Sungai: Aksi bersih-bersih ini menargetkan sampah plastik dan ranting di aliran sungai dan bantaran, seperti yang dilakukan dari Jembatan I Jalan Tongkol hingga Jembatan Baru Jalan KH. Agus Salim.
   c. Sosialisasi dan Penegakan: Selain pembersihan fisik, melakukan sosialisasi "Lomba Kampung SALAI (Sampah Bernilai)" untuk mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya dan mengurangi sampah yang masuk ke sungai
   d. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025: Pemprov Kaltim mengadakan apel bersama dan aksi bersih-bersih lingkungan yang dipusatkan di kawasan Masjid Islamic Center, Samarinda, pada Juni 2025
   e. World Clean Up Day (WCD) 2024-2025: DLH Kaltim terus menggerakkan aksi bersih-bersih serentak dalam rangka WCD untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi sampah di perairan
   f. Sedekah Sampah Bernilai: DLH Kaltim menggabungkan aksi bersih sungai dengan "Sedekah Sampah Bernilai," di mana sampah organik/anorganik yang dikumpulkan dari sungai dipilah dan disalurkan ke Bank Sampah
   g. Penguatan Bank Sampah: Pengurus Forum Komunikasi Bank Sampah Se-Kalimantan Timur diperkuat untuk mendukung target "Kaltim Bersih Sampah 2025".
   h. Pengurangan Sampah Plastik: Kaltim berupaya mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sesuai Jakstranas 2025.
   i. Bankeu Sanitasi: Pemprov Kaltim menyiapkan bantuan keuangan (bankeu) Rp200 miliar untuk mendukung kabupaten/kota meningkatkan akses sanitasi dan mengelola limbah domestik agar tidak mencemari sungai.

5. Penanaman pohon untuk mengurangi terjadinya erosi dan/atau abrasi pada sempadan Sungai

   Penanaman pohon di sempadan sungai wilayah Kalimantan Timur merupakan langkah krusial untuk memperkuat struktur tanah dan mengurangi laju sedimentasi yang masuk ke perairan. Akar pohon berfungsi mengikat tanah, sehingga risiko erosi dan tanah longsor dapat ditekan secara signifikan. Berikut beberapa program penghijauan sempadan sungai yang telah berjalan antara lain:

   a. Sungai Karang Mumus (SKM), Samarinda: Aksi penghijauan rutin yang melibatkan penggiat lingkungan dan pemerintah kota untuk menata kembali bantaran sungai.
   b. Gerakan "Satu Siswa Satu Pohon": Kampanye Pemerintah Provinsi Kaltim yang mendistribusikan lebih dari 123.000 bibit pohon endemik dan buah-buahan untuk memulihkan lahan kritis.
   c. Sungai Loa Ipuh, Kutai Kartanegara: Program penanaman ratusan pohon, termasuk tanaman produktif, untuk meminimalisir abrasi di sepanjang sungai.
   d. BPDAS Samarinda: Secara berkala melakukan penanaman serentak di wilayah aliran sungai, seperti di kawasan Balikpapan dan sekitarnya.

6. Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota tahun 2025

   Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama instansi terkait intensif melakukan sosialisasi pengelolaan sampah di kabupaten/kota untuk mendukung target 100% sampah terkelola pada tahun 2029. Fokus utama meliputi penerapan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), wajib pilah sampah, optimalisasi bank sampah, serta pembatasan plastik sekali pakai di sektor ritel dan usaha. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

   a. Pengelolaan Sampah RIPS: Sosialisasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah untuk pemerintah daerah di Kaltim oleh Pusdal LH Kalimantan untuk mencapai target 100% sampah terkelola pada 2029.
   b. Wajib Pilah Sampah: melakukan sosialisasi wajib pilah sampah dari sumbernya, sejalan dengan instruksi optimalisasi pengelolaan sampah.
   c. Pembatasan Plastik Sekali Pakai: Sosialisasi Peraturan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik di toko ritel dan pelaku usaha lainnya.
   d. Penanganan Sampah dalam rangka penilaian Adipura: melakukan sosialisasi dan penanganan sampah terintensif dalam rangka penilaian Adipura.
   e. Sosialisasi Lomba Kampung SALAI: Peluncuran sosialisasi Kampung SALAI (Sampah Bernilai) untuk mendorong partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan/desa dalam pengelolaan sampah di Samarinda.

7. Intensifikasi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan tahun 2025

   Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup, aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha pada tahun 2025. Kegiatan ini berfokus pada kepatuhan izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan pengelolaan limbah B3, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Berikut poin penting terkait kegiatan tersebut:

   a. Evaluasi dokumen lingkungan, pemantauan pengelolaan limbah, dan pemenuhan baku mutu lingkungan.
   b. Tujuannya mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan memastikan pelaku usaha menaati kewajiban lingkungan hidup.
   c. Selain pengawasan, juga dilakukan fasilitasi dan pembinaan teknis agar pelaku usaha dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Sedangkan untuk faktor penghambat yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan kualitas air diantaranya :

1. Meningkatnya jumlah penduduk : berdampak pada tingginya limbah Domestik dan Sampah yang dapat mempengaruhi pencemaran sungai di Kalimantan Timur, terutama di area padat penduduk seperti Sungai Karang Mumus (Samarinda) dan aliran Sungai Mahakam, yaitu limbah rumah tangga, pasar, dan pemukiman yang langsung dibuang ke badan air. Hal ini juga dipengaruhi perilaku masyarakat membuang sampah langsung ke sungai atau drainase (limbah domestik), terutama di area pemukiman pinggir sungai.
2. Aktivitas Pertambangan dan Industri: Sisa operasional pertambangan batu bara dan industri kecil/menengah, termasuk rumah sakit dan hotel, menyumbangkan beban pencemar organik dan logam berat yang tinggi, meningkatkan nilai BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*).
3. Alih Fungsi Lahan dan Deforestasi: Pembangunan perumahan, perkebunan, dan pertambangan di hulu hingga hilir menyebabkan hilangnya daerah resapan air dan memicu erosi serta sedimentasi, yang menurunkan kualitas air permukaan.
4. Kurangnya Infrastruktur Pengolahan Limbah (IPAL): Masih minimnya instalasi pengolahan air limbah domestik menyebabkan limbah cair langsung mencemari badan air tanpa pengolahan yang efektif.

Sebagai upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya yaitu dengan :

1. Peningkatan Akurasi Data dan Pemantauan

   a. Validasi dan Verifikasi Data: rutin melaksanakan koordinasi evaluasi dan sinkronisasi data kualitas air untuk memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan (valid dan terverifikasi).

b. Penerapan analisis data kualitas air berbasis DPSIR: Menggunakan pendekatan *Driver-Pressure-State-Impact-Response* untuk menganalisis akar penyebab penurunan kualitas air secara lebih spesifik.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum
   a. Penerapan PROPERLINK: Gubernur Kalimantan Timur memperketat Program Penilaian Peringkat Kinerja (PROPERLINK) bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak taat dalam pengelolaan limbah cair akan diberikan sanksi, termasuk peringkat merah atau hitam, untuk memaksa perbaikan pengelolaan limbah.
   b. Penindakan Pencemar: Melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti mencemari sungai di luar baku mutu yang ditetapkan.
3. Pengelolaan Sumber Pencemar (Domestik dan Industri)
   a. Infrastruktur Air Limbah: Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah untuk mengurangi beban pencemaran ke sungai.
   b. Sinergi Instansi: Penurunan kualitas air akibat pencemaran (industri, domestik, pertambangan) perlu koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait lainnya untuk penyamaan persepsi dan aksi bersama.

Edukasi Masyarakat: Mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke selokan dan mengurangi limbah domestik

Indikator : Indeks Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam satu wilayah pada waktu tertentu. Target Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah 86,50 dengan realisasi 86,16 atau dengan persentase capaian 99,61 %. Realisasi tahun 2025 yang mencapai 86,18 dikarenakan adanya peningkatan kualitas air laut di beberapa titik pemantauan kualitas air laut di sepanjang pesisir/laut Provinsi Kalimantan Timur. Rumus perhitungan kualitas air laut tidak mengalami perubahan untuk periode tahun 2025 (sama dengan rumus yang lama) yang membedakan adalah kategorinya saja, untuk tahun 2025 metode perhitungan IKAL mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (lampiran IV). Berikut kategori angka rentang untuk IKAL:

- **Kategori angka rentang berdasarkan** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Baik	$85 < x \leq 100$
Sedang	$60 < x \leq 85$
Kurang	$0 < x \leq 60$

- **Kategori angka rentang** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Sangat Baik	90 < x < 100
Baik	70 < x < 90
Sedang	50 < x < 70
Kurang	25 < x < 50
Sangat Kurang	0 < x < 25

Visualisasi data Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Kalimantan Timur dari hasil pemantauan pada air laut tahun 2021 sd 2025 dihitung menggunakan metode perhitungan Indeks Kualitas Air Laut yang memiliki 2 jenis kategori IKAL yaitu kategori berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 yang digunakan untuk menghitung pada tahun 2021 sd 2025 dan kategori berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 digunakan hanya untuk tahun 2025 saja, berikut dapat disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 3.32



Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menunjukkan performa signifikan dengan melampaui indeks rata-rata nasional sebesar 3,49 poin. Keunggulan ini merepresentasikan efektivitas tata kelola lingkungan perairan di tingkat provinsi yang lebih progresif dibandingkan dinamika kualitas lingkungan di wilayah lain secara nasional. Keberhasilan tersebut didorong oleh serangkaian langkah strategis, antara lain pengetatan pengawasan terhadap operasional industri pertambangan, komitmen berkelanjutan dalam perlindungan ekosistem pesisir, khususnya kawasan mangrove, serta intensifikasi program rehabilitasi terumbu karang. Integrasi kebijakan pemantauan rutin dan upaya pemulihan lingkungan yang sistematis di sektor perairan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan tren positif serta memperlebar margin capaian di atas standar nasional.

Gambar 3.33



Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 3.34

Peta Pemantauan Kualitas Air Laut



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Peningkatan capaian kinerja Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) di Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kombinasi antara upaya konservasi ekosistem pesisir, pengendalian limbah, serta pemantauan intensif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pihak terkait. Meskipun terdapat tekanan dari pertumbuhan industri dan penduduk, beberapa faktor pendorong utama peningkatan kualitas air laut di Kaltim, khususnya berdasarkan grafik tren tahun 2021-2025, antara lain:

1. Pelaksanaan Program Pantai Lestari berupa kegiatan bersih-bersih pantai.
   Pelaksanaan program Pantai Lestari di Kalimantan Timur, seperti aksi bersih-bersih di Pantai Melawai, Desa Kersik, dan Pantai Sipakario, difokuskan pada pengurangan sampah plastik serta edukasi masyarakat pesisir. Kegiatan ini rutin melibatkan TNI AL, komunitas lingkungan, dan pemerintah daerah untuk menjaga ekosistem laut, keberlanjutan ekonomi, dan kenyamanan lingkungan pesisir. Berikut detail Pelaksanaan Program Pantai Lestari di Kaltim Tahun 2025:
   a. Aksi Bersih Pantai Melawai (Balikpapan): Kolaborasi Pemprov. Kaltim dengan Pemkot Balikpapan, Lanal Balikpapan dan KRI Badik-623

mengadakan pembersihan untuk memperingati hari besar (misalnya Hari Pahlawan 2025), melibatkan Pramuka Saka Bahari dan warga lokal.

b. Gerakan di Desa Kersik (Kutai Kartanegara): Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim rutin mengadakan aksi bersih, termasuk pemungutan sampah plastik dan limbah nelayan, lalu memilahnya ke bank sampah.

c. World Cleanup Day (Balikpapan): Kolaborasi dengan komunitas seperti Balikpapan Youth Spirit untuk susur pantai di Pantai Tanjung Kelor, Manggar Baru.

d. Aksi di Pantai Sipakario (Penajam Paser Utara): Polres PPU melakukan bersih-bersih sampah di sepanjang pesisir sebagai wujud kepedulian lingkungan.

2. Terlaksananya kolaborasi dengan Perangkat Daerah, Akademisi, Kabupaten/Kota dan Mitra Usaha dalam rangka penanaman mangrove untuk mengurangi terjadinya abrasi pantai.

Pelaksanaan kolaborasi penanaman mangrove untuk mitigasi abrasi pantai di Kalimantan Timur menunjukkan komitmen kuat yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi, dan Mitra Usaha. Dengan luas ekosistem mangrove mencapai lebih dari 240 ribu hektare. Berikut adalah progres dan detail kolaborasinya tahun 2025:

1) Kolaborasi Pemerintah & Mitra Strategis
   - Kerjasama Internasional: Pemprov Kaltim memperkuat kolaborasi dengan Jerman (melalui proyek GIZ) pada tahun 2025 untuk pengelolaan mangrove berbasis pedesaan.
   - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN): Kemitraan strategis dengan YKAN untuk tahun 2025-2030 yang fokus pada pendampingan masyarakat melalui Akademi Kampung SIGAP dan pemberdayaan ekonomi ramah lingkungan.

2) Aksi di Kabupaten/Kota
   - Kutai Timur (Kutim): Pemkab Kutim bersama mitra (seperti PT APE) melakukan penanaman 4.000 bibit mangrove di Teluk Lingga pada Juni 2025 untuk mencegah abrasi. Penanaman juga dilakukan di Pantai Marang, Desa Kaliorang.
   - Balikpapan: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim bersama pemerintah kota dan mitra industri aktif menanam di pesisir Balikpapan Timur dan kawasan Mangrove Proklim Muara Rapak.
   - Kutai Kartanegara (Kukar): Penanaman oleh akademisi dan dinas pariwisata di Desa Kuala Samboja untuk mitigasi abrasi di Delta Mahakam.

3) Peran Akademisi dan Mitra Usaha
   - Akademisi: Terlibat dalam riset, pemantauan pertumbuhan mangrove, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove.
   - Mitra Usaha (CSR): Perusahaan seperti PT Energi Unggul Persada (EUP) di Bontang aktif dalam penanaman mangrove sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan untuk menjaga pesisir.

Secara keseluruhan, kolaborasi ini berfokus pada rehabilitasi fisik (penanaman) dan pemberdayaan masyarakat agar ekosistem mangrove dapat berfungsi optimal sebagai benteng alami abrasi.

3. Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir laut untuk tidak membuang sampah ke badan air.

   Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup aktif melakukan sosialisasi dan pemantauan terkait pengelolaan sampah di kabupaten/kota yang memiliki pesisir/laut, dengan fokus utama melarang pembuangan sampah ke badan air (sungai/laut) guna mencapai target pengurangan sampah laut pada tahun 2025. Berikut adalah poin-poin penting sosialisasi:
   - Fokus Wilayah Pesisir: Pemantauan dan sosialisasi dilakukan di berbagai kabupaten/kota pesisir seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), dan Berau.
   - Sosialisasi Perubahan Perilaku: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya mengubah perilaku masyarakat untuk tidak menjadikan badan air atau sungai sebagai tempat pembuangan sampah akhir.
   - Target Pengurangan Sampah Laut: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen mengurangi sampah plastik di laut sebesar 70% hingga tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen nasional.
   - Dominasi Sampah Plastik: Hasil pemantauan menunjukkan sampah plastik masih mendominasi sampah di pesisir, sehingga sosialisasi berfokus pada pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaannya di sumbernya.
   - Rencana Aksi Sinergis: Tim Koordinasi Daerah Penanganan Sampah Laut (TKD) melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perusahaan, bank sampah, dan kelompok masyarakat untuk menyusun matrik rencana aksi tahun 2024-2025.

4. Kegiatan pengawasan pembuangan air limbah ke laut, ekosistem pesisir dan laut yang rentan (mangrove, lamun, terumbu karang, dan lain-lain) dan pemulihannya.

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup aktif melakukan berbagai kegiatan pengawasan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem pesisir serta laut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan di wilayah pesisir rentan (seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun). Berikut adalah beberapa poin penting terkait kegiatan yang dilakukan:

- Pengawasan Limbah dan Sampah Laut: melakukan pengawasan pembuangan air limbah, termasuk pemantauan sampah di pesisir dan laut yang bertujuan untuk mencapai target pengurangan sampah plastik ke laut.
- Restorasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir: mendorong restorasi ekosistem mangrove sebagai benteng alami abrasi. Koordinasi pelaksanaan restorasi mangrove dilakukan untuk mendukung kolaborasi lintas sektor.
- Pengawasan Industri dan IPAL: Pemeriksaan teknis terhadap dokumen standar teknis pembuangan air limbah ke laut yang mencakup pengujian kualitas air limbah, sistem pengolahan (IPAL), dan metode pembuangan ke laut.
- Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN): mendukung aksi bersih sampah di kawasan mangrove (seperti di Balikpapan) pada peringatan HPSN 2025.
- Pemantauan Kualitas Air Laut dan Sampah Laut: Pemantauan kualitas air laut dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang terigistrasi KLH dan pemantauan sampah laut di pesisir/laut yang dilakukan bersama akademisi, seperti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.

5. Pengelolaan Pesisir Berkelanjutan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berkomitmen dalam pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas air laut tetap terjaga.
6. Pemantauan Air Laut Rutin: Dilakukan pemantauan kualitas air laut secara berkala (minimal 2 kali dalam setahun) oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengukur parameter fisik, kimia, dan biologi.
7. Kajian Kualitas Air di Wilayah Industri/Pesisir: Adanya kajian mendalam yang memantau kondisi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun untuk mengendalikan dampak pencemaran dari aktivitas manusia.
8. Penerapan IPAL Industri: Dorongan penggunaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada industri dan pertambangan untuk mencegah limbah berbahaya mencemari laut.
9. Teknologi Pengolahan Air Laut: Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan air laut untuk kebutuhan kegiatan pesisir yang menunjukkan fokus pada kelestarian sumber daya.

Dalam meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air laut (IKAL) di Provinsi Kalimantan Timur, juga menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait dengan tingginya beban pencemaran dan keterbatasan teknis. Berikut adalah faktor-faktor penghambat utamanya:

1. Tingginya Sampah Plastik dan Limbah Domestik: Sampah plastik masih mendominasi hasil pemantauan kualitas air laut, khususnya di kawasan pesisir seperti Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Berau.

Hal ini sering kali berasal dari limbah domestik dan industri yang bermuara ke laut.

2. Aktivitas Industri dan Tambang: Pertumbuhan industri yang pesat, khususnya di kawasan pesisir, meningkatkan risiko pencemaran. Selain itu, aktivitas hulu sungai (seperti di Sungai Mahakam) yang tercemar limbah nutrien atau padatan tersuspensi (TSS) akhirnya bermuara ke laut.
3. Faktor Alam (Pasang Surut Ekstrem): BMKG mengeluarkan peringatan mengenai pasang laut yang tinggi di pesisir Kaltim (mencapai 2,8 - 3,1 meter). Hal ini mengganggu aktivitas warga, merusak tambak, dan menyulitkan proses pemantauan/pengambilan sampel kualitas air secara rutin.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Perilaku masyarakat membuang sampah langsung ke laut (limbah domestik), terutama di area pemukiman pinggir pesisir/laut.

Sebagai upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya yaitu dengan :

1. Pengendalian Pencemaran
   a. Penanganan Limbah Industri & Domestik: Melakukan pengawasan ketat terhadap industri pesisir dan meminimalisir pembuangan limbah rumah tangga ke laut.
   b. Pemantauan Kualitas Air: Melakukan pengujian berkala terhadap parameter kualitas air laut untuk memantau status mutu perairan.
2. Penguatan Pengelolaan Lingkungan
   a. Perumusan Kebijakan Teknis: Menyusun aturan dan kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan sumber daya alam di wilayah pesisir.
   b. Peningkatan Kapasitas & Penaatan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.
3. Konservasi Pesisir
   Pengelolaan Ekosistem: Melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai penyaring alami.

a. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Target Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 adalah 92,00 dengan realisasi 92,21 atau dengan persentase capaian 100,23%. Mulai tahun 2025, perhitungan IKU berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, pasal 5 ayat 2 huruf b, pengukuran kualitas udara ambien berdasarkan parameter sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), dan *particulate matter* (PM2,5). Dikarenakan adanya penambahan parameter perhitungan, capaian IKU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengalami

penurunan lebih sedikit dari capaian tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kategori angka rentang untuk IKU mengalami perubahan untuk rumus baru dan rumus lama:

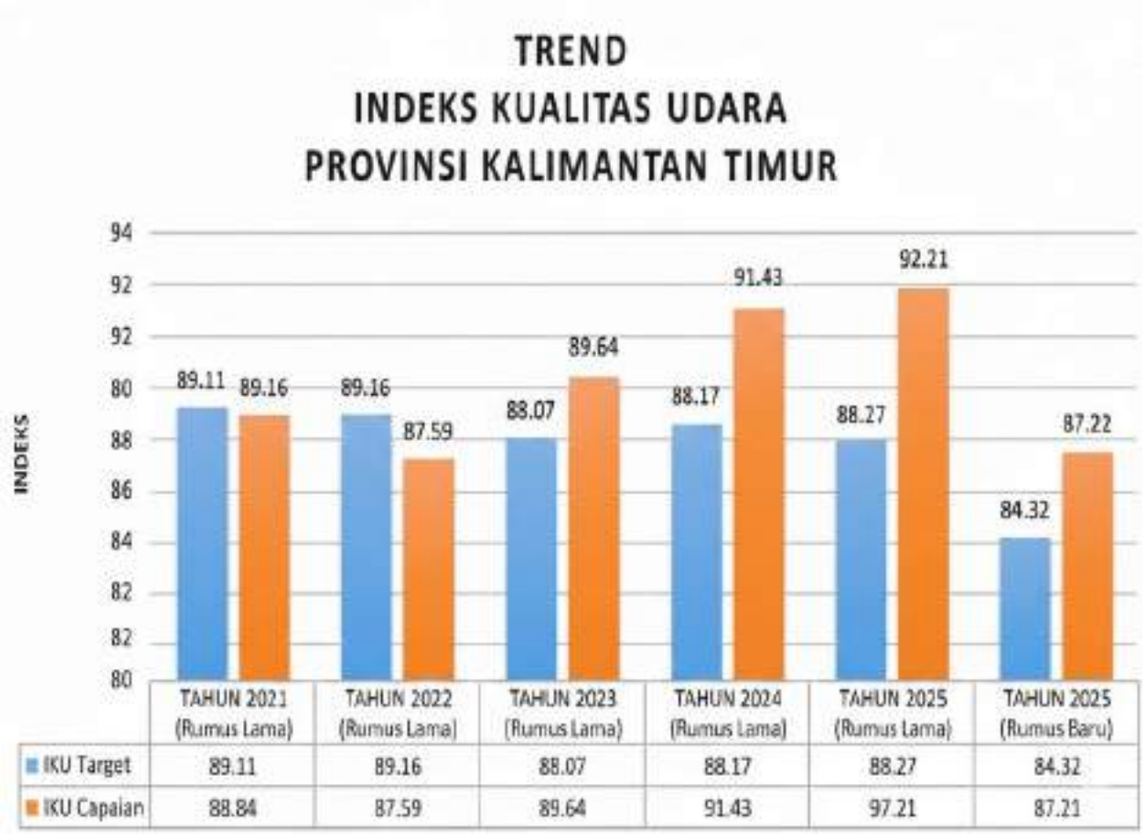
- **Kategori angka rentang rumus Baru** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Baik	$85 < x \leq 100$
Sedang	$60 < x \leq 85$
Kurang	$0 < x \leq 60$

- **Kategori angka rentang rumus Lama** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Sangat Baik	$90 < x < 100$
Baik	$70 < x < 90$
Sedang	$50 < x < 70$
Kurang	$25 < x < 50$
Sangat Kurang	$0 < x < 25$

Visualisasi data Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kalimantan Timur dari hasil pemantauan 10 Kabupaten/Kota pada tahun 2021 sd 2025 yang dihitung menggunakan metode perhitungan Indeks Kualitas Udara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 (Rumus Lama) digunakan untuk menghitung pada tahun 2021 sd 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 (Rumus Baru) digunakan untuk tahun 2025 saja, berikut dapat disajikan dalam grafik di bawah ini:



Gambar 3.35

Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 3.36

Peta Pemantauan Kualitas Udara



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Udara telah berhasil melampaui realisasi nasional yang mana terdapat selisih sebesar +4,59 poin. Hal ini membuktikan bahwa IKU Provinsi Kalimantan Timur lebih baik dari pada IKU Nasional, yang dikarenakan adanya perbaikan dari pengelolaan lingkungan diskala Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan capaian nasional terjadi disebabkan adanya penurunan kualitas lingkungan di luar Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 3.37



Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas udara di Kalimantan Timur, sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara komitmen pemerintah, pengawasan industri, dan faktor iklim. Meskipun wilayah ini merupakan pusat pertambangan, perkebunan, industri dan lain-lain beberapa langkah strategis telah diambil untuk mengendalikan pencemaran, berikut adalah beberapa penyebab utama meningkatnya kualitas udara di Kalimantan Timur:

1. Penguatan Pengawasan dan Regulasi Lingkungan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur aktif melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran udara, termasuk melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja (PROPERLINK) bagi kegiatan usaha.
2. Penerapan Industri Hijau: Perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor pupuk dan energi, mulai menerapkan teknologi ramah lingkungan dan kebijakan industri hijau, seperti yang dilakukan PT Pupuk Kalimantan Timur, untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
3. Pengendalian Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan): Adanya kebijakan dan pengendalian yang lebih ketat terhadap karhutla, yang merupakan penyebab utama penurunan kualitas udara secara drastis di Kalimantan Timur.
4. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH): Di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Bontang dan Kabupaten lainnya upaya mempertahankan RTH dan pemantauan kualitas udara secara konsisten membantu menjaga kualitas udara tetap dalam kategori baik hingga atau baik sekali.
5. Faktor Cuaca/Iklim (Kemarau Basah): Pada tahun 2025, BMKG memprediksi fenomena kemarau basah, yang berarti curah hujan masih tinggi. Hal ini membantu mengurangi potensi karhutla dan membersihkan polutan di udara.
6. Terlaksananya Program Langit Biru berupa kegiatan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menekan polusi udara melalui implementasi Program Langit Biru, khususnya melalui kegiatan Uji Emisi Gas

Buang Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyasar berbagai jenis kendaraan roda empat, mulai dari kendaraan pribadi, dinas, hingga operasional (bensin dan solar), guna memastikan emisi yang dihasilkan tetap berada di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006. Melalui pendekatan pemeriksaan kesehatan kendaraan (*spot check*) yang bersifat edukatif dan gratis, program ini berhasil menarik minat masyarakat tanpa menimbulkan kekhawatiran akan adanya razia kepolisian. Pada tahun 2025, pelaksanaan program ini dipusatkan di tiga kota besar, yakni **Balikpapan, Samarinda, dan Bontang**. Di Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur berkolaborasi dengan DLH Kota Balikpapan menyelenggarakan uji emisi pada Juli 2025 sebagai bagian dari evaluasi kualitas udara untuk penilaian Adipura. Sementara itu, di Kota Samarinda, antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi saat pelaksanaan di titik strategis seperti GOR Kadrie Oening dan GOR Segiri. Kota Bontang juga turut berkontribusi aktif dalam mendukung program ini melalui penyediaan layanan uji emisi serupa, memperkuat sinergi antarwilayah di Kalimantan Timur.

Efektivitas kegiatan ini didukung oleh target operasional yang ambisius, dengan sasaran minimal **700 unit kendaraan teruji per lokasi setiap harinya**. Keberhasilan pencapaian target tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Satlantas Polresta, Dinas Perhubungan, PT Pertamina, serta sektor swasta. Melalui kemitraan strategis ini, Pemerintah Provinsi tidak hanya berfokus pada pengujian teknis, tetapi juga secara aktif meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya perawatan rutin kendaraan demi kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menjadi bukti nyata peningkatan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kualitas udara yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam menjaga dan meningkatkan capaian indeks kualitas udara diantaranya :

1. Kerusakan Alat Pemantau: Sering terjadinya kerusakan pada alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun BMKG di beberapa wilayah, seperti di Samarinda dan Balikpapan yang mempengaruhi kualitas data secara *real-time* dan terus-menerus.
2. Faktor Alam dan Kebakaran Hutan (Karhutla): Karhutla yang sering terjadi tiba-tiba, terutama di musim kering dapat meningkatkan emisi partikulat (PM2.5) secara drastis, sehingga mempersulit analisis konsistensi kualitas udara.
3. Emisi Aktivitas Manusia: Tingginya emisi dari kendaraan bermotor dan aktivitas industri, terutama di kawasan yang berkembang pesat seperti Samarinda, Balikpapan dan Bontang, seringkali melampaui kapasitas penurunan polusi, membuat fluktuasi data Indeks Kualitas Udara (IKU) tinggi.

4. Luas Wilayah dan Sebaran Titik Pantau: Luasnya wilayah Kalimantan Timur tidak sebanding dengan sebaran titik pantau AQMS dan manual passive yang representatif di seluruh kabupaten/kota.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian indeks kualitas udara , uapaya yang akan dilakukan diantaranya :

1. Peningkatan Sarana dan Titik Pemantauan (Monitoring)
   - Perluasan Titik Pantau: Peningkatan jumlah titik pantau hingga 40 titik yang mencakup 10 kabupaten/kota, terbagi menjadi area transportasi, industri, perkantoran, dan pemukiman untuk menggambarkan kondisi udara yang lebih komprehensif.
   - Optimalisasi AQMS: Pemerintah Provinsi Kaltim memaksimalkan penggunaan *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang tersebar di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat.
2. Perbaikan Metode Analisis dan Data
   - Analisis Komposit: Perhitungan nilai komposit parameter kualitas udara (Parameter SO2 dan NO2) dengan menambahkan parameter PM2,5 yang lebih akurasi untuk mendapatkan gambaran akurat dalam satu waktu dan wilayah tertentu.
   - Validasi Data: Melaksanakan koordinasi dan validasi data kualitas udara secara berkala (terverifikasi) untuk memastikan akurasi data sebelum dirilis.
   - Penyempurnaan Data Sumber Emisi: Pemutakhiran data pada sumber emisi, terutama dari sektor limbah, untuk memastikan perhitungan kualitas udara mencakup seluruh kontributor polusi.
3. Tindak Lanjut Program Pengendalian (Action Plan)
   - Uji Emisi Kendaraan: Penyelenggaraan uji emisi gratis secara rutin, terutama di Kota Samarinda, Bontang dan Balikpapan, untuk mengurangi polusi dari sumber bergerak.
   - Penguatan PROPER: Penegakan hukum dan pembinaan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) bagi industri, dengan fokus pada perusahaan yang tidak taat (peringkat merah/hitam) agar memperbaiki pengelolaan emisi udara.
   - Pengendalian Karhutla: Fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan mempengaruhi kualitas udara.
4. Penguatan Tata Kelola
   - Revisi Rencana Aksi (RAD-GRK): Penyempurnaan RAD-GRK (Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca) yang mencakup mekanisme *Monitoring, Evaluation, and Reporting* (PEP) yang efektif untuk penurunan emisi.
   - Evaluasi Strategis: Menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD untuk memastikan prinsip berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Indikator : Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut. Target Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 adalah 88,43 dengan realisasi 88,63 atau dengan persentase capaian 100,23 %. Perhitungan IKL untuk tahun 2025 dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan sebagai IKTL dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut. Perhitungan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, pada lampiran VII. Berikut kategori angka rentang untuk rumus baru dan rumus lama:

- **Kategori angka rentang rumus Baru** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Baik	$85 < x \leq 100$
Sedang	$60 < x \leq 85$
Kurang	$0 < x \leq 60$

- **Kategori angka rentang rumus Lama** (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021)**:**

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Sangat Baik	$90 < x < 100$
Baik	$70 < x < 90$
Sedang	$50 < x < 70$
Kurang	$25 < x < 50$
Sangat Kurang	$0 < x < 25$

Visualisasi data Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kalimantan Timur dari hasil pemantauan 10 Kabupaten/Kota pada tahun 2021 sd 2025 yang dihitung menggunakan metode perhitungan Indeks Kualitas Lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 (Rumus Lama) digunakan untuk menghitung pada tahun 2021 sd 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 (Rumus Baru) digunakan untuk tahun 2025 saja, berikut dapat disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 3.38



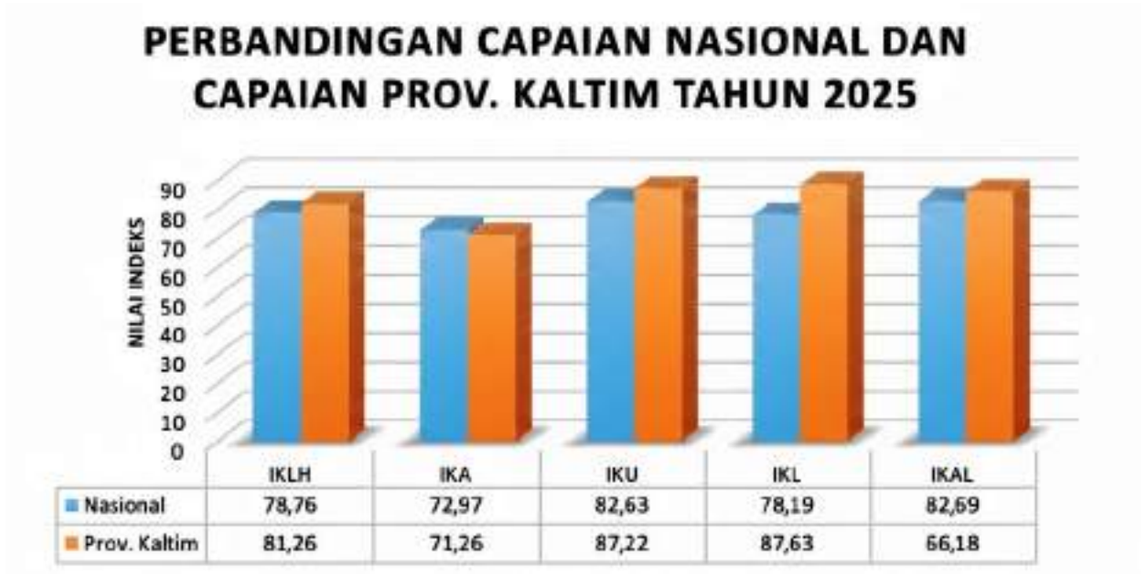
Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan performa yang sangat positif dengan berhasil melampaui realisasi nasional secara signifikan, yakni terpaut selisih sebesar **10,44 poin**. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa kualitas lahan di Kalimantan Timur berada pada kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Fenomena ini dipicu oleh efektivitas perbaikan pengelolaan lingkungan di skala provinsi, sementara penurunan kualitas lingkungan di berbagai wilayah luar Kalimantan Timur justru menjadi faktor penyebab rendahnya angka capaian di tingkat nasional.

Kenaikan indeks yang impresif ini merupakan hasil dari sinergi dan komitmen kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, mitra kerja, serta pengawasan ketat terhadap pelaku usaha dan partisipasi aktif masyarakat. Meskipun Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat kegiatan ekstratif seperti pertambangan, perkebunan, dan industri skala besar, pemerintah telah mengambil langkah strategis yang berfokus pada pengendalian kerusakan lahan. Hal ini dilakukan melalui upaya **rehabilitasi dan restorasi** lahan kritis pascatambang, serta penguatan **penataan tata ruang** melalui validasi dokumen RPPLH dan pembaruan RTRW guna menekan laju alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Lebih jauh lagi, Kalimantan Timur tengah mengakselerasi **transformasi ekonomi hijau** sebagai pilar keberlanjutan masa depan. Kebijakan ini mendorong pergeseran ketergantungan ekonomi dari sektor migas dan pertambangan menuju sektor yang lebih ramah lingkungan, seperti optimalisasi pertanian, perkebunan berkelanjutan, dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Melalui integrasi antara pemulihan ekosistem dan penguatan regulasi, Provinsi Kalimantan Timur optimis dapat menjaga tren positif kualitas lahan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Gambar 3.39



Sumber : Data diolah Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), didorong oleh beberapa faktor utama yang mencakup tutupan lahan, ekosistem gambut, dan pengelolaan lingkungan lainnya. Berikut faktor-faktor pendorong utama capaian kinerja IKL di Kalimantan Timu tahun 2025 :

1. Terlaksananya Mitigasi Dampak IKN (Ibu Kota Nusantara):
   Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menjadi faktor pendorong baru, di mana pemantauan kualitas lingkungan di wilayah penyangga (seperti Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) menjadi sangat intensif untuk memastikan tidak terjadi penurunan kualitas lahan yang ekstrem.
2. Pelaksanaan Program Pangan Untuk Penghijauan
   Program Pangan Untuk Penghijauan (PPH) di Kalimantan Timur merupakan inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dimulai sejak 2022, bertujuan memadukan kelestarian lingkungan dengan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman produktif/buah-buahan ber-ekonomi tinggi. Berikut adalah progres pelaksanaannya:
   - Optimalisasi Lahan Pangan: Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan optimalisasi lahan (Oplah) seluas 13.900 hektar yang tersebar di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, dan Paser.
   - Peningkatan Indeks Pertanaman: Optimalisasi lahan ini bertujuan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi 1,5 hingga tiga kali panen dalam setahun, sekaligus meningkatkan luas panen padi yang pada tahun 2025 tercatat mencapai 66,52 ribu hektare.
   - Penghijauan Berbasis Pangan: Program ini melibatkan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dengan menanam pohon yang

menghasilkan komoditas pangan, seperti budidaya kakao dan tanaman pangan produktif lainnya.

- Aksi Korporasi (PT Pupuk Kaltim): Sebagai bentuk dukungan, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memperkuat program penghijauan dengan menanam 1.977 pohon sepanjang tahun 2025.

3. Upaya kolaboratif dalam mengendalikan pembukaan lahan

   Upaya kolaboratif dalam mengendalikan pembukaan lahan di Kalimantan Timur pada tahun 2025 difokuskan pada pelestarian lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama Pemerintah Pusat, Mitra Pembangunan, dan sektor Swasta, menekankan pendekatan berkelanjutan untuk mencegah deforestasi yang tidak terkendali. Berikut adalah realisasi dan upaya kolaboratif pengendalian pembukaan lahan di Kalimantan Timur tahun 2025:

   - Kerja sama Lingkungan dengan YKAN: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memperpanjang kemitraan hingga 2030 untuk perlindungan kawasan lahan basah, pengelolaan ekosistem gambut, dan penguatan kelembagaan desa.
   - Pengendalian Karhutla: Tim gabungan Pemerintah, TNI-Polri, dan Perusahaan melakukan operasi pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebanyak 63 kali sepanjang awal 2025 (Januari sd Agustus 2025)
   - Jambore Dalkarhutla 2025: Dilaksanakan Apel Siaga dan Jambore Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kaltim pada Bulan Agustus 2025 untuk memperkuat kesiapsiagaan bersama dalam mengantisipasi kerawanan kebakaran lahan.
   - Pengelolaan Bentang Alam Wehea-Kelay: Kolaborasi dengan YKAN dan pelaku usaha untuk menyelaraskan kepentingan bisnis dan konservasi hutan, terutama dalam perlindungan koridor orangutan.

4. Pelaksanaan Program Indonesia Hijau berupa kegiatan rehabilitasi dan revegetasi.

   Progres Program Indonesia Hijau di Kalimantan Timur pada tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam pemulihan lingkungan, dengan target rehabilitasi dan revegetasi yang signifikan untuk mengatasi deforestasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur aktif memantapkan program ini, didukung oleh kolaborasi dengan Pemerintah pusat, sektor Swasta, dan Masyarakat. Berikut adalah poin-poin progres Program Indonesia Hijau pada tahun 2025:

   - Target Rehabilitasi Lahan: Kalimantan Timur menargetkan pemulihan atau rehabilitasi lahan dengan target IKL 82,45 dan tercapai 88,63, yang memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rehabilitasi Hutan & Lahan (RHL) dari 10 Kabupaten/Kota.

- Reforestasi Mandiri: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat upaya reforestasi (penanaman kembali) mencapai komitmen 17 ribu hektare per tahun, dengan fokus area di Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.
- Penyediaan Bibit: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan telah menyiagakan lebih dari 1 juta (1.091.702) bibit pohon dari 36 jenis tanaman untuk mendukung program penghijauan.
- Penanaman Serentak: Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025 menjadi momentum utama dengan penanaman pohon serentak, salah satunya dilakukan di Samarinda sebagai bentuk "Sedekah Oksigen".
- Data Indeks Kualitas Lahan (IKL) tervalidasi: Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Rehabilitasi Hutan & Lahan (RHL) dari 10 Kabupaten/Kota tervalidasi melalui aplikasi IKLH (SITALA) per November 2025, menunjukkan transparansi dalam pemantauan reforestasi.
- Kolaborasi Industri: Perusahaan di Kalimantan Timur turut memperkuat penghijauan dengan target ribuan pohon pada 2025 sebagai bagian dari aksi manajemen lingkungan.
- Integrasi Ekonomi Hijau: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong investasi hijau dan pengelolaan hutan sosial, termasuk inisiatif *Tropical Forest Forever Facility* (TFFF) untuk mendanai konservasi.

Hal-hal yang masih menjadi tantangan sekaligus faktor penghambat dalam menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya saat ini Provinsi Kalimantan Timur tengah menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa akibat tingginya laju alih fungsi lahan. Pesatnya perkembangan industri ekstraktif, terutama pertambangan batu bara dan perluasan perkebunan skala besar, menjadi faktor utama yang menggerus tutupan lahan vegetasi alami secara signifikan. Kondisi ini semakin terakselerasi seiring dengan pembangunan infrastruktur masif untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Transformasi lahan hutan menjadi kawasan terbangun dan area logistik tidak hanya mengurangi luas ruang terbuka hijau, tetapi juga mengubah struktur bentang alam yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan di wilayah penyangga. Di sisi lain, kualitas tutupan lahan di Kalimantan Timur juga mengalami degradasi yang mengkhawatirkan akibat pemanfaatan lahan yang tidak produktif. Banyaknya lahan terbuka bekas aktivitas industri yang belum terpulihkan secara optimal menciptakan hamparan lahan kritis yang menyulitkan proses analisis pencapaian target Indeks Kualitas Lahan (IKL). Ketidakjelasan status produktivitas lahan ini sering kali menimbulkan anomali dalam klasifikasi data spasial, sehingga gambaran kualitas lingkungan di lapangan seringkali tidak selaras dengan data administratif yang dilaporkan.

Tantangan fisik tersebut diperumit oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas teknis mumpuni di tingkat daerah. Saat

ini, Kalimantan Timur masih kekurangan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi dalam melakukan analisis data tutupan lahan yang kompleks, baik dari sisi kuantitas maupun penguasaan teknologi penginderaan jauh. Kesenjangan kompetensi dalam menghitung dan memverifikasi data lapangan ini menjadi hambatan utama dalam penyusunan strategi pemulihan lingkungan. Tanpa dukungan SDM yang kuat, upaya pemantauan IKL akan kehilangan akurasi, yang pada akhirnya dapat menghambat pengambilan kebijakan berbasis data untuk melestarikan ekosistem di Benua Etam.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan difokuskan pada peningkatan akurasi data tutupan lahan, restorasi lahan terdegradasi dan optimalisasi reklamasi pascatambang. Berdasarkan hasil evaluasi dan riset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama tenaga ahli, ada beberapa poin perbaikan strategi:

1. Peningkatan Analisis dan Validasi Data Tutupan Lahan
   - Penguatan Evaluasi data IKL (Indeks Kualitas Lahan): Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) guna memastikan data yang dihasilkan valid dan terverifikasi.
   - Analisis Tutupan Lahan/Vegetasi: Perkuat pemantauan tutupan hutan dan vegetasi sebagai indikator utama kualitas lahan guna memperbaiki nilai komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
   - Kerjasama Tenaga Ahli: Melibatkan Akademisi untuk menyusun kajian ilmiah yang lebih akurat dalam mengevaluasi capaian IKL
2. Strategi Perbaikan Kualitas Lahan (Pengendalian Kerusakan)
   - Rehabilitasi Lahan Mangrove dan Gambut: Fokus pada pemulihan lahan terdegradasi melalui penanaman mangrove dan restorasi ekosistem gambut, terutama melalui rapat koordinasi rutin dan aksi di lapangan.
   - Optimalisasi Lahan Pascatambang: Mendorong revegetasi dan reklamasi lahan pascatambang batu bara, termasuk inokulasi mikroorganisme tanah (jamur *Arbuscular mycorrhizal*) untuk mempercepat pemulihan kesuburan tanah.
   - Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang untuk Pangan: Mengubah lahan bekas galian tambang menjadi kawasan produktif seperti pertanian (contoh: jagung) dan ketahanan pangan berkelanjutan.
3. Kebijakan dan Peningkatan Tata Kelola
   - Integrasi ke dalam RENSTRA dan RPJMD: Menyelaraskan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 pada Perangkat Daerah terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kalimantan Timur tahun 2025-2029 untuk berorientasi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas lahan.

- Pengawasan dan Pengendalian: Meningkatlkan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan dan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan yang ketat.

Sasaran 9 : Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan

Indikator : Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* BAU

Indikator ini mengukur efektivitas upaya mitigasi melalui perbandingan antara jumlah emisi yang berhasil dikurangi dengan tingkat emisi pada skenario *Business As Usual* (BAU). Skenario BAU sendiri merupakan proyeksi emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang diperkirakan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu jika tidak ada intervensi kebijakan maupun teknologi mitigasi. Rumus perhitungan yang digunakan yaitu :

$$\text{Penurunan Emisi (\%)} = \frac{\text{Emisi BAU} - \text{Emisi Aktual}}{\text{Emisi BAU}} \times 100\%$$

Target capaian Kinerja Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual (BAU)* (%) pada Tahun 2025 sebesar 24,40 %, dan telah terealisasi 22,59 % atau dengan persentase capaian 92,58 %.

Jika dilihat dari sektor kehutanan, nilai baseline emisi GRK sektor kehutanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,82 juta ton CO_2e, yang dihitung berdasarkan rata-rata emisi selama 10 (sepuluh) tahun sebelumnya. Emisi deforestasi dan degradasi dihitung menggunakan data tutupan lahan dengan menganalisis perubahan tutupan lahan dari tahun sebelumnya hingga tahun berjalan, khususnya perubahan dari tutupan berhutan menjadi tutupan non hutan akibat aktivitas manusia. Pada tahun 2025, target indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sub sektor kehutanan dari baseline *Business as Usual* (BAU) ditetapkan sebesar **1,65 juta ton** CO_2e, namun realisasi yang dicapai adalah sebesar **1,54 juta ton** CO_2e. Dengan capaian kinerja sekitar **93,3%**, target tersebut dinyatakan belum sepenuhnya tercapai dengan selisih sebesar **0,11 juta ton** CO_2e. Ketidaktercapaian ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon belum optimal sesuai perencanaan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan teknis. Masih terjadinya deforestasi dan degradasi hutan akibat perubahan penggunaan lahan, perambahan, serta kebakaran hutan menjadi faktor utama yang meningkatkan emisi sekaligus menurunkan kapasitas serapan karbon hutan secara langsung.

Di sisi lain, efektivitas kegiatan rehabilitasi hutan dan restorasi ekosistem belum memberikan dampak serapan karbon yang maksimal pada tahun berjalan akibat kendala teknis seperti keterbatasan waktu tanam, tingkat keberhasilan tumbuh, serta adanya jeda waktu antara penanaman hingga fungsi penyerapan karbon

berjalan optimal. Kondisi ini diperberat oleh tantangan tata kelola dalam sinkronisasi perencanaan, pendanaan, dan implementasi lintas sektor yang memengaruhi efektivitas pengendalian emisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengendalian deforestasi, percepatan rehabilitasi lahan, serta peningkatan kualitas sistem *Measurement, Reporting, and Verification* (MRV) agar target penurunan emisi pada periode berikutnya dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kemudian terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Sektor Perkebunan dari *Business As Usual (BAU),* jika membandingkan tahun 2025 dengan tahun 2024, terjadi penurunan dari 6.46% menjadi 6.14%, hal ini disebabkan karena luasan areal yang dilindungi mengalami penurunan target, sehingga target Indikator Penurunan Emisi GRK sektor Perkebunan dinyatakan belum sepenuhnya tercapai. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor perkebunan berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan berpedoman pada SK Gubernur Nomor 525/K.424/2022. Regulasi ini menetapkan Peta Indikatif Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) seluas 456.827,13 Ha sebagai acuan utama. Penghitungan capaian penurunan emisi tersebut didasarkan pada empat pilar utama, yaitu pengelolaan tutupan lahan pada ANKT, pemanfaatan *Palm Oil Mill Effluent* (POME), penguatan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), serta efektivitas pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

Pada tahun berjalan, realisasi kinerja tercatat seluas 56.957,44 Ha. Angka ini merupakan kontribusi dari Bidang Perkebunan Berkelanjutan melalui penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan seluas 56.237,44 Ha, yang ditambah dengan kegiatan pencegahan serta penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha seluas 720 Ha. Adapun target persentase penurunan emisi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,14%. Angka ini diperoleh dari akumulasi target tahun sebelumnya sebesar 5,59% ditambah target kumulatif tahunan sebesar 0,56% yang diturunkan dari *Baseline Business as Usual* (BAU) sesuai dokumen RAD-GRK Provinsi Kalimantan Timur 2010–2030.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, terdapat selisih capaian sebesar 2,65% dari target yang ditetapkan. Ketidaktercapaian ini mengindikasikan bahwa optimalisasi serapan karbon belum berjalan sesuai perencanaan akibat beberapa faktor struktural dan teknis. Deforestasi yang dipicu oleh perubahan penggunaan lahan, perambahan, dan kebakaran tetap menjadi kendala utama yang meningkatkan emisi sekaligus menurunkan kapasitas serapan karbon. Selain itu, aktivitas peremajaan tanaman kelapa sawit (*replanting*) serta masih adanya pola pembukaan lahan dengan cara membakar di tingkat masyarakat—meskipun sosialisasi Permentan No. 06 Tahun 2025 terus dilakukan—turut menyumbang peningkatan emisi dari garis dasar BAU. Dari sisi tata kelola, efektivitas pencapaian target masih terhambat oleh tantangan sinkronisasi perencanaan, pendanaan, dan implementasi lintas sektor. Selisih antara target dan realisasi ini menegaskan perlunya penguatan strategi pengendalian deforestasi serta peningkatan kualitas sistem pengukuran,

pelaporan, dan verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification* - MRV). Perbaikan menyeluruh pada aspek-aspek tersebut menjadi krusial agar target penurunan emisi sektor perkebunan pada periode berikutnya dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Faktor pendorong capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* BAU yaitu :

1. Penguatan Tata Kelola Kawasan melalui Pengendalian Deforestasi dan Degradasi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan penguatan pengawasan sebagai garda terdepan dalam menjaga tutupan hutan. Upaya ini dilakukan secara konkrit melalui penertiban izin pemanfaatan kawasan dan pembatasan perubahan fungsi hutan yang ketat untuk memastikan luas hutan alam tetap terjaga. Dengan menekan angka deforestasi dan degradasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara langsung mengamankan cadangan karbon hutan yang masif, yang menjadi kunci utama dalam mencapai target penurunan emisi GRK di tingkat regional maupun nasional. Hal lain yang telah dilakukan juga yaitu melalui peningkatan pengawasan pembinaan kepada pelaku usaha Perkebunan, sosialisasi untuk menanam tanaman non sawit serta penerapan Regulasi Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemantauan ANKT di Kawasan Perkebunan dan Masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Serapan Karbon melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) : Sebagai upaya pemulihan ekosistem, maka secara intensif telah dilaksanakan program rehabilitasi pada kawasan hutan lindung, hutan produksi, hingga lahan-lahan kritis di luar kawasan hutan. Meskipun kontribusi serapan karbon dari bibit yang ditanam memerlukan waktu (jangka menengah hingga panjang), langkah ini merupakan investasi ekologis strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menciptakan "penyerap karbon" (*carbon sink*) yang berkelanjutan. Transformasi lahan kritis menjadi area hijau kembali menjadi fondasi penting dalam menyeimbangkan neraca emisi karbon di Kalimantan Timur.
3. Mitigasi Risiko Emisi melalui Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa kebakaran hutan adalah ancaman besar yang dapat memicu lonjakan emisi secara instan dan drastis. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi prioritas yaitu dengan memperkuat sistem deteksi dini dan kesiapsiagaan melalui patroli terpadu serta pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat tapak. Melalui koordinasi lintas sektor yang solid, intensitas dan luas kebakaran hutan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga pelepasan emisi karbon akibat kebakaran, terutama pada lahan gambut yang rentan dapat dicegah secara efektif.
4. Transformasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat via Perhutanan Sosial : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong implementasi program Perhutanan Sosial sebagai solusi konflik tenurial sekaligus strategi mitigasi emisi. Dengan memberikan akses legal dan hak pengelolaan kepada masyarakat, praktik

perambahan hutan dan pembukaan lahan secara liar dapat dialihkan menjadi pengelolaan hutan yang lestari dan bertanggung jawab. Pelibatan masyarakat sebagai aktor utama penjaga hutan terbukti efektif dalam menjaga keutuhan tegakan pohon sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal tanpa merusak fungsi ekologis hutan.

5. Diversifikasi Ekonomi Hijau melalui Multi Usaha Kehutanan pada PBPH : Untuk mengurangi tekanan terhadap hutan produksi, maka penerapan konsep Multi Usaha Kehutanan terus diperkuat. Pendekatan ini menggeser orientasi bisnis dari sekadar pemanenan kayu menuju pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, seperti ekowisata dan perdagangan karbon. Dengan adanya diversifikasi ini, ketergantungan pada penebangan pohon berkurang secara signifikan, sehingga struktur tutupan hutan tetap terjaga utuh sementara nilai ekonomi kawasan hutan tetap dapat dioptimalkan.
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen penurunan emisi melalui integrasi kebijakan teknis dan pendampingan di lapangan, yang mencakup diseminasi pengelolaan POME rendah emisi melalui teknologi penangkapan metana serta percepatan sertifikasi ISPO bagi pekebun untuk menjamin standar keberlanjutan. Upaya ini disinergikan dengan program konservasi lahan dan air guna menjaga daya dukung ekosistem, serta penguatan sistem pengendalian kebakaran lahan dan kebun sebagai langkah preventif terhadap lonjakan emisi karbon. Langkah-langkah strategis tersebut merupakan manifestasi nyata dari implementasi RAD-GRK Provinsi, di mana Pemerintah Daerah bertindak sebagai fasilitator utama dalam memastikan bahwa intensifikasi produksi perkebunan berjalan selaras dengan perlindungan area nilai konservasi tinggi (ANKT) demi tercapainya target pembangunan hijau yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Faktor penghambat capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* BAU yaitu :

1. Tekanan Alih Fungsi Lahan dan Dinamika Pembangunan Wilayah : Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah masih tingginya tekanan terhadap kawasan hutan akibat kebutuhan lahan untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur strategis. Aktivitas ini menciptakan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan target lingkungan, di mana perubahan penggunaan lahan terutama di wilayah dengan aksesibilitas tinggi berpotensi meningkatkan deforestasi. Meskipun pengawasan terus diperketat, dinamika pembangunan ini menjadi faktor eksternal yang secara signifikan mengancam keutuhan cadangan karbon hutan alam.
2. Kompleksitas Pengendalian Deforestasi dan Praktik Ilegal : Meskipun berbagai instrumen kebijakan telah diterbitkan, praktik perambahan kawasan dan pembalakan liar (*illegal logging*) belum sepenuhnya dapat dieliminasi di seluruh penjuru Kalimantan Timur. Sebaran kawasan hutan yang sangat luas menyulitkan

pengawasan total di lapangan, sehingga pembukaan lahan tidak terkendali masih terjadi di beberapa lokasi terpencil. Hal ini mengakibatkan degradasi hutan yang terus berulang, yang tidak hanya mengurangi stok karbon tetapi juga menghambat efektivitas program penurunan emisi yang sedang berjalan.

3. Kerentanan Ekosistem terhadap Anomali Iklim dan Karhutla : Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius berupa ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki musim kemarau atau periode anomali iklim seperti El Niño. Karhutla menjadi faktor penghambat yang sangat signifikan karena satu kejadian kebakaran besar dapat melepaskan emisi karbon dalam jumlah masif ke atmosfer dalam waktu singkat. Selain itu, bekas lahan terbakar mengalami penurunan kemampuan dalam menyerap karbon (*carbon sequestration*) pada periode berikutnya, sehingga membebani target capaian netto emisi daerah.
4. Kesenjangan Sumber Daya, Pendanaan, dan Jeda Waktu Pemulihan Ekosistem : Dalam aspek teknis dan manajerial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran, personil, serta sarana prasarana pendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Kondisi ini diperumit oleh karakteristik kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang bersifat jangka panjang, dimana kontribusi serapan karbon dari bibit yang ditanam saat ini tidak bisa langsung diakui dalam perhitungan emisi tahun berjalan. Keterbatasan sumber daya ini menuntut kreativitas dalam mencari pendanaan alternatif, seperti skema insentif karbon internasional.
5. Kendala Kewenangan Wilayah dan Faktor Sosial-Ekonomi Masyarakat :Tantangan institusional muncul dari adanya pembatasan kewenangan pengelolaan, di mana wilayah strategis seperti Taman Nasional Kutai berada di bawah otoritas Pusat (Kementerian Kehutanan) sesuai PP No. 21 Tahun 2021, sehingga perhitungan emisi tidak mencakup seluruh wilayah administratif provinsi secara utuh. Di sisi lain, ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap pembukaan lahan untuk mata pencaharian tetap tinggi. Tanpa adanya solusi ekonomi alternatif yang konkret dan berkelanjutan bagi warga, tekanan sosial terhadap kawasan hutan akan terus menjadi hambatan dalam pengendalian emisi di tingkat tapak.

Upaya perbaikan dalam meningkatkan capaian Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari *Business As Usual* BAU yaitu :

1. Transformasi Pengawasan Kawasan berbasis Spasial dan Mitigasi Risiko Deforestasi: Upaya perbaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada peningkatan intensitas pengawasan kawasan hutan, terutama pada wilayah yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap deforestasi dan degradasi. Dengan memperkuat pendekatan berbasis data spasial dan analisis risiko, intervensi di lapangan menjadi lebih tepat sasaran dalam mendeteksi perubahan tutupan hutan secara dini. Langkah strategis ini diharapkan mampu menekan potensi emisi dari kehilangan tegakan pohon secara signifikan dan memastikan integritas kawasan hutan di Kalimantan Timur tetap terjaga.

2. Akselerasi dan Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan melalui seleksi jenis tanaman yang memiliki daya serap karbon tinggi serta tingkat keberhasilan tumbuh yang optimal. Fokus utama perbaikan kinerja terletak pada penguatan pemeliharaan pascatanam untuk menjamin keberlangsungan hidup tanaman dalam jangka panjang. Melalui pengawasan ketat terhadap pertumbuhan vegetasi, kontribusi serapan karbon di wilayah Kalimantan Timur diproyeksikan akan meningkat secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.
3. Optimalisasi Sistem Kesiapsiagaan dan Respon Cepat Pengendalian Karhutla: Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur diperkuat melalui integrasi sistem peringatan dini yang dikombinasikan dengan patroli terpadu secara rutin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan peran aktif Masyarakat Peduli Api sebagai mitra strategis di tingkat tapak untuk melakukan deteksi serta penanganan dini. Melalui koordinasi respon cepat, risiko lonjakan emisi gas rumah kaca akibat kebakaran, terutama pada musim kemarau ekstrem, dapat dimitigasi secara efektif sebelum berdampak luas terhadap cadangan karbon daerah.
4. Ekspansi Perhutanan Sosial dan Diversifikasi Multi Usaha Kehutanan: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pemanfaatan kawasan perhutanan sosial agar lebih produktif melalui pengembangan komoditas hasil hutan bukan kayu dan optimalisasi jasa lingkungan. Implementasi konsep Multi Usaha Kehutanan diperluas untuk memberikan alternatif penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Strategi ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembukaan lahan baru, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan di Kalimantan Timur dapat berkurang secara signifikan.
5. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, Kapasitas SDM, dan Sinergi Pendanaan: Keberhasilan penurunan emisi bergantung pada penguatan kapasitas aparatur kehutanan di Kalimantan Timur melalui pelatihan teknis pengelolaan karbon dan pemanfaatan teknologi informasi terbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memprioritaskan sinkronisasi perencanaan lintas sektor antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan seluruh program berjalan selaras. Selain itu, optimalisasi sumber pendanaan berbasis kinerja dan kerja sama multipihak menjadi kunci untuk memperbesar skala dampak program penurunan emisi secara menyeluruh di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Sasaran 10 : Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan

Indikator : Bauran Energi Baru dan Terbarukan

Energi baru dan terbarukan merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi

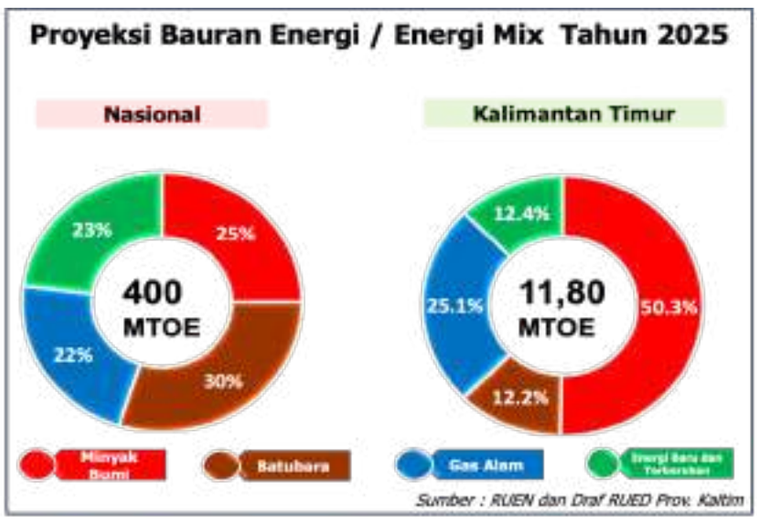
karbondioksida. Bauran energi baru dan terbarukan menggambarkan persentase bauran penggunaan energi baru terbarukan dibandingkan dengan penggunaan energi konvensional tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara dan gas bumi di Provinsi Kalimantan Timur. 3Bauran Energi sendiri terdiri dari 4 komponen utama, yaitu penggunaan minyak bumi (diampu oleh stakeholders Pertamina, PLN, Wilus ketenagalistrikan), Batubara (diampu oleh stakeholders PLN, Wilus ketenagalistrikan, dan pembangkit IPP) , gas bumi (diampu oleh stakeholders Pertamina, PLN, Wilus ketenagalistrikan, PT. PKT, PT. Badak), dan energi baru terbarukan (diampu oleh stakeholders yang menggunakan/membangun infrastruktur energi bau terbarukan). Indikator bauran energi merupakan indikator wajib dari Kemendagri dan Bappenas yang intervensinya lebih banyak oleh Pemerintah Pusat. Dilihat dari struktur bauran energi sendiri, kewenangan Migas, dan Batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Kewenangan pembangkitan Listrik yang dilaksanakan oleh PLN juga dibawah Kementerian ESDM dan BUMN. Sehingga dapat disimpulkan Pemerintah Daerah tidak dapat terlalu banyak mengintervensi kebijakan untuk menaikkan bauran energi secara signifikan kecuali sesuai kewenangannya untuk memstikan kebijakan diimplemetasikan dengan baik. Struktur Bauran Energi terdiri dari Minyak Bumi, Batubara, Gas Bumi dan EBT. Energi Baru Terbarukan sendiri merupakan sumber energi yang berasal dari Alam seperti surya, Air, panas bumi, bioenergi. Pemanfaatan EBT sendiri belum mengikat dan hanya terdapat kewajiban dari pelaku usaha untuk menggunakan bahan bakar nabati dengan proporsi sesuai ketetapan Pemerintah.

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemanfaatan EBT Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Berbagai isu Strategis yang sangat berpengaruh dalam pencapaian pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai. Kontribusi terbesar terhadap peningkatan maupun penurunan bauran energi terdapat pada penggunaan Biofuel (B30, B35, dst) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah sendiri dapat berkontribusi melalui Pembangunan PLTS di daerah 3T namun kontribusinya terhadap bauran masih kecil atau dibawah 0,0005%.

Jika dilihat dari kenaikan bauran energi yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2025, hal ini dapat disebabkan oleh kenaikan penggunaan *mandatory biofuel*. Realisasi capaian bauran energi Kaltim tahun 2025 sebesar 12,78 dengan capaian 103,14 % dari target yang ditetapkan yaitu 12,39 %. Realisasi ini mengalami kenaikan

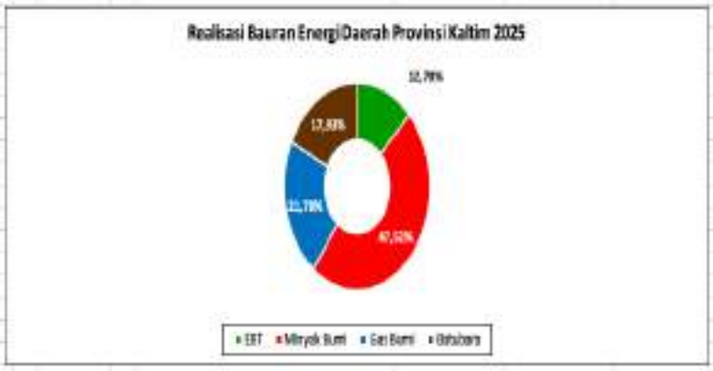
dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 realisasi sebesar 11,44%, dan tahun 2024 sebesar 12,14%. Trend kenaikan ini sebagian besar didorong oleh kebijakan pemerintah pusat dalam program mandatory biofuel sampai dengan B40 (pencampuran bahan bakar nabati sebesar 40% terhadap bahan bakar solar industri), disamping peningkatan konsumsi energi industri yang tumbuh. Belum semua perusahaan yang memanfaatkan bauran energy dikarenakan masih ada ketergantungan dari energi fosil. Ketergantungan tersebut sebagian besar didominasi penggunaan minyak untuk industri dan transportasi, serta gas alam bahan baku industri pupuk. Secara nasional, realisasi bauran energi tidak tercapai dari target 23% dengan realisasi 15,75%. Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik sesuai kewenangannya dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan B40 dengan metode sampling penggunaan B40 pada industri seperti pertambangan , industri perkebunan yang sebagian besar berada di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Paser. Selain itu juga dilakukan inventarisasi konsumsi energi pada pengguna energi besar seperti refinery minyak yang ada di Balikpapan, Bontang, dan Kutai timur serta pembangkitan listrik oleh PLN dan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan seperti Kariangau Power.

Untuk capaian bauran energi saat ini banyak terdongkrak dengan kewajiban penggunaan biofuel sampai 40% pada pelaku usaha. Selain itu, penggunaan pembangkit biomassa pada pabrik kelapa sawit juga membantu menaikkan capaian bauran energi. Sektor pembangkitan Listrik oleh PLN dan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan juga masih banyak menggunakan bahan bakar fosil seperti Batubara dan diesel. Disisi lain, PLTS OIKN sebesar 50 MW juga berkontribusi terhadap kenaikan bauran energi. Untuk Pembangunan infrastruktur EBT oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah 3T, hanya berkontribusi 0,02% terhadap bauran energi Kaltim.



Sumber Data :Dinas ESDM Prov.Kaltim, 2025

BAURAN ENERGI DAERAH – PROVINSI	BOE	TOE	MTOE	%
1 EBT	11.666.532,05	1.633.314,49	1,63	12,78%
2 Minyak Bumi	43.392.044,35	6.074.886,21	6,07	47,52%
3 Gas Bumi	19.890.217,74	2.784.630,48	2,78	21,78%
4 Batubara	16.371.865,61	2.292.061,19	2,29	17,93%
Total	91.320.659,76	12.784.892,37	12,78	100,00%



Sumber Data :Dinas ESDM Prov.Kaltim, 2025

Beberapa faktor pendorong dalam upaya pecapaian kinerja antara lain :

1. Program mandatory Biofuel oleh Pemerintah Pusat.
2. Pembangunan infrastruktur EBT oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah belum terjangkau Listrik Tahun 2025 dengan pembangunan instalasi SHS Apdal sebanyak 904 unit dan PJUTS sebanyak 1072 unit serta Biogas kapasitas 17 M3 sebanyak 11 unit
3. Penggunaan pembangkit EBT oleh Industri dan OIKN. Untuk saat ini PLTS yang dibangun oleh Industri dan OIKN sebesar 68,9 MW (OIKN 50 MW)
4. Adanya kajian potensi EBT seperti pemanfaatan PLTS di lahan bekas tambang yang dapat dijadikan bahan promosi investasi
5. Untuk memudahkan pembaharuan data yang dibutuhkan guna memonitor Bauran Energi Baru dan Terbarukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aplikasi untuk memudahkan *stakeholders* dalam melaporkan penggunaan bauran EBT melalui tautan https://sibaperdesdm.kaltimprov.go.id.
6. Adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Timurnomor 5 tahun 2023 tentang Peningkatan Program Energi Baru Terbarukan dimana salah satunya mengedepankan program AMET (Aksi Mandiri Energi Terbarukan) yang pada intinya mengajak pelaku usaha di Kalimantan Timur menggunakan Energi Baru Terbarukan yang berbasis *reward* dan *insentif* dari Pemerintah Provinsi.
7. Pembentukan Forum Energi Daerah melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.243/2024 yang bertujuan mensinergikan masing-masing kewenangan agar selaras antar Pemerintah Pusat, Daerah, Pelaku Usaha, serta masyarakat. Ketersediaan data stakeholders juga membutuhkan waktu sehingga pelaporan triwulannya sering lewat waktu

Disamping faktor pendorong tersebut, tentunya ada faktor kendala antara lain :

1. EBT masih banyak bersifat voluntary bukan mandatory. yang bersifat mandatory hanya penggunaan bahan bakar nabati, sesuai presentase yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu sebesar 40 %.

2. Investasi besar untuk infrastruktur EBT. Seperti PLTS contohnya, untuk sektor industry dibutuhkan energi yang bisa terus bertahan 24 jam untuk proses produksi. Sedangkan PLTS tanpa storage system hanya bertahan jika matahari ada. Untuk menyimpan energi dibutuhkan baterai storage system yang besar, dimana harganya juga masih cukup tinggi.
3. Gas alam untuk bahan baku industri belum bisa disubstitusi dengan EBT dikarenakan keekonomian dan supply chain yang belum tercipta dengan baik.
4. Ketersediaan EBT terbatas sehingga akan menjadi kendala jika digunakan diindustri yang memebutuhkan tenaga besar.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya perbaikan antara lain :

1. Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timurnomor 5 tahun 2023 tentang Peningkatan Program Energi Baru Terbarukan dimana salah satunya mengedepankan program AMET (Aksi Mandiri Energi Terbarukan) yang pada intinya mengajak industry/pelaku usaha di Kalimantan Timur menggunakan Energi Baru Terbarukan yang berbasis *reward* dan *insentif* dari Pemerintah Provinsi.
2. Melakukan kajian-kajian potensi EBT yang detail.

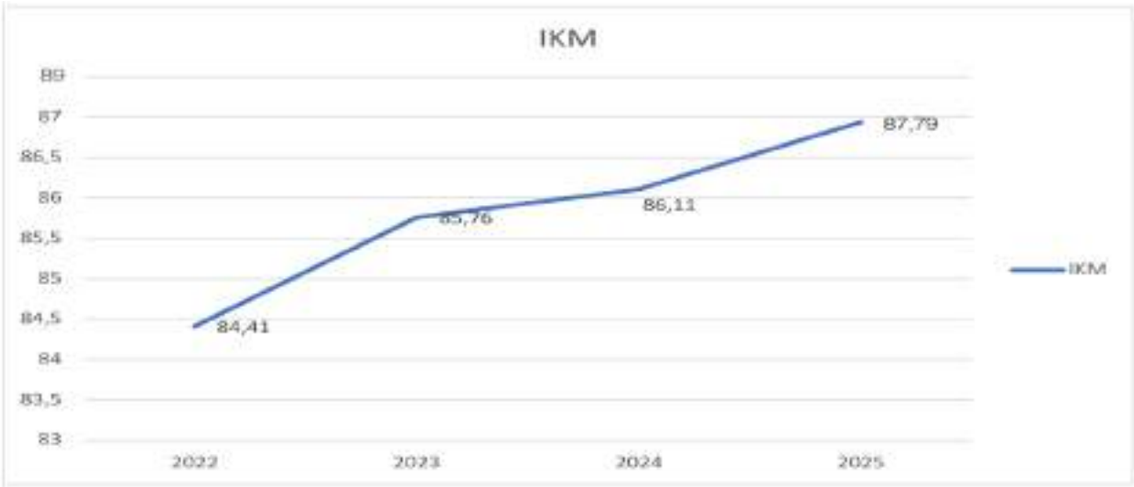
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk pencapaian Indeks tersebut melalui hasil survey kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Pelaksanaan SKM sebagai upaya untuk mengetahui kekurangan/ kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga dapat segera diambil langkah kebijakan dalam rangka melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2025 pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 87,79 dengan kategori B Nilai IKM di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 terhadap 45 Perangkat Daerah dan 5 UOBK. Hasil survey pencapaian indeks dimanfaatkan perbaikan unsur prioritas perbaikan melalui program/kegiatan perbaikan pelayanan. Hasil pencapaian indeks ini secara umum merupakan rata-rata pelaksanaan survey yang dilakukan 2 (dua) kali pada 1 (satu) tahun yaitu dilaksanakan persemester. Sejak tahun 2024 sampai sekarang tahun 2025 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator sasaran seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah.

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui grafik berikut:



Sumber data : Biro Organisasi

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2025 dari rentang nilai 84,41 hingga 87,79 di tahun 2025 di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Perbandingan kenaikan Nilai Indeks 2 (dua) tahun terakhir antara lain 0,35 pada tahun 2024 dan 1,68 pada tahun 2025. Sosialisasi yang dilakukan secara intens dan penetapan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator sasaran tahun 2024-2026 menjadi pendorong peningkatan dan kepatuhan pelaksanaan survey dalam rangka pencapaian indeks. Adapun Perangkat Daerah yang melakukan dan menyampaikan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tahun 2023 sebanyak 37 Perangkat Daerah dengan hasil:

13 Perangkat Daerah kategori A.

23 Perangkat Daerah kategori B.

1 Perangkat Daerah kategori C.

Tahun 2024 sebanyak 39 Perangkat Daerah dengan hasil:

13 Perangkat Daerah kategori A.

25 Perangkat Daerah kategori B.

1 Perangkat Daerah kategori C.

Mengingat tahun 2025 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi indikator sasaran seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Renstra 40 Perangkat Daerah sehingga seluruh Perangkat Daerah telah menyampaikan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil:

14 Perangkat Daerah dan 3 UOBK kategori A.

21 Perangkat Daerah dan 2 UOBK kategori B.

Rentang nilai dari tiap kategori sebagai berikut:

Tabel 3.64

Nilai Persepsi Interval SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	65,00 –76,60	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	76,61 –88,30	B	Baik
4	3,26 – 4,00	88,31 –100,00	A	Sangat baik

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat adalah belum semua unit penyelenggara pelayanan publik menyampaikan laporan realisasi tindak lanjut perbaikan terhadap hasil SKM yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan SKM sebagian besar masih dilakukan secara manual, sehingga tidak dapat dipantau secara real time serta terlambatnya penyampaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Biro Organisasi.

Indikator : Sistem Merit

Berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa penilaian penerapan Sistem Merit didasarkan pada aspek-aspek dan bobot sebagai berikut :

1. Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebesar 10% ;
2. Pelaksanaan pengadaan pegawai sebesar 10% ;
3. Pengembangan karier sebesar 30% ;
4. Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi 10%;
5. Manajemen kinerja sebesar 20% ;
6. Penggajian dan penghargaan serta penegakan disiplin sebesar 10% ;
7. Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas sebesar 4% ;
8. Ketersediaan sistem informasi sebesar 6%.

Penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga Tahun 2025 masih mengacu pada hasil Penilaian Sistem Merit Tahun 2023 yang digunakan sebagai baseline kinerja. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperoleh tingkat penerapan Sistem Merit dengan kategori III, nilai 271, dengan indeks 0,61-0,8 sebutan baik dari nilai maksimal

400 yang mencerminkan bahwa sebagian besar prinsip sistem merit telah diterapkan, meskipun masih terdapat aspek strategis yang perlu diperkuat untuk peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara. Capaian tersebut melebihi target nilai yang ditetapkan 267 (101,49%) dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Sedangkan untuk target 2024 adalah 270 dan Tahun 2025 adalah 275.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara yang mengatur diantaranya penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan mengalihkan tugas pengawasan Sistem Merit ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. Sehingga penilaian penerapan Sistem Merit belum dapat dilakukan di Tahun 2024 dan 2025.

Dalam PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025, penilaian sistem merit diarahkan pada penguatan delapan aspek utama manajemen ASN yang mencakup :

1. Perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan;
2. Manajemen talenta;
3. Pengelolaan kinerja;
4. Pengembangan kompetensi;
5. Penguatan budaya kerja dan citra institusi;
6. Penghargaan dan pengakuan;
7. Disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif; dan
8. Digitalisasi manajemen ASN.

Gambar 3.40
Nilai Sistem Merit Tahun 2023



Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. **Perencanaan Kebutuhan**

   Perencanaan kebutuhan ASN menunjukkan capaian yang tinggi dengan skor 35 dari 40 (87,5%). Kondisi ini menggambarkan bahwa perencanaan kebutuhan kebutuhan pegawai 5 tahun telah disusun secara sistematis dan berbasis analisis jabatan serta analisis beban kerja, serta relatif selaras dengan struktur organisasi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. **Pengadaan ASN**

   Aspek pengadaan ASN memperoleh skor 38 dari 40 (95,0%), yang menunjukkan bahwa proses rekrutmen ASN telah dilaksanakan secara terbuka, kompetitif dan tidak diskriminatif. Capaian ini menegaskan kepatuhan yang kuat terhadap prinsip merit dalam proses pengadaan pegawai. Selain itu, telah melaksanakan evaluasi pasca pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan dasar yang dilaksanakan telah terintegrasi dengan Program Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas.

3. **Pengembangan Karier**

   Pengembangan karier memperoleh skor 57,5 dari 120 (47,9%), yang menunjukkan bahwa aspek ini masih belum optimal. Pemanfaatan hasil pemetaan kompetensi dan kinerja ASN sebagai dasar pengembangan karier, manajemen talenta, dan rencana suksesi jabatan belum berjalan secara menyeluruh, sehingga memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

4. **Promosi dan Mutasi**

   Aspek promosi dan mutasi mencatat skor 20 dari 40 (50,0%). Hal ini menunjukkan bahwa proses promosi dan mutasi ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit dan talent pool. Pemanfaatan data kinerja dan kompetensi sebagai dasar pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan.

5. **Manajemen Kinerja**

   Manajemen kinerja memperoleh skor 52,5 dari 80 (65,6%). Penilaian kinerja ASN telah dilaksanakan dan didukung oleh sistem e-Kinerja, namun hasil penilaian kinerja tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pembinaan karier, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan.

6. **Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin.**

   Aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin memperoleh skor 30 dari 40 (75,0%). Mekanisme penggajian dan penegakan disiplin ASN telah dilaksanakan sesuai ketentuan, serta telah mendukung penerapan prinsip keadilan dan kepastian dalam manajemen ASN.

7. Perlindungan dan Pelayanan

Perlindungan dan pelayanan ASN mencapai skor 16 dari 16 (100%). Seluruh indikator pada aspek ini terpenuhi, diantaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki program perlindungan bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan bantuan hukum kepada pegawai. Ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak ASN, pelayanan kepegawaian, dan penanganan pengaduan telah berjalan dengan sangat baik dan konsisten.

8. Sistem Informasi

Aspek sistem informasi memperoleh skor 22 dari 24 (91,7%). Sistem informasi kepegawaian telah tersedia dan dimanfaatkan dalam pengelolaan data ASN, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi pilot project dalam penggunaan Aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Namun demikian, integrasi antar sistem kepegawaian masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih optimal.

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
1. Perencanaan Kebutuhan			
Rencana kebutuhan 5 tahun belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi terbaru.	Perencanaan 5 tahunan saat ini menggunakan aplikasi Perencanaan SIASN BKN	Fitur Rencana Kebutuhan 5 tahunan belum dapat di akses pada aplikasi Perencanaan SIASN, sehingga pelaksanaan perencanaan kebutuhannya disusun secara konvensional	Mengkoordinasikan ke BKN terkait penggunaan Fitur Rencana Kebutuhan 5 tahunan
Perencanaan kebutuhan yang disusun belum berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja terbaru serta program prioritas/ Renstra Daerah.	Perencanaan kebutuhan ASN saat ini menggunakan aplikasi Perencanaan SIASN BKN yang sesuai dengan anjab ABK dan Program Prioritas / Renstra Daerah	Pasca diterbitkannya UU 20/2023 tentang ASN, dimana mengamanatkan penyelesaian penataan tenaga Non ASN, sehingga mempengaruhi pada perencanaan kebutuhan ASN sesuai program prioritas pada masing-masing perangkat daerah / renstra daerah.	Mengkoordinasikan ke BKN dan KemenPANRB terkait rencana kebutuhan ASN sesuai program prioritas pada masing-masing perangkat daerah / renstra daerah.

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Belum terlihat rencana sumber pengadaan pegawai (diisi dari CPNS, PPPK, atau Pengalihan dari Instansi lain) untuk mencapai kondisi yang ideal	Terdapat aplikasi Perencanaan SIASN BKN	Fitur Rencana Kebutuhan 5 tahunan belum dapat di akses pada aplikasi Perencanaan SIASN, sehingga pelaksanaan perencanaan kebutuhannya disusun secara konvensional oleh masing-masing bidang di BKD	Mengkoordinasikan ke BKN terkait penggunaan Fitur Rencana Kebutuhan 5 tahunan
2. Pengadaan ASN			
Beberapa kebijakan mutasi antar instansi belum diperbarui mengikuti regulasi terbaru.	Surat Edaran terkait penyesuaian Proses Bisnis Mutasi	- Masih mengacu ke Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perpindahan Antar Instansi. - Pergub baru berlum terbit karena menunggu Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN	Membuat surat kepada perangkat daerah terkait penyesuaian Proses Bisnis Mutasi terkini
Data dukung pengadaan pegawai belum sepenuhnya diperbarui (minimal 2020)	Pengadaan pegawai ASN sudah menggunakan aplikasi SIASN BKN		

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
3. Pengembangan Karier			
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum lengkap - hanya standar kompetensi manajerial belum mencakup standar kompetensi teknis, dan sosial kultural - belum menyesuaikan perkembangan peraturan terbaru 2023	telah disusun draft SKJ menyesuaikan peraturan terbaru	SKJ terbaru belum terbit, masih menggunakan SKJ yang sebelumnya	Menyelesaikan Draft SKJ terbaru oleh Biro Organisasi

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Pemetaan potensi dan kompetensi belum memenuhi Manajemen Talenta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020.	1. Koordinasi lintas sektor dan instansi pembina sdh terjalin dengan baik. 2. Dukungan kebijakan nasional dan regulasi yang jelas terkait manajemen talenta ASN. 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi terakreditasi A 4. Dukungan sistem informasi kepegawaian yang mulai terintegrasi. 5. Kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pemetaan potensi pegawai untuk pengembangan karier.	1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan pemetaan kompetensi. 2. Pemetaan kompetensi belum dilakukan secara menyeluruh pada seluruh jabatan/pegawai. 3. Pemanfaatan hasil asesmen dalam pengambilan keputusan kepegawaian belum maksimal. 4. Belum ada tenaga Pranata Komputer Pengelolaan Sistem, Psikolog Klinis, Asesor Sumber Daya Manusia Muda dan Madya	1. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan asesmen kompetensi dan penguatan assessment center. 2. Melakukan pemetaan kompetensi secara bertahap dan prioritas pada jabatan kritikal/strategis; 2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat daerah terkait pemetaan kompetensi dan implementasinya (saat melakukan umpan balik klasikal); 1. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi kompetensi dengan sistem

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
			kepegawaian agar data lebih akurat dan mudah dimanfaatkan. 3. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemanfaatan hasil asesmen untuk perencanaan karier dan pengisian jabatan. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi pemanfaatan hasil pemetaan kompetensi 4. Meningkatkan kapasitas asesor melalui pelatihan, sertifikasi, dan kerja sama dengan instansi pembina.

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Identifikasi kebutuhan diklat pegawai belum dituangkan dalam AKPK/AKD	Telah Tersedia dokumen perencanaan dan kebutuhan pengembangan kompetensi	-	-
Belum memiliki rencana suksesi jabatan.	Jabatan yang lowong yang di bahas pada rapat TPK (Tim Penilai Kinerja)	Belum adanya arahan dari pimpinan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	Membuat Telahan Staf (TS) terkait jabatan yang lowong kepada PPK
Data hasil assessment belum digunakan optimal untuk pengembangan kompetensi	Data Hasil Assessment telah tersedia	Data Hasil Assessment masih tersebar dan harus diolah kembali	Menggunakan data hasil assessment pada aplikasi SIMATA BKN untuk pengembangan kompetensi
Belum menyusun HCDP/AKPK berbasis kesenjangan kompetensi.	tersedia Data Hasil Assessment berdasarkan kesenjangan kompetensi	Tidak Tersedia Analis Pengembangan Kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah	Berkoordinasi dengan BPSDM terkait ketersediaan Analis Pengembangan Kompetensi di Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Identifikasi kebutuhan diklat pegawai belum dituangkan dalam Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK)/AKD;	AKPK telah disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi dasar perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang sistematis dan berbasis individu, dan organisasi.	Program pengembangan kompetensi yang tersedia belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil jabatan dan unit kerja. Akibatnya, sebagian pelatihan yang diikuti ASN belum menghasilkan sertifikasi atau STTP yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan profesionalisme ASN masih terbatas.	Mengoptimalkan pemanfaatan AKPK sebagai dasar penyusunan program pengembangan kompetensi, sehingga jenis dan sasaran pelatihan lebih sesuai dengan kebutuhan jabatan dan mendorong peningkatan kepemilikan sertifikasi dan/atau STTP yang relevan.
Perlu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat	Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN telah dilaksanakan dengan	Pengukuran dampak pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja, kepemilikan sertifikasi dan/atau	memperkuat monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi ASN melalui indikator yang terukur dan terintegrasi dengan kinerja serta kepemilikan sertifikasi

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
	menekankan keterkaitan terhadap peningkatan kinerja ASN,	STTP, serta konsistensinya antar unit kerja masih perlu diperkuat agar hasil pengembangan kompetensi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.	dan/atau STTP, agar dampaknya dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Program pengembangan kompetensi non-klasikal belum dimaksimalkan	- Kewajiban Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, yang menekankan bahwa Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit	1. Akses Internet yang tidak stabil 2. Tidak semua peserta atau pegawai terbiasa menggunakan teknologi pembelajaran online. 3. Peserta sering kurang konsisten karena tidak ada pengawasan langsung seperti di kelas.	Upaya peningkatan partisipasi ASN dalam pengembangan kompetensi dilakukan melalui diversifikasi metode pembelajaran, termasuk pemanfaatan pembelajaran nonklasikal seperti e-learning, coaching, mentoring, dan pembelajaran mandiri. Hal ini di perkuat dengan adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
	20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja, yang menegaskan bahwa Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. - Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university).	4. Dibandingkan pelatihan klasikal, interaksi antara peserta dan pengajar lebih terbatas 5. Peserta sering memiliki beban kerja tinggi, sehingga sulit meluangkan waktu untuk belajar mandiri.	Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
4. Promosi dan Mutasi			
Pola karier belum ditetapkan secara formal (masih draft).	Sudah terbit Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah		
Kebijakan promosi dan mutasi belum sepenuhnya mengacu pada manajemen talenta.	tersedia Data Manajemen Talenta sebagai dasar promosi dan mutasi	Sedang dalam proses pemadanan data ASN	Melakukan Update data ASN terbaru

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Pengisian jabatan belum berbasis talent pool secara konsisten.	Tersedia Data kelompok rencana suksesi	ketidaksesuaian data rekam jejak jabatan dan pendidikan pada kelompok rencana suksesi terhadap jabatan kosong	Verifikasi data rekam jejak jabatan dan pendidikan pada kelompok rencana suksesi terhadap jabatan kosong
5. Manajemen Kinerja			
Belum optimalnya pelaksanaan dialog kinerja.	sudah tersedia matriks peran hasil pada aplikasi E-Kinerja sebagai bentuk dialog kinerja	dialog kinerja belum membudaya di beberapa perangkat daerah	Membuat surat Edaran tentang pelaksanaan dialog kinerja
Analisis permasalahan kinerja belum dilakukan secara sistematis.	Sudah tersedia permasalahan kinerja pada aplikasi E-Sakip	Belum terstukturnya permasalahan kinerja secara sistematis	Melakukan Monitoring dan Evaluasi permasalahan kinerja

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam pembinaan dan pengembangan karier.	Hasil penilaian kinerja telah digunakan pada pembinaan dan pengembangan karier karena menggunakan Manajemen Talenta		
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin			
Tunjangan kinerja masih lebih menitikberatkan pada disiplin kehadiran, Belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.		Belum ada regulasi yang mengatur tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja	Menyusun regulasi pembayaran tunjangan kinerja mempertimbangkan hasil penilaian kinerja
Pemberian Penghargaan bagi Pegawai berprestasi		Belum ada regulasi yang mengatur tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai berprestasi	Menyusun regulasi Pemberian Penghargaan bagi Pegawai berprestasi
7. Perlindungan dan Pelayanan			

Tabel 3.65

Faktor Pendorong dan Penghambat Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek

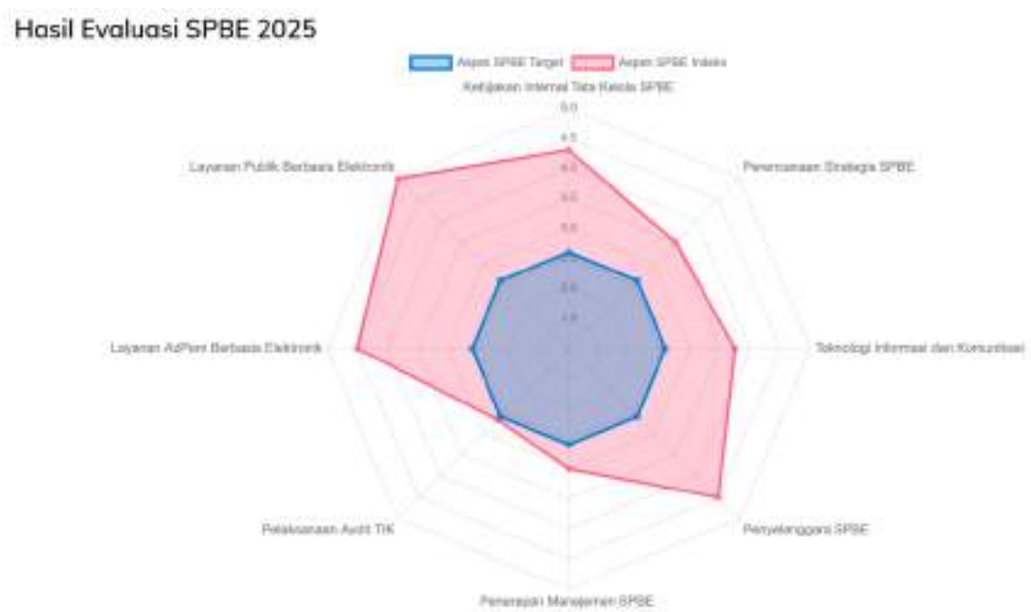
Hasil Verifikasi Evaluasi Penerapan Sistem Merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 pada setiap aspek	Faktor Pendorong s.d. Tahun 2025	Faktor Penghambat s.d. Tahun 2025	Upaya Perbaikan Tahun 2026
Tidak terdapat catatan signifikan dari KASN, Namun perlu memastikan program perlindungan dan pembekalan pensiun dilaksanakan terjadwal.	Telah dilaksanakan asistensi pegawai pensiun	Kegiatan Pembekalan Pegawai pensiun berupa Konseling yang mengundang Psikolog dan Praktisi bisnis serta lokasi studi belajar tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran (efisiensi Anggaran)	Mengusulkan alokasi anggaran kepada tim TAPD
8. Sistem Informasi			
catatan khusus dari sub lain : Sistem informasi Kepegawaian belum mengintegrasikan data Hukuman Disiplin dan Data Kompetensi dengan data kinerja Pegawai	Hukuman Disiplin sudah terintegrasi ke SIASN	1. Untuk data kinerja dan data kompetensi (menggunakan Aplikasi BKN) belum terintegrasi dengan SIMASN 2. API Kinerja dan Kompetesi belum tersedia oleh BKN	Mengkoordinasikan Akses API Kinerja dan Kompetensi dengan BKN

Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital pemerintah. Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap tingkat kematangan SPBE, dimana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiriatas 5 (lima) tingkatan, dimana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimilki oleh instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas instansi Pusat/Daerah tersebut.

Gambar 3.41

Nilai SPBE 2025 berdasarkan aspek SPBE



Pada Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari nilai Indeks SPBE sebesar 4,13, yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 3,79. Perolehan nilai Indeks SPBE melebihi target yang telah ditetapkan 3,85, sehingga pencapaian yang diperolehsebesar 107,27%. Peningkatan tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Apabila dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional Tahun 2025 sebesar 3,23, capaian Indeks SPBE Tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional dengan selisih 0,90 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja SPBE telah tercapai dan bahkan melampaui capaian nasional, sehingga penyelenggaraan SPBE telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Surat Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 21 April 2025 nomor B/66/PD.02/2025 perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, maka pada Tahun 2026 Indeks SPBE akan berubah menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi).

Gambar 3.42

Sebaran Nilai SPBE 2018 - 2025 berdasarkan domain SPBE

No	Nama Domain	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Domain Kebijakan SPBE	-	2,88	-	1,3	1,4	3	3,7	4,30
2	Domain Tata Kelola SPBE	-	3,14	-	2,6	1,7	1,9	3,5	3,80
3	Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1,09	1	1,64	2,82	2,91
4	Domain Layanan SPBE	-	3,03	-	2,69	2,95	3,9	4,32	4,70
5	Indeks SPBE	2,49	3,04	-	2,22	2,11	2,91	3,79	4,13

Capaian Indeks SPBE Tahun 2025 didukung oleh peningkatan pada seluruh domain penilaian. Domain Kebijakan SPBE memperoleh nilai 4,30, yang mencerminkan ketersediaan dan kualitas regulasi internal serta komitmen pimpinan dalam mendukung transformasi digital. Domain Tata Kelola SPBE mencapai nilai 3,80, menunjukkan penguatan kelembagaan, perencanaan, dan koordinasi penyelenggaraan SPBE yang semakin terstruktur. Selanjutnya, Domain Manajemen SPBE memperoleh nilai 2,91, yang menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan sumber daya SPBE, meskipun masih memerlukan penguatan berkelanjutan pada aspek manajemen Sumber Daya Manusia dan pengelolaan layanan TIK. Sementara itu, Domain Layanan SPBE mencapai nilai 4,70, yang mengindikasikan semakin optimalnya penyediaan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Gambar 3.43

Capaian Rata-Rata Indeks SPBE Nasional

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

Faktor-faktor pendorong peningkatan Indeks SPBE Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong utama yang saling mendukung dan terintegrasi. Faktor-faktor tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tata kelola, manajemen, serta penyediaan layanan SPBE secara berkelanjutan.

1. Penguatan Kebijakan dan Komitmen Pimpinan

Salah satu faktor utama pendorong peningkatan Indeks SPBE Tahun 2025 adalah semakin kuatnya kebijakan internal dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan SPBE. Hal ini ditunjukkan melalui penyempurnaan regulasi, pedoman teknis, serta kebijakan strategis yang mendukung integrasi SPBE lintas perangkat daerah/unit kerja. Penguatan kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan nilai Domain Kebijakan SPBE yang mencapai kategori sangat baik. Komitmen Pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatka Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOPSI) dalam mengorkestrasi transformasi digital di daerah. Ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 (ADLG Award 2025) mengukuhkan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Sekretaris Daerah berkinerja digital terbaik tingkat nasional.

2. Peningkatan Tata Kelola dan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE

Peningkatan kinerja pada Domain Tata Kelola SPBE didorong oleh semakin efektifnya mekanisme perencanaan, koordinasi, dan pengendalian SPBE. Peran tim koordinasi SPBE, kejelasan pembagian tugas, serta integrasi perencanaan SPBE dengan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD/Renja) berkontribusi terhadap pelaksanaan SPBE yang lebih terarah dan terukur.

3. Optimalisasi Layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik

    1. Nilai Domain Layanan SPBE yang mencapai 4,70 menjadi faktor dominan dalam mendorong peningkatan Indeks SPBE Tahun 2025. Optimalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik, disertai dengan peningkatan interoperabilitas sistem, kemudahan akses, serta orientasi pada kebutuhan pengguna, telah meningkatkan kualitas dan pemanfaatan layanan SPBE secara signifikan.Capaian pada Aspek Layanan Publik, yang sudah terpenuhi melalui implementasi layanan beasiswa, layanan pajak, layanan investasi serta layanan kesehatan.Pemanfaatan aplikasi umum serta aplikasi khusus dalam mendukung layanan SPBE yang direviu secara berkala dalam pelaksanaannya.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Aplikasi Umum diantaranya adalah :
        1. Aplikasi **Srikandi**, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
        2. Aplikasi **SP4N-LAPOR!**, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;

3. Aplikasi **SPSE**, yaitu Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
4. Aplikasi **SIPD**, yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.Aplikasi ini dapat digunakan untuk otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan, atau kegiatan usaha. Contoh dari Aplikasi Khusus diantaranya adalah :

1. Aplikasi pada Rumah Sakit yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi maupun pelayanan di Rumah Sakit.
2. Aplikasi pada setiap Perangkat Daerah yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi maupun pelayanan di setiap Perangkat Daerah.

4. Konsistensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SPBE

   Konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan SPBE dari tahun ke tahun menjadi faktor pendukung yang penting. Keberlanjutan program digitalisasi, peningkatan kualitas aplikasi, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian SPBE tahun sebelumnya mendorong terjadinya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada Tahun 2025.

5. Peningkatan Pemanfaatan SPBE oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat melalui Literasi Digital

   Meningkatnya pemanfaatan sistem elektronik oleh perangkat daerah serta masyarakat turut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks SPBE. Pemanfaatan yang optimal mencerminkan bahwa layanan SPBE tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara efektif dalam mendukung proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE

   Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang SPBE, khususnya Sumber Daya Manusia teknis TIK dan pengelola layanan digital. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem elektronik secara mandiri serta berkelanjutan.
2. Manajemen SPBE dan Audit TIK yang belum sepenuhnya optimal

   Nilai Domain Manajemen SPBE dan Audit TIK yang masih berada di bawah domain lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan SPBE belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa aspek, seperti penerapan manajemen layanan TIK, manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan SPBE masih memerlukan penguatan agar lebih terstruktur dan terstandar.
3. Pengelolaan keamanan informasi yang masih perlu penguatan

Aspek keamanan informasi dan perlindungan data masih memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam penerapan standar keamanan, pengelolaan risiko, serta peningkatan kesadaran pengguna. Kondisi ini berpotensi menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan keandalan dan kepercayaan terhadap layanan SPBE.

Upaya tindak lanjut

1. Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusiadigital

   Upaya perbaikan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, peningkatan kompetensi pengelola layanan digital, serta penguatan pemahaman perangkat daerah terhadap standar layanan digital. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan responsivitas terhadap kebutuhan pengguna.
2. Penguatan Manajemen Layanan Digital yang berorientasi pada kualitas layanan.

   Pada Tahun 2026, penguatan manajemen layanan digital akan diarahkan pada penerapan manajemen layanan TIK yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pengguna. Hal ini meliputi penetapan standar layanan, pengelolaan keluhan pengguna, serta evaluasi kinerja layanan secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
3. Penguatan keamanan informasi untuk meningkatkan kepercayaan pengguna
4. Penguatan aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi akan terus dilakukan melalui penerapan standar keamanan layanan digital dan peningkatan kesadaran keamanan bagi pengguna. Keamanan yang terjamin merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan digital.
5. Peningkatan integrasi sistem untuk kemudahan akses layanan

   Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan integrasi dan interoperabilitas sistem elektronik lintas perangkat daerah, sehingga layanan digital dapat diakses secara lebih mudah, cepat, dan terpadu. Integrasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan pengalaman pengguna (user experience) dan mengurangi kompleksitas dalam mengakses layanan pemerintah.
6. Penguatan infrastruktur dan keandalan layanan digital

   Peningkatan kualitas infrastruktur TIK akan diarahkan untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan stabilitas layanan digital. Infrastruktur yang andal menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan pengguna dan mencegah gangguan layanan yang dapat menurunkan tingkat kepuasan.
7. Peningkatan kepatuhan terhadap standar layanan dan Kebijakan Pemdi

   Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan standar Pemdi akan diperkuat guna memastikan keseragaman kualitas layanan di seluruh perangkat daerah. Keseragaman ini diharapkan dapat meningkatkan persepsi dan kepuasan pengguna terhadap layanan digital secara menyeluruh.

Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kinerja yang di hasilkan oleh Kepala Daerah dapat dipertanggung jawabkan hasilnya karena proses pelaksanaannya dilakukan secara terukur, tepat sasaran, serta efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya.

Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan ini.

Komponen evaluasi AKIP terdiri dari:

a. perencanaan kinerja (30%)
b. pengukuran kinerja (30%)
c. pelaporan kinerja (15%)
d. evaluasi AKIP internal (25%)

Melalui evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya, akan didapat hasil penilaian dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang didalamnya memberikan gambaran kondisi penerapan SAKIP dan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya. Penilaian dilakukan pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal sesuai Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.

Tabel 3.66

Predikat dan Interpretasi Nilai Akuntabilitas Kinerja

Predikat	Interpretasi
AA **(Nilai > 90 – 100)**	**Sangat Memuaskan** **Telah terwujud *Good Governance.* Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (*Reform)*. Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.**
A **(Nilai > 80 – 90)**	**Memuaskan** **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi**

	hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB **(Nilai > 70 – 80)**	**Sangat Baik** **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal danberbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**
B **(Nilai > 60 – 70)**	**Baik** **Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.**
CC **(Nilai > 50 – 60)**	**Cukup (Memadai)** **Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.**
C **(Nilai > 30 – 50)**	**Kurang** **Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.**
D **(Nilai > 0 – 30)**	**Sangat Kurang** **Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.**

Sumber data : Kemen PANRB

Evaluasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 telah dilakukan secara desk / melalui penilaian dokumen yang telah di upload ke website esr.menpan serta melalui wawancara online via zoom dari Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan unsur Pimpinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yaitu 77,82 atau memperoleh predikat BB (sangat baik) dari target yang telah ditetapkan 80,01. Nilai ini mengalami penurunan jika dibanding tahun 2024 realisasi 78,94 dan 2023 realisasi 77,89 meskipun sempat mengalami peningkatan dari tahun 2023-2024

dengan selisih 0,85. Hal ini dikarenakan tahun 2025 masa transisi antara dokumen pemenuhan RPD/ Renstra 2024 – 2026 atau RPJMD/ Renstra 2025 – 2029 yang saat itu masih proses dan selesai pada September 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai Upaya dalam rangka perbaikan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja, baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah yang menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja, diantaranya :

a. Tim dari unsur pimpinan, Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim melakukan asistensi Renstra seluruh Perangkat Daerah tahun 2024-2026;
b. Melakukan monitoring dan evaluasi data capaian kinerja melalui aplikasi E-SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui pelaksanaan Rapat Pimpinan;
d. Menyusun kebijakan terkait pemberian *reward and punishment* dari hasil evaluasi SAKIP, yang saat ini dalam proses finalisasi.
e. Melakukan asistensi pada hasil capaian indikator sasaran Pemerintah Daerah dalam rangka pendalaman analisis.
f. Melakukan asistensi Perjanjian Kinerja sebagai upaya menjaga keselarasan dengan dokumen RPJMD dan Renstra.
g. Adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.

Dalam penerapan SAKIP, masih terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, diantaranya :

a. Masih terdapat Perjanjian Kinerja Eselon III yang belum disampaikan pada esr.menpan.go.id.
b. Masih ada Penjengan Kinerja belum meperhatikan logical framework dan critical success factor sehingga belum terlihat potensi crosscutting.
c. Masih ada penetapan kinerja yang belum berorientasi hasil sesuai levelnya.
d. Kurang mendalamnya analisis pada capaian terkait dengan faktor pendorong, penghambat dan upaya tindak lanjut.
e. Penjabaran kinerja eselon II masih ada yang belum selaras menunjang capaian kinerja diatasnya.
f. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dalam monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah.
g. Belum semua LHE ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan melakukan fasilitasi dan asistensi terkait :

a. Reviu terhadap penjenjangan kinerja pada tingkat pemda sampai urusan di tingkat Perangkat Daerah dengan memperhatiakn logical framework dan critical success factor agar selaras.
b. Identifikasi dan pemetaan terhadap pohon kinerja untuk melihat potensi crosscutting.
c. Keselarasan rencana aksi dalam pencapaian sasaran melalui indikator.
d. Asistensi Capaian Startegis sebagai bahan penyusunan LPPD dalam rangka penajaman analisis.
e. Melakukan Asistensi Perjanjian Kinerja untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD dan Renstra.
f. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan pada Perangkat Daerah atas hasil rekomendasi dan rencana tindak lanjut.
g. Melengkapi informasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja dengan realisasi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan kinerja tersebut sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja.
h. Melengkapi laporan kinerja pemda maupun Perangkat Daerah dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.
i. Melakukan monev terhadap tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh Perangkat Daerah sehingga dapat mendorong peningkatan capaian kinerja pada level Perangkat Daerah.
j. Menyusun dan menerapkan kebijakan terkait pemberian *reward and punishment* dari hasil evaluasi SAKIP dan Perjanjian Kinerja.

Indikator : Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 3,726 level 3 telah dicapai pada 3,288 level 3 dengan capaian kinerja 88,24%, hal ini didasarkan atas Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Pelaksanaan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor : LHP-339/PW17/3/2025 tanggal 24 Desember 2025. Pencapaian Kinerja atas Tingkat Maturitas SPIP kalua dilihat dari tahun 2023 sd 2025 terjadi trend kenaikan, yaitu di tahun 2023 : 3,034 pada level 3, tahun 2024 : 3,203 pada level 3, tahun 2025 : 3,288 pada level.Terjadi kenaikan pada skornya yaitu tahun 2023 dibanding tahun 2024 ada kenaikan sebesar 0,2 dan tahun 2024 dibanding tahun 2025 kenaikan sebesar 0,1 namun secara level masih berada di level 3. Capaian secara Nasional sudah tercapaua pada level 3

sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden setiap Pemerintah Daerah pada tahun 2025 sudah harus berada pada Level 3.

Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Pelaksanaan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor : LHP-339/PW17/3/2025 tanggal 24 Desember 2025 menggambarkan bahwa Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum memberikan keyakinan yang memadai dalam mendukung pencapaian tujuan. Meskipun dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum dapat sepenuhnya efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya. Hal ini disebabkan atas penilaian beberapa komponen antara lain, yaitu :

a. Terdapat sasaran perangkat daerah yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya dan tidak berorientasi hasil.
b. Terdapat indikator sasaran pemerintah daerah dan perangkat daerah tidak cukup untuk menggambarkan sasaran dan tidak berorientasi hasil.
c. Terdapat target sasaran perangkat daerah yang tidak SMARTC, tidak proyektif, dan tidak memperhatikan capaian tahun lalu.
d. Terdapat sasaran kegiatan yang belum ditetapkan.
e. Indikator program dan kegiatan tidak berorientasi hasil, tidak cukup untuk menggambarkan sasaran, tidak spesifik dan tidak relevan serta terdapat target yang ditetapkan lebih rendah dari target di atasnya.
f. Perangkat daerah belum melakukan pemetaan atas risiko kemitraan secara memadai.
g. Perangkat daerah belum melakukan pemantauan berkala atas risk register dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan untuk memonitor keterjadian risiko dan efektivitas RTP.
h. Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal untuk dapat meningkatkan persepsi pegawai dan masyarakat atas kepercayaan sistem yang melindungi pelapor.
i. Adanya tindak pidana korupsi yang diputuskan pada tahun 2025 yaitu adanya manipulasi data penerima Tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2018 s.d. 2022 di RSUD AW. Sjahranie Kota Samarinda, dengan memasukkan nama-nama pegawai yang seharusnya tidak memperoleh pembayaran TPP dan mengganti nomor rekening pegawai menjadi nomor rekening terdakwa. Hal ini menunjukkan komitmen penegakan integritas dan nilai etika belum menjadi bagian pengendalian transaksi penting serta kurangnya akuntablitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

j. Terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah yang tidak tercapai.
k. Terdapat sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah tidak tepat.
l. Perangkat daerah tidak mengisi target dan capaian sasaran strategis perangkat daerah dan belum melakukan pengujian terhadap capaian sasaran strategis perangkat daerah.
m. Terdapat Indikator kegiatan tidak tepat dengan tujuannya.
n. Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut dari BPK akan tetapi masih terdapat temuan yang berulang.
o. Pengamanan atas Aset Negara Berdasarkan hasil penilaian kewajaran penyajian Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur oleh BPK diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir masih terdapat temuan pengamanan aset yang berulang terkait penatausahaan aset.
p. Pengcascadingan atas proses bisnis sektor belum selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah, sasaran strategis perangkat daerah, sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan sehingga mengandung kelemahan. Kelemahan atas keselarasan program/kegiatan dengan sasaran strategis OPD disebabkan kurangnya pemahaman SDM penyusun program, kegiatan pada perangkat daerah belum memenuhi kaidah perencanaan dan perjenjangan kinerja.
q. Belum terdapat laporan atas pelaksanaan RTP, sehingga tidak dapat diukur efektivitas atas pelaksanaan RTP. Risiko terkait kemitraan dan fraud belum disusun.
r. Hal-hal yang perlu diperhatikan Terkait implementasi SPIP Terintegrasi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
    a) Pelaksanaan SPIP dan manajemen risiko masih bergantung pada peran Inspektorat Daerah;
    b) Komitmen Tim Penilaian Mandiri atas pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan level maturitas belum optimal;
    c) Belum seluruh OPD mengelola risiko kemitraan secara memadai dan belum menyusun risiko fraud;
    d) Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan persepsi pegawai dan kepercayaan masyarakat atas sistem yang dapat melindungi pelapor.
    e) Pengendalian, tata kelola dan risiko pada OPD belum menjadi bagian budaya organisasi.

Disamping itu juga dilakukan atas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas yang diarahkan pada :

a. Sektor Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Untuk dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah menetapkan capaian ultimate outcome pada sasaran pemerintah daerah yaitu terhadap Sasaran Strategis " Ketersediaan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar dengan Indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dann capaian ditahun 2025 adalah 8,39.

b. Sektor Penurunan Tingkat Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 pada Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan jika dilihat tren dari tahun 2020. Capaian TPT tahun 2024 sebesar 5,75%. Capaian ini masih berada di bawah tidak mencapai target nasional yaitu sebesar 4,5%- 5%.

Salah satu isu strategis Nasional yaitu Penurunan prevalensi stunting dan pengembangan wilayah yang merupakan isu strategis local pada Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil evaluasi sector penurunan prevalensi Stunting, berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI), tahun 2024 prevelensi stunting Provinsi Kaltim sebesar 22,9%. Adapun target penurunan stunting pada RPD Pemprov Kaltim Tahun 2025 yaitu 12,83% lebih rendah target nasional yakni dibawah 14%.

Hasil evaluasi sector Pengembangan Wilayah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong sektir pengembangan wilayah sebagai pemicu proses transformasi struktur ekonomi yang bertujuan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas infrastruktur. Pengembangan wilayah memerlukan factor-faktor penting, yaitu potensi sumber daya alam dan SDM, infrastruktur yang memadai, perencanaan tata ruang yang baik, kelembagaan yang kuat, partisipasi masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil evaluasi menujukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu : Hasil evaluasi penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukan adanya peningkatan, meskipun secara level tetap berada pada level 3, namun ada kenaikan pada pencapaian skornya, yaitu di tahun 2023 level 3 skor 3,034 dan tahun 2024 level 3 skor 3,203 dan tahun 2025 level 3 skor 3,288 yang diuraikan sebagai berikut :

a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaran SPIP adalah 3,288 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada **Level 3 (Terdefenisi).**
b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,975 atau belum memenuhi karakteristik MRI pada **Level 2**, dan
c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,037 atau belum memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2.**

Dari target capaian Maturitas SPIP pada Level 3 skor 3,750 dicapai pada level 3 skor 3,288, hal ini disebabkan antara lain dari hasil evaluasi ada beberapa komponen yang belum mencapai skor 3, yaitu antara lain :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika.
b. Kepemimpinan yang kondusif.
c. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
d. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM
e. Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
f. Analisis Risiko
g. Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
h. Pengendalian Fisik atas Aset.
i. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi kejadian
j. Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dab Pencatatannya
k. Informasi yang relevan
l. Komunikasi yang efektif
m. Pemantauan yang berkelanjutan
n. Evaluasi terpisah
o. Efektivitas dan Efisiensi Capaian Outcame dan Output

Terkait implementasi SPIP Terintegrasi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

a) Pelaksanaan SPIP dan manajemen risiko masih bergantung pada peran Inspektorat Daerah;
b) Komitmen Tim Penilaian Mandiri atas pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan level maturitas belum optimal;
c) Belum seluruh OPD mengelola risiko kemitraan secara memadai dan belum menyusun risiko fraud;

d) Pemanfaatan saluran pengaduan belum optimal dan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan persepsi pegawai dan kepercayaan masyarakat atas sistem yang dapat melindungi pelapor.
e) Pengendalian, tata kelola dan risiko pada OPD belum menjadi bagian budaya organisasi.

Praktek baik Implementasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

a. Maturitas SPIP telah dijadikan Indikator Strategis Pemda Prov. Kaltim untuk Tahun 2024-2026 pada dokumen RKPD Pemprov Kaltim Tahun 2024-2026 pada Sasaran 11, yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK dimana target untuk tahun 2025 adalah pada Level 3 (skor 3,750).
b. Memiliki kebijakan pelaksanaan rencana pengendalian kecurangan di lingkungan Pemda Prov. Kaltim :
   - Pergub Kaltim No. 800/K.923/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Prov. Kaltim.
   - Pergub Kaltim No.356/K.320/2019 tentang Pembentukan Satgas Sapu Bersih Pengutan Liar (SABERPUNGLI) di Prov. Kaltim
   - Pergub Kaltim No. 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran serta Cara Pelaporan melalui Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Pemprov. Kaltim.
   - Menyusun SOP Pelaksanaan Whistleblowing System dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan pula terkait adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam rangka pencapaian penyelenggaraan Maturitas SPIP, yaitu :

a. Faktor Pendorong :
   1. Dukungan Organisasi/Perangkat Daerah.
   2. Dukungan Peraturan dan Kebijakan yang mendukung implementasi SPIP.
   3. Dukungan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi dari Aparatur Pengawasan
   4. Dukungan Teknologi / Aplikasi Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP
   5. Adanya Keterlibatan Stakeholder
   6. Pengembangan Kapasitas melalui Diklat/Bimtek/Sosialisasi/FGD Maturitas SPIP.
   7. Adanya Pengelolaan Risiko / Manajemen Risiko Maturitas SPIP.
   8. Tim Penjamin Kualitas (PK) Penyelenggaraan Maturitas SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

b. Faktor Penghambat :

   1. Kurangnya Komitmen Pimpinan terhadap Penyelenggaraan Maturtas SPIP.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Anggaran penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.
3. Kurangnya Komitmen Manajemen.
4. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
5. Perubahan Teknologi dan Perubahan Regulasi terkait Penyelenggaran Maturitas SPIP
6. Ketergantungan pada salah satu ASN dalam pengembangan dan implementasi SPIP.
7. Kurangnya Komunikasi
8. Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Penyelanggaraan Maturitas SPIP.

c. Upaya Perbaikan :

Dalam rangka meningkatkan pencapaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP, beberapa upaya yang sudah dan akan dilakukan, yaitu :

1. Meningkatkan Komitmen Manajemen terhadap dukungan dan komitmen penuh untuk pengembangan dan implementasi SPIP.
2. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Anggaran yang memadai pada Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan Komunikasi diantara Pelaksana dan Tim Penyelenggaraan Maturitas SPIP
4. Meningkatkan Peran Organisasi dan Perangkat Daerah dalam mengembangkan budaya organisasi yang mendukung peningkatan maturitas SPIP.
5. Mengembangkan Sistem Penghargaan untuk meningkatkan motivasi dalam penyelenggaraan Maturitas SPIP.
6. Meningkatkan Pelaksanaan Sosialisasi/Diklat/Bimtek dan FGD Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
7. Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja SPIP secara terus-menerus.
8. Melakukan Pembinaan dan Pemantauan atas Pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Tingkat Strategis Pemprov. Kaltim dan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar Penerapan Manajemen Risiko sebagai Indikator Penilaian Kinerja.
10. Melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang disampaikan pada Laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP.
11. Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
12. Melakukan Kegiatan Penjamin Kualitas Maturitas SPIP dan Fasilitasi serta Asistensi Maturitas SPIP.

3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan capaian nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi			Capaian Nasional 2025
			2023	2024	2025	
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	14,03	14,04	13,30
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,99	10,02	10,10	9,07
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,72	75,03	75,28	74,47
4	Prevalensi Stunting	Poin	22,9	15,12	15,94	-
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,31	5,14	5,18	4,85
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ***)**	Indeks	68,96	61,41		-
7	LPE Non Migas dan Batubara *)	Persen	3,31			-
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,77	0,61	0,83	1,29
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,14	0,1	0,18	0,30
10	Tingkat inflasi	Persen	3,46	1,47	2,68	2,92
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,39	7,89	8,78	-
12	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,64	52,64	71,26	72,97
13	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,36	85,16	86,18	82,69
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,64	91,43	87,22	82,63
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	83,86	84,03	88,63	78,19
16	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	-	50,15	22,59	-
17	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	11,44	11,82	12,78	15,75
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,76	86,11	87,79	-
19	Sistem Merit *)	Poin	271	-	271,00	-
20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,91	3,79	4,13	3,23

21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,89	78,74	77,82	-
22	Tingkat maturitas SPIP	Level	3,034	3,203	3,288	3,288

*) Data realisasi 2024 belum rilis

3.2.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target akhir RPD 2024-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Target Akhir RPD
			Target	Realisasi	2026
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,12	14,04	14,15
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,21	10,10	10,35
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,17	75,28	74,93
4	Prevalensi Stunting	Poin	19,80	15,94	10,00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	5,18	5,14
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ***)**	Indeks	67,64	-	*67,98*
7	LPE Non Migas dan Batubara *)	Persen			6,40-7,20
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,74	0,83	0,74
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,12	0,18	0,10
10	Tingkat inflasi	Persen		2,68	4,30
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,39	8,78	9,05
12	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,41	71,26	53,72
13	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	86,50	86,18	82,15
14	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	87,22	88,37
15	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,43	88,63	82,55
16	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	24,40	22,59	25,48
17	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	12,39	12,78	14,68
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,30	87,79	86,00
19	Sistem Merit *)	Poin	275,00	271,00	280,00
20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,86	4,13	3,10

21	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	80,01	77,82	80,01
22	Tingkat maturitas SPIP	Level	3,72	3,288	4

3.2.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

No	Sasaran Strategis	TA 2025		
		Rara-rata % realisasi kinerja	Rara-rata % realisasi anggaran	Efisiensi
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing				
	Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	99,18	88,77 %	10,41%
	Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	112,19	67,26 %	44,74%
	Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	99,22	74,93	24,29%
	Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan		95,46	
	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		83,51	
	Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	87,68	94,69	-7,01%
	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	104,64	85,62	19,02%
	Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	98,61	82,95	15,66%
	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	92,58	90,67	1,91%
	Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	103,14	94,66	8,48%
	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	98,59	86,00	12,59%

3.2.4 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

No	Program Prioritas	TA 2025		
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing				
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**1.645.053.232.491**	**1.328.834.491.974**	81%

2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**5.242.312.700**	**5.072.462.954**	97%
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**550.063.879.841**	**349.156.877.902**	63,48%
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**1.549.789.468**	**1.479.424.175**	92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**9.610.735.274**	**5.588.743.307**	58%
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**1.549.789.468**	**1.479.424.175**	95%
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas				
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	**233.372.823.537**	**180.500.735.110**	77%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**1.343.896.351**	**1.322.661.766**	98%
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**14.232.573.157**	**13.771.580.883**	97%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**1.266.087.010**	**1.165.715.441**	92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**20.900.261.229**	**19.550.394.949**	94%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				

12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**2.683.570.051**	**2.463.863.031**	92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**1.804.346.622**	**1.601.079.565**	89%
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**1.634.080.077**	**1.469.472.707**	90%
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**1.743.001.343**	**1.595.845.097**	92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**2.561.038.457**	**2.459.926.084**	96%
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**20.360.306.423**	**5.311.904.851**	26%
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**2.965.487.561**	**2.734.685.538**	92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**2.546.638.978**	**2.212.784.958**	87%
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**534.760.945**	**487.832.397**	91%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**338.512.880**	**263.929.460**	78%
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**23.332.087.381**	**5.024.745.664**	22%
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**2.551.515.944**	**2.361.335.068**	93%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**14.506.836.592**	**10.391.095.479**	72%
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**46.625.561.266**	**43.753.115.497**	94%
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	**10.185.095.964**	**9.834.836.476**	97%

	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**2.301.747.134**	**2.214.636.157**	96%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**19.086.671.746**	**15.662.973.388**	82%
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**31.642.680.796**	**16.730.717.194**	53%
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**1.160.711.628**	**1.082.558.749**	93%
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**18.550.968.639**	**17.010.441.970**	92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**7.575.121.689**	**7.237.815.910**	96%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**86.492.682.995**	**80.136.491.702**	93%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**766.892.243**	**758.239.177**	99%
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	**155.193.236.047**	**144.737.062.815**	93%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**2.431.044.012.658**	**2.247.647.758.081**	92%
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**226.916.321.913**	**202.359.937.803**	89%
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**23.864.950.396**	**19.981.344.713**	84%
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**9.637.002.600**	**6.637.104.793**	69%

40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**9.610.735.274**	**5.588.743.307**	58%
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**7.474.584.466**	**7.085.384.713**	95%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**86.492.682.995**	**80.136.491.702**	93%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	**80.500.484.725**	**78.470.505.067**	97%
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**3.342.532.279**	**2.772.793.844**	83%
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	**233.372.823.537**	**180.500.735.110**	77%
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**10.113.512.422**	**9.932.361.926**	98%
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	**7.442.474.632**	**6.808.772.371**	91%
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	**79.388.392.639**	**71.329.322.515**	90%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**1.045.098.790**	**1.008.389.265**	96%
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	**80.500.484.725**	**78.470.505.067**	
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**86.693.134.578**	**82.061.566.359**	
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi				

Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK				
KEPEGAWAIAN				
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**15.215.854.442**	**14.651.508.065**	96%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**27.830.776.402**	**25.523.492.541**	92%
SEKRETARIAT DAERAH				
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	**3.864.642.295**	**1.898.959.568**	49%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**45.400.782.350**	**42.127.591.430**	93%
INSPEKTORAT DAERAH				
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**6.268.388.400**	**6.264.586.078**	100%

3.3 Capaian Pelaksanaan Program Unggulan

Konsepsi pencapaian visi dan keberhasilan pelaksanaan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah dioperasionalkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selanjutnya membutuhkan dukungan pelaksanaan program unggulan. Hasil dari pelaksanaan program unggulan ini dianggap dapat menjadi pengungkit utama upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi dimaksud. Pendefinisian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun lebih kepada program-program kerja yang telah menjadi janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Terdapat 2 (dua) program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, yaitu program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol. Kedua program unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di sektor sumber daya manusia, sektor ekonomi, dan sektor infrastruktur sebagai sebuah investasi untuk mewujudkan “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Pelaksanaan program unggulan dimaksud juga menjadi bagian penting dari upaya pelaksanaan Trisula Pembangunan Daerah yakni penurunan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun capaian pelaksanaan program unggulan Gratispol dan program unggulan Jospol sebagai berikut:

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah	Kegiatan	UPDATE BAPPEDA			
				Alokasi Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
A	**Program Unggulan Gratispol**			**Rp1.229.606.718.590**	**Rp925.356.186.406**	**82,95**	**75,26**
1	Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gratispol SMA/SMK/MA	Rp631.743.474.983,00	Rp595.248.400.321	99,94	94,22
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Gratispol S-1	Rp150.944.500.000	Rp89.894.738.327	70,67	59,55
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Gratispol S2-S3	Rp14.464.000.000	Rp14.366.379.000	61,12	99,33
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Gratispol Luar Kaltim	Rp7.764.000.000	Rp16.209.964.915	310,97	208,78
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Gratispol Luar Negeri	Rp9.975.266.420	Rp1.815.755.757	182,05	18,20
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Gratispol Khusus	Rp21.483.000.000	Rp10.873.504.938	29,07	50,61
2	Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	Dinas Kesehatan	JKN Gratis Biaya Berobat dan Pelayanan Kesehatan Bermutu	Rp231.470.242.600	Rp74.792.618.500	33,00	32,31
		Dinas Kesehatan	Cek Kesehatan Gratis Bagi Warga (Berulang Tahun)	Rp5.000.000.000	Rp4.742.280.087	100,00	94,85
		Dinas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan	Rp35.865.680.003	Rp11.005.169.510	85,00	30,68
		Dinas Kesehatan	Ambulance Terapung (Klinik Terapung)	Rp1.800.000.000	Rp1.774.017.540	100,00	98,56
3	Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting	Dinas Kesehatan	Penguatan Tim Pendamping Keluarga Risiko Stunting	Rp2.053.347.560	Rp1.125.679.010	100,00	54,82
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Posyandu yang memberikan barang ke masyarakat	Rp1.155.341.408	Rp1.132.415.748	100,00	98,02
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kader Posyandu yang mendapatkan peningkatan kapasitas 6 Bidang Layanan SPM	Rp844.658.592	Rp591.045.202	100,00	69,97
4	Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika	Gratis Biaya Langganan Internet Desa dan Pemasangan Jaringan dan Bandwith	Rp9.239.207.024	Rp8.828.778.331	112,00	95,56
5	Gratis Seragam Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemberian Seragam Sekolah Siswa SMA/SMK/SLB kelas X	Rp65.004.000.000	Rp60.466.821.620	98,02	93,02
6	Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Rp10.000.000.000	Rp1.709.617.600	20,80	17,10
7	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Gratis Umroh dan Perjalanan Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah	Rp30.800.000.000	Rp30.779.000.000	99,55	99,93
B	**Program Unggulan Jospol**			**Rp2.355.092.071.352**	**Rp2.131.673.814.308**	**94,84**	**90,51**
1	Hilirisasi Industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal berbasis pertanian modern	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Perencanaan/SID pengembangan Kawasan Pisang	Rp750.000.000	Rp747.710.000	100,00	99,69
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Perencanaan pembangunan Workshop Pupuk	Rp268.396.000	Rp249.374.805	100,00	92,91

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah	Kegiatan	UPDATE BAPPEDA			
				Alokasi Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
			Organik (UPTD. PTPH)				
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Perencanaan Lab DNA Pemuliaan Tanaman (UPTD. PSBTPH)	Rp300.000.000	Rp179.514.450	60,00	59,84
		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Perencanaan Lab Keamanan Pangan	Rp200.000.000	Rp192.051.100	100,00	96,03
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner	Rp23.765.503.300	Rp20.235.244.028	90,51	85,15
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pembangunan RPB Pakan Ternak dan Peralatannya di Kota Bangun	Rp9.995.347.809	Rp9.231.146.949	100,00	92,35
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED Pusat Distribusi Pangan di Kariangau	Rp1.199.856.800	Rp1.122.586.389	100,00	93,56
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Paket Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) yang meliputi Pengadaan Ternak, Penyediaan dan Pengolahan Pakan, Pengolahan Pupuk asal hewan	Rp31.937.226.594	Rp30.567.926.377	100,00	95,71
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pembangunan Hatchery Ayam Lokal Unggul	Rp984.819.600	Rp817.670.000	100,00	83,03
2	Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembuatan aplikasi Super App SAKTI	Rp1.430.616.667	Rp1.416.000.000	100,00	98,98
3	Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah	Biro Kesejahteraan Rakyat	Pemberiaan Insentif Guru Sekolah (KB, TK, SD, MI, SMP, MTs)	Rp53.384.500.000	Rp53.375.500.000	91,48	99,98
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Pemberian Insentif Ustadz dan Ustadzah di Pesantren	Rp23.259.500.000	Rp23.255.000.000	92,25	99,98
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tambahan Insentif Guru SMA, SMK, MA, SLB Swasta (Pindahan dari Biro KESRA)	Rp70.074.000.000	Rp55.233.000.000	97,48	78,82
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Insentif Penjaga Rumah Ibadah sebanyak 5.775 orang selama 6 bulan	Rp17.130.000.000	Rp12.371.500.000	72,33	72,22
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Tambahan Operasional Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Pemberian Uang Kepada Mayarakat Penjaga Rumah Ibadah untuk Perjalanan Religi	Rp1.027.270.000	Rp950.593.724	94,17	92,54

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah	Kegiatan	UPDATE BAPPEDA			
				Alokasi Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
4	Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Rp10.000.000.000	Rp9.662.524.105	100,00	96,63
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Kegiatan DEKRANASDA	Rp7.000.000.000	Rp6.991.530.997	100,00	99,88
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Biaya Pendataan 2.000 UKM	Rp100.000.000	Rp99.668.500	100,00	99,67
5	Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa	Dinas Pariwisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Rp844.098.596	Rp844.098.596	99,00	100,00
		Dinas Pariwisata	Pengembangan Desa Wisata Tanjung Isuy	Rp779.353.134	Rp575.202.932	95,00	73,81
		Dinas Pariwisata	Pengembangan Desa Wisata Batu Majang	Rp681.488.000	Rp680.095.295	100,00	99,80
6	Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan	Dinas Kesehatan	Penyusunan Feasibility Study RSUD di Kutai Barat	Rp4.890.000.000	Rp0	0,00	0,00
		Dinas Kesehatan	Penyusunan Feasibility Study, Masterplan dan DED RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RS KORPRI)	Rp4.590.000.000	Rp4.590.000.000	100,00	100,00
		Dinas Kesehatan	Pematangan Lahan Parkir RS Mata	Rp1.100.000.000	Rp1.063.851.852	100,00	96,71
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Perluasan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RS KORPRI)*	Rp6.216.878.223	Rp6.216.878.223	100,00	100,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perencanaan dan Rehabilitasi Sekolah Unggulan : (1) SMAN 3 Tenggarong Seberang (2) SMAN 10 Samarinda (3), SMAN 2 Sangatta Utara	Rp2.994.326.960	Rp1.938.123.601	100,00	64,73
		Dinas Kesehatan	Pengadaan Alkes untuk RSUD AWS	Rp3.561.308.264	Rp3.377.021.454	100,00	94,83
		Dinas Kesehatan	Pengadaan Akes untuk RSUD KD	Rp249.392.474.969	Rp228.490.998.930	100,00	91,62
7	Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Tering-Ujoh Bilang	Rp207.154.252.081	Rp190.155.097.156	99,80	91,79
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Pembangunan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Bandara Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu*	Rp42.187.305.637	Rp34.648.434.119	87,13	82,13
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	DED dan Pemeliharaan/ Pembangunan Jalan Long Bagun	Rp30.000.000.000	Rp29.241.862.000	100,00	97,47

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah	Kegiatan	UPDATE BAPPEDA			
				Alokasi Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		Ruang dan Perumahan Rakyat	- Long Boh (Batas Kaltara)				
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	FS dan DED Pembangunan Water Front and Riverside Road (Selili - Jembatan Mahkota II)	Rp4.485.000.000	Rp4.208.241.657	100,00	93,83
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	DED Pembangunan Jalan Jembatan Nibung (Pelawan) - Simp. Km 46 (Biatan)	Rp1.987.200.000	Rp1.967.161.536	100,00	98,99
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	DED Pembangunan Jalan Sotek - Bongan	Rp3.381.000.000	Rp2.535.408.276	100,00	74,99
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Feasibility Study SPAM Regional Sistem Mahakam*	Rp3.020.000.000	Rp2.635.642.240	100,00	87,27
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Lanjutan Normalisasi Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Samarinda*	Rp13.841.041.000	Rp13.841.041.000	100,00	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Lanjutan Normalisasi Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Samarinda (ABT)*	Rp7.004.712.000	Rp7.004.712.000	100,00	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Lanjutan Normalisasi Sungai dan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Balikpapan (ABT)*	Rp7.505.147.000	Rp7.505.147.000	100,00	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Lanjutan Normalisasi dan Penguatan Tebing sungai Karang asam besar Kota Samarinda	Rp2.009.364.500	Rp2.009.364.500	100,00	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Optimalisasi Jaringan Layanan Pipa Transmisi IPA KM 8 ID 750 mm Segmen III di Balikpapan*	Rp1.745.238.820	Rp62.837.324	3,79	3,60
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Optimalisasi Jaringan Layanan District Metering Area (DMA) Balikpapan Utara (ABT)*	Rp2.532.602.905	Rp2.532.602.905	100,00	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Optimalisasi Jaringan Layanan District Metering Area (DMA) Balikpapan Timur (ABT)*	Rp2.483.410.226	Rp2.483.410.226	100,00	100,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	Peningkatan Jalan Kewenangan Provinsi	Rp1.291.295.026.901	Rp1.158.310.512.373	93,09	89,70

No	Program Unggulan	Perangkat Daerah	Kegiatan	UPDATE BAPPEDA			
				Alokasi Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
		Perumahan Rakyat					
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei Nibung	Rp181.864.404.000	Rp174.225.006.164	97,73	95,80
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik dan Rencana Induk Ketenagalistrikan	Rp20.000.000.000	Rp19.646.490.160	100,00	98,23
8	Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata	Dinas Perhubungan	DED Dolphin Tambat Kapal	Rp714.195.400	Rp711.290.000	100,00	99,59
		Dinas Perhubungan	Darmaga Speedboat Samarinda	Rp488.180.700	Rp483.690.000	100,00	99,08
		Dinas Perhubungan	Kajian Review Kepmenhub No, 722/2018	Rp337.623.900	Rp0	0,00	0,00
		Dinas Perhubungan	Rehabilitasi Dermaga Sungai, Tering, Kab. Kutai Barat	Rp2.939.760.000	Rp2.731.409.999	100,00	92,91
9	Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penerbitan NIB dan Izin dan Non Izin (OSS dan E-PTSP)	Rp174.810.366	Rp174.810.366	100,00	100,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MoU Pelaku usaha Besar dan UMKM, Koperasi dan BUMDES yang melaksanakan Kesepakatan Kemitraan	Rp84.831.000	Rp84.831.000	100,00	100,00
	Program Unggulan Gaspol dan Jospol			**Rp3.584.698.789.942**	**Rp3.057.030.000.714**	**90,76**	**85,28**

Program unggulan Gratispol meliputi Gratis Bersekolah SMA/SMK hingga S3, Gratis Biaya dan Layanan Kesehatan Berkualitas, Gratis Hidup Sehat Tanpa Stunting, Gratis Wifi Internet di Seluruh Desa, Gratis Seragam Sekolah, Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah, serta Gratis Umroh dan Perjalanan Religi untuk Penjaga Rumah Ibadah. Berdasarkan hasil pelaksanaannya, program ini mecapai realisasi fisik sebesar 82,95% dan realisasi keuangan sebesar 75,26%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program Gratispol telah mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Program unggulan Jospol meliputi Hilirisasi Industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal berbasis pertanian modern; Pengembangan Teknologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan Pelayanan Publik; Peningkatan insentif guru sekoah umum, pesantren, serta penjaga rumah ibadah; Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM; Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa; Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan pendidikan dan Kesehatan; Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tol dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi, dan pelabuhan internasional; Revitalisasi sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri

dan pariwisata; Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat, dan swasta. Berdasarkan hasil pelaksanaannya, program ini mencapai realisasi fisik sebesar 94,84% dan realisasi keuangan sebesar 90,51%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jospol telah mendukung penguatan perekonomian daerah, peningkatan konektivititas wilayah, dan pembangunan infrastruktur strategis secara berkelanjutan.

3.4 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Provinsi Kalimantan Timur

Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan konkuren pemerintahan ialah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 18 (delapan belas) Bidang Urusan Pemerintahan yakni Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan. Penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) Bidang Urusan Pemerintahan yakni Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) Bidang Urusan yakni Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta fungsi penunjang urusan lainnya. Adapun rincian capaian program dan kegiatan diuraikan pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.67

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	91.5	86.5	2,054,444,859,277	1,598,672,493,385	1. Kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap pelayanan prima dan SOP layanan belum merata. 2. Implementasi SOP layanan kesekretariatan belum konsisten. 3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan belum optimal. 4. Sarana dan prasarana pendukung layanan masih terbatas. 5. Monitoring dan evaluasi kepuasan pengguna layanan belum dilakukan secara berkelanjutan.	1. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan pelayanan prima dan administrasi kesekretariatan. 2. Penyempurnaan dan penguatan penerapan SOP layanan kesekretariatan. 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan. 4.Peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung layanan. 5. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**			1. Respons dan tindak lanjut keluhan belum sesuai standar waktu layanan. 2. Koordinasi antarunit terkait penyelesaian keluhan belum optimal. 3. Dokumentasi dan pelaporan tindak lanjut keluhan belum tertib	1. Penyusunan dan penguatan SOP pengelolaan pengaduan pengguna layanan. 2. Optimalisasi kanal pengaduan dan sistem pencatatan keluhan. 3. Peningkatan koordinasi dan penegasan penanggung jawab tindak lanjut. 4. Monitoring dan evaluasi penanganan keluhan secara berkala	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100	100	1,850,511,316	1,414,832,861	- Sinkronisasi rendah, data tidak akurat, partisipasi rendah, tidak berbasis evidence - Tidak inline dengan perencanaan, tidak efisien, intervensi politik, belanja pegawai dominan - Indikator buruk, Monev lemah, laporan normatif, SDM kurang - Sistem tidak terintegrasi, koordinasi lemah, kapasitas fiskal rendah	- Integrasi dokumen, perencanaan berbasis data, peningkatan SDM - Performance-based budgeting, efisiensi belanja rutin, transparansi - Indikator SMART, evaluasi berkala, dashboard kinerja - Integrasi sistem, koordinasi antar-OPD, peningkatan kapasitas fiskal	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	1,542,544,255,956	1,165,342,667,303	- Rentang Jarak Yang luas dan Jumlah ASN yang banyak menjadi tantangan untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan sebagai dasar pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN secara tepat waktu.- - Jumlah ASN yang terbatas dalam mengelola keuangan	- Kebutuhan pada pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN seperti absensi seluruh Sekolah Negeri yang ada di lingkungan Disdikbud Prov. Kaltim telah dibuatkan secara Online sehingga sekolah hanya perlu mengisi pada template yang disediakan. - Pelayanan secara daring telah kami terapkan pada ASN Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim melalui Whatsapp dan Zoomeeting; - Melakukan rekruitment tambahan jasa pelayanan untuk membantu pengelolaan keuangan.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	695,808,505	590,722,529	- Belum selesainya pelaksanaan penyerahan Aset Tanah dari Pemerintah Kab./Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (P3D) lanjutan. - Masih banyaknya tanah SMA/SMK/SLB Negeri belum bersertifikat (SHP), atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim. - Masih Banyaknya tanah SMA/SMK/SLB Negeri belum ada plang tanda batas (patok) dan papan nama tanah milik Pemprov. Kaltim. - Kurangnya anggaran perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan pengamanan aset Pemerintah Prov. Kaltim yang barada di SMA/SMK/SLB Negeri Se Kalimantan Timur, seperti pelaksanaan kegiatan P3D lanjutan, proses hibah tanah, proses alih status aset, kegiatan rekonsiliasi aset sekolah, Inventarisasi aset sekolah serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aset. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya bagian Aset tidak	- Segera diselesaikannya penyerahan Aset Tanah dari Pemerintah Kab./Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (P3D) lanjutan yang di pimpin oleh BPKAD Prov. Kaltim. bersama BPKAD Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur. - Semua SMA/SMK/SLB Negeri yang belum bersertipikat, segera menindaklanjut proses sertipikat dengan di bantu oleh Disdikbud. Prov. Kaltim dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d VI Prov. Kaltim. - Dianggarkan untuk belanja pengadaan plang tanda batas (patok) dan papan nama tanah milik Pemprov. Kaltim pada tahun 2026 dan 2027. - Agar ditambahkan anggaran belanja perjalanan dinas kegiatan pengamanan aset Pemerintah Prov. Kaltim yang barada di SMA/SMK/SLB Negeri Se Kalimantan Timur, seperti pelaksanaan kegiatan P3D	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											menerima data/informasi atas Bantuan dari Pemerintah Pusat atau Kementerian tahun 2025 kepada SMA/SMK/SLB Negeri Se-Talimantan Timur, sehingga kesulitan dalam melaksanaan pencatatan asetnya.	lanjutan, proses hibah tanah, proses alih status aset, kegiatan rekonsiliasi aset sekolah, Inventarisasi aset sekolah serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aset tahun 2026 dan 2027.	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100	100	332,569,850	254,501,812	- Kurangnya pemahaman Tentang Retribusi - Keterlambatan pembayaran - Pengguna Retribusi tidak melaporkan pembayaran nya tepat waktu - selisih nilai data dengan BPKAD pada saat rekon	- Sosialisasi Tentang Retribusi - Koordinasi dengan Pengelola Retribusi sekolah - Koordinasi ke pihak pengelola retribusi di sekolah untuk melakukan pembayaran tepat waktu - koordinasi ke sekolah karena ada bukti setor yang belum di kirim ke pengelola retribusi dinas	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	78	7,744,167,637	6,661,220,841	1.Pemahaman pegawai terhadap regulasi kepegawaian belum merata. 2. Koordinasi antara perangkat daerah dan instansi pembina kepegawaian belum optimal.	1. Peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian melalui bimbingan teknis. 2. Penguatan koordinasi dan kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100	90	11,241,901,679	9,945,470,051	- Jenis barang yang diperlukan pegawai beraneka ragam - Kebutuhan peralatan yang tidak sesuai dengan stok barang -	- Koordinasi dan mendata kebutuhan pegawai - Melakukan inventaris kebutuhan peralatan kantor	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100	89.8	131,945,034,979	131,580,369,469	1. Perencanaan kebutuhan barang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil. 2.. Proses pengadaan memerlukan waktu relatif lama. 3. Pemahaman regulasi pengadaan belum merata. 4. Penatausahaan dan pencatatan BMD belum optimal.	1. Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD secara tepat dan terukur. 2.Optimalisasi proses pengadaan sesuai ketentuan. 3. Peningkatan kompetensi pengelola pengadaan dan BMD. 4. Penguatan penatausahaan dan pelaporan BMD secara tertib dan akuntabel.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100	100	337,251,015,795	270,111,391,405	Perangkat kerja yang mengalami kerusakan	- Melakukan peremajaan pada perangkat kerja - Merawat perangkat kerja agar dapat berjalan dengan baik	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	69	13,744,441,560	8,380,192,038	Jenis keperluan perawatan pada kendaraan yang beraneka ragam	- Melakukan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan jadwal perawatan - Melakukan pendataan dalam pembayaran surat kendaraan, agar dapat dilaksanakan tepat waktu	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD yang Ditingkatkan Pelayanannya Berbasis Industri	%	100	21	7,095,151,999	4,391,125,076	1. Standar pelayanan dan SOP belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. 2. Keterbatasan kompetensi dan jumlah SDM layanan. 3. Sarana dan prasarana layanan belum memadai. 4. Sistem informasi dan manajemen layanan belum optimal. 5. Monitoring kepuasan pengguna layanan belum dilakukan secara rutin.	1. Penyempurnaan dan penerapan standar pelayanan serta SOP BLUD. 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. 3. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan. 4.Optimalisasi sistem informasi dan manajemen layanan. 5. Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala.	
				PROGRAM PENGELOLAAN PDIDIKAN	**Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus**	**%**	**70.25**	**85.042**	**1,645,053,232,491**	**1,198,916,638,962**	1. Permasalahan ekonomi keluarga yang kerap kali menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan 2. Belum tersedianya fasilitas dan sarana prasarana pendidikan untuk kemudahan akses terhadap pendidikan 3. Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas terhadap pendidikan Kurangnya daya tampung sekolah terhadap lulusan jenjang SMP 4. Penugasan guru sebagai kepala sekolah	1. Masih adanya anak tidak sekolah (ATS) - Memperkuat program akses pendidikan dengan mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak yang belum bersekolah melalui pendekatan lintas sektor. - Peningkatan sosialisasi dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu diupayakan agar tidak ada anak yang terhambat akses	
					Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	**%**	**82.17**	**81.62**					
					Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	**%**	**67.54**	**66.166**					
					Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	**%**	**74.53**	**73.11**					
					Persentase Angka	**%**	**62.55**	**53.75**					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus						atau pendamping satuan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dan manajemen sekolah. 5. Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berdampak pada peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran. 6. Pendidik dan tenaga kependidikan belum maksimal dalam melakukan kegiatan refleksi dan perbaikan pembelajaran, sehingga inovasi dan evaluasi pembelajaran kurang terimplementasi secara optimal. 7. Kualitas pembelajaran di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal metode pengajaran, hasil belajar siswa, dan pemanfaatan teknologi. 8. Ketersediaan buku teks dan nonteks yang	pendidikannya. 2. Meningkatkan Mutu Satuan Pendidikan dalam Literasi dan Numerasi Untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi, - Fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pelatihan, pendampingan dan pengembangan kompetensi, serta penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis asesmen secara berkala. - Penguatan kurikulum dan penggunaan media pembelajaran yang efektif juga menjadi bagian dari strategi ini 3. Memenuhi Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan - Melakukan perencanaan kebutuhan pendidik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik yang merata sesuai dengan kebutuhan satuan	
					Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	**%**	**79.42**	**89.435**					
					Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	**%**	**89.19**	**88.2**					
					Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	**%**	**78.08**	**75.12**					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar masih belum mencukupi di beberapa satuan pendidikan. 9. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat praktik untuk mendukung pembelajaran literasi dan numerasi belum memadai di sejumlah sekolah. 10. Kondisi lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosial, belum sepenuhnya mendukung terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi siswa. 11. Kurang Optimalnya hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA). 12. Kurangnya jumlah lulusan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri. 13. Belum optimalnya pelaksanaan tracer study SMK (penelusuran lulusan) 14. Implementasi program Link and Match antara SMK dan dunia kerja belum optimal 15. Kurikulum pembelajaran di SMK	pendidikan. - Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan juga diprioritaskan untuk menjaga motivasi dan kualitas pengajaran.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja 16. Kepemimpinan kepala SMK belum optimal dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja 17. Kurangnya pendataan yang komprehensif terkait kemitraan antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menghambat evaluasi dan pengembangan program link and match yang efektif 18. Belum optimalnya pelatihan dan pendampingan bagi guru SMK dalam pengelolaan dan implementasi pembelajaran di Teaching Factory (TeFa). 19. Sarana dan prasarana pembelajaran di SMK belum merata sesuai dengan standar dan teknologi yang		
											digunakan di dunia kerja yang dinamis.		

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											20. Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK belum efektif dalam menjembatani lulusan dengan peluang kerja yang relevan kurangnya pelibatan praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK 21. Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik 22. Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	%	100	100	649,618,723,791	451,091,624,476	Kurangnya persiapan dalam mempersiapkan Peserta Didik dalam mencapai kelulusan di Satuan Pendidikan	Diperlukannya peningkatan penyelesaian Residu di Satuan Pendidikan	
						%	63.08	61.57			Belum terlayaninya Satuan Pendidikan dalam pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual serta pendampingan psikologis dan sosial Peserta Didik selama proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan	
					Rerata kompetensi Numerasi SMA	%	65.43	78.62			Kurangnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi	Melakukan Pemagangan/Bimbingan Teknis, dalam	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					berdasarkan Asesmen Nasional						dan kompetensi yang sesuai serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara keberlanjutan melalui Komunitas Belajar sebagai wadah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kulitas layanan	meningkatkan Kapasitas di Bidang Pendidikan; diperlukan pembentukan dan advokasi Komunitas Belajar dengan melibatkan MGMP, MKKS, dan lain-lain; diperlukan pelaksanaan kegiatan Komunitas Belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan prasarana pendukung	
					APM SMA/SMK	%	100	72.61			1. Kurangnya pemahaman kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan 2. Biaya Personal Peserta Didik yang belum memenuhi kebutuhan Peserta Didik dalam mendukung Partisipasi Peserta Didik dalam Proses Belajar Mengajar 3. Kurangnya Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah 4. Masih adanya anak tidak sekolah (ATS)	1. Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru serta merehabilitasi ruang kelas uyang rusak 2. Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah 3. Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu 4. Menyusun NPK	
					APK SMA/SMK	%	100	99.1					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												(Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu 5. Menyalurkan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik 7. Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan 8. Melakukan analisis data ATS dari dasbor http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS 9. Melakukan koordinasi dengan sekolah asal dan/atau desa/kelurahan untuk verifikasi data ATS melalui dasbor http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS 10. Melakukan analisis akar masalah hasil verifikasi data ATS dari dasbor http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS 11. Menyusun strategi penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan ATS sesuai dengan akar	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												masalah ATS 12. Menyusun analisis kebutuhan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya kekurangan daya tampung	
					Indeks Iklim Keamanan SMA	%	83.64	73.04			Kurangnya pemahaman Warga Satuan Pendidikan tentang perundungan, kekerasan seksual dan hukuman fisik	Peningkatan pemahaman dan Sistem Pelayanan Pendampingan kepada Satuan Pendidikan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual dan hukuman fisik, serta diperlukannya sosialisasi dan advokasi Penguatan Pendidikan Karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	
					Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	77.9	84.25			Kurang terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan serta kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan literasi Peserta Didik	Mengusulkan formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan Perundang-undangan; menyelenggarakan Pelatihan/Bimbingan Teknis terkait dengan Aplikasi/Platform Bidang Pendidikan	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Indeks Iklim Kebinekaan SMA	%	73.88	72.87			Kuragnya pemahaman Warga Satuan Pendidikan terkait kebinekaan dalam mencegah diskriminasi terhadap Gender, Ekonomi, Fisik, Agama, Suku dan Budaya; Kurangnya Penguatan Karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan	Diperlukannya pelaksanaan sosialisasi, diskusi bertemakan keberagaman serta diperlukannya kanal aduan/laporan apabila terjadi kasus terkait isu kebinekaan; Diperlukan nya kegiatan Pagi Ceria, Gerakan Kepanduan dan Ekstrakulikuler serta sosialisasi dan advokasi Implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi	Orang	25000	24031	887,175,185,472	657,830,967,258	Kurangnya pemahaman Satuan Pendidikan terkait pentingnya Lulusan Bersertifikasi	diperlukannya pemahaman bagi Satuan Pendidikan dalam meningkatkan pemahaman terkait Sertifikasi Peserta Didik di Satuan Pendidikan	
					APM SMA/SMK	%	100	72.61			Kurangnya pemahaman kepada Masyarakat terkait pentingnya Pendidikan	Memberikan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	
					Indeks Inklusivitas SMK	%	60.96	58.65			Belum terlayaninya Satuan Pendidikan dalam pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, psikis ,	
												perundungan, kekerasan seksual serta pendampingan psikologis dan sosial	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												Peserta Didik selama proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan	
					APK SMA/SMK	%	100	99.1			Biaya Personal Peserta Didik yang belum memenuhi kebutuhan Peserta Didik dalam mendukung Partisipasi Peserta Didik dalam Proses Belajar Mengajar	Memberikan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	
					Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	73.68	77.9			Kurang terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan serta kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan literasi Peserta Didik	Mengusulkan formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketentuan Perundang-undangan; menyelenggarakan Pelatihan/Bimbingan Teknis terkait dengan Aplikasi/Platform Bidang Pendidikan	
					Indeks Iklim Keamanan SMK	%	71.29	70.09			Kurangnya pemahaman Warga Satuan Pendidikan tentang perundungan, kekerasan seksual dan hukuman fisik	Penignkatan pemahaman dan Sistem Pelayanan Pendampingan kepada Satuan Pendidikan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual dan hukuman fisik,	
												serta diperlukannya sosialisasi dan advokasi Penguatan Pendidikan Karakter	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	
					Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	62.44	72.7			Kurangnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara keberlanjutan melalui Komunitas Belajar sebagai wadah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan kulitas layanan	Melakukan Pemagangan/Bimbingan Teknis, dalam meningkatkan Kapasitas di Bidang Pendidikan; diperlukan pembentukan dan advokasi Komunitas Belajar dengan melibatkan MGMP, MKKS, dan lain-lain; diperlukan pelaksanaan kegiatan Komunitas Belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan prasarana pendukung	
					Angka Kelulusan SMK	%	100	100			Kurangnya persiapan dalam mempersiapkan Peserta Didik dalam mencapai kelulusan di Satuan Pendidikan	Diperlukannya peningkatan penyelesaian Residu di Satuan Pendidikan	
					Indeks Iklim Kebinekaan SMK	%	71.39	70.09			Kuragnya pemahaman Warga Satuan Pendidikan terkait kebinekaan dalam mencegah diskriminasi terhadap Gender, Ekonomi, Fisik, Agama, Suku dan Budaya; Kurangnya Penguatan	Diperlukannya pelaksanaan sosialisasi, diskusi bertemakan keberagaman serta diperlukannya kanal aduan/laporan apabila terjadi kasus terkait isu kebinekaan;	
											Karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan	Diperlukan nya kegiatan Pagi Ceria, Gerakan Kepanduan dan Ekstrakulikuler	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												serta sosialisasi dan advokasi Implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan	
				Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	74.8	88.23	108,259,323,228	89,994,047,228	Kemampuan murid jenjang SMPLB dalam mengkuti proses pembelajaran numerasi masih terkendala	Meningkatkan kemampuan siswa SMPLB dalam numerasi melalui pembelajaran mendalam yang sesuai dengan kemampuan siswa disabilitas	
					Indeks Iklim Keamanan SDLB	%	81.04	80.54			Minimnya sistem kontrol keamanan (seperti CCTV) disetiap sudut lingkungan Satuan Pendidikan SLB., kurangnya rasa aman bagi murid dan guru	Melakukan sosialisasi dan Advokasi perundungan, kekerasan (fisik/seksual), penyalahgunaan narkoba dan judi online bagi murid dan guru	
					APK SLB	%	100	110.61%			Masih terbatasnya jumlah SLB yang ada di wilayah yang tidak sesuai dengan jumlah anak disabilitas usia 4-18 tahun	Mendorong dilakukannya verifikasi dan validasi Anak Disabilitas Usia 4-18 tahun serta pemenuhan penambahan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru SLB	
					Indeks Iklim Keamanan SMPLB	%	76.63	75.43			Minimnya sistem kontrol keamanan (seperti CCTV) disetiap sudut lingkungan Satuan Pendidikan SMPLB.,	Melakukan sosialisasi dan Advokasi perundungan, kekerasan (fisik/seksual),	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											kurangnya rasa aman bagi murid dan guru	penyalahgunaan narkoba dan judi online bagi murid dan guru di SMPLB	
					Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	%	74.94	73.14			Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)	Melakukan sosialisasi dan Advokasi masalah anti kekerasan, bullying, judi online bagi orangtua siswa dan siswa di SMPLB	
					Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	81.69	91.89			Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dijenjang SDLB yang ada saat ini masih belum optimal	Mengintensifkan program pelatihan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan SDLB	
					Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	%	73.46	72.45			Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)	Melakukan sosialisasi dan Advokasi masalah anti kekerasan, bullying, judi online bagi orangtua siswa dan siswa di SDLB	
					Angka Kelulusan SLB	%	100	100			Masih terdapat siswa yang putus sekolah dengan alasan kendala jarak dengan rumah	Penyediaan Sarana Mobilitas siswa pada Satuan Pendidikan	
					Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	%	79	77			Belum maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)	Melakukan sosialisasi dan Advokasi masalah anti kekerasan, bullying, judi online bagi	
												orangtua siswa dan siswa di SMALB	
					Indeks Inklusivitas SMPLB	%	74.94	70			Belum terciptanya lingkungan belajar yang ramah, dan setara bagi semua siswa jenis	Penciptaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan jenis disabilitas siswa pada	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											disabilitas pada Satuan Pendidikan SMPLB	satuan Pendidikan SMPLB.	
					Indeks Inklusivitas SDLB	%	70.84	69.54			Belum terciptanya lingkungan belajar yang ramah, dan setara bagi semua siswa jenis disabilitas pada Satuan Pendidikan SDLB .	Penciptaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan jenis disabilitas siswa pada satuan Pendidikan SDLB.	
					Indeks Iklim Keamanan SMALB	%	77.8	76.5			Minimnya sistem kontrol keamanan (seperti CCTV) disetiap sudut lingkungan Satuan Pendidikan SLB., kurangnya rasa aman bagi murid dan guru	Melakukan sosialisasi dan Advokasi perundungan, kekerasan (fisik/seksual), penyalahgunaan narkoba dan judi online bagi murid dan guru	
					Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	81.38	86.26			Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dijenjang SMPLB yang ada saat ini masih belum optimal	Mengintensifkan program pelatihan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan SMPLB	
					Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.	%	73.07	88.37			Kemampuan murid jenjang SMALB dalam mengkuti proses pembelajaran numerasi masih terkendala	Meningkatkan kemampuan siswa SMALB dalam numerasi melalui pembelajaran mendalam yang sesuai dengan kemampuan siswa disabilitas	
					Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	82.45	95.34			Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dijenjang SMALB yang ada saat ini masih belum optimal	Mengintensifkan program pelatihan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan Pendidikan SMALB	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	%	75.53	97.29			Kemampuan murid jenjang SDLB dalam mengkuti proses pembelajaran numerasi masih terkendala	Meningkatkan kemampuan siswa SDLB dalam numerasi melalui pembelajaran mendalam yang sesuai dengan kemampuan siswa disabilitas	
					Indeks Inklusivitas SMALB	%	71.4	71.07			Belum terciptanya lingkungan belajar yang ramah, dan setara bagi semua siswa jenis disabilitas pada Satuan Pendidikan SMALB .	Penciptaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan jenis disabilitas siswa pada satuan Pendidikan SMALB.	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus**	**%**	**100**	**92.06**	**8,504,477,708**	**8,140,452,938**	1. Belum optimalnya pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal pada satuan pendidikan Jenjang sekolah menengah. 2. Belum optimalnya pemilihan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan Kearifan Lokal daerah setempat. 3. Belum adanya regulasi penyesuaian/Sinkronisasi data Dapodik dengan Kurikulum Muatan Lokal. 4. Kurangnya Guru Mata Pelajaran sesuai	1. Mengoptimalkan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal - Penguatan penelitian dan pendataan potensi lokal sebagai bahan pengembangan kurikulum muatan lokal - Pelibatan masyarakat dan pakar budaya dalam penyusunan materi pelatihan bagi guru untuk mengimplementasikan	
											dengan Kurikulum Muatan Lokal yang sudah ditetapkan) meliputi: Sumber Daya 5. Alam (SDA), Seni Budaya, Bahasa Daerah: Berau, Dayak,	kurikulum tersebut secara efektif dan kreatif di sekolah	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											Paser, dan Kutai. 6. Belum adanya Program Studi Bahasa Daerah di Perguruan Tinggi yang mencetak Guru yang memiliki kualifikasi Mata Pelajaran Bahasa Daerah yang ada di Kalimantan Timur. 7. Belum adanya regulasi dalam Dapodik yang mengakomodir penghitungan Jam Mata Pelajaran untuk guru yang mengampu Mata Pelajaran Muatan Lokal.		
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	%	95	94.69	7,169,376,488	7,017,990,500	1. Pemetaan potensi dan kebutuhan daerah belum optimal. 2. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum masih terbatas. 3. Kesiapan satuan pendidikan dan pendidik belum merata. 4. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum belum berkelanjutan.	1. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. 2. Penyempurnaan materi kurikulum berbasis potensi dan kebutuhan daerah. 3. Peningkatan kapasitas pendidik dalam implementasi kurikulum muatan lokal. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	%	95	89.43	1,335,101,220	1,122,462,438	1. Pemetaan potensi dan kebutuhan daerah belum optimal. 2. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan kurikulum masih terbatas.	1. Penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. 2. Penyempurnaan materi kurikulum berbasis potensi dan kebutuhan daerah.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											3. Kesiapan satuan pendidikan dan pendidik belum merata. 4. Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum belum berkelanjutan.	3. Peningkatan kapasitas pendidik dalam implementasi kurikulum muatan lokal. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.	
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana**	**%**	**100**	**95.92**	**5,242,312,700**	**5,051,682,954**	1. Adanya pergerakan data PTK yang disebabkan berbagai macam faktor (pensiun, dll) 2. Masih adanya satuan pendidikan yang kekurangan atau bahkan ketidakselarasan latarbelakang pendidikan guru dalam mengajar mata pelajaran 3. Belum optimalnya perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan 4. Belum optimalnya penataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan	1. Memenuhi Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan - Melakukan perencanaan kebutuhan pendidik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik yang merata sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. - Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kependidikan juga diprioritaskan untuk menjaga motivasi dan kualitas pengajaran.	
				Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	%	100	79.73	5,242,312,700	5,051,682,954	1. Ketidakseimbangan kebutuhan dan ketersediaan pendidik antar daerah. 2. Proses administrasi pemindahan yang memerlukan waktu relatif lama.	1. Penyusunan basis data kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Penyederhanaan dan standarisasi proses administrasi pemindahan.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											3. Koordinasi antar kabupaten/kota belum optimal. 4. Pemahaman terhadap regulasi pemindahan belum merata	3. Penguatan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota. 4. Sosialisasi regulasi pemindahan secara berkelanjutan.	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Kebudayaan yang dikembangkan**	**%**	**89**	**89**	**8,608,619,423**	**8,199,352,410**	1. Kurangnya pemetaan dan dokumentasi budaya lokal secara sistematis. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk program kebudayaan. 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya masih rendah. 4. Promosi dan publikasi kebudayaan belum optimal.	1.Penyusunan database dan dokumentasi budaya lokal secara lengkap. 2.Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. 3. Penguatan partisipasi masyarakat melalui program kolaboratif dan festival. 4. Optimalisasi promosi kebudayaan melalui media cetak, digital, dan acara publik. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala	
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	%	65	65	3,550,320,037	3,166,931,884	1. Kurangnya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan kegiatan budaya. 2. Data dan dokumentasi kegiatan lintas daerah belum terintegrasi. 3. Partisipasi	1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar kabupaten/kota. 2. Penyusunan database kegiatan kebudayaan lintas daerah. 3. Peningkatan	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											masyarakat dan stakeholder belum merata. 4. Dukungan anggaran dan sarana/prasarana untuk kegiatan lintas daerah terbatas.	dukungan anggaran, fasilitas, dan promosi kegiatan budaya. 4. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan forum budaya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan.	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	%	75	75	5,058,299,386	5,032,420,526	1. Inventarisasi dan pendataan kesenian tradisional yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengembangan kesenian tradisional. 3. Pemberian dukungan sarana, dana, dan promosi kegiatan kesenian. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian kesenian	1. Kurangnya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan kesenian tradisional. 2. Data dan dokumentasi kesenian lintas daerah belum lengkap dan terintegrasi. 3. Partisipasi masyarakat dan pelaku kesenian belum merata. 4. Dukungan anggaran, fasilitas, dan promosi kegiatan masih terbatas.	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**%**	**71**	**47.33**	**4,962,699,646**	**4,325,583,104**	1. Data dan dokumentasi kesenian tradisional belum lengkap dan terintegrasi. 2. Keterbatasan SDM pelaku seni dan fasilitator pengembangan	1. Penyusunan database kesenian tradisional yang komprehensif. 2. .Peningkatan kapasitas pelaku seni dan pendamping melalui pelatihan dan workshop.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											kesenian. 3. Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran untuk pengembangan kesenian masih terbatas. 4. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesenian tradisional belum merata.	3. Penyediaan dukungan sarana/prasarana serta peningkatan anggaran program. 4. Penguatan partisipasi masyarakat melalui festival, pertunjukan, dan kegiatan kolaboratif. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara rutin untuk perbaikan berkelanjutan	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	%	75	75	4,962,699,646	4,325,583,104	1. Koordinasi antar kabupaten/kota belum optimal. 2. Data dan dokumentasi kesenian lintas daerah belum lengkap. 3. Dukungan anggaran dan sarana/prasarana terbatas. 4. Partisipasi masyarakat dan pelaku kesenian masih rendah	1. Penguatan koordinasi antar kabupaten/kota melalui forum atau rapat rutin. 2. Penyusunan database dan dokumentasi kesenian lintas daerah. 3. Peningkatan dukungan anggaran, sarana/prasarana, dan promosi kegiatan. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelatihan, workshop, dan festival kesenian. 5. Monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan keberlanjutan pembinaan	
					Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	70	70					
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina**	**%**	**78.5**	**78.5**	**685,302,560**	**640,178,000**	1. Data dan dokumentasi sejarah lokal belum lengkap	1. Penyusunan database dan dokumentasi sejarah	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											atau terintegrasi. 2. Keterbatasan SDM dan fasilitator dalam pengelolaan sejarah lokal. 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sejarah masih rendah. 4. Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran untuk program sejarah terbatas.	lokal secara sistematis. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitator melalui pelatihan dan workshop. 3. Penguatan partisipasi masyarakat melalui edukasi, seminar, dan kegiatan pelestarian sejarah. 4. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran untuk program sejarah. 5. Monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan keberlanjutan program	
				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	%	80	80	685,302,560	640,178,000	1. Data dan dokumentasi sejarah lokal provinsi belum lengkap atau terintegrasi. 2. Keterbatasan SDM dan fasilitator dalam pembinaan sejarah lokal. 3. Partisipasi masyarakat dan sekolah	1. Penyusunan database dan dokumentasi sejarah lokal provinsi secara sistematis. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitator melalui pelatihan, workshop, dan seminar. 3. Penguatan	
											dalam kegiatan sejarah masih rendah. 4. Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran untuk kegiatan sejarah lokal terbatas.	partisipasi masyarakat dan sekolah dalam kegiatan sejarah. 4. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 5. Monitoring dan	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												evaluasi rutin untuk menjamin keberlanjutan program pembinaan sejarah	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan**	**%**	**63.5**	**63.5**	**5,649,522,671**	**4,405,264,577**	1. Belum adanya turunan Perda dari Undang-undang Cagar Budaya, 2. Kurangnya sumber daya manusia bidang kebudayaan yang kompeten, 3. Kurangnya dana / pembiayaan dalam pelestarian warisan budaya dan kurangnya data dan kajian karya budaya. 4.Upaya pelestarian warisan budaya di Kalimantan Timur belum maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran, dukungan dan partisipasi.	1. Inventarisasi dan Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Strategi pelestarian budaya fokus pada - Pendataan dan inventarisasi seluruh objek pemajuan kebudayaan yang ada untuk mencegah hilangnya warisan budaya - Pembentukan tim khusus yang berkompeten dalam inventarisasi penganggaran yang memadai untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan dilakukan secara berkelanjutan	
					Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	**OPK**	**37**	**37**					
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	%	75	75	5,147,437,565	4,133,361,431	1. Data dan dokumentasi cagar budaya belum lengkap atau terintegrasi. 2. Keterbatasan SDM dan tenaga ahli dalam proses identifikasi dan verifikasi. 3. Koordinasi dengan kabupaten/kota dan masyarakat belum	1. Penyusunan database dan dokumentasi cagar budaya secara sistematis. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan tenaga ahli melalui pelatihan dan pendampingan. 3. Penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota dan masyarakat. 4. Penyediaan dukungan	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											optimal. 4. Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran untuk penetapan dan pelestarian terbatas	sarana, prasarana, dan anggaran memadai untuk pelestarian. 5. Monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan keberlanjutan cagar budaya.	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	%	60	60	502,085,106	271,903,146	1. Keterbatasan SDM, tenaga ahli, dan anggaran untuk pengelolaan cagar budaya. 2. Data dan dokumentasi kondisi cagar budaya belum lengkap atau terintegrasi. 3. Koordinasi dengan kabupaten/kota dan masyarakat belum optimal. 4. Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan dan pariwisata belum maksima	1. Penyusunan database dan dokumentasi kondisi cagar budaya secara sistematis. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan tenaga ahli melalui pelatihan dan workshop. 3. Penguatan koordinasi dengan kabupaten/kota dan masyarakat. 4. Optimalisasi pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata. 5. Monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan cagar budaya.	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase Pengelolaan Permuseuman**	**%**	**66**	**66**	**1,954,900,000**	**1,883,156,751**	1.Data dan dokumentasi koleksi museum belum lengkap atau terintegrasi. 2. Keterbatasan SDM dan tenaga ahli dalam pengelolaan museum. 3. Sarana, prasarana, dan anggaran pengelolaan museum masih terbatas. 4. Partisipasi masyarakat dan	1. Penyusunan database dan dokumentasi koleksi museum secara sistematis. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan tenaga ahli melalui pelatihan dan workshop. 3. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											kunjungan museum belum optimal.	anggaran yang memadai. 4. Penguatan layanan publik dan promosi museum untuk meningkatkan kunjungan. 5. Monitoring dan evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas pengelolaan museum	
				Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	%	50	50	1,954,900,000	1,883,156,751	1. Koleksi dan dokumentasi museum belum lengkap atau terintegrasi. 2. Keterbatasan SDM dan tenaga ahli pengelolaan museum. 3. Sarana, prasarana, dan anggaran pengelolaan museum terbatas. 4. Partisipasi masyarakat dan kunjungan museum belum maksimal	1. Penyusunan database dan dokumentasi koleksi museum secara sistematis. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan tenaga ahli melalui pelatihan, workshop, dan pendampingan. 3. Penyediaan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. 4. Optimalisasi layanan publik dan promosi museum untuk meningkatkan kunjungan dan partisipasi masyarakat. 5. Monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan kelestarian koleksi dan kualitas pengelolaan museum	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
2	**Kesehatan**	**DINAS KESEHATAN**	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**Ratio**	**10.7**	**8.88**	**550,063,879,841**	**350,026,517,543**			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	Persen	15%	91.11	272,122,347,136	247,982,039,003	Perbedaan data antara aplikasi pelaporan (seperti ASPAK) dengan kondisi fisik di lapangan seringkali menghambat penilaian objektif terhadap ketercapaian target 60% tersebut.	Mewajibkan seluruh Fasyankes untuk melakukan pembaruan data secara real-time Prioritas pemenuhan alat kesehatan untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU) melalui strategi investasi yang aman di daerah dengan akses terbatas.	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	100	277,501,235,705	101,632,326,164	layanan spesialis masih terkonsentrasi di perkotaan, menyebabkan ketimpangan layanan bagi masyarakat pedesaan.	Mengimplementasikan Sistem Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi dan mendorong penggunaan Telemedicine untuk menjangkau daerah terpencil.	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	Persen	95	100	187,252,000	178,182,776	Penggunaan sistem manual dan data yang tidak terintegrasi (redundansi data) memperlambat proses realtime data dan pengambilan keputusan	Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) yang terintegrasi dan mendorong penggunaan Aplikasi Data untuk	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
												menjangkau daerah terpencil.	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	Persen	80	100	253,045,000	233,969,600	Kesulitan memenuhi standar tenaga ahli (seperti apoteker klinik, tenaga PPI, atau dokter spesialis tertentu) yang menjadi syarat mutlak dalam elemen penilaian manajemen dan klinis.	Melaksanakan penyempurnaan sistem akreditasi secara berkala untuk memastikan setiap fasyankes memenuhi standar mutu pelayanan minimal.	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	**Persen**	**45**	**100**	**35,865,680,003**	**11,259,553,375**			
				Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1	100	17,093,977,000	691,571,640	Belum optimalnya perencanaan SDMK yang mempertimbangkan kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk program UKP dan UKM prioritas, seperti tenaga medis maupun Tenaga Kesehatan lainnya.	Melakukan pemetaan kompetensi melalui Platform Satusehat SDMK untuk memberikan pelatihan teknis bagi tenaga UKP agar mampu menjalankan fungsi UKM secara integratif saat dibutuhkan	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	Kab/Kota	5	100	18,771,703,003	10,567,981,735			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar**	**Persen**	**100**	**100**	**126,000,000**	**76,585,700**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	Persen	100	100	113,400,000	65,621,300	1. Ketidaktertiban dalam pengurusan perpanjangan izin operasional atau perubahan alamat kantor/gudang yang tidak dilaporkan secara resmi.	1. Mengotimalkan penggunaan sistem E-Report PBF secara disiplin dan mengoptimalkan aplikasi SatuSehat untuk memantau rantai pasok secara real-time.	
				Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persen	100	100	12,600,000	10,964,400	2. Rasio antara jumlah pengawas di Dinas Kesehatan dengan jumlah PBF/PAK Cabang yang terus tumbuh tidak seimbang, sehingga frekuensi audit lapangan berkurang.	2. Pelatihan intensif bagi tenaga pengawas di tingkat Dinas KEsehatan agar memiliki standar penilaian yang sama (kalibrasi persepsi) saat melakukan pembinaan di lapangan.	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan**	**Persen**	**100**	**100**	**2,299,024,738**	**1,798,791,939**			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persen	100	100	270,943,744	202,043,200	Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki kecepatan yang sama dalam menindaklanjuti hasil advokasi	Fasilitasi dan pendampingan Kab/kota dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat dan kemitraan yang berkelanjutan di 12 Kabupaten/Kota tersebut.	
				Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi	Persen	100	100	1,791,399,784	1,561,392,679			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah								
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persen	100	100	236,681,210	35,356,060			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90	Indeks	100	**107,900,940,846**	**88,715,614,850**			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100	persen	100	919,697,000	816,654,345	1. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi internal, seperti Perencanaan, inventarisasi kegiatan keuangan, Barang Milik Daerah serta Pertanggungjawaban Keuangan serta Administrtatif kesekretariatan lainnya karena belum optimalnya sistem	Menyusun dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih detail untuk setiap layanan kesekretariatan.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100	persen	100	88,490,156,799	74,248,850,184			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	persen	100	280,900,000	272,878,480	integrasi admininitratif yang efisien. 2. ketidakakuratan dalam laporan kinerja dan keuangan akibat sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal antar sub-bagian.	pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pelayanan prima (service excellence) bagi staf sekretariat.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	100	2,919,627,324	2,872,020,231			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	0	0	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	100	14,371,912,264	9,739,494,476		Mengimplementasikan atau mengoptimalkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) atau aplikasi serupa untuk pelacakan surat secara real-time.	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100	persen	100	918,647,459	765,717,134			
		RSUD Abdoel Wahab Sjahranie	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang ditindaklanjut	%	100	100	901,066,029,922	854,525,635,635			https://drive.google.com/drive/folders/1Sz0olptL2m32lFMRyho067_lmkyFnwLG?usp=sharing
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	82	92					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Perangkat Daerah										
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	Dokumen	51	51	75,169,783	58,890,848	Adanya pergeseran Anggaran DPA		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	%	88	94	299,065,622,564	291,330,204,689	1. Anggaran telah sesuai dengan jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN 2. Ada 10 pegawai pensiun dan 2 pegawai mutasi		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	Dokumen	20	20	5,300,000	5,292,000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	Kegiatan	45	45	47,873,820	33,473,100	Adanya pergeseran Anggaran DPA		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	Paket	90	90	1,875,351,366	1,441,562,606			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	Unit	286	255	2,228,804,200	1,856,924,088	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 209 unit terealisasi 172 unit dan realisasi anggaran sebesar 82% dengan keterangan ada 4 jenis alat yang tidak bisa		

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											terpenuhi hingga akhir tahun : 1. Pompa Mixed Flow 2. mesin pompa celup phase tidak bisa terpanuhi karena : a. Merupakan paket pekerjaan Pengadaan Barang, b. Belum berkontrak dan c. Dibutuhkan penyesuaian terhadap jenis,spesifikasi dan kelengkapan lai nya yang merupakan satu kesatuan sehingga diperlukan penyusunan perencaaan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini, 3. Fire Alarm 4. Optical Time Domain Reflectometer Batal dilaksanakan karena terjadi kenaikan harga barang dan merupakan produk import.		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	Unit	34	34	1,085,559,700	904,097,794	Semua kegiatan pemeliharaan barang milik RS terlaksana,Silpa Positif		
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	%	89	107	596,682,348,489	558,895,190,510			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Meningkatnya Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	%	89	87	20,713,701,471	19,347,114,151			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	Nilai	90	96	19,354,700,203	18,524,008,735	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Kalibrasi alat), dengan target 2.260 namun terealisasi 2.050 alat dengan alasan: 1. Karena ada beberapa alat yang dikalibrasi oleh vendor yang bersangkutan contoh Bio Septic Cabinet (BSC) dari ESCO 2. Ada beberapa alat yang baru dikalibrasi (waktunya belum mencapai 1 tahun)		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	%	100	100	1,119,482,741	654,329,916	Pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan : a. Dukumen DLH tidak terlaksana karena masih menunggu penetapan regulasi baru dari DLH Provinsi b. Pengadaan Pompa yang dibutuhkan spesifikasi pompa tidak sesuai dengan yang dibutuhkan		

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase layanan RS terintegrasi secara sistem	%	60	60	239,518,527	168,775,500	Pada Sub Kegiatan sistem informasi kesehatan Pengadaan barang import (microtic) dan harganya melebihi pagu anggaran, sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan	Pemilihan penyedia yang tepat sasaran	
			Meningkatnya mutu pendidikan , pelatihan dan penelitian kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	%	68	76	1,068,169,650	986,561,052	Silpa Positif		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	%	66	72	1,068,169,650	986,561,052	Silpa Positif		
		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**- Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut**	**%**	**100**	**100**	**793,714,633,592**	**809,398,609,408**			
					- Indeks kualitas layanan kesekretariatan .	**Indeks**	**70**	**100**					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	219,180,559,118	208,981,846,526			
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UnitKerja	22	23	574,534,074,474	600,416,762,882			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**	**%**	**88.5**	**92.8**	**42,708,522,988**	**41,092,777,879**			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana. Prasarana. Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	38	38	42,708,522,988	41,092,777,879			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya**	**%**	**60**	**114**	**30,000,000**	**11,000,000**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	60	114	30,000,000	11,000,000			
		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**113,985,898,852.00**	**100,418,041,382.00**			1. Penghargaan Juara III pada Lomba Rumah Sakit Inovatif dan Kreatif dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2025. 2. Penghargaan Terbaik Keenam kategori Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas inovasi KETAN MAS RIDHO (Kenali Tanda Kecemasan,
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**Indeks**	**84**	**95.78**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	%	100	100	215,622,000.00	207,839,387.00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	%	100	100	67,205,658,593.00	59,530,296,865.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	Dokumen	82	82	928,934,748.00	867,578,113.00			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mah akam)	%	100	100	2,162,462,219.00	1,929,810,497.00			Mengakhiri Hidup, dan Depresi Secara Online). 3. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Terbaik I tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mah akam)	%	78.4	88.3	10,272,591,844.00	8,931,692,041.00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik	%	72.21	96.15	565,008,499.00	562,025,602.00			
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mah akam)	%	100	125.7	32,635,620,949.00	28,388,798,877.00			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**%**	**93.78**	**100**	**5,598,315,413.00**	**5,232,107,895.00**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	%	95	93.44	5,233,643,605.00	4,913,924,304.00	Dari tiga katagori untuk memenuhi presentase ASPAK yaitu Sasaran, Prasarana dan Alkes, Masih belum terpenuhi disarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar disebabkan standar yang ada di aplikasi aspak standar untuk pelayanan Rumah Sakit Umum bukan kata gori untuk di Rumah Sakit Khusus	Berkordinasi dengan bidang terkait untuk mengusulkan sarana dan alat kesehatan yang belum sesuai dengan standar	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	Orang	28950	34052	358,880,288.00	313,400,591.00			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	%	100	82.5	5,791,520.00	4,783,000.00	1. Keterbatasan jumlah tenaga programmer yang berdampak pada keterlambatan pengembangan dan penyempurnaan sistem. 2. Adanya perubahan kebijakan dan kebutuhan teknis dari BPJS yang terjadi secara mendadak. 3. Proses perbaikan dan penyempurnaan modul ERM Rawat Inap yang masih berlangsung sehingga belum dapat diimplementasikan	1. Melakukan optimalisasi pembagian tugas kepada tenaga programmer yang tersedia serta mengusulkan penambahan SDM atau dukungan tenaga teknis tambahan sesuai kebutuhan. 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak BPJS untuk memperoleh informasi perubahan kebijakan	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											secara optimal. 4. Banyaknya perubahan pada form aplikasi sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan integrasi dengan platform SATUSEHAT.	lebih awal serta menyesuaikan perencanaan pengembangan sistem. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses perbaikan ERM Rawat Inap agar penyempurnaan sistem dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan layanan. 4. Menyusun prioritas perubahan form dan melakukan penyesuaian secara bertahap guna memastikan integrasi dengan SATUSEHAT tetap berjalan tanpa mengganggu operasional pelayanan.	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**%**	**93**	**100**	**574,616,000.00**	**514,891,514.00**			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	Laporan	38	38	574,616,000.00	514,891,514.00			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**0**	**164,053,149,255**	**180,710,663,330**			
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**indeks**	**74.6**	**0**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	84	93.33	783,904,413	505,278,155			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	105,576,966,656	86,555,817,995			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	%	100	100	9,007,491,916	25,305,526,347			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	1,271,103,546	2,973,844,168			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan	%	100	100	10,168,066,390	18,684,523,632			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Administrasi Umum								
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	100	100	1,348,154,862	3,080,270,025			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	23,672,255,979	22,557,009,443			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	%	100	100	12,225,205,493	21,048,393,565			
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Pengurangan luas genangan banjir perkotaan**	**Ha**	**147**	**130.83**	**226,916,321,913**	**242,735,368,071**			
					Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	**lt/detik**	**875**	**630**					
					Panjang pantai kritis yang ditangani **	**Km**	**0.45**	**0.48**					
					Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	**Ha**	**10285**	**10071.07**					
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	Unit	13	12	183,830,821,555	166,277,749,380			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang segmen sungai yang ditangani	meter	5487.82	24039.94					
					Pantai Kritis yang ditangani **	Lokasi	5	5					
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	meter	4327.57	14121.29	43,085,500,358	76,457,618,691			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota**	**%**	**83.4**	**81.29**	**9,637,002,600**	**6,592,866,309**			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	unit	1	1	9,637,002,600	6,592,866,309			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	**Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik**	**%**	**25**	**25**	**1,367,423,900**	**1,182,265,644**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	Dokumen	1	1	1,367,423,900	1,182,265,644			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota**	**%**	**42**	**42**	**1,994,704,300**	**1,675,874,949**			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	Dokumen	2	2	1,994,704,300	1,675,874,949			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase panjang drainase yang ditangani**	**%**	**13.91**	**12.71**	**23,864,950,396**	**31,978,444,253**			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	meter	924	915.96	23,864,950,396	31,978,444,253			
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi**	**%**	**75**	**138**	**39,460,066,400**	**34,182,972,407**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	Kawasan	2	2	39,460,066,400	34,182,972,407			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani**	**%**	**83.58**	**81.84**	**550,370,763,757**	**462,385,053,328**			
				Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	unit	9	9	550,370,763,757	462,385,053,328			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Persentase jumlah kawasan yang ditata**	**%**	**66.67**	**65.78**	**20,118,376,992**	**16,054,289,709**			
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	1	1	20,118,376,992	16,054,289,709			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Penambahan Ruas Jalan Baru**	**ruas**	**2**	**2**	**2,431,044,012,658**	**2,537,733,492,073**			
					Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	**%**	**86.23**	**85.83**					
				Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun	Km	43.5	24.528	2,431,044,012,658	2,537,733,492,073			
					Panjang jalan dengan kondisi mantap	Km	792.61	805.81					
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat**	**%**	**60.13**	**62.58**	**9,610,735,274**	**5,585,325,320**			
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	orang	1000	992	7,724,181,480	4,246,573,215			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	Layanan	1	1	235,152,128	179,941,029			
				Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen	3	2	1,651,401,666	1,158,811,076			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**%**	**83.9**	**82.08**	**7,474,584,466**	**6,559,309,153**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PENATAAN RUANG									
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	%	13.35	13.35	1,541,966,573	1,463,668,520			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	%	27.88	27.88	2,496,409,923	2,245,123,867			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	26.73	25.77	1,795,480,127	1,518,391,415			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	%	15.94	15.08	1,640,727,843	1,332,125,351			
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat**		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan**	**%**	**25**	**18**	**10,356,240,000**	**1,903,172,000**			
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi .	Dokumen	2	2	10,336,240,000	1,899,192,000			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit	0	0	10,000,000	0			
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	1	1	10,000,000	3,980,000			
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi**	**Ha**	**156.59**	**76.87**	**86,492,682,995**	**80,009,789,977**			
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	2	761,824,880	480,230,710			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	Ha	48.58	48.58	85,730,858,115	79,529,559,267			
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Penanganan PSU Permukiman**	**%**	**74.58**	**74.58**	**33,863,718,000**	**31,214,102,450**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	11	11	33,863,718,000	31,214,102,450			
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	**Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**	Penyelenggaraan Penegakkan Produk Hukum Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**90**	**97.80**	**40,743,149,745**	**30,586,780,804**	**Untuk pemenuhan Indeks Kualitas Layanan kesekretariatan dan persentase keluhan layanan kesekretariatan diperlukan pemenuhan sarana prasarana gedung/kantor yang layak untuk bekerja dimana Gedung/Kantor yang ada sekarang sudah tidak layak lagi untuk digunakan bekerja, selain itu diperlukan pemenuhan peningkatan kapasitas/SDM bagi Anggota Satpol PP**	**Upaya melakukan pindah gedung/melakukan rehab gedung, serta pemenuhan peningkatan kapasitas SDM Anggota satpol PP sesuai dengan kondisi penganggaran**	
					Persentase Keluhan Pengguna layanan Yang Ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	673,954,978	595,742,680	Tidak ada permasalahan yang signifikan didalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, hanya saja tuntutan ketepatan waktu didalam menyampaikan berbagai macam pelaporan baik perencanaan maupun penganggaran	Upaya melakukan perbaikan didalam menyampaikan pelaporan dan penganggaran agar lebih baik/akurat dan tepat waktu	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	100	100	34,429,013,808	24,849,259,368	Meskipun target kinerja kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah tercapai 100%, realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp 34.429.013.808,00 hanya terealisasi Rp 24.766.715.468,00 yang disebabkan oleh adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil sehingga tidak seluruh anggaran yang direncanakan harus direalisasikan.	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata, memperbaiki akurasi estimasi belanja, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	391,035,700	387,591,280	Meskipun target kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah tercapai 100%, realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp 391.035.700,00 hanya terealisasi Rp 384.546.280,00 yang disebabkan oleh adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil sehingga tidak seluruh anggaran yang direncanakan harus direalisasikan.	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata, memperbaiki akurasi estimasi belanja, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	859,871,829	794,233,314	Meskipun target kinerja kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah tercapai 100%, realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp959.871.829,00 hanya terealisasi Rp 719.921.714,00 yang disebabkan oleh adanya rincian belanja yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata, memperbaiki akurasi estimasi belanja, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Pemenuhan BMD	%	100	0	4,322,000	0	Tidak dapat dilaksanakan di karenakan tidak tercatat di RKBMD Melakukan Evaluasi dan Monitoring Dalam Merencanakan Pengadaan Barang.	Melakukan Evaluasi dan Monitoring Dalam Merencanakan Pengadaan Barang.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu	%	100	100	3,654,993,430	3,247,642,783	Meskipun target kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang tepat waktu telah tercapai 100%, realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp 3.654.993.430,00 hanya terealisasi Rp 3.244.642.783,00 yang disebabkan oleh adanya rincian belanja yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata, memperbaiki akurasi estimasi belanja, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan untuk berfungsi baik	%	100	71	729,958,000	712,311,469	Target kinerja kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Hanya tercapai 71%, realisasi anggaran dari pagu sebesar Rp 729.958.000,00 hanya terealisasi Rp 678.561.469,00 yang disebabkan oleh adanya rincian belanja yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah	Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran berbasis kebutuhan nyata, memperbaiki akurasi estimasi belanja, serta melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala agar pelaksanaan kegiatan ke depan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	2,596,916,970	2,350,137,486	Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum optimalnya penegakan hukum dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, pesatnya perkembangan wilayah, meningkatnya aktivitas ekonomi informal, dan kurangnya sosialisasi kebijakan turut memperbesar potensi gangguan Trantibum. Kondisi tersebut menyebabkan upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya berjalan efektif dan berkelanjutan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi peraturan daerah, penguatan kapasitas dan profesionalitas aparatur, serta optimalisasi penegakan hukum yang humanis namun tegas. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan data dan pemetaan daerah rawan gangguan Trantibum, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang aman, tertib, dan kondusif.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Kasus	4	7	1,000,086,051	911,044,046	Lemahnya koordinasi antarlembaga, belum adanya regulasi dan SOP terpadu, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan persepsi dan prioritas penanganan antar daerah. Selain itu kurangnya sistem informasi bersama dan rendahnya partisipasi masyarakat turut memperburuk efektivitas penanganan	Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penanganan gangguan ketertiban lintas wilayah, Keberadaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau forum lintas sektor lainnya, Penguatan forum koordinasi berkala antara Satpol PP kabupaten/kota dan provinsi Serta adanya forum warga FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), dan relawan ketertiban	
					Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	150	225	978,123,898	862,087,328	Terdapat kendala dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dimana kemampuan SDM anggota Satlinmas yang sdh ada masih kurang memadai.Pelatihan berupa Bimtek yang diberikan seringkali belum menjangkau seluruh anggota secara mendalam akibat keterbatasan waktu dan fasilitas.	Pemerintah Daerah melalui Satpol PP Bidang Perlindungan Masyarakat terus berupaya melakukan Pelatihan Berupa Bimtek berbasis Kompetensi , Simulasi Kesiapsiagaan dan Peningkatan Disiplin untuk memastikan Satlinmas tangguh dan Profesional.	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	Perda dan Perkada	5	5	570,107,021	529,843,650	Meskipun realisasi keuangan program mungkin mencapai target, terdapat beberapa kendala mendasar yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal dan menghambat efektivitas penegakan Perda/Perkada dan adanya biaya efisiensi operasional. Penyerapan anggaran yang hanya 86%, menandakan masih ada potensi penegakan perda dan perkada yang belum terjamah secara maksimal sepanjang tahun 2025.	Melakukan evaluasi secara berkala tiap Triwulan agar pelaksanaan penegakan perda dan perkada bisa dilakukan dengan maksimal dengan memonitor anggaran ke kegiatan Pengawasan dan Penanganan lebih intensif.	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS	Orang	1	1	48,600,000	47,162,462	Tidak ada permasalahan dalam pemenuhan Polisi Pamong Praja yang memiliki Kualitas PPNS dengan realisasi keuangan 97,04%	Mengalokasikan anggaran di tahun berikutnya untuk diklat peningkatan kapasitas penyidik agar kualitas PPNS meningkat.	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran**	**Jumlah**	**222**	**231**	**563,751,230**	**466,825,961**	**Jambore dibatalkan, Pembinaan aparatur tidak dilaksanakan karena tidak ada penyelenggara Bimbingan teknis yang menawarkan program.**	**Melaksanakan Rapat koordinasi di tahun 2026 dengan seluruh kabupaten kota, Tahun 2026 tidak ada lagi menganggarkan pengiriman peserta bimtek.**	

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	4	4	563,751,230.00	466,825,961.00	Jambore dibatalkan, Pembinaan aparatur tidak dilaksanakan karena tidak ada penyelenggara Bimbingan teknis yang menawarkan program.	Melaksanakan Rapat koordinasi di tahun 2026 dengan seluruh kabupaten kota, Tahun 2026 tidak ada lagi menganggarkan pengiriman peserta bimtek.	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Pra Bencana**	**%**	**100**	**100%**	**34,141,460,835.00**	**33,019,921,103.00**			
					Persentase Penanganan Tanggap Darurat	**%**	**100**	**100%**					
					Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	**%**	**100**	**100%**					
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	%	100	100%	88,722,204.00	77,369,674.00			
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100%	20,780,996,354.00	19,910,579,922.00			
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100%	812,651,330.00	792,112,099.00			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	100%	12,459,090,947.00	12,239,859,408.00			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**85**	**94,12 indeks**	**20,772,569,217.00**	**17,730,659,879.00**			
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	**%**	**80**	**80%**					
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100%	497,822,223.00	473,301,447.00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100	100%	15,202,221,693.00	12,617,909,081.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100%	43,960,000.00	43,518,000.00			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100%	15,212,247.00	15,049,247.00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	%	100	100%	782,719,205.00	781,746,642.00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	%	100	0%	-	-	Efisiensi Anggaran		

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemerintah Daerah	disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	%	100	100%	3,344,116,936.00	2,925,159,596.00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100	100%	886,516,913.00	873,975,866.00			
6	**Sosial**	**Dinas Sosial**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**%**	**84**	**86.7**	**74,008,467,731**	**75,249,269,350**			
					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	646,943,380	588,388,605			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Laporan	6	6	50,329,043,443	42,439,828,001			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	Laporan	3	3	12,090,358	11,484,020			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan	4	2	150,863,523	146,942,262			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Laporan	6	6	5,151,485,445	8,554,636,243			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	2	1,117,761,381	1,389,560,601			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	13,567,307,845	17,259,638,186			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	Laporan	6	6	3,032,972,356	4,858,791,432			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan**	**%**	**64**	**64**	**1,045,885,422**	**1,027,914,550**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	15	15	81,209,089	81,077,997			
				Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	PSKS	4	4	964,676,333	946,836,553			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Ppeningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti**	**%**	**5.8**	**5.8**	**12,621,246,753**	**34,780,394,721**			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Orang	50	37	1,673,838,330	1,435,124,909			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	Orang	80	80	10,947,408,423	33,345,269,812			
					Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	Orang	100	100					

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	Orang	85	97					
				Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	Orang	126	133	5,662,475,813	11,232,382,442			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	Orang	60	242	2,025,853,123	1,575,065,436			
				Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Orang	7928	6981	17,181,670,130	16,935,836,908			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif**	**Orang**	**13740**	**10485**	**18,550,968,639**	**17,369,341,970**			

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Orang	18	15	108,820,000	95,715,885			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	Orang	13722	10475	18,442,148,639	17,273,626,085			
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi**	**%**	**100**	**100**	**8,157,061,681**	**8,088,351,840**			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	Orang	17870	18193	8,157,061,681	8,088,351,840			
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik**	**lokasi**	**1**	**1**	**746,565,489**	**710,538,020**			
				Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Lokasi	1	1	746,565,489	710,538,020			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Keputusan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023. Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 3. Pergub No. 1 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					78.250.454.598,00	65.687.680.855,00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	68.190.801.279,00	56.987.096.584,00			1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2. Paramakarya 3. K3 Untuk Zero Accident
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,00	Indeks	84,00	68.190.801.279,00	56.987.096.584,00			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10,00	Dokumen	10,00	1.520.039.347,00	687.534.389,00	Keterhambatan dalam proses pengumpulan data dari Bidang dan UPTD	Sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	Dokumen	3,00	828.595.421,00	424.816.587,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD .	2,00	Laporan	2,00	47.902.226,00	22.193.600,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,00	Laporan	5,00	643.541.700,00	240.524.202,00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1,00	Dokumen	0,00	45.683.713.922,00	41.453.223.917,00	Gangguan pada Aplikasi SIPD	Kelancaran Akses Aplikasi SIPD menjadi pendorong Kegiatan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229,00	Orang/Bulan	213,00	44.901.774.922,00	40.932.504.317,00			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00	Dokumen	1,00	605.103.800,00	383.436.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	27.440.000,00	1.530.000,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,00	Laporan	1,00	125.715.200,00	115.019.300,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	Dokumen	1,00	23.680.000,00	20.734.300,00			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0,00		0,00	59.051.500,00	9.825.000,00	Hanya 1 Paket yang terlaksana karena 1 paket lainnya telah dihapus terkena efisiensi	Terlaksana tepat waktu	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1,00	Dokumen	1,00	59.051.500,00	9.825.000,00			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2,00	Paket	1,00	5.954.100,00	5.325.000,00			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00	Dokumen	1,00	15.680.000,00	4.500.000,00			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6,00	Orang	0,00	37.417.400,00	0,00			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,00	Orang	0,00	0,00	0,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	3.450.697.919,00	3.780.984.319,00	-	Terlaksana tepat waktu	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5,00	Paket	5,00	24.954.864,00	23.355.373,00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10,00	Paket	10,00	664.918.114,00	1.306.209.331,00			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23,00	Paket	23,00	458.600.112,00	408.151.450,00			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,00	Paket	8,00	74.966.022,00	64.851.000,00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15,00	Dokumen	15,00	1.742.500,00	0,00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	12,00	664.877.207,00	478.492.165,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	Dokumen	1,00	1.560.639.100,00	1.499.925.000,00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,00	Dokumen	1,00	195.618.126,00	194.535.040,00	-	Terlaksana tepat waktu	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2,00	Unit	0,00	0,00	0,00			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00	Unit	0,00	0,00	0,00			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	Unit	1,00	195.618.126,00	194.535.040,00			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1,00	unitUnit	0,00	0,00	0,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	Dokumen	1,00	16.197.959.428,00	9.404.627.804,00	-	Terlaksana tepat waktu	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Laporan	12,00	7.498.088,00	6.834.000,00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	592.493.400,00	413.862.369,00			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	0,00	0,00	0,00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	15.597.967.940,00	8.983.931.435,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	Dokumen	1,00	1.083.721.037,00	1.456.366.115,00	-	Terlaksana tepat waktu	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2,00	Unit	2,00	45.831.999,00	44.430.088,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	Unit	14,00	269.913.000,00	269.590.149,00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,00	Unit	1,00	108.437.238,00	106.199.500,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	659.538.800,00	643.371.000,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	Unit	0,00	0,00	0,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	0,00	0,00	0,00			
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja	70,00	Persen	80,00	1.180.836.608,00	554.758.495,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	8,00	Dokumen	8,00	1.180.836.608,00	554.758.495,00	Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dalam hal mengikuti kegiatan BIMTEK yang perlu waktu cukup lama .	Sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro .	7,00	Dokumen	8,00	761.088.640,00	324.072.303,00			
				Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro .	20,00	Orang	29,00	419.747.968,00	230.686.192,00			
			1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.755/2023. 2. Keputusan Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Nomor : 500.15.9/8708/DTKT-II/2023	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja .	66,50	Persen	77,00	2.961.785.819,00	2.999.428.152,00			
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	60,00	Orang	271,00	2.721.593.695,00	2.812.042.857,00	Adanya dukungan dari LPK dan perusahaan penyelenggara pemagangan .	Adanya dukungan dari LPK dan perusahaan penyelenggara pemagangan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	352,00	Orang	352,00	2.595.915.423,00	2.701.792.357,00			
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20,00	Lembaga	20,00	125.678.272,00	110.250.500,00			
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	15,00	Laporan	0,00	0,00	0,00			
				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	15,00	LPK	0,00	0,00	0,00			
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1,00	Laporan	1,00	97.720.834,00	67.664.524,00	Dukungan dari Disnaker Kab/kota, Perusahaan, dan APINDO	Kurangnya jumlah paket kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar pada perusahaan WLKP	
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	23,00	Perusahaan	23,00	97.720.834,00	67.664.524,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1,00	Laporan	1,00	142.471.290,00	119.720.771,00	Dukungan dari Disnaker Kab/kota, Perusahaan, dan PT Alkon Indo Sertifikasi (Lembaga Audit)	Kurangnya anggaran untuk kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar pada perusahaan WLKP	
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1,00	Dokumen	1,00	142.471.290,00	119.720.771,00			
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,60	Persen	29,14	1.123.325.865,00	1.021.104.601,00			
				Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	270,00	Orang	279,99	765.291.637,00	559.045.638,00	Kerja sama dengan dunia usaha belum berkelanjutan.	Adanya regulasi dan program pemerintah yang mendukung layanan bimbingan jabatan.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	285,00	Orang	285,00	121.760.955,00	46.243.493,00			
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	270,00	Orang	270,00	165.844.955,00	77.900.995,00			
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	12.000,00	Orang	12.000,00	37.112.000,00	33.989.236,00			
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	180,00	Orang	180,00	440.573.727,00	400.911.914,00			
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	16,00	Lembaga	16,00	28.682.000,00	26.741.845,00	Tidak semua LPTKS melaporkan kegiatan secara rutin.	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan, operasional, dan kewajiban LPTKS.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	16,00	Lembaga	16,00	28.682.000,00	26.741.845,00			
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar kerja	1,00	event	0,00	265.788.000,00	379.273.949,00			
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1,00	Dokumen	1,00	109.300.000,00	331.693.949,00			
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	55.000,00	Orang	5.555,00	156.488.000,00	47.580.000,00			
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	230,00	Orang	0,00	0,00	0,00			
				Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	30,00	Orang	30,00	63.564.228,00	56.043.169,00	Daerah tidak memperoleh data RPTKA secara real time.	Adanya peraturan tentang penggunaan TKA dan kewenangan pusat–daerah.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	30,00	Orang	30,00	63.564.228,00	56.043.169,00			
			Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3.1/K.125/2023 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten / Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	72,00	Persen	78,20	1.971.410.859,00	1.622.514.384,00			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	105,00	SK	118,00	537.319.940,00	289.725.850,00	Terlambatnya Laporan Data Hubungan Industrial yang dilaporkan oleh kabupaten/kota setiap bulannya	Terkumpulnya laporan data hubungan industrial yang disampaikan tepat waktu setiap tanggal 10 tiap bulannya	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	50,00	Perusahaan	50,00	295.111.960,00	191.287.200,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	50,00	Perusahaan	108,00	190.607.980,00	54.262.650,00			
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1,00	Laporan	1,00	51.600.000,00	44.176.000,00			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	50,00	Perusahaan	78,00	745.270.694,00	537.612.792,00	Kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan	Adanya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang menjadi pedoman dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan	
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1,00	Perkara	0,00	465.959.126,00	287.215.660,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10,00	Perkara	9,00	25.810.000,00	20.620.600,00			
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20,00	AsosiasidanSerikatPekerja	20,00	61.862.985,00	49.960.832,00			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8,00	Lembaga	8,00	191.638.583,00	179.815.700,00			
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10,00	SK	10,00	688.820.225,00	795.175.742,00	Terlambatnya aturan mengenai aturan penetapan Upah Minimum	Peraturan pemerintah nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1,00	Surat Keputusan	1,00	331.940.265,00	482.954.692,00			
				Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9,00	Surat Keputusan	9,00	270.270.975,00	243.728.550,00			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11.000,00	Orang	11.000,00	86.608.985,00	68.492.500,00			
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi	18,23	Persen	16,67	2.283.605.746,00	2.031.608.770,00			
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4.000,00	Perusahaan	2.810,00	2.283.605.746,00	2.031.608.770,00	adanya efisiensi anggaran, prsh tidak koperatif ,tidak semua prsh memiliki kantor cabang di Kaltim dan kurangnya jumlah pengawas yang tidak sebanding dgn jumlah perusahaan di Kaltim	Adanya anggaran	
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	325,00	Perusahaan	325,00	937.673.524,00	857.561.125,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1,00	Kasus	1,00	202.812.400,00	135.749.530,00			
				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547,00	Perusahaan	547,00	1.143.119.822,00	1.038.298.115,00			
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan					22.831.724.095,00	16.896.152.169,00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Balikpapan)	84,00	Indeks	94,30	4.161.914.887,00	4.006.913.814,00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Balikpapan)	100,00	Persen	0,00	4.161.914.887,00	4.006.913.814,00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD.BLKI Balikpapan)	1,00	Dokumen	1,00	145.869.380,00	73.267.000,00			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00	Dokumen	1,00	120.169.380,00	50.660.000,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Balikpapan)	1,00	Dokumen	1,00	285.816.473,00	206.926.200,00			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24,00	Paket	16,00	26.366.473,00	24.508.800,00			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5,00	Orang	3,00	259.450.000,00	182.417.400,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPDT BLKI Balikpapan)	1,00	Dokumen	1,00	565.648.834,00	723.841.935,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,00	Paket	12,00	11.029.373,00	10.789.200,00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9,00	Paket	6,00	175.355.817,00	283.520.390,00			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4,00	Paket	3,00	167.317.142,00	241.540.200,00			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	Paket	12,00	52.667.302,00	48.473.740,00			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	Paket	12,00	6.799.200,00	6.633.473,00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	12,00	152.480.000,00	132.884.932,00			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1,00	Dokumen	0,00	0,00	0,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1,00	Unit	0,00	0,00	0,00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Balikpapan)	1,00	Dokumen	1,00	1.900.465.000,00	1.443.288.824,00			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Laporan	12,00	7.000.000,00	3.297.800,00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	452.625.000,00	159.069.748,00			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	0,00	156.000.000,00	0,00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	1,00	1.284.840.000,00	1.280.921.276,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Uptd BLKI Balikpapan)	1,00	Dokumen	1,00	1.264.115.200,00	1.559.589.855,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00	Unit	0,00	2.000.000,00	0,00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00	Unit	2,00	65.000.000,00	25.791.995,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	677.080.800,00	463.245.180,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	364.034.400,00	242.496.000,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	156.000.000,00	828.056.680,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	76,50	Persen	52,80	18.669.809.208,00	12.889.238.355,00			
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten (UPTD. BLKI. Balikpapan)	80,00	Persen	77,28	18.669.809.208,00	12.889.238.355,00			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1.040,00	Orang	1.038,96	16.486.135.208,00	12.702.084.592,00			
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20,00	Lembaga	24,00	310.594.000,00	187.153.763,00			
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5,00	Unit	0,00	1.873.080.000,00	0,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang					12.129.010.946,00	32.007.594.306,00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)	84,00	Indeks	80,00	3.092.600.127,00	10.257.560.355,00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Bontang)	100,00	Persen	80,00	3.092.600.127,00	10.257.560.355,00			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (UPTD BLKI Bontang)	1,00	Dokumen	1,00	138.881.670,00	412.201.011,00			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	Dokumen	12,00	138.881.670,00	137.400.337,00			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian (UPTD BLKI Bontang)	1,00	Dokumen	1,00	18.800.760,00	55.874.100,00			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya .	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20,00	Paket	20,00	18.800.760,00	18.624.700,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1,00	Dokumen	1,00	482.889.392,00	1.731.403.851,00			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,00	Paket	12,00	10.489.654,00	10.479.066,00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	Paket	6,00	181.306.462,00	289.876.141,00			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	Paket	12,00	13.676.096,00	13.545.000,00			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	Paket	12,00	20.429.180,00	17.518.500,00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	Laporan	12,00	256.988.000,00	245.715.910,00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BLKI Bontang)	1,00	Dokumen	0,00	2.071.363.305,00	5.840.159.736,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	Laporan	12,00	7.954.000,00	7.941.500,00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	545.999.500,00	433.915.328,00			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	1,00	300.849.805,00	298.743.084,00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	1.216.560.000,00	1.206.120.000,00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	Dokumen	1,00	380.665.000,00	2.217.921.657,00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00	Unit	1,00	48.565.000,00	37.132.338,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1,00	Unit	1,00	5.000.000,00	3.421.700,00			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,00	Unit	1,00	97.500.000,00	89.976.300,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	60.000.000,00	59.399.874,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	69.600.000,00	450.977.449,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	Unit	1,00	100.000.000,00	98.399.558,00			
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)	77,00	Persen	49,00	9.036.410.819,00	21.750.033.951,00			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	80,00	Persen	28,33	9.036.410.819,00	21.750.033.951,00			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	672,00	Orang	672,00	8.452.341.421,00	6.677.718.281,00			
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	20,00	Lembaga	21,00	233.348.000,00	221.998.400,00			
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	18,00	Unit	18,00	350.721.398,00	350.294.636,00			
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**81**	**23.163.857.087**	**21.991.127.850**	**sumber daya manusia, perencanaan yang belum matang, dan aspek teknis pelaporan**	**peningkatan kapasitas SDM dan evaluasi kinerja ASN**	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Indeks Kualitas Layanan Kesektariatan	**indeks**	**84**	**70,75**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71	71,9	524.147.533	520.012.691	Tidak tercapaianya target capaian kinerja DP3A sehingga mempengaruhi peningkatan Nilai SAKIP	Memenuhi evidendata capaian kinerja DP3A	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	95	94,44	13.754.158.627	13.232.199.314			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	82	72	555.208.761	547.991.300			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	Unit	113	132	2.096.495.655	2.058.496.895			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	33	34	1.229.047.091	1.194.458.582			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	4	4	3.711.230.501	3.247.916.131			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	Unit	87	1022	1.293.568.919	1.190.052.937			
			Perda No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan**	**orang**	**300**	**209**	**1.549.789.468**	**1.479.424.175**	akses terbatas terhadap pendidikan dan literasi ekonomi, ketidakadilan gender, masalah sosial-ekonomi yang kompleks seperti keterbatasan modal, dan jaringan informasi yang kurang memadai	Melakukan Peningkatan Kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	Lembaga					Melakukan Peningkatan Kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	penguatan serta pengembangan kapasitas perempuan, masyarakat dan lembaga pemberdayaan perempuan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	lembag aundefi ned					keterbatasan akses, kurangnya dukungan keluarga, dan rendahnya minat berpartisipasi, serta faktor eksternal seperti kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap bantuan, tradisi yang menghambat pemberdayaan (misalnya, larangan bekerja setelah kematian suami atau kewajiban biaya tinggi kepada mertua), dan sumber daya yang terbatas seperti kurangnya sumber daya manusia dan pengetahuan. data yang di berikan kab/kota masih terintergrasi dengan data kemendagri	Pembentukan Kelompok PEKKA di 3 lokasi yakni Kutim,PPU dan Kota Bontang, dan Melakukan Upaya Peningkatan Kapasitas terhadap kelompok yang sudah di bentuk	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	10	10	297.350.678	277.971.752			
			Perda nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi kaltim nomor 6 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani**	**%**	1	1	284.801.430	258.854.788			
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	lembaga	300	209	967.637.360	942.597.635			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	%	**24,96**	**100**	**2.291.670.694**	**2.190.368.703**	**Belum adanya kebijakan terbaru dalam menindaklanjuti regulasi/peraturan yang diterbitkan oleh KPPA RI**	**Mengidentifikasi dan menyusun perencanaan, penetapan kebijakan di Provinsi Kaltim mengenai urusan PPA**	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan kapasitas penyedia layanan Perlindungan Perempuan	lembaga					**Belum adanya RAD Urusan PPA**	**Penyusunan RAD Urusan PPPA di tahun 2026**	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Kewenangan Provinsi									
			Peraturan Gubernur SIGA Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan data dsn sistem informasi gender dan ansk	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase capaian data gender dan anak**	**%**					**Kurangnya sosialisasi pencegahan kekerasan secara masif**	**Pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan secara masif baik di Provinsi maupun Kab/Kota**	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Data	10	17	863.906.478	788.755.081	1. Kurangnya koordinasi yang efektif dari perangkat daerah yang terkait, lembaga/organisasi dan masyarakat untuk perlindungan perempuan. 2. Budaya patriarki yang mendukung stigma dan permisif terhadap kekerasan terhadap perempuan. 3. Kurangnya layanan pendampingan sebab keterbatasan SDM di daerah untuk pencegahan	1. Adanya sinergi antar OPD/lembaga/organisasi yang terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melakukan Pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan . 2. Peran aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di berbagai tingkatan kabupaten/kota melakukan pencegahan kekerasan terhadap perlindungan perempuan. 3.Koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga di tingkat kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. 4. meningkatnya kesadaran masyarakat serta aksesibilitas saluran pelaporan yang semakin luas melalui laporan SAPA 129.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											dan penanganan perlindungan perempuan. 4. Setiap lembaga cenderung bekerja sendiri-sendiri dan tidak terhubung satu sama lain, menghambat upaya pencegahan yang komprehensif. 5.Peran perempuan yang masih dianggap subordinat atau memiliki daya tawar rendah dalam pengambilan kebijakan.		
			Perda nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi kaltim nomor 6 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat kabupaten / kota layak anak**	**Persen**	80	100	1.111.685.470	1.093.675.364			
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	Lembaga	10	32	316.078.746	307.938.258			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	Lembaga	**80**	**100**	**791.605.694**	**627.304.597**	**Masih terdapat kabupaten/kota yang mengalami kendala teknis dalam mengakses atau mengoperasikan sistem SIMFONI PPA.**	**Melakukan pendampingan baik online maupun offline berkala kepada admin dan operator SIMFONI PPA kabupaten/kota. Mengusulkan peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan infrastruktur jaringan di daerah yang masih terkendala teknis.**	
			Perda nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi kaltim nomor 6 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak**	**%**					**Keterbatasan SDM operator di lapangan, terutama dalam proses penginputan, verifikasi dan validasi data kasus kekerasan.**		
				Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	lembaga					**Tidak semua lembaga layanan (polisi, rumah sakit, LSM) melaporkan data secara tepat waktu sehingga mempengaruhi konsistensi pelaporan.**		
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Layanan					**Dukungan dari pihak UPTD PPA serta jejaring lembaga layanan dalam memberikan laporan kasus kekerasan secara cepat dan terintegrasi**		

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	dokumen	20	20	791.605.694	627.304.597			
3	**Pangan**	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**	**Skor**	**90**	**90**	**809.647.043**	**808.164.749**	**melaksanakan replikasi atau sosialisasi DRPPA pada Kab/Kota**		
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	**Skor**					**Meningkatkan komitmen FA dalam Perencanaan dan proses pembangunan anak meyediakan anggaran dalam kegiatan serta komitmen pembangunan yang berspektif anak**		
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan					meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan di sekolah menuju satuan pendidikan ramah anak		
				Pengelolaan dan Keseimbangan	Persentase Cadangan	%					Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi		

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Cadangan Pangan Provinsi	Pangan Yang Tersedia						pelembagaan PHA		
				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Media					Usulan melalui sub kepegawaian tentang SDM profesional/psikolog		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase daerah rawan pangan**	**%**	10	10	270.842.247	270.273.748			
					Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya	**Kecamatan**	10	10	538.804.796	537.891.001			
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	Laporan	**3,88**	**3,5**	**1.930.270.034**	**1.800.478.194**			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	Kecamatan	1	10	1.109.040.964	989.408.816			
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan**	**%**	80	178	402.335.074	397.472.890			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					keamanan pangan								
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Dokumen	1	1	418.893.996	413.596.488			
4	**Lingkungan Hidup**	**Dinas Lingkungan Hidup**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**88,5**	**95,15**	**31.394.195.079**	**26.355.360.627**			
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	%	100	100	413.449.836	377.149.155			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	%	100	100	21.776.638.283	17.714.350.544			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	%	100	100	43.539.010	42.763.100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan	%	100	100	321.606.617	319.762.532			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					pelayanan kepegawaian								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	%	100	80	1.834.928.610	1.763.295.098			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	100	100	899.328.591	862.013.360			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	%	100	91,67	5.142.772.836	4.333.315.399			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	67	100	961.931.296	942.711.439			
				PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)**	**%**	**100**	**100**	**1.298.031.342**	**1.077.674.992**			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup	%	100	100	897.632.369	757.016.992			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					terhadap dokumen RPPLH								
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	%	100	100	400.398.973	320.658.000			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Pencemaran**	**≤(tercemar ringan)Indeks**	**5**	**2,49**	**3.342.532.279**	**2.772.793.844**			
					Indeks Standar Pencemar Udara	**(Baik)Indeks**	**47**	**42**					
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	91,67	2.434.533.569	2.013.487.833			
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	Persen	81	86,55	566.731.690	459.562.161			
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	%	45	49,06	341.267.020	299.743.850			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola**	**Ha**	**186,25**	**209,38**	**513.310.400**	**512.974.400**			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	%	35	39,35	513.310.400	512.974.400			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)**	**%**	**52**	**42,09**	**354.154.139**	**349.714.911**			
				Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	Usaha	25	25	354.154.139	349.714.911			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	**Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan**	**%**	**55**	**53,13**	**1.023.918.988**	**1.004.584.947**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**pemerintah provinsi**								
				Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	%	67,5	66,67	1.023.918.988	1.004.584.947			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup**	**Kelompok**	**120**	**158**	**220.101.470**	**211.594.386**			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	%	50	56,19	220.101.470	211.594.386			
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari**	**%**	**84,42**	**84,72**	**112.376.131**	**111.551.757**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					hasil pembinaan (%)								
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	%	20	71,74	112.376.131	111.551.757			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)**	**%**	**100**	**100**	**690.406.983**	**644.603.425**			
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	%	100	100	690.406.983	644.603.425			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase sampah yang dikelola (%)**	**%**	**89**	**68,45**	**1.159.078.269**	**1.143.396.203**			
				Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	%	70	57,38	1.159.078.269	1.143.396.203			
5	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	**Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**Persen**	**80**	**99,22**	**407.105.869**	**394.680.546**			
				Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	Dokumen	1	1	308.502.941	298.599.282			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan pendaftaran penduduk	Dokumen	1	1	98.602.928	96.081.264			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**Persen**	**100**	**100**	**412.101.705**	**369.452.081**			
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	2	2	263.904.525	221.910.550			
				Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	Dokumen	2	2	148.197.180	147.541.531			
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	**Publikasi data kependudukan skala provinsi**	**Kali**	**2**	**2**	**325.667.874**	**266.774.100**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	28	28	216.148.490	160.498.200			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	1	109.519.384	106.275.900			
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**84**	**89**	**28.482.902.722**	**23.754.086.552**	Sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan masih kurang;	Mengajukan usulan anggaran pengadaan sarana dan prasarana ke TAPD	
					Presentase Keluhan yang di tindaklanjuti	**%**	**100**	**100**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	710.657.709	625.923.031	Ketersediaan data pendukung dari Bidang - bidang yang belum lengkap	Koordinasi dengan Bidang terkait permintaan dan pemenuhan data dalam mendukung perencanaan penganggaran OPD	1. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025 untuk dua kategori, yakni Desa dan Kelurahan, bentuk apresiasi atas komitmen pembinaan pemerintahan

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
													desa dan kelurahan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	ASN	85	85	16.131.946.420	12.913.598.352	Pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP untuk CPNS dan PPPK yang tidak 12 bulan karena keterlambatan penerbitan SK CPNS dan PPPK pada bulan Mei tahun 2025	Melakukan rekon dengan BPKAD dan menghitung ulang kebutuhan anggaran TPP	2. Peringkat 1 Lomba Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional III (Kalimantan dan Sulawesi) yaitu Desa Padang Jaya Kabupaten Paser dan Kelurahan Satimpo Kota Bontang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Adminisrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Dokumen	1	1	36.317.990	27.037.040	masih lemahnya pencatatan/inventarisasi BMD	Melakukan rekon BMD dengan BPKAD dan mencatat BMD yang baru	3. Juara 3 Nasional Kategori Desa Ketahanan Pangan yaitu Desa Loa Duri Ilir, Kab. Kutai Kartanegara

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	orang	25	25	792.551.197	660.040.408	Pengelolaan Data Kepegawaian yang belum akurat	Koordinasi dengan BKD terkait update data kepegawaian	4.Peringkat 5 BUMDesa Terinspiratif yaitu BUMDesa Tepian Bina Bersama, Desa Tepian Langsat, Kab. Kutai Timur
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	Buah	150	150	1.950.613.152	1.844.515.822	Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten, sering berubah, dan kurangnya peraturan pelaksana	Sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang baru	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	3	831.522.395	811.614.208			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	2	2	4.608.457.660	3.748.542.945			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	Unit	20	20	3.420.836.199	3.122.814.746			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENATAAN DESA	**Presentase desa yang difasilitasi penataan desanya**	**%**	**2,14**	**2,14**	**296.452.342**	**212.953.671**	Kelangkapan administrasi usulan pemekaran desa/kampung dari Kabupaten yang masih kurang berdampak pada fasilitasi ke kemendagri	Fasilitasi dan sosialisasi tentang penataan desa ke Kabupaten pengusul pemekaran desa/kampung Melakukan monitoring ke Kabupaten pengusul pemekaran desa/kampung Koordinasi dengan Kemendgari terkait kelengkapan administrasi pemekaran desa/kampung	
				Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi Penataan Desanya	Desa	18	18	296.452.342	212.953.671			
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju**	**%**	**2,97**	**4,51**	**5.388.531.099**	**5.250.923.540**	Tahun 2025 menggunakan Indeks Desa yang terdiri dari 6 Dimensi(Layanan Dasar; Sosial; Ekonomi; Lingkungan; Aksesibilitas; Tata Kelola Pemdes); tahun 2024 menggunakan Indeks Desa Membangun yang terdiri 3 Dimensi(Ketahanan Sosial, Ketahanan	Berkoordinasi dengan DPMD/K Kabupaten; Tenaga Pendamping Profesional terkait pengisian kuisoner/penilaian Indeks Desa dalam menanggulangi kasalahan penginputan dan pelaporan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi/Lingkungan); sehingga terjadi perbedaan pada komponen penilaian		
				Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	Kab/Kota	10	2	5.388.531.099	5.250.923.540	Kerjasama antar desa antar kabupaten/kota yang belum dilaksanakan secara intensif dalam rangka meningkatkan perekonomian desa terutama pengembangan potensi desa atau produk unggulan desa Fasilitasi pemasaran produk unggulan desa yang belum optimal	Berkoordinasi dengan DPMD/K Kabupaten dalam mendorong peningkatan kerjasama antar desa antar kabupaten/kota Sosialisasi pengembangan produk unggulan desa berdasarkan potensi desa dalam pemasaran Bekerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga dalam mendukung pengembangan produk unggulan desa	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Presentase desa yang mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara optimal**	**%**	**35**	**35**	**7.575.121.689**	**7.236.069.910**	Belum optimalnya pemanfaatan administrasi desa, Terbatasnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan, Belum optimal pengembangan potensi ekonomi desa - Lembaga ekonomi desa (BUMDes) belum berkembang dan belum berkontribusi terhadap PADDes	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa, Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku BUMDes, memberikan bantuan keuangan kepada BUMDes	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	Desa	296	339	7.575.121.689	7.236.069.910			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat**	**%**	**3,25**	**3,25**	**21.569.498.074**	**19.163.955.672**	Masih rendahnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); Lembaga Adat Desa (LAD); Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pembangunan Desa Belum optimalnya pembinaan, peningkatan kapasitas terhadap LKD,LAD dan MHA	Sosialiasi dan percepatan pembuatan Perdes LKD agar lebih maksimal menjalankan Fungsi dan Peran serta Fasilitasi peningkatan kapasitas LKD, LAD dan MHA dalam meningkatkan partisipasi Lembaga terhadap pembangunan desa Koordinasi dengan DPMD/K Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi terhadap pembangunan desa	
				Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat, dan kelompok masyarakat	Desa	27	54	21.569.498.074	19.163.955.672			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total**	**%**	**2,18**	**2,17**	**531.516.169**	**489.728.970**	Masih Kurangnya Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian dari upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, karena pada saat bicara tentang kemiskinan ekstrem, maka sasarannya adalah keluarga atau rumah tangga miskin	
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	5	5	531.516.169	489.728.970			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Angka prevalensi kontrasepsi modern**	**%**	**68,42**	**55,71**	**315.116.725**	**276.593.325**	Belum Semua Kab./Kota di Kaltim terbentuk Kampung KB	Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas hingga 100% di Kab./Kota se Kaltim	
				Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan	Rasio akseptor KB	%	0,76	0,76	315.116.725	276.593.325			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			Perda No 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**indeks**	**65,54**	**65,5**	**669.542.492**	**617.142.906**	1. kab/kota belum memenuhi kriteria indikator diomensi indeks kualitas keluarga 2. Laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur masih ada diatas 2.0	1. Penguatan pada club ayah dalam peningkatan kualitas keluarga 2. Sharing Motivator Ketahanan Keluarga	
				Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Organisasi	4	4	628.297.124	600.664.018			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan	Presentase organisasi pemberdayaan dan peningkatan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan	%	40	40	41.245.368	34.680.848			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	ketahanan keluarga								
8	**Perhubungan**	**Dinas Perhubungan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti**	**%**	40	40	**38.856.209.092**	**35.029.243.915**			
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**Indeks**	**74**	**90,52**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	92	92,31	625.816.352	370.666.154			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	%	94	92,52	24.442.523.005	21.926.244.073			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	%	92	93,25	65.128.900	49.460.400			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	%	100	95,24	35.602.000	35.504.000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti	%	20	84,42	222.954.450	209.027.765			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Pendidikan dan Pelatihan								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	%	92	93,43	2.678.281.037	2.531.609.473			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	%	0	0	0	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	%	100	100	7.938.824.848	7.190.354.874			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	92	92,03	2.847.078.500	2.716.377.176			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP**	**%**	**86**	**86,01**	**155.193.236.047**	**144.737.062.815**			
					Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	**Kejadian**	**165**	**155**					
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	**Angka**	**0,005**	**0**					

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%	85	77,78	150.606.899.335	141.196.904.303			
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun (UPTD Terminal)	%	58	77	3.025.573.500	2.297.830.096			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang dipatuhi	Dokumen	4	4	236.667.080	203.396.128			
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	%	74	121,1	528.552.155	448.195.167			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	Unit	17	17	40.206.000	39.717.300			
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	Dokumen	3	3	220.631.137	182.237.240			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit	120	216	338.907.960	236.581.999			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggara Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	Unit	310	320,01	195.798.880	132.200.582			
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Rasio Konektivitas Angkutan Laut dan SDP**	**Angka**	**0,98**	**0,978**	**5.290.823.738**	**4.674.543.775**			
				Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	Unit	105	96	262.899.252	254.641.840			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	Dokumen	1	1	66.321.887	64.837.450			
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	Badan Usaha	65	113	173.306.738	162.099.605			
				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	Unit	1	1	4.788.295.861	4.192.964.880			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengumpan Regional									
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian**	**%**	**45**	**40**	**119.890.787**	**97.077.007**			
				Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	%	45	40	119.890.787	97.077.007			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
	Komunikasi dan Informatika	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	Pergub Kaltim No.49 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah	%	70	70	45.379.199.562	44.823.544.435	1. tidak mematuhi etika jurnalistik 2. Belum bisa menjangkau disinformasi dan hoax yang tersebar di WA grup. 3.Umpan balik dari masyarakat terhadap isu belum maksimal. 4. Pengguna medsos yang tidak bertanggungjawab membuat konten yang isinya menyerang pemerintah 5. Anggaran yang semakin berkurang	1, Menekankan kerjasama media wajib minimal 2 th domisili di Kaltim 2. Menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan siber anti fitnah/ hoax dan meningkatkan literasi digital 3. Melakukan penetrasi kecakapan dalam memanfaatkan digital 4. Meningkatkan produksi konten2 positif pemerintah agar masyarakat turut mendukung program pembangunan pemerintah 5. Lebih mengutamakan publikasi melalui videotron yang ada di OPD2 dan kantor gubernur, rumah dinas wagub	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	%	85	85	45.379.199.562	44.823.544.435	1. Media yang tidak mematuhi etika jurnalistik 2. Belum bisa menjangkau disinformasi dan hoax yang tersebar di WA grup. 3. Umpan balik dari masyarakat terhadap isu belum maksimal. 4. Pengguna medsos yang tidak bertanggungjawab membuat konten2 yang isinya menyerang pemerintah 5. Anggaran yang semakin berkurang	1, Menekankan kerjasama media wajib minimal 2 th domisili di Kaltim 2. Menjalin hubungan kerjasama dengan jaringan siber anti fitnah/ hoax dan meningkatkan literasi digital 3. Melakukan penetrasi kecakapan dalam memanfaatkan digital 4. Meningkatkan produksi konten2 positif pemerintah agar masyarakat turut mendukung program pembangunan pemerintah 5. Lebih mengutamakan publikasi melalui videotron yang ada di OPD2 dan kantor gubernur, rumah dinas wagub	Top GPR Award 2025

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
													Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Predikat "Informatif" skor 92,07
													Top GPR Leader 2025 di ajang GPR Awards 2025 diterima oleh Kepala Diskominfo Kaltim,

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
													KIMFest 2025 Juara Kategori Utama Terbaik di Bidang Literasi diraih oleh KIM Mangun Karya PPU
			Pergub Kaltim No.4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik**	%	82	80	45.400.782.350	42.127.617.430	Masih ada Perangkat Daerah yang belum aktif dalam memberikan data dan informasi terkait transformasi digital yang sudah diimplementasikan	Peran aktif Perangkat Daerah Pendukung dan pengampu layanan berbasis elektronik pada Pemprov Kaltim	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	100	97,3	60.688.280	58.477.400	Masih ada Perangkat Daerah yang belum aktif dalam memberikan data dan informasi terkait transformasi digital yang sudah diimplementasikan	Peran aktif Perangkat Daerah Pendukung dan pengampu layanan berbasis elektronik pada Pemprov Kaltim	
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	%	85	82,33	45.340.094.070	42.069.140.030	Masih ada Perangkat Daerah yang belum aktif dalam memberikan data dan informasi terkait transformasi digital yang sudah diimplementasikan	Peran aktif Perangkat Daerah Pendukung dan pengampu layanan berbasis elektronik pada Pemprov Kaltim	
			Pergub Kaltim No.12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data**	**%**	**85**	**85**	**3.194.327.443**	**3.050.208.974**	memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi kinerja istansi berjalan dengan efektif dan efisien	membuat tahapan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi kinerja istansi berjalan dengan efektif dan efisien	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	%	85	85	3.194.327.443	3.050.208.974	memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi kinerja istansi berjalan dengan efektif dan efisien	membuat tahapan perencanaan, pelaksanaan , dan evaluasi kinerja istansi berjalan dengan efektif dan efisien	
			Pergub Kaltim No.20 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	Tingkat	3	3	968.110.060	897.940.940	Sumber Daya Manusia , Organisasi Birokrasi , tata laksana teknologi, dan juga prilaku serta budaya birokrasi	Segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan	
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	90,46	839.367.911	772.503.586	Sumber Daya Manusia , Organisasi Birokrasi , tata laksana teknologi, dan juga prilaku serta budaya birokrasi	Segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	%	85	83,12	128.742.149	125.437.354	Sumber Daya Manusia , Organisasi Birokrasi , tata laksana teknologi, dan juga prilaku serta budaya birokrasi	Segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	1. indeks 2. persen	100 100	100	72.807.066.555	60.782.884.688			
			Pergub Kaltim No.54 Tahun 2025 Tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pergub Kaltim No. 28 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	persen	100	100	341.779.300	324.600.820	Perubahan indikator program, efisiensi anggaran	penetapan indikator, target dan realisasi anggaran yang maksimal	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	persen	100	100	27.305.451.835	17.590.202.704	Tidak ada	Membentuk forum koordinasi rutin antara unit perencanaan, keuangan, dan pelaksana teknis.	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	persen	100	100	16.933.680	16.633.100	Tidak ada	Melakukan pemutakhiran data aset secara berkala dan sesuai ketentuan.	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	persen	100	100	54.970.760	50.510.000	Tidak ada	Tidak ada	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	persen	100	100	1.491.756.472	1.379.314.743	Tidak ada	Tidak ada	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	persen	100	100	36.555.043.484	34.794.648.327	Tidak ada	Meningkatkan data pengusulan dan penghapusan barang milik daerah	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	persen	100	100	5.589.425.953	5.266.057.726	Tidak ada	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	persen	100	100	1.451.705.071	1.360.917.268	Tidak ada	Terealisasinya pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan layanan operasional teknis dan administrasi pimpinan	
10	**Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Diitindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**52.685.016.058**	**51.159.943.954**			
					Indek Kualitas layanan Kesekretariatan	**Indeks**	**88,8**	**89,95**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Dokumen	29	29	1.215.370.066	1.203.147.484			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	Dokumen	75	75	28.859.530.155	23.629.722.483			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	Dokumen	18	18	48.563.509	47.952.000			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah (UPTD Pelatihan Koperasi)	Dokumen	5	0	0	0			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	orang	189	172	1.163.663.950	1.327.982.665			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	4.491.727.367	5.419.612.022			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100	100	2.911.422.192	2.880.683.845			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan	12	12	10.416.017.202	11.107.858.525			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Unit	200	200	3.578.721.617	5.542.984.930			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat**	**%**	**35**	**39,13**	**581.031.444**	**542.074.805**	1. keterbatasan permodalan dan rendahnya kinerja unit usaha koperasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, serta masih adanya koperasi binaan yang tidak aktif namun belum ditertibkan 2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga pendamping koperasi, serta belum optimalnya sinergi program pembinaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, juga menjadi kendala dalam mendorong peningkatan kesehatan koperasi binaan secara merata	1. Upaya Mengatasi Permasalahan Permodalan, Kinerja, IT, dan Koperasi Tidak Aktif: a. Penguatan Akses Permodalan Perbankan & Kinerja b. Digitalisasi Laporan Keuangan c. Penertiban Koperasi dengan pemutakhiran data 2. Upaya Mengatasi Keterbatasan Pendamping dan Sinergi Pembinaan: • Peningkatan Kapasitas SDM Pendamping • Sinkronisasi & Sinergi Program provinsi, kabupaten dan kota • Optimalisasi Tenaga Pendamping	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	%	54	55,3	376.040.186	356.375.664	1. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi provinsi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas koperasi, 2. keterbatasan anggaran operasional, serta luasnya wilayah dan sebaran koperasi yang tidak merata. 3. belum optimalnya ketersediaan dan pemutakhiran data koperasi, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian koperasi terhadap ketentuan pemeriksaan, serta belum maksimalnya koordinasi dan sinergi dengan pemerintah	Upaya terintegrasi dengan mengembangkan Sistem Pengawasan Koperasi Berbasis Elektronik (E-Supervision) Terintegrasi yang mencakup: 1. Modul Data: Untuk pemutakhiran data mandiri oleh koperasi. 2. Modul Analisis Risiko: Untuk menentukan prioritas objek pemeriksaan. 3. Modul Pelaporan Online : Untuk efisiensi administrasi (sudah dilaksanan dengan sertiap koperasi yang melakukan RAT wajib update data di ODS Koperasi). 4. Modul Koordinasi: Untuk berbagi informasi antar level pemerintah. 5. Didukung dengan peningkatan kapasitas SDM dan penegakan aturan yang konsisten. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kendala dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi di tingkat provinsi dapat teratasi sehingga tujuan pengawasan untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja koperasi dapat tercapai.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											kabupaten/kota turut menghambat optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi di tingkat provinsi.		

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	%	20	37,5	204.991.258	185.699.141	1. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi masih terkendala oleh keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas KSP, 2. keterbatasan anggaran operasional pengawasan. 3. belum optimalnya kualitas dan keterbukaan laporan keuangan KSP, rendahnya kepatuhan sebagian KSP terhadap ketentuan pemeriksaan, luasnya wilayah dan sebaran KSP, 4. belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota turut menghambat efektivitas	1. Pembentukan unit khusus pengawas KSP 2. Terapkan penganggaran berbasis risiko (fokus pada KSP berisiko tinggi). 3. Optimalkan pengawasan jarak jauh (remote supervision) untuk efisiensi. 4. Rutin ke Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dengan sistem bagia biaya pemeriksaan khususnya KSP Binaan Provinsi 5. Pembentukan Satgas Pengawasan KSP yang melibatkan Kabupaten/Kota	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pemeriksaan dan pengawasan KSP di tingkat provinsi.		
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan**	**%**	**4,97**	**4,98**	**2.495.733.985**	**6.903.269.463**			
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	Koperasi	260	147	2.495.733.985	6.903.269.463	Perlu adanya inovasi dalam pelatihan	1. Membuat inovasi pelatihan, yang menyesuaikan kebutuhan target peserta. Serta menyiapkann metode pelatihan yang dapat menyesuaikan dengan efesiensi anggaran. 2. Melakukan sosialisasi jadwal pelatihan	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM Yang Mengikuti Pelatihan	UKM	480	837,02	2.495.733.985	6.903.269.463			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi**	**%**	**66**	**68,18**	**346.514.617**	**327.463.645**	1. Jumlah pemeriksa atau pengawas koperasi tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang harus diawasi. 2. Banyak koperasi tidak melaporkan data atau kegiatan secara berkala. 3. Tidak semua koperasi aktif terdata dengan baik di ODS 4. Beberapa koperasi menolak diperiksa atau tidak kooperatif selama proses pengawasan. 5. Kurangnya kesadaran akan pentingnya audit internal dan eksternal	1. Strategi Mengatasi Rasio Pengawas dan Koperasi (Poin 1): Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko 2. Strategi Meningkatkan Pelaporan Rutin dan Akurasi Data ODS (Poin 2 & 3): a.Verval Data & Integrasi Sistem ODS. b. Bimtek Pelaporan Mandiri 3. Strategi Menghadapi Koperasi Tidak Kooperatif (Poin 4): Penguatan Regulasi & Sanksi. Pendekatan Persuasif & Edukatif. 4. Strategi Peningkatan Kesadaran Audit (Poin 5): a. Gerakan Sadar Audit RAT. b.Fasilitasi Audit Eksternal	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	%	61,65	62,12	346.514.617	327.463.645	1. Koordinasi antar daerah yang lemah, karena perbedaan visi dan kebijakan masing-masing kabupaten/kota. 2. Kesenjangan kapasitas anggota di berbagai daerah yang menyebabkan ketimpangan internal. 3. Keterbatasan dana provinsi, karena koperasi lintas wilayah belum menjadi prioritas dalam banyak program.	1. Harmonisasi kebijakan melalui Grand Design Provinsi dan penguatan forum komunikasi antar dinas kabupaten/kota. 2. Pemerataan pelatihan berbasis wilayah dan fasilitasi kemitraan antar koperasi (transfer ilmu). 3.Re-focusing anggaran pada sektor strategis lintas wilayah dan penggalangan dana non-APBD (CSR/Hibah).	
				PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital**	**%**	**10**	**30,38**	**14.232.573.157**	**13.701.120.983**	1. Masuknya UKM ke pasar digital masih terhambat oleh rendahnya literasi dan keterampilan digital pelaku usaha, keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet, serta minimnya pemahaman	1. Penyelenggaraan bimtek strategi pemasaran daring dan penyediaan titik akses internet/perangkat di PLUT. 2. Fasilitasi pembuatan konten kreatif (foto/video produk) gratis dan akses pembiayaan perangkat digital. 3. Percepatan sertifikasi produk (Halal/P-IRT) dan program inkubasi untuk menjaga keberlanjutan toko daring.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											strategi pemasaran daring. 2. keterbatasan modal untuk pengembangan konten dan promosi digital. 3. belum terpenuhinya standar produk dan perizinan, serta rendahnya konsistensi pengelolaan toko daring turut menghambat percepatan transformasi digital UKM.		
				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha kecil yang dilakukan pembinaan dan pendampingan	Unit Usaha	2000	2296	14.232.573.157	13.701.120.983	Keterbatasan rasio tenaga pendamping dibanding jumlah UKM, belum optimalnya database UKM yang mutakhir, kendala geografis dalam menjangkau wilayah terpencil, serta belum adanya sistem monitoring pasca-pembinaan yang berkelanjutan	1. Implementasi pembinaan berbasis klaster, pemanfaatan metode hybrid mentoring (online & offline), serta aktivasi pendamping swadaya. 2. Pengembangan sistem pemutakhiran data UKM mandiri dan penerapan kartu kendali digital untuk memantau progres kenaikan kelas usaha secara berkala.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											untuk mengukur progres kenaikan kelas usaha		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Jumlah UKM Potensial Ekspor**	**UKM**	**40**	**53**	**1.343.896.351**	**1.322.661.766**	1. Pengembangan UKM potensial ekspor masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas SDM UKM dalam memahami prosedur dan regulasi ekspor, standar mutu dan sertifikasi produk internasional, serta kemampuan pemasaran global. 2. keterbatasan permodalan, tingginya biaya logistik dan pengiriman, rendahnya kontinuitas dan volume produksi, serta keterbatasan akses informasi	1. Pendampingan Export Center, fasilitasi sertifikasi standar internasional, dan pelatihan pemasaran global. 2. Fasilitasi kredit ekspor (LPEI), skema agregasi produk untuk efisiensi logistik, dan perluasan jejaring via Atase Perdagangan.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pasar dan jejaring ekspor.		
				Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	UKM	455	517,02	1.343.896.351	1.322.661.766	1. Terfasilitasinya usaha kecil masih terhambat oleh keterbatasan informasi dan pemahaman pelaku usaha terhadap program fasilitasi pemerintah, rendahnya kelengkapan administrasi dan legalitas usaha, serta keterbatasan kapasitas SDM pelaku usaha. 2. keterbatasan anggaran dan jangkauan program, belum optimalnya	1. Sosialisasi "jemput bola", aktivasi Klinik Legalitas Usaha untuk bantuan administrasi, dan pelatihan literasi bisnis bagi UKM. 2. Optimalisasi kemitraan CSR untuk menutupi celah anggaran serta penguatan sistem monitoring berkelanjutan oleh tenaga pendamping.	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pendampingan berkelanjutan.		
11	**Penanaman Modal**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	1. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**92**	**91,59**	**33.311.282.997**	**30.618.508.182**	Tidak ada permasalahan yang signifikan. Hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan	Menyusun kegiatan dan alokasi anggaran serta waktu pelakasanaan kegiatan dengan cermat	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	%	100	100	553.335.720	501.202.223	Sisa anggaran berupa sisa honor narasumber dan sisa nilai kontrak	Menyusun anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	83,3	14.210.176.688	12.339.809.483	Penyusunan anggaran gaji disesuaikan dengan aplikasi SIENGGANG, dengan memasukkan formasi jafung yang kosong dan sebagai usaha preventif menghindari kekurangan gaji PNS dan PPPK;	Menyusun anggaran gaji sesuai dengan kondisi riil jumlah pegawai	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											Efisiensi anggaran yang berdampak terhadap berkurangnya besaran honor bulanan pengelola keuangan		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	Orang	1	1	30.200.000	30.000.000	Tidak ada permasalahan. Peruntukan anggaran untuk honorarium pengelola barang dan makan minum rapat internal	Menyusun anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	100	293.792.555	268.146.134	Tidak ada permasalahan. Peruntukan anggaran untuk pengadaan pakaian dinas, atribut, pelaksanaan diklat dan makan minum rapat	Menyusun anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	Laporan	439	404	2.552.405.435	2.531.288.781	Tidak ada permasalahan. Peruntukan anggaran untuk peralatan dan perlengkapan kantor, rapat koordinasi dan	Menyusun anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											konsultasi SKPD, penatausahaan arsip dan keperluan administrasi umum lainnya		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	Unit/Tahun	87	43	4.598.511.607	4.449.262.649	Efisiensi anggaran yang mengakibatkan kendala dalam realisasi belanja	Menyesuaikan target indikator saat terjadi efisiensi	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	Laporan	86	73	4.000.433.247	3.630.545.616	Tidak ada permasalahan. Peruntukan anggaran untuk keperluan pembayaran TALI, penyediaan jasa surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, serta jasa pelayanan umum kantor	Menyusun anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	100	7.072.427.745	6.868.253.296	Tidak ada permasalahan. Peruntukan anggaran untuk rehabilitasi bangunan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya	Menyusun anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan**	**Dokumen IPRO**	**2**	**2**	**1.743.001.343**	**1.595.845.097**	Belum adanya arah kebijakan investasi yang terstruktur dan terintegrasi sehingga pemetaan potensi daerah masih bersifat parsial.	Melakukan sinkronisasi data lintas perangkat daerah serta survei lapangan untuk menghasilkan pemetaan potensi dan peluang investasi yang akurat, terintegrasi, dan siap ditawarkan	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	Potensi Investasi	2	2	1.743.001.343	1.595.845.097	Keterbatasan data investasi yang terintegrasi dan terkini dari berbagai sumber	Koordinasi lintas daerah dan survei lapangan untuk sinkronisasi data dan memperkuat analisis potensi serta peluang investasi yang akurat	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara**	**Minat**	**12**	**12**	**1.634.080.077**	**1.469.472.707**	Kepeminatan investasi belum didukung dengan ketersediaan lahan potensial yang siap ditawarkan, sarana infrastruktur pendukung investasi, dan pengaruh ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi keputusan investasi	Peningkatan melalui data akurat, pengembangan jangkauan promosi dan koordinasi efektif pemerintah pusat, daerah dan stakeholder	
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Kegiatan Promosi (Kegiatan)	Kegiatan	12	12	1.634.080.077	1.469.472.707	Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa rencana	Optimalisasi Sumber Daya guna peningkatan kualitas kegiatan promosi investasi yang efektif dan efisien	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Kewenangan Daerah Provinsi							promosi mengalami penyesuaian		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu (%)**	**Persen**	**100**	**100**	**1.804.346.622**	**1.601.079.565**	Perubahan regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan	Merencanakan, mengikutsertakan dan melibatkan SDM yang ada untuk peningkatan kompetensi dalam memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	**Persen**	**100**	**100**					
				Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	(Izin&NonIzin)	7500	4042	1.804.346.622	1.601.079.565	1. menurunnya jumlah permohonan izin dan non izin dari pelaku usaha dampak dari kondisi ekonomi dan kebijakan nasional 2. adanya penyesuaian dan perubahan regulasi 3. peningkatan kualitas verifikasi dan pemenuhan persyaratan teknis dan administratif	1. Penguatan sosialisasi perizinan dan OSS-RBA kepada pelaku usaha 2. Optimalisasi pendampingan dan konsultasi perizinan 3. Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara**	**%**	**100**	**100**	**744.782.693**	**702.069.018**	Faktor pemahaman pelaku usaha yang belum mengetahui kewajiban dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Telah dilakukan sinkronisasi dan pembagian target investasi kepada DPMPTSP Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Laporan	1614	3794	744.782.693	702.069.018	Infrastuktur yang kurang memadai sehingga menjadi penghambat dalam pencapaian target realisasi investasi.	Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan Bimtek. Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.	
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan**	**%**	**100**	**100**	**475.906.558**	**446.976.744**	Sebagian pelaku usaha maupun masyarakat, banyak yang belum memahami jenis layanan yang disediakan DPMPTSP Prov. Kaltim. Selain itu pada beberapa daerah juga memiliki keterbatasan dalam akses informasi	Memaksimalkan kanal informasi daring (media sosial, website) untuk menyebarkan informasi layanan dan memperoleh feedback dari masyarakat serta optimalisasi fungsi helpdesk/call center untuk menjawab pertanyaan dan memberikan panduan	

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											mengenai layanan yang diberikan.		
				Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	Data	210	234	475.906.558	446.976.744	perubahan regulasi terutama terkait layanan perizinan dan nonperizinan serta perlunya kehati-hatian dalam menyajikan data agar tidak melanggar ketentuan privasi data pribadi pelaku usaha	berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna mendapatkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyajikan hasil olahan data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti infografis dan konten digital untuk disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**	**Dinas Pemuda dan Olah Raga**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**91**	**91,08**	**196.973.113.416**	**357.258.682.790**			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	10	10	1.089.045.024	663.705.938			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					yang Ditetapkan Tepat Waktu								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	95	93,8	26.562.856.294	23.749.505.238			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	%	95	95	91.853.420	79.472.914			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetens	%	95	95	442.434.387	401.474.546			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	95	95	32.518.923.037	46.349.920.512			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	95	95	40.841.040.287	118.080.519.891			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	95	95	31.974.403.123	38.176.903.260			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	95	95	63.452.557.844	129.757.180.491			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	**Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam**	**%**	**1,31**	**0,23**	**20.393.797.082**	**20.327.386.842**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				DAYA SAING KEPEMUDAAN	**kegiatan ekonomi mandiri**								
					Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	**%**	**27,32**	**4,06**					
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	Orang	5580	8519	16.704.933.142	16.646.250.184			
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Organisasi	170	191	3.688.863.940	3.681.136.658			
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING	**Jumlah Perolehan medali pada Event Olahraga**	**Keping Medali**	**135**	**323**	**178.910.537.521**	**175.461.977.522**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				KEOLAHRAGAAN	**Nasional dan Internasional**								
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	24	24	1.001.650.060	955.356.566			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Orang	600	600	6.634.430.906	6.531.544.230			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	630	630	153.781.502.813	150.853.028.596			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Partisipasi Insan Olahraga Dalam Kegiatan yang diselenggarakan	Orang	7000	7000	17.492.953.742	17.122.048.130			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	Orang	150	150	17.492.953.742	17.122.048.130			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif**	**%**	**8,66**	**8,66**	**13.722.000.000**	**13.719.891.000**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Orang	4500	8770	13.722.000.000	13.719.891.000			
13	**Kebudayaan**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**12.206.143.482**	**10.420.535.834**			
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**Indeks**	**91,5**	**94,28**					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	93	330.720.000	297.210.000			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	0	0	0			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	%	100	100	1.233.977.452	1.230.010.698			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	%	100	100	2.587.296.752	1.220.738.968			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	%	100	98	5.746.468.278	5.547.844.251			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	95	2.307.681.000	2.124.731.917			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Kebudayaan yang dikembangkan**	**%**	**89**	**89**	**8.608.619.423**	**8.199.352.410**			
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	%	65	65	3.550.320.037	3.166.931.884			
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	%	75	75	5.058.299.386	5.032.420.526			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**%**	**71**	**47,33**	**4.962.699.646**	**4.325.583.104**			
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	%	75	75	4.962.699.646	4.325.583.104			
					Jumlah Lembaga Kesenian yang	%	70	70					

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					ditingkatkan Kapasitasnya								
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina**	**%**	**78,5**	**78,5**	**685.302.560**	**640.178.000**			
				Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	%	80	80	685.302.560	640.178.000			
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan**	**%**	**63,5**	**63,5**	**5.649.522.671**	**4.405.264.577**			
					Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan	**OPK**	**37**	**37**					
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	%	75	75	5.147.437.565	4.133.361.431			
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	%	60	60	502.085.106	271.903.146			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase Pengelolaan Permuseuman**	**%**	**66**	**66**	**1.954.900.000**	**1.883.156.751**			
				Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	%	50	50	1.954.900.000	1.883.156.751			
14	**Perpustakaan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**91**	**91**	**33.203.033.900**	**27.288.637.202**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**Indeks**	**82**	**88,16**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	17	17	194.203.830	180.891.778			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	98	83	24.420.764.784	20.278.058.529			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	%	85	75	45.380.058	41.830.962			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	100	142.200.000	86.695.347			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	100	50	3.076.084.057	2.901.659.160			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	1	1	362.626.731	358.000.000			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pelayanan jasa	%	100	100	4.415.271.740	3.071.449.259			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemerintahan Daerah	penunjang tepat waktu								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	100	100	546.502.700	370.052.167			
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Nilai Kegemaran Membaca Masyakarat (TGM)**	**nilai**	**47**	**47**	**8.374.822.800**	**8.129.567.436**			
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	**indeks**	**40**	**40**					
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP	Perpustakaan	70	70	2.977.441.823	2.786.183.294			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	Eksemplar	3100	3671,95	2.977.441.823	2.786.183.294			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite	Orang	240000	88608	2.977.441.823	2.786.183.294			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang	Kegiatan	18	22	5.397.380.977	5.343.384.142			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					kreatif dan inovatif								
15	**Kearsipan**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Jumlah OPD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Kategori baik**	**OPD**	**7**	**9**	**1.287.546.368**	**1.066.079.732**			
				Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	%	80	10,52	549.135.328	477.010.570			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	96,5	96	236.445.201	158.329.000			
				Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	%	6	6	501.965.839	430.740.162			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional**	**%**	**77**	**77**	**631.441.257**	**511.405.120**			

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	Berkas	5200	1703	116.153.013	83.863.500			
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	Kegiatan	6	0	7.582.622	0			
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	Arsip	13940	28483,6	229.560.423	200.097.528			
				Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	Arsip	1300	1873,04	152.620.207	136.161.492			
				Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	Laporan	1	3	125.524.992	91.282.600			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	**Kelautan dan Perikanan**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**%**	**100**	**100**	**59,144,129,802**	**49,244,907,166**	Realisasi anggaran terserap sebesar 74% dikarenakan ada nya tambahan anggaran pada perubahan pada bulan november. Dimana waktu untuk pengerjaan hanya 1,5 bulan saja	koordinasi pada bappeda, BPKAD, dan Inspektorat	
					Indeks	**91.4**	**86**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	106.25	683,805,112	521,001,920	Toleransi waktu dalam pengiputan yang kadang terllau cepat	koordinasi pada bappeda, BPKAD, dan Inspektorat	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	74.41	42,560,697,838	34,994,805,788	SILPA pada gaji dan tunjangan, JKK, JKM, BPJS PPPK serta TPP dan Uang Makan PPPK dianggarkan dari Januari 2025, sedangkan dibayarkan mulai dari bulan Mei 2025 - THR P3K baru yang tidak terealisasi karena SK P3K belum terbit (TMT bulan Mei 2025) - Gaji dan TPP P3K ke 13 dibayarkan hanya 1/12 karena akumulasi perhitungan	Koordinasi pada BPKAD dan PT TASPEN	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										- Kelebihan Usulan Anggaran Gaji dan Tunjangan, sebagai langkah perventif untuk menghindari kekurangan pembayaran gaji		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	20	100	78,522,414	76,769,100	1. Keterbatasan anggaran pemeliharaan menyebabkan sebagian barang milik daerah tidak mendapatkan perawatan secara optimal sehingga menurunkan tingkat fungsionalitasnya. 2. Minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah menghambat	1. Melakukan inventarisasi dan pendataan Barang Milik Daerah secara berkala untuk memastikan kondisi dan kelayakan barang. 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola aset melalui pelatihan pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Melakukan inventarisasi dan pendataan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										optimalisasi pemanfaatan barang. 3. Inventarisasi barang milik daerah yang belum tertib dan akurat menyulitkan identifikasi barang yang masih berfungsi dengan baik.	Barang Milik Daerah secara berkala untuk memastikan kondisi dan kelayakan barang.	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	20	100	244,024,500	203,968,000	1. Beban kerja aparatur yang tinggi mengurangi waktu dan kesempatan untuk mengikuti proses pelatihan dan sertifikasi kompetensi. 2. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikat kompetensi membuat aparatur kurang termotivasi untuk mengikutinya. 3. Belum adanya kebijakan atau kewajiban yang mengikat terkait sertifikasi	Upaya peningkatan persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi dilakukan melalui program pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi berbasis kompetensi secara berkala untuk memastikan setiap aparatur memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										kompetensi menyebabkan pelaksanaannya belum optimal.		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	2,719,097,156	2,589,514,221	1. Rendahnya persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran untuk perawatan dan perbaikan, sehingga beberapa fasilitas menjadi tidak optimal atau rusak tanpa penanganan tepat waktu. 2. Tingginya tingkat kerusakan sarana dan prasarana kantor juga disebabkan oleh pemakaian yang tidak sesuai prosedur, sehingga umur	1. Peningkatan persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik dilakukan melalui pemeliharaan rutin, inspeksi berkala, serta penanganan cepat terhadap fasilitas yang mengalami gangguan. 2. menjaga sarana dan prasarana kantor tetap berfungsi dengan baik dengan melakukan perawatan rutin, pemeriksaan secara	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										pakai fasilitas menjadi lebih pendek dari yang direncanakan. 3. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik terkendala oleh minimnya pemahaman staf terhadap penggunaan dan perawatan fasilitas yang benar	berkala, dan segera memperbaiki yang rusak	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	592,534,585	582,180,398	1. Pemenuhan BMD mengalami hambatan karena adanya keterbatasan dana, proses pengadaan yang memakan waktu, serta kurang optimalnya koordinasi antar bagian terkait. 2. Tingkat pemenuhan BMD masih rendah akibat kendala anggaran, prosedur administrasi yang kompleks,	1. Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (BMD) ditingkatkan melalui penguatan sistem pengadaan, inventarisasi yang tepat, serta pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan ketersediaan aset sesuai kebutuhan 2. Pemenuhan BMD terus ditingkatkan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										dan keterlambatan pengiriman barang. 3. Faktor-faktor seperti anggaran yang terbatas, prosedur pengadaan yang berbelit, dan koordinasi yang belum maksimal menjadi penghambat utama pemenuhan BMD	melalui monitoring persediaan, evaluasi kebutuhan, serta perawatan dan pemeliharaan aset secara berkala untuk mendukung kinerja organisasi.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	8,662,845,181	6,994,339,606	1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia menyebabkan proses pelayanan jasa penunjang tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. 2. Prosedur administrasi yang panjang dan belum efisien memperlambat waktu penyelesaian	1. Menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta terukur untuk setiap jenis pelayanan jasa penunjang. 2. Memberikan pembinaan dan peningkatan kompetensi petugas yang terlibat dalam pelayanan jasa penunjang. 3. Mengoptimalk	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										pelayanan jasa penunjang. 3. Gangguan teknis pada peralatan atau sistem informasi pendukung menyebabkan pelayanan jasa penunjang tidak dapat dilakukan tepat waktu.	an pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana agar pelayanan jasa penunjang dapat dilaksanakan tepat waktu.	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	3,602,603,016	3,282,328,133	1. Sebagian BMD belum dimanfaatkan secara optimal karena belum sesuai dengan kebutuhan unit kerja saat ini. 2. Data inventaris BMD yang belum sepenuhnya mutakhir menyulitkan pemantauan kondisi dan tingkat pemanfaatanny a. 3. Proses penghapusan atau penggantian BMD yang rusak belum berjalan optimal sehingga masih tercatat sebagai	1. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap BMD agar tetap dalam kondisi layak pakai dan berfungsi optimal. 2. Melaksanakan inventarisasi dan penilaian kondisi BMD secara berkala untuk memastikan status penggunaan dan fungsinya. 3. Mengoptimalk an pemanfaatan BMD sesuai dengan peruntukannya	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										aset yang tidak berfungsi.	untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.	
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**%**	**75.45**	**75.45**	**2,436,284,419**	**2,317,391,082**	- Kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terhadap regulasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - Tumpang tindih pemanfaatan ruang laut sehingga sering terjadi perbedaaan implementasi. - Kurangnya kapasitas dan lemahnya kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. - Keterbatasan Dana dan Infrastruktur	- Penataan ruang laut dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan terhadap sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil - Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. - Adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										Pendanaan untuk kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan pesisir di Kalimantan Timur. - Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan peruntukkan ruang dan keberlanjutan sumber daya.	akademisi guna pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan berkelanjutan - Melakukan rehabilitasi ekosistem wilayah pesisir sesuai dengan kewenangan dan database kondisi ekosistem.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kawasan	1	1	1,273,510,054	1,198,144,122	- Belum validnya data dukung materi teknis perairan pesisir untuk review RTRWP. - Belum adanya kelembagaan (UPT) untuk pengelolaan kawasan konservasi di Bontang dan Kukar - Kurangnya mitra yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Bontang dan Kukar - Belum tervalidasinya data ekosistem padang lamun dan terumbu karang di perairan Kaltim - Perlunya penyediaan/review terhadap rencana pengelolaan di kawasan konservasi di Bontang dan Kukar	- Pengumpulan data materi teknis perairan pesisir - Optimalisasi pengelolaan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi - Inisiasi kemitraan dengan mitra pembangunan guna pengelolaan kawasan konservasi di Bontang dan Kukar yang efektif dan berkelanjutan - Penyusunan data dan informasi spasial ekosistem pesisir - Penyusunan/review rencana pengelolaan kawasan konservasi - Fasilitasi pendataan dan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										- Kurangnya data dan informasi pemanfaatan di kawasan konservasi - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana wilayah pesisir - Kurangnya partisipasi masyrakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan menjaga keberlangsungan ekosistem pesisir - Kurang nya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam informasi dan teknologi produksi garam. - Membutuhkan lahan yang clean dan clear untuk kegiatan produksi garam	informasi pemanfaatan kawasan konservasi - Penyadartahuan kepada masyarakat pesisir tentang pentingnya mitigasi bencana - Melakukan rehabilitasi dengan melibatkan masyarakat - Menyelenggarakan bimtek tentang informasi dan teknologi produksi garam	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Rekomendasi	8	8	417,067,046	394,254,286	- Terdapat perizinan pemanfaatan ruang laut yang bukan kewenangan provinsi sehingga tidak terlaporkan dengan baik - Kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan dan prosedur perizinan berusaha	- Berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan penerbitan izin dalam rangka menyediakan sistem dan database perizinan berusaha sebagai sarana pencatatan dan pengelolaan data. - Penyediaan media informasi (Plang, leaflet, poster, dan sistem aplikasi SIMATA Laut) tentang Pengajuan Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Perizinan Berusaha - Melakukan fasilitasi penyusunan permohonan perizinan pemanfaatan ruang laut	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	15	18	745,707,319	724,992,674	- Kurang terfasilitasinya masyarakat pesisir untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan wilayah pesisir - Kurang terfasilitasinya masyarakat pesisir dalam pembentukkan Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) - Belum maksimalnya komitmen pemangku kepentingan pemanfaat Kawasan Konservasi untuk bermitra dengan pengelola kawasan - Belum tersedianya data potensi wisata bahari di Kalimantan Timur	- Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat pesisir. - Fasilitasi pembentukkan Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) - Adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan akademisi. - Penyusunan profil wisata bahari di Kalimantan Timur	
				PROGRAM PENGELOLAAN	**Ton**	**195000**	**219.329.202**	**19,086,671,746**	**15,466,731,187**	1. Cuaca dan musim penangkapan ikan	Mengevaluasi semua kegiatan untuk dijadikan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PERIKANAN TANGKAP						tidak menentu berdampak pada hari melaut dan aktivitas nelayan menangkap ikan. 2. Rendahnya kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga kelestarian SDI dan lingkungan laut dan PUD yang mendukung potensi SDI serta kepatuhan terhadap peraturan dan perijinan usaha perikanan tangkap. 3. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan kurangnya jumlah SDM aparatur dalam pengelolaan perikanan tangkap. 4. Kurangnya ketersediaan sarana penunjang penangkapan ikan dan sarana prasarana armada pelabuhan perikanan	pedoman kegiatan selanjutnya	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Kegiatan	1	1	12,306,562,196	9,792,344,675	Tidak semua alat tangkap ramah lingkungan; Kapasitas nelayan yang belum merata dan Keterbatasan data dan pelaporan hasil tangkap	Penyesuaian dengan daya dukung sumber daya ikan; Pembinaan dan Edukasi Nelayan dan Peningkatan Pendataan & Pelaporan Penangkapan Ikan	
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1	1	2,717,362,932	2,077,720,600	Tidak semua alat tangkap ramah lingkungan; Kapasitas nelayan yang belum merata dan Keterbatasan data dan pelaporan hasil tangkap	Penyesuaian dengan daya dukung sumber daya ikan; Pembinaan dan Edukasi Nelayan dan Peningkatan Pendataan & Pelaporan Penangkapan Ikan	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	185	185	351,838,996	272,519,395	Ada berapa izin kapal daerah yang harus migrasi ke izin pusat karena melakuakan penangkapan ikan dikewenangan pusat di atas 12 Mil laut	Melakukan pendataan kapal daerah yang telah memiliki perizinan pusat	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	475	423	774,456,010	577,851,248	Ada penambahan persyaratan di aplikasi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Melakukan kordinasi ke PTSP terkait peraturan PP, No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaran Pwerizinan Berusahan Berbasisi Resiko (dalam penerbitan NIB)	
				Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pelabuhan	6	6	2,729,774,613	2,573,239,565	Anggaran untuk Lokasi PPI yang di bangun dan di kelola untuk peningkatan Sarana dan Prasaran perlu ada peningkatan ; bebrapa Pelabuhan perlu dilakukan perawatatan fasiltas seperti pabrik Es, Cold Storage serta Dermaga;	melakukan upaya pengusulan penambahan anggaran untuk peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan; pemilihan lokasi pembangunan dan pegelolaan PPI yang prioritas sebagi upaya peningkatan pelayanan.	
				Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Rekomendasi	125	83	158,746,677	128,717,760	Ada berapa kapal yang tidak memenuhi persyaratan dokumen dalan pendaftaran kapal 10-30 GT	Melakukan kordinasi dengan pihak terkait dalam hal di Kemenhub/KSOP	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	15	34	47,930,322	44,337,944	Perlunya peningkatan kepatuhan nelayan dalam persyaratan pendaftaran kapal s.d 10 GT	Melakukan kordinasi dengan pihak Kab/Kota, Kelurahan dan Kecamatan	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Ton**	**201000**	**2.091.737 .229**	**31,642,680,796**	**16,769,519,879**	Kualitas air yang buruk sehingga dapat menyebabkan kematian ikan akibat perubahan cuaca ekstreme menyebabkan kandungan O2 terlarut dalam air rendah, pencemaran akibat limbah rumah tangga dan aktifitas lingkungan yang tidak terkontrol. Serangan hama dan penyakit ikan oleh bakteri, parasit virus maupun jamur sehingga menyebabkan produkstifitas rendah. Harga	Koordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program dan kebijakan yang sesuai dengan kewenangannya . Fasilitasi dan pembinaan kepada POKDAKAN melalui pengembangan kelembagaan, bantuan sarana dan prasarana produksi, sosialisasi dan pelatihan teknis. Mengembangkan komoditas unggulan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										pakan yang tinggi sehingga membuat pelaku usaha perikanan enggan berproduksi.	perikanan budidaya berbasis kawasan (KPB) sesuai Kepmen KP nomor 111/ Tahun 2023. Peran serta penyuluh perikanan untuk meningkatakan ketrampilan pembudidaya ikan.	
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	4	8	43,038,446	38,424,000	Banyak pelaku usaha, khususnya skala kecil kesulitan mengurus izin karena rendahnya pemahaman mengenai prosedur dan regulasi yang baru	Dengan pemahaman yang baik terhadap mekanisme OSS, ketelitian dalam pemenuhan data serta mencari pendampingan (penyuluh, PTSP) menjadi langkah penting untuk meminimalkan kesalahan dalam prosedur perizinan di OSS	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Lokasi	10	10	2,389,402,862	2,302,345,959			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Dokumen	1	1	29,210,239,488	14,428,749,920	Realisasi anggaran terserap sebesar 39,22% dikarenakan : 1. Nilai Pokir yang diterima Rp. 17.622.185.506 2. Realisasi Rp. 3.994.108.800 (22,67%) 3. Yang masuk dalam Pokir Perubahan sebanyak 178 POKDAKAN, namun yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan hanya 46 POKDAKAN dengan nilai Rp. 4.334.420.640 4. Pengadaan POKIR yaitu Benih (34.300.000 ekor), Nener (2.600.000 ekor) Pakan (15,6 Ton), Saponin dan pupuk. Namun Hanya Saponin (60 Sak) dan pupuk (60 Sak) (dengan senilai Rp. 108.519.840)	1. Konsultasi dengan Inspektorat mengenai Usulan pokir yang tidak memenuhi syarat. Agar tidak dilaksanakan. Laksanakan yang memenuhi syarat sesuai aturan. 2. Merivsi SSH Tidak Terlalu Tinggi 3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Menggunakan E-purchasing melalui Mini Kompetisi	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										tidak dilaksanakan karena tidak ada penyedia bersedia untuk menawar paket tersebut		
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**%**	**100**	**72.45**	**2,578,250,580**	**2,248,246,970**	1.Kurangnya perhatian terhadap Standarisasi Perizinan Usaha yang seharusnya dilengkapi oleh pelaku usaha pemanfatan ruang laut. 2.Ketidak sesuaian jadwal pemeriksaan lapangan dengan tim pendamping lapangan khususnya Pengawas	1.Dalam pelaksanaan Patroli perairan, kondisi pasang surut air dan cuaca menjadi bahan pertimbangan 2.Tidak terlalu banyak melibatkan personil yang diduga memberikan kebocoran informasi. 3.Terus mendampingi	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										Perikanan. 3.ketidaksesuaian jadwal inspeksi atau pengawasan antara pengawas perikanan provinsi dan pengawas perikanan kab/kota 2. ketidakberadaan pelaku usaha saat dilaksanakan inspeksi rutin. 4.kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban dalam kepemilikan nib 5.Keterbatasan jumlah personil / SDM pengawas perikanan, maupun sarana yang dimiliki dalam menunjang pengawasan, 6.Penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan belum konsisten 7.Perubahan kondisi cuaca mempengaruhi	dan mengawal pelaku usaha resort yang dalam proses perizinan 4.Penyadartahuan pelaku usaha terhadap Peraturan Perundang undangan Pengawasan Ruang Laut atau pemanfaatan sumber daya kelautan. 5.Pemantapan kegiatan pengawasan melalui koordinasi dan komunikasi yang aktif. 6.penyadartahuan pelaku usaha terhadap peraturan perundang undangan pembudidaya an ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 7. penyesuaian jadwal pengawasan terpadu melalui	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										dalam pengawasan perikanan yang sudah terjadwal.	oss rba 8.Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang terdekat dengan kawasan rawan illegal fishing dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	%	100	72.92	2,107,735,911	1,857,495,620	Capaian pengawasan di wilayah 12 mil 72,92%, hal ini merupakan hasil dari penyesuaian intensitas patroli guna memastikan efektivitas operasional pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi. Kami mengedepankan prinsip ketepatan sasaran dalam keterbatasan jangkauan armada saat ini.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait atau kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) untuk berbagi informasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pantauan tanpa harus meningkatkan frekuensi mobilisasi armada secara mandiri dan melakukan pemetaan ulang rute patroli agar lebih terklaster. Dengan pengelompokan wilayah pengawasan dalam satu jalur perjalanan, kami yakin dapat meningkatkan cakupan persentase tanpa	Certificate of Appreciation diberikan oleh Global Conservation kepada Raihan Fida Nuzband, Iramanto dan M. Rio Rinaldi Atas dedikasi luar biasa dalam penegakan hukum yang menghasilkan vonis yang mengikat secara hukum terhadap para pelaku penangkapan ikan illegal di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) (https://drive.google.com/file/d/1SBEQjYLRMf8GVpHsurlvL5DVfA-FyMd4/view?usp=sharing).

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											mengurangi kualitas pengawasan di tiap titiknya.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%	100	68.37	470,514,669	390,751,350	Capaian pengawasan di wilayah PUD 68,37%, hal ini merupakan hasil dari penyesuaian intensitas patroli dan kunjungan ke pelaku usaha guna memastikan efektivitas operasional pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi. Kami mengedepankan prinsip ketepatan sasaran dalam keterbatasan jangkauan armada saat ini.	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, Penyuluh Lapangan atau kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas) untuk berbagi informasi lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pantauan tanpa harus meningkatkan frekuensi mobilisasi armada secara mandiri dan melakukan pemetaan ulang rute patroli agar lebih terklaster. Dengan pengelompokan wilayah pengawasan dalam satu jalur perjalanan, kami yakin dapat meningkatkan cakupan	Penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diberikan kepada Irhan Hukmaidy, Iramanto dan M. Rio Rinaldi atas dedikasi, kerja keras dan capaian kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberantasan Destructive Fishing. (https://drive.google.com/file/d/1npZVCYd5G9p-Wttfa646aV0Kx7d0alVO/view?usp=sharing)

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											persentase tanpa mengurangi kualitas pengawasan di tiap titiknya.	
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Produk**	**11**	**11**	**805,828,420**	**744,877,593**	Pelaku usaha di Kaltim sebagian besar adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) orientasi UMKM hanya produksi dan jual,	DKP Prov. Kaltim melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha pengolahan ikan (UMKM) agar ber SNI.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										sedikit yang mau ber SNI. Biaya uji setiap jenis produk berbeda dan jika tidak ada kesesuaian kadar uji, pengujian sampel diulang dan berbayar, hal ini yang menyebabkan pelaku usaha olahan perikanan enggan ber SNI.	Bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan DJPDSKP KKPRI untuk pengujian kesesuaian produk olahan perikanan ber SNI. Melakukan pembinaan dan Bimtek bernilai tambah produk olahan perikanan, Promosi dan bazar produk olahan perikanan	
				Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	1	1	110,628,376	109,160,011			
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	UMKM	10	10	650,263,606	599,046,622	1. Adanya penyesuaian pada SHS. 2. Pada dana kegiatan efisiensi seharusnya dilaksanakan satu kesatuan bukan	Berkoodinasi dengan Kasubag Perencanaan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										hanya efisiensi di Perdin saja		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Lokasi	1	1	44,936,438	36,670,960			
2	**Pariwisata**	**Dinas Pariwisata**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**%**	**100**	**100**	**21.817.472.554**	**20.068.075.749**	Masih terjadi nya egosektor Bidang dalam pelayanan sehingga di butuhkan pendekatan personel untuk menguatkan integrasi pelayanan antar bidang.	Masih terjadi nya egosektor Bidang dalam pelayanan sehingga di butuhkan pendekatan personel untuk menguatkan integrasi pelayanan antar bidang	
					Indeks	**81**	**81**			masih sering terjadi kesalahan koordinasi dan komunikasi lintas Bidang dengan Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	Melakukan penguatan rapat internal kepegawaian dan perencanaan untuk menyamakan persepsi untuk mewujudkan visi misi organisasi perangkat daerah Dinas	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	90	90	1.082.348.568	976.210.221	Kualitas dokumen pendukung masih ada yang perlu dilengkapi dan Keterbatasan SDM atau kurangnya kompetensi spesifik yang dibutuhkan untuk analisis dan penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang berkualitas.	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran dan Melakukan review internal sebelum dokumen ditetapkan untuk meminimalkan revisi	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	82	82	12.842.364.335	11.746.862.166	SK Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang terlambat terbit. - Aplikasi yang sering error di waktu-waktu produktif.SK Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang terlambat terbit. - Aplikasi yang sering error	1.Membekali SDM Subbag keuangan dan pengelola keuangan di masing-masing bidang agar meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam mengantisipasi kesalahan dalam proses keuangan 2.Dukungan jajaran	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										di waktu-waktu produktif.	pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian untuk setiap bulannya. 3. Berkoordinasi dengan pihak2 terkait dalam hal ini BPKAD, Taspen, pengguna layanan bagian keuangan (PNS dan PPPK)	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	70	70	4.487.944	4.487.900	1. Kurangnya motivasi dari pegawai yang bersangkutan; 2. Kurangnya dorongan/motivasi dari pimpinan; 3. Jadwal pelatihan yang bertabrakan dengan kegiatan Dinas; 4. Keterbatasan jenis pelatihan yang dapat diikuti setiap tahunnya	1. Melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi (AKPK) dan evaluasi pemenuhan setiap tahunnya; 2. Menerapkan kebijakan pimpinan terkait reward bagi pegawai dengan JP tertinggi dan sanksi bagi pegawai yang tidak melaksanakan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pengembangan kompetensi. 3. Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut pemantauan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	2.917.271.894	2.880.943.976	-Kesulitan dalam menentukan spesifikasi barang/jasa, kurangnya kejelasan kebutuhan yang akan dipenuhi. -Perubahan spesifikasi selama proses pengadaan. -Keterlambatan dalam penyusunan dokumen pengadaan akibat kurangnya perencanaan yang matang. -Terkendala oleh faktor-faktor internal dan eksternal lainnya.	-Melakukan review terhadap prosedur pengadaan secara berkala dan melakukan perbaikan jika diperlukan. -Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga pegawai memiliki kompetensi yang dibutuhkan. -Menerapkan teknologi informasi menggunakan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										-Persaingan yang tidak sehat, dominasi penyedia barang/jasa tertentu. -Kualitas barang/jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi akibat pengawasan yang kurang ketat. -Adanya kecurangan dalam pelaksanaan kontrak.	sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pengadaan. -Membangun kerjasama dengan pihak eksternal dan membangun jaringan dengan penyedia barang dan jasa yang terpercaya. - Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	4.640.301.813	4.128.899.208	Terbatasnya anggaran kegiatan, keterlambatan proses pengadaan jasa, dan monitoring serta tindak lanjut belum optimal.	Memperkuat komitmen pimpinan OPD, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia, menjaga koordinasi dan komunikasi internal,	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											memastikan kualitas penyedia jasa serta memberikan tindaklanjut hasil kegiatan jasa penunjang.	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	330.698.000	330.672.278	1. Alokasi anggaran tidak memadai 2. Prioritas anggaran yang berubah-ubah 3. Kurangnya tenaga ahli 4. Beban kerja yang terlalu tinggi 5. Kurangnya Perencanaan yang Matang 6. Kurangnya data inventarisasi 7. Rendahnya Kesadaran Pegawai 8. Birokrasi yang Rumit 9. Peraturan yang tidak fleksibel 10. Faktor Alam dan Bencana	1. Justifikasi anggaran 2. Efisiensi anggaran 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia4. Melakukan inventarisasi aset secara berkala dan mencatat kondisi aset secara detail. 5. Analisis kerusakan 6. Peningkatan Kesadaran Pegawai 7. Penyederhanaan Birokrasi: Reformasi birokrasi8. Menerapkan sistem elektronik untuk mempermudah akses informasi	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											dan pelayanan. 9. Delegasi wewenang 10. Pemantauan bersama 11. Implementasi Sistem Informasi Management Inventarisasi aset 12. Menyusun jadwal pemeliharaan berdasarkan data aset. 13. Pelaporan kerusakan 14. Evaluasi kinerja	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**%**	**63,33**	**63,33**	2.683.570.051	2.463.863.031	Belum optimalnya konetifitasi infrastruktur antar destinasi dalam satu daerah dengan kabupaten kota lain nya.	Melakukan kolaborasi dengan OPD lain terkait yang mengampu terkait infrastruktur seperti dengan Dinas PUPR, Diskominfo dan Dishub.	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	%	66,67	0	315.000	0	Kegiatan Ditiadakan karena Efisiensi		
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	%	100	33	779.353.134	575.202.932	terbatasnya kapasitas dan jumlah SDM pengelola destinasi dan rentang jarak	Meningkatkan sinergitas dengan semua pihak terkait	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										kendali yang cukup jauh		
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	%	100	100	1.705.901.917	1.701.351.291	Terbatasnya anggaran dan jumlah kapasitas pengelola destinasi	Meningkatkan sinergitas dengan semua pihak terkait	
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%	100	100	198.000.000	187.308.808	Belum pahamnya para pelaku usaha sektor pariwisata dalam pemenuhan tanda daftar usaha pariwisata/NIB yang diterbitkannya secara online OSS yang berbasis resiko	Perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait OSS (DPMPTSP Kaltim)	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Hari**	2,70	2,43	4.517.052.956	4.368.716.731	Kelesuan ekonomi Indonesia berpengaruh langsung dengan menurunnya jumlah lama tinggal wisatawan nusantara dan juga efek dari efesiensi wisatawan cenderung melakukan kegiatan yang penting sehingga tidak memperpanjang	Meningkatkan dan memperkuat strategi promosi dengan bekerja sama dengan mitra pariwisata.	
					Hari	1,65	1,66					

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										lama tinggal wisatawan.		
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	%	100	100	4.517.052.956	4.368.716.731	Perubahan Musim / Cuaca yang tidak menentu	Penurunan /discount harga tiket destinasi Penetrasi promosi pasar destinasi	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	**%**	**88**	**88**	4.913.212.051	4.904.775.681	Masih parsialnya komunitas ekonomi kreatif dalam menyelenggarakan event di daerah 10 Kabupaten Kota masing masing. Belum optimalnya peran komite Ekraf di 10 Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Timur.	Rakor, dan Sarasehan Ekonomi Kreatif di 10 Kabupaten Kota secara bergiliran.	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	%	88	88	3.400.486.571	3.397.021.052	Tidak banyak kegiatan bersama, serta tidak ada dorongan dari Kementerian terkait Kabupaten/Kota kreatif	Kembali diperhatikan untuk tindak lanjut Kabupaten/Kota kreatif	
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	%	80	80	1.512.725.480	1.507.754.629	Harus lebih banyak berkolaborasi dengan komunitas dengan	Diadakan pertemuan rutin dalam pengembangan sub sektor Ekraf untuk mengupayakan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										memberikan tantangan	laju pertumbuhan ekonomi	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**%**	**66**	**66**	3.901.763.938	3.621.579.947	Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelatihan SDM Parekraf antara kabupaten kota dan provinsi, mengingat potensi pariwisata di setiap Kabupaten Kota Berbeda beda.	Melaksanakan Raker pengembangan SDM Ekraf yang dilakukan secara bergilir se Kabupaten Kota Kalimantan Timur.	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	%	100	100	3.770.051.164	3.496.446.035	Kendala yang sering muncul meliputi keterbatasan anggaran dan sarana pelatihan, terutama di daerah dengan akses terbatas. Kesenjangan kualitas SDM antar daerah juga masih tinggi, disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Selain itu, minimnya data terintegrasi tentang jumlah dan kompetensi	Penyusunan database terpadu SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memudahkan perencanaan berbasis data. Pemerintah daerah memperkuat kerja sama lintas sektor (pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas) agar pelatihan lebih tepat sasaran. Selain itu, penguatan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										SDM pariwisata dan ekonomi kreatif membuat perencanaan program belum optimal. Kurangnya kontinuitas pelatihan dan tindak lanjut pasca kegiatan juga menghambat peningkatan kualitas secara berkelanjutan.	kapasitas lembaga pelatihan dan sertifikasi lokal dilakukan agar lebih mudah menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Penerapan metode pembelajaran berbasis praktik dan teknologi digital juga membantu mempercepat proses peningkatan kompetensi.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%	66	66	131.712.774	125.133.912	Beberapa kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya akses terhadap pendanaan, fasilitas, dan teknologi produksi yang modern. Masih banyak pelaku ekraf yang belum memiliki kemampuan manajerial dan pemasaran digital yang memadai, sehingga sulit memperluas pasar. Selain itu, rendahnya literasi bisnis dan keuangan, serta minimnya program lanjutan pasca pelatihan, membuat perkembangan kapasitas mereka belum optimal. Kurangnya data terukur mengenai pelaku ekraf yang berkembang juga menjadi hambatan dalam pemantauan hasil program	Mendorong akses kemitraan dan permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, inkubator bisnis, dan platform ekonomi digital. Selain itu, penguatan pendampingan pasca pelatihan dilakukan agar peserta dapat menerapkan pengetahuan secara langsung. Pengembangan sistem data dan pemantauan berbasis digital juga diupayakan untuk mengukur secara akurat peningkatan kapasitas pelaku ekraf setiap tahunnya.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
3	**Pertanian**	**Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks**	**82,7**	**89,56**	**98.167.261.682**	**137.851.677.554**			
					%	**100**	**100**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	90	90	528.329.580	520.005.367			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	91,27	0	61.779.846.477	54.216.169.219			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	45,7	45,7	46.268.424	45.364.620			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	85	140,25	358.139.020	603.028.338			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90	90	1.421.588.606	2.386.128.985			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	60	22.305.701.119	63.793.132.639			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	90	9.436.238.938	13.120.869.995			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	87,13	2.291.149.518	3.166.978.391			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**%**	**35,7**	**14,9**	**20.360.306.423**	**9.237.671.813**			
					%	**41,57**	**0**					
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Ha	9000	9000	14.594.940.710	3.168.483.685			
					Ha	840	0					
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	SertifikatKompetensi/Rekomendasi	215	238,01	2.482.257.261	5.554.947.628			
					Ha	960	1677,02					
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Varietas	3	3	3.283.108.452	514.240.500			
					Laporan	11	11					
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**%**	**43**	**43**	**2.561.038.457**	**2.459.926.084**			
					%	**41,76**	**41,76**					
				Penataan Prasarana Pertanian	Unit	3	0	2.561.038.457	2.459.926.084			
					Unit	7	3					
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**%**	**75,9**	**77,11**	**1.045.098.790**	**3.025.167.795**			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Ha	15155	15395,96	1.045.098.790	3.025.167.795			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**%**	**80**	**77,77**	**2.965.487.561**	**2.812.851.728**			
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Orang	300	300	812.006.520	710.798.664			
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Laporan	9	6	2.153.481.041	2.102.053.064			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Unit	0	0	0	0			
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan	Dinas Perkebunan	1. Peraturan Gubernur Kaltim No. 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan FKPB sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kaltim No. 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan	**DINAS PERKEBUNAN**								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (DINAS PERKEBUNAN)	**Indeks**	**84,88**	**84,59**	**967.372.700**	**956.723.831**	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik dan sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik belum optimal	Meningkatkan persentase Barang Milik Daerah serta sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik yang difokuskan pada pemutakhiran data, pemeliharaan berbasis prioritas dan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			FKPB 2. Peraturan Gubernur Kaltim No. 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi 3. Peraturan Gubernur Kaltim No. 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi Di Area Perkebunan 4. Peraturan Gubernur Kaltim No. 44 Tahun 2023 tentang Standar Minimum Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan 5. Peraturan Gubernur Kaltim No. 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif							penghapusan aset tidak layak	
					%	**100**	**100**	**596.510.000**	**594.460.499**			1. Piagam Penghargaan Mitra Kerja dari Kementerian Hukum RI
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	792.972.700	782.358.756			2. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Disbun Prov. Kaltim
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	803.458.323	711.552.417			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	75	38	-	-	1. Usia dan kondisi aset yang sudah tua serta banyak BMD yang telah melewati masa manfaat sehingga sering mengalami kerusakan. 2. Aset belum diremajakan	1. Melakukan inventarisasi fisik dan penilaian kondisi BMD secara rutin. 2. Memperbarui data BMD dalam sistem informasi secara berkala	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Sertifikasi Berkelanjutan Dan Kemudahan Usaha 6. Peraturan Gubernur Kaltim No. 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Perbenihan Tanaman Perkebunan							atau dihapuskan tepat waktu. 3. Pendataan dan Inventarisasi belum optimal sehingga data kondisi BMD belum diperbarui secara berkala.	dan terintegrasi.	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	110,66	-	-			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	40,00	83,56	297.080.076	68.702.580			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	4	4	188.386.406	187.404.036			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	7	7	5.200.000	5.200.000			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	4	4	770.910.000	768.825.574			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	76,6	557.188.857	522.719.586	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik mengalami penurunan dalam hal ini tidak mencapai target yang telah ditentukan	Melakukan Inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana belum sepenuhnya mutakhir	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										dikarenakan : 1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang memiliki usia pakai yang relatif lama 2. Belum optimalnya pemeliharaan berkala		

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**%**	**25,41**	**25**	**-**	**-**	1. Belum tersedianya mekanisme teknis pemenuhan sarana perkebunan di tingkat provinsi selain penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan pengadaan bantuan sarana perkebunan kepada masyarakat seperti perluasan, peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi, sehingga tidak tersedia mekanisme teknis operasional yang dapat secara langsung mendorong peningkatan tingkat pemenuhan sarana perkebunan. 2. Terbatasnya	1. Penyusunan dan penguatan mekanisme teknis fasilitasi pemenuhan sarana perkebunan Menyusun pedoman teknis fasilitasi dan pembinaan pemenuhan sarana perkebunan yang berfokus pada fungsi pengawasan, pendampingan , dan fasilitasi pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannn ya. 2. Penguatan peran koordinasi dan pembinaan kepada Kabupaten/Kot a dan Pusat Meningkatkan koordinasi, dan sinkronisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kot a dan Pusat	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										ruang intervensi teknis pemerintah provinsi Pemerintah provinsi memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi teknis langsung terhadap pemenuhan sarana perkebunan, mengingat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-28.50 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inerventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur	dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana perkebunan. Selain itu mendorong pada pendanaan lain seperti dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendukung capaian tingkat pemenuhan sarana perkebunan. 3. Pengembangan dan pemutakhiran data teknis sarana perkebunan Melakukan pemutakhiran dan integrasi data kebutuhan serta pemanfaatan sarana perkebunan secara berkala	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa kewenangan Provinsi dalam aspek pengawasan peredaran dan penggunanaan sarana pertanian. 3. Belum optimalnya dukungan data teknis sebagai dasar perencanaan dan pengukuran kinerja Data kebutuhan sarana perkebunan yang terbarui dan terintegrasi belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan kegiatan dan pengukuran capaian indikator tingkat pemenuhan sarana perkebunan belum dapat dilakukan secara optimal. 4.	sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan pengukuran kinerja indikator. 4. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja teknis Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pemanfaatan sarana perkebunan melalui penyusunan indikator pengawasan, instrumen evaluasi, dan pelaporan yang terstandar. 5. Penyesuaian indikator kinerja agar selaras dengan kewenangan Provinsi Melakukan peninjauan dan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										Ketergantungan capaian kinerja terhadap pelaksanaan di Kabupaten/Kota Capaian indikator tingkat pemenuhan sarana perkebunan di tingkat provinsi sangat bergantung pada pelaksanaan kegiatan serta pelaporan kinerja pemerintah Kabupaten/Kota, yang membatasi kendali langsung provinsi terhadap peningkatan capaian indikator. 5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi teknis Monitoring dan evaluasi teknis terhadap pemanfaatan sarana perkebunan yang telah tersedia belum	penyesuaian indikator tingkat pemenuhan sarana perkebunan agar lebih mencerminkan peran provinsi dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan fasilitasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 6. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan perbenihan, sosialisasi pengawasan peredaran benih illegitim, pelatihan persiapan uji kompetansi produsen benih kelapa sawit secara langsung ke lapangan kepada petani/ pekebun; dan 7. Peningkatan sarana prasarana	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										dilaksanakan secara terstandar dan berkelanjutan, sehingga efektivitas pemenuhan sarana perkebunan belum dapat diukur secara komprehensif. 6. Masih adanya produsen benih yang tidak melaporkan pendistribusian benihnya; dan 7. Terbatasnya sarana prasarana perbenihan.	seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dan lain-lain (Tahun 2024 telah dibangun sarana jalan kebun di 2 lokasi yaitu kebun km. 29 Samboja dan km. 41 Loa Janan, serta pembangunan kebun perbenihan di Km. 41 Loa Janan dan Kantor UPTD Karang Asam).	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jenis	5	3	-	-	2 jenis sarana perkebunan yang diawasi tidak tercapai sesuai target yaitu pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pengawasan tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada : 1. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan verifikasi langsung terhadap sarana pascapanen perkebunan di lapangan. 2. Terbatasnya kegiatan koordinasi dan pembinaan kepada pelaku	1. Pengusulan kembali alokasi anggaran pengawasan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan pada tahun perencanaan berikutnya. 2. Penyesuaian target indikator kinerja dengan kemampuan pendanaan 3. Penguatan dasar perencanaan dan penganggaran melalui data dan analisis kebutuhan pengawasa	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										usaha maupun petani terkait sarana pascapanen perkebunan dan sarana pengolahan hasil perkebunan 3. Pengumpulan dan pemutakhiran data ketersediaan serta sebaran sarana pascapanen perkebunan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan		

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Ha**	**49.000**	**28.207**	**14.436.321**	**14.290.007**	1. Keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam intervensi langsung pembangunan dan perluasan kebun. Pemerintah Provinsi tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan perluasan kebun, sementara kewenangan yang dimiliki lebih terbatas pada aspek pengawasan peredaran dan penggunaan sarana dan prasarana perkebunan. Kondisi ini membatasi kemampuan Pemerintah Provinsi dalam mendorong penambahan luasan kebun secara langsung melalui program	1. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam penyediaan prasarana Perkebunan Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi teknis lainnya untuk mendorong integrasi pembangunan jalan usaha tani dan prasarana pendukung perkebunan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 2. Optimalisasi peran fasilitasi provinsi dalam mendukung kesiapan wilayah pengembangan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										dan kegiatan fisik. 2. Keterbatasan ketersediaan prasarana pendukung perkebunan, khususnya jalan usaha tani Pada beberapa wilayah potensial, ketersediaan dan kualitas jalan usaha tani belum memadai untuk mendukung aksesibilitas lahan, mobilisasi sarana produksi, dan pengangkutan hasil kebun. Kondisi ini berdampak pada rendahnya minat pekebun swadaya dan pelaku usaha untuk melakukan pembukaan atau perluasan kebun baru karena tingginya biaya produksi dan risiko usaha. 3. Ketergantungan capaian luasan	Melalui pembinaan dan fasilitasi teknis, Pemerintah Provinsi mendorong peningkatan kesiapan lahan dan prasarana dasar di wilayah potensial, sehingga dapat meningkatkan minat pekebun swadaya, PTPN, dan PBS dalam melakukan pengembangan perkebunan. 3. Penguatan pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana perkebunan Melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana dan prasarana perkebunan secara lebih efektif, serta memastikan	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										kebun pada kebun swadaya, PTPN, dan PBS Penambahan luasan kebun pada tahun 2025 sebagian besar berasal dari pekebun swadaya, PTPN, dan PBS, yang sangat dipengaruhi oleh kesiapan prasarana pendukung, iklim investasi, serta kebijakan internal masing-masing pelaku usaha. 4. Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam penyediaan prasarana perkebunan Pembangunan prasarana pendukung perkebunan, termasuk jalan usaha tani, melibatkan kewenangan lintas sektor dan lintas pemerintahan (Kabupaten/Kota dan perangkat	kesesuaiannya dengan kebutuhan teknis di lapangan guna mendukung keberlanjutan dan efisiensi usaha perkebunan. 4. Peningkatan kualitas data dan pemetaan wilayah potensial berbasis prasarana Melaksanakan pendataan ketersediaan jalan usaha tani dan prasarana pendukung lainnya, sebagai dasar perencanaan dan koordinasi pembangunan kebun secara lebih terarah dan akuntabel.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										daerah teknis lainnya).		
				Penataan Prasarana Pertanian	Jenis	2	2	14.436.321	14.290.007			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**%**	**45,56**	**45,67**	**7.987.738**	**7.977.251**			
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pelaku Usaha	122	134	7.987.738	7.977.251			
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**%**	**47,48**	**55,56**	**33.825.768**	**32.334.273**			
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	35	35	33.825.768	32.334.273			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**%**	**16,82**	**22,12**	**-**	**-**			
					%	**48,72**	**51,29**	**-**	**-**			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan	1	1	150.000.000	150.000.000			
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	orang	372	396	4.630.000	4.630.000			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Lembaga	18	18	672.120.000	657.600.000			
				UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN)	**Indeks**	**86,20**	**95,85**	**-**	**-**			
					%	**100**	**100**	**-**	**-**			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	-	-			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	191,23	-	-			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	62	100	-	-			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	1	1	-	-			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	2	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3	-	-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	50	70,21	-	-			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**benih**	**6.000.000**	**7.949.024**	**-**	**-**			
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	benih	5.000.000	7.853.065	-	-			
				UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Indeks**	**84**	**93,99**	**-**	**-**			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				DAERAH PROVINSI (UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN)	**%**	**100**	**100**	**-**	**-**			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	-	-			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	70,65	-	-	Kurangnya minat petani dalam penggunaan APH cair maupun Padat sehingga berpengaruh pada kurangnya pesanan	Melakukan sosialisasi dan promosi aktif kepada instansi, akademisi, dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat pada penggunaan APH Cair dan Padat	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	30	68	-	-			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	1	1	-	-			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	2	1	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3	-	-			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	70	77,14	-	-			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**%**	**40**	**40**	**-**	**-**			
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pelaku Usaha	13	13	-	-			
				UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Indeks**	**100**	**100,00**	**-**	**-**			
				PROVINSI (UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN)	**%**	**82,75**	**94,21**	**-**	**-**			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	-	-			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	96,39	-	-	Rendahnya Permintaan Bibit Perkebunan teruatama minat masyarakat/petani terhadap pembelian bibit lada	1. Penyesuaian Jenis Bibit dengan Kebutuhan Pasar dengan melakukan identifikasi kebutuhan komoditas unggulan daerah. 2. Menyediakan bibit sesuai permintaan dan potensi pengembangan perkebunan daerah. 3. Penguatan Sosialisasi dan Promosi dengan melakukan sosialisasi kepada petani terkait manfaat penggunaan bibit unggul dan Mempromosikan layanan bibit perkebunan melalui penyuluh dan media informasi.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	38	92,86	-	-			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	1	1	-	-			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	5	5	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	3	-	-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	65	62,50	-	-			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**%**	**96,50**	**96,50**	**-**	**-**			
				Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	benih	50.000	50.000	-	-			
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks**	**95,17**	**98,21**	**55.658.184.100**	**75.741.424.001**			
					%	**100**	**100**					

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	92	100	996.540.397	921.488.515			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor	91	88,67	29.598.980.651	25.912.191.202			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Skor	83	100	173.321.325	273.397.220			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skor	83	100	634.398.200	925.912.656			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	83	97,9	1.303.453.062	2.296.230.307			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	83	83	5.390.762.906	12.101.813.701			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83	83,53	6.909.196.706	9.085.848.166			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	83	72,39	10.651.530.853	24.224.542.234			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Skor**	**88**	**98,56**	**46.625.561.266**	**49.364.251.193**			
					Skor	**97,29**	**100**					
					%	47,62	51,38	1.984.103.068	1.643.104.269			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	%	27	47,37					
					Ton	410000	413936					
					KK	660	719					
					MilyarRupiah	920	1059,66					
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	ST	194	214,72	2.888.125.701	8.572.954.995			
					%	26,1	38,18					
					Bulan	16,66	12,62					
					%	5	11,9					
					Rupiah	215805200	249794519					
					%	2,05	2,02					
					Stek/pols	120000	197256					
					Ton	1800	1779,66					
					Ton	20	28,65					
				Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Ekor	225	225	3.039.249.699	2.570.312.821			
					%	13	22,28					
					%	61,5	59,8					
					%	60	61,56					
					UnitUsaha	119	119					
					%	1,85	0,85					

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Unit	31	42	4.027.525.865	3.636.221.458			
					Ha	1225	1225					
				Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	%	47,3	47	314.820.636	311.001.421			
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Indukan/Bibit	4700	5355,18	34.371.736.297	32.630.656.229			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Skor**	**99,72**	**100**	**14.506.836.592**	**10.378.470.776**			
				Penataan Prasarana Pertanian	Ha	155	167	14.506.836.592	10.378.470.776			
					MilyarRupiah	120	156					
					unit	4	4					
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Skor**	**92,41**	**92,48**	**12.112.568.450**	**15.357.359.791**			
					Skor	**95,81**	**100**					
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan	%	20	23,3	5.838.117.614	5.555.304.629			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kecamatan	68	78					
					%	45,8	50,23					
					%	80	92,75					
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	%	2,85	1,21	1.916.585.997	1.891.621.062			
					%	80	80,8					
				Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Gram/Hari	30,5	33,33	4.162.047.077	7.730.217.615			
					%	1,35	1,86					
					%	86	88,89					
					Unit	36	36					
					%	24	20,98					
				Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	60	78,05	195.817.762	180.216.485			
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Skor**	**99,59**	**100**	**142.214.340**	**129.842.000**			
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	65,8	66,3	142.214.340	129.842.000			
					UnitUsaha	126	126					

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Skor**	**99,73**	**100**	**2.301.747.134**	**2.194.896.245**			
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	rasio	1,146	1,17	376.023.682	335.808.079			
					Orang	100	237					
					RTUP	49158	49158					
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Unit	12	12	1.925.723.452	1.859.088.166			
4	**Kehutanan**	**Dinas Kehutanan**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks**	**83**	**83**	**317.878.207.962**	**214.372.403.639**			
					%	**100**	**100**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.355.237.431	1.337.818.365			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	138.460.958.811	134.998.070.164			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	513.113.134	482.286.303			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	1.967.529.136	1.838.473.619			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	14.088.541.903	13.674.832.285			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	119.641.919.534	23.461.637.834			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	26.106.592.021	23.961.268.366			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	15.744.315.992	14.618.016.703			
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	**%**	**0,71**	**0,71**	**233.372.823.537**	**179.787.826.614**			
					%	**1**	**1,94**					
					Ton	**900**	**1658,7**					
					M3	**4450000**	**5048525**					
				Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	49.049.604.731	45.510.444.963			
				Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Dokumen	20	19	1.990.657.845	1.840.029.967			
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ha	5153407,17	5245653,16	3.837.926.443	3.471.897.571			
				Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	250	250	97.455.556.754	92.300.638.459			
				Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<Ha	25000	5232,5	78.706.691.818	34.601.722.482			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	M3	16499	27716,67	623.991.875	417.722.423			
				Perbenihan Tanaman Hutan	SK;Sertifika	105	105	1.708.394.071	1.645.370.749			
				PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**Ha**	**730007,98**	**730007,98**	**10.113.512.422**	**9.895.586.264**			
				Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Hektar	64814	64814	9.002.452.595	8.838.095.949			
				Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Spesies	2	2	37.750.600	35.892.970			
				Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Ha	665142	665142	1.073.309.227	1.021.597.345			
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN	**Kelompok**	**20**	**31**	**79.388.392.639**	**71.200.138.376**			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	**Ha**	**20000**	**20477**					
				Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kelompok	17	20	79.388.392.639	71.200.138.376			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	**Ha**	**196336**	**196336**	**7.442.474.632**	**6.799.702.371**			
				Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DAS	1	1	7.442.474.632	6.799.702.371			
5	**Energi dan Sumberdaya Mineral**	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks**	**86,51**	**93,25**	**29.773.127.226**	**26.548.153.357**			
					%	**100**	**100**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	559.970.568	552.020.402			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	87	94,96	21.394.088.475	19.753.802.839			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	35.937.700	26.370.500			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	61,64	79,03	74.618.872	28.265.500			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	5	5	1.526.048.730	1.112.628.121			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	0	0	0			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	4.992.140.419	3.925.801.021			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	1.190.322.462	1.149.264.974			
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	**%**	**53,38**	**49,44**	**1.006.696.702**	**960.621.078**			
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	CAT	2	1	955.496.702	924.636.846			
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	51.200.000	35.984.232			
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	**%**	**100**	**120,8**	**1.105.927.330**	**826.845.400**			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Peta	1	1	81.600.000	76.986.100			
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	50	55	249.973.000	242.274.850			
				Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	70	27	77.600.000	73.822.000			
				Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dokumen	1	1	471.179.330	217.760.850			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	1	1	225.575.000	216.001.600			
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**%**	**35,78**	**73,17**	**86.693.134.578**	**81.949.627.159**			
					TonCOe/Tahun	**484,906**	**491,26**					
					%	**45,76**	**49,02**					
				Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	1.916.287.869	1.227.785.500			
				Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	83.399.880	66.526.100			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Laporan	1	1	84.149.432.069	80.169.820.359			
				Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	1	1	107.800.000	85.896.000			
				Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Dokumen	1	1	337.460.000	311.131.700			
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Laporan	1	1	98.754.760	88.467.500			
					%	**38,73**	**42,59**	**80.500.484.725**	**78.725.970.592**			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	**%**	**97,78**	**93,83**					
					%	**100**	**100**					
					kWp	**300**	**1272,39**					
				Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Perusahaan	40	146	283.200.000	278.668.100			
				Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Perusahaan	20	14	59.600.000	58.837.200			
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1	1	80.157.684.725	78.388.465.292			
6	**Perdagangan**	**Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks**	**88,8**	**89,95**	**2.350.190.709**	**6.506.768.202**	Tidak ada permasalahan Menyesuaikan Perhitungan Dinas		

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					%	100	100			tidak ada keluhan		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	13	12	84.120.000	129.900.000	Untuk honorarium Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat dibayarkan	- Belum adanya pimpinan/kepala UPTD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengakibatkan silpa yang cukup besar	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	5	0	996.318	0	Tidak dilaksanakan terdapat efisiensi anggar		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	20	46	123.850.000	318.602.250	Minimnya pelatihan K3 untuk laboratorium	- Mencari informasi untuk pelatihan K3 dan menganggarkan sesuai kebutuhan dikarenakan untuk pelatihan K3 cukup mahal pembiayaannya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	6	981.809.575	2.843.354.091	Tidak ada permasalahan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	11	14	121.723.160	345.051.000	Tidak ada permasalahan		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kegiatan	38	36	765.543.356	2.159.463.777	Tidak ada permasalahan		

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	58	58	272.148.300	710.397.084	Tidak ada permasalahan		
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**%**	**100**	**100**	**210.527.500**	**201.970.301**	1. Masih banyak eksportir yang tidak langsung memberikan berkas SKA nya untuk keperluan perusahaan sehingga mempengaruhi penerbitan SKA yang tepat waktu 2. Diputusnya anggaran jaringan internet oleh Kemendag dikarenakan efisiensi anggaran dari pusat	1. Menghimbau kepada eksportir untuk menaati peraturan dan regulasi penerbitan dokumen SKA yang ada 2. Menggunakan anggaran jaringan internet kantor Dinas untuk mendukung proses penerbitan SKA yang cepat dan efisien	
					%	**100**	**100**			perpanjangan perijinan minuman beralkohol langsung melalui OSS di dinas PTSP kabupaten / kota sehingga sulit dalam penghimpunan data distributor minuman beralkohol	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol di tingkat distributor	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					%	**85**	**100**			Tidak ada permasalahan		
				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	pelakuUsaha	9	52	98.681.500	97.234.301	Tidak ada permasalahan		
				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	%	100	100	98.681.500	97.234.301	perpanjangan perijinan minuman beralkohol langsung melalui OSS di dinas PTSP kabupaten / kota sehingga sulit dalam penghimpunan data distributor minuman beralkohol	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan minuman beralkohol di tingkat distributor	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Eksportir	265	205	111.846.000	104.736.000	1. SKA tidak mandatory, 2. SKA hanya diterbitkan saat buyer menghendaki 3. SKA dapat diterbitkan di IPSKA lainnya di wilayah Kaltim atau daerah lainnya selama memenuhi persyaratan yang diminta (kantor pusat,kantor cabang,gudang,sit	1. Sosialisasi penggunaan SKA kepada eksportir existing 2. Pendekatan kepada eksportir baru pengguna SKA utk mengarahkan buyer menggunakan SKA 3. Inventarisir dan evaluasi pengguna SKA yang berkurang	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										e,asal bahan baku)	penerbitan SKA dari IPSKA Kaltim	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**%**	**50**	**50**	**1.199.856.800**	**1.109.536.389**	- Masih ada Kab/Kota yang belum membentuk toko penyeimbang/sigap - Draft Pergub Pengelolaan Food Station telah diajukan ke Biro Hukum setda prov. Kaltim dan akan masuk dalam pembahasan di tahun 2026	- Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten dan kota dalam pembentukan kios pengendali inflasi - Melakukan konsultasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan pergub pengelolaan food station di tahun 2026	
				Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Kegiatan	7	7	1.199.856.800	1.109.536.389	- Masih ada Kab/Kota yang belum membentuk toko penyeimbang/sigap - Draft Pergub Pengelolaan Food Station telah diajukan ke Biro Hukum setda	- Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten dan kota dalam pembentukan kios pengendali inflasi - Melakukan konsultasi dengan pihak	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										prov. Kaltim dan akan masuk dalam pembahasan di tahun 2026	terkait dalam proses penyusunan pergub pengelolaan food station di tahun 2026	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	**%**	**90**	**84,67**	**766.892.243**	**720.749.758**	- Konsumsi Rapat Half day dialihkan menjadi Makan dan minum Rapat Biasa sehingga Menyisakan anggaran yang tidak terserap sepenuhnya	-Penyusunan anggaran Belanja Disesuaikan Kembali mengikuti Arahan dan Aturan Gubernur terbaru	
					%	**14**	**10,85**			- data distributor dari kabupaten kota masih belum lengkap - data usulan titik pantau barang penting kabupaten kota masih belum optimal - belum melaksanakan rapat emurator aplikaso SP2KP kemendag dan masih berkoordinasi ke kementerian perdagangan	- berkoordinasi dengan kabupaten dan kota yang masih belum memberikan update data distributor berkoordinasi kabupaten kota terkait data usulan titik pantau barang penting - akan melaksanakan rapat emurator aplikasi SP2KP Kemendag di	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										mengenai narasumber	tahun 2026 yang berupa Rekonsiliasi - melaksanakan pasar murah di Galeri UKM samarinda dan di halaman DPPKUKM Prov. Kaltim - melaksanakan Operasi Pasar di 2 titik lokasi	
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	%	100	98,54	196.740.000	193.975.519	- data distributor dari kabupaten kota masih belum lengkap - data usulan titik pantau barang penting kabupaten kota masih belum optimal - belum melaksanakan rapat emurator aplikaso SP2KP kemendag dan masih berkoordinasi ke kementerian perdagangan mengenai narasumber	- berkoordinasi dengan kabupaten dan kota yang masih belum memberikan update data distributor berkoordinasi kabupaten kota terkait data usulan titik pantau barang penting - akan melaksanakan rapat emurator aplikasi SP2KP Kemendag di tahun 2026 yang berupa Rekonsiliasi - melaksanakan pasar murah di Galeri UKM	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											samarinda dan di halaman DPPKUKM Prov. Kaltim - melaksanakan Operasi Pasar di 2 titik lokasi	
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	%	80	76,28	519.642.443	479.984.239	Adanya kenaikan ongkos angkut pada jalur distribusi barang kebutuhan pokok dari sentra penghasil ke konsumen akhir	- Melaksanakan Operasi Pasar dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok pada 2 titik di kabupaten Paser - Memfasilitasi Pasar Murah bekerjasama dengan OIKN di 2 titik lokasi di kabupaten PPU	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk	laporan	10	8	50.509.800	46.790.000	Tidak ada permasalahan		

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Bersubsidi di Wilayah Kerjanya								
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**Jenis**	**70**	**72**	**1.266.087.010**	**1.114.824.441**	1. Biaya logistik ekspor kaltim yang tinggi 2. Harga kemasan yang tinggi (harus pesan dalam jumlah banyak dari jawa) menurunkan daya saing harga . 3. Kualitas dan standarisasi produk masih belum memenuhi permintaan internasional 4. Perbedaan aturan di negara tujuan 5. Masih minimnya penguasaan bahasa asing	1. Melakukan koordinasi dengan multi pihak dalam upaya mencari solusi jangka pendek dan panjang untuk permasalahan biaya logistik ekspor kaltim yang tinggi 2. Memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi pengurangan biaya kirim 3. Bekerjasama dengan CSR dari perusahaan yang bergerak di daerah pelaku usaha, Memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi biaya pengujian produk 4. Melakukan sosialisasi	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											peluang potensi negara tujuan 5. Pendampingan bagi calon eksportir	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pelaku Usaha	10	10	1.266.087.010	1.114.824.441	1. Biaya logistik ekspor kaltim yang tinggi 2. Harga kemasan yang tinggi (harus pesan dalam jumlah banyak dari jawa) menurunkan daya saing harga . 3. Kualitas dan standarisasi produk masih belum memenuhi permintaan internasional 4. Perbedaan aturan di negara tujuan 5. Masih minimnya penguasaan bahasa asing	1. Bekerjasama dengan CSR dari perusahaan yang bergerak di daerah pelaku usaha 2. Bekerjasama dengan dinas di daerah pelaku usaha 3. Bekerjasama dengan instansi lingkup pemprov yang mengampu bahan baku 4. Bekerjasama dengan instansi vertikal pengampu ekspor 5. Bekerjasama dengan pelaku usaha yang	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											telah lebih dahulu berhasil ekspor	
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**%**	**79**	**61,05**	**3.388.401.461**	**5.348.035.037**	Masih banyaknya pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan pada barang/ produknya	Memberikan dan Menambahkan Materi Pemahaman Tentang Pentingnya Perizinan Produk dan Jasa pada Kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas	
				Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Orang	1000	1028	1.763.264.500	1.685.156.134	Tidak ada permasalahan		
				Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh	≤%(P)&≤%(K)	20,5	0	1.049.817.780	3.087.747.507	Tidak ada keluhan		
					laporan	12	12			Tidak ada permasalahan		

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Daerah Kabupaten/Kota	IKM	12	5			5 IKM yang memenuhi persyaratan	- Dari 12 IKM yang dilakukan pendampingan untuk HACCP hanya 5 IKM yang memnuhi syarat dalam pendapingan HACCP	
					%	100	120			Tidak ada permasalahan		
				Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	%	5	5	575.319.181	575.131.396	Terjadinya penurunan Persentase Barang dan Jasa yang sesuai ketentuan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan Realisasi peningkatan Kinerja Menurun	Mengfokuskan Optimalisasi dan meningkatkan Pengawasan Barang dan jasa pada Persentase Barang dan Jasa yang sesuai ketentuannya bukan pada jumlah barang dan Jasa yang diawasi	
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**%**	**90**	**90**	**440.357.743**	**425.437.756**	Efesiensi Anggaran	- Pendataan dan kurasi produk UMKM unggulan daerah - Mengikuti Pameran/Event antar daerah	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	%	33,3	33,33	137.877.127	136.254.810	Kualitas dan Legalitas Produk Belum Memadai, Anggaran promosi dan fasilitasi UMKM terbatas, sehingga hanya sebagian kecil UMKM dapat difasilitasi.Kurangnya Kapasitas Produksi UMKM, Fasilitas booth, display, atau media promosi belum optimal.Tidak semua kabupaten/kota memiliki galeri atau ruang promosi UMKM yang memadai.	- Optimalisasi anggaran. - Peningkatan Kualitas dan Legalitas Produk UMKM. - Penguatan Kapasitas Produksi UMKM	
				Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	%	23,43	23,67	63.544.000	62.784.000	Anggaran untuk sosialisasi, publikasi, dan undangan terbatas, Setelah sosialisasi, beberapa OPD belum mengimplementasikan penggunaan PDN secara optimal, Kurangnya monitoring dan	- Pendataan dan kurasi produk UMKM unggulan daerah - Pelaksanaan kegiatan Business Matching antara UMKM/Pelaku Usaha dan instansi pengguna	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										evaluasi pasca kegiatan	produk dalam negeri	
				Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	orang	800	369,04	238.936.616	226.398.946	Anggaran untuk sosialisasi, publikasi, dan undangan terbatas, Setelah sosialisasi, beberapa OPD belum mengimplementasikan penggunaan PDN secara optimal, Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca kegiatan	- Penguatan Anggaran dan Dukungan Program - Memberikan contoh kasus keberhasilan (best practices) implementasi P3DN. - Mengintegrasikan kegiatan sosialisasi P3DN dalam program yang relevan	
7	**Perindustrian**	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	1. Pergub No 63 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**%**	**5,56**	**12,48**	**20.900.261.229**	**19.532.614.949**	Daya saing dan daya tarik investasi di kawasan peruntukan industri belum optimal	Percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung, kepastian legalitas lahan, serta penyederhanaan perizinan dan pemberian kemudahan investasi. Selain	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			2019-2039 2. Perda Kaltim No 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039								itu, penguatan promosi investasi, penyediaan insentif yang kompetitif, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan dengan pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong berkembangnya kawasan industri secara berkelanjutan.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	5	5	20.900.261.229	19.532.614.949	Belum sinkronnya data dan status lahan, kesiapan infrastruktur dasar yang terbatas, serta belum meratanya infrastruktur industri pendukung seperti kawasan industri, logistik, energi, dan air bersih. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan tenaga kerja terampil dan kualitas sumber daya manusia industri yang belum merata, ketidakjelasan legalitas lahan, rendahnya akses pembiayaan dan teknologi bagi IKM, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah dan tingginya ketergantungan	Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyinkronkan data, kebijakan, dan perencanaan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Langkah ini didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, penyederhanaan perizinan, pemberdayaan IKM melalui kemitraan, serta penyelarasan RPIP dengan dokumen perencanaan	Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2025 dari Kemenperin RI

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										ekonomi pada sektor ekstraktif turut menghambat optimalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan pencapaian target pembangunan industri daerah.	daerah lainnya guna mendorong pertumbuhan industri daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**%**	**10**	**10,97**	**428.891.552**	**374.801.793**	Ketidaksesuaian data perizinan yang diinput pelaku usaha dengan kondisi faktual usaha, akan berdampak pada risiko hukum dan lingkungan yang meningkat	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan mempersiapkan personil (aparatur pembina) menjadi lebih baik.	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	%	25,5	27,1	428.891.552	374.801.793	Lokasi industri yang sulit dijangkau dan membutuhkan kesiapan anggaran serta personil menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan, serta masih banyaknya kesalahan penginputan dari pelaku usaha yang berpengaruh pada proses pemenuhan komitmen perizinan.	Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan mempersiapkan personil (aparatur pembina) menjadi lebih baik.	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**%**	**19,02**	**20,99**	**235.714.997**	**228.147.195**	Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap akurat dan terkini belum maksimal	Melakukan koordinasi secara maksimal baik dengan pelaku usaha dan dinas yang membidangi perindustrian dikabupaten / kota	
				Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Industri	3	3	235.714.997	228.147.195	Adanya penyesuaian anggaran yang berpengaruh terhadap sebagian besar pelaksanaan	mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk tertib dalam penyampaian laporan melalui	

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										kegiatan Belum semua pelaku industri menyampaikan laporan produksi secara triwulanan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan	pendampingan langsung dan bekerjasama dengan dinas yang membidangi perindustrian dikabupaten / kota	
8	**Transmigrasi**	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	1. Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi 2. Pergub No. 10 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	1,00	Kawasan	1,00	383.703.270,00	333.256.669,00			
				Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1,00	Dokumen	1,00	383.703.270,00	333.256.669,00	Kurangnya dukungan pemerintah dalam Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	Kebijakan Pemerintah yang mendukung Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	
				Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	1,00	Dokumen	1,00	315.250.100,00	277.805.996,00			
				Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	1,00	KawasanTransmigrasi	1,00	28.785.500,00	26.157.700,00			
				Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	277.645,24	Hektar	2.720,92	13.500.000,00	11.872.273,00			
				Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1,00	Dokumen	1,00	26.167.670,00	17.420.700,00			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1,00	Kawasan	1,00	62.850.000,00	58.132.200,00			
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00	Dokumen	1,00	62.850.000,00	58.132.200,00	Kurangnya Koordinasi antar pemerintah dan pihak lain menyangkut Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1,00	Laporan	1,00	31.500.000,00	30.508.200,00			
				Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	1,00	Dokumen	1,00	9.300.000,00	8.137.400,00			
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah	70,00	KepalaKeluarga	50,00	8.400.000,00	6.828.700,00			

C. Urusan Pilihan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Kabupaten/Kota dalam Provinsi								
				Pelatihan Transmigrasi	50,00	Orang	50,00	150.000,00	150.000,00			
				Pelayanan Kesehatan Transmigran	10,00	KK	0,00	0,00	0,00			
				Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	2,00	Lokasi	2,00	13.500.000,00	12.507.900,00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100,00	Persen	88,35	92.135.152,00	79.781.000,00			
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	1,00	Dokumen	1,00	92.135.152,00	79.781.000,00	Kurangnya dukungan pemerintah dalam Pengembangan Satuan Permukiman	Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Pengembangan Satuan Permukiman	
				Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	60,00	KepalaKeluarga	20,00	82.185.152,00	71.381.000,00			
				Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	1,00	SatuanPermukiman	1,00	9.950.000,00	8.400.000,00			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	Sekretariat Daerah	Biro Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	Indeks	84,5	94,1	342.657.103.465	294.242.339.301	1. Keterbatasan Waktu Eksekusi Anggaran Perubahan: Penetapan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2026 dilakukan mendekati akhir tahun anggaran. Sempitnya durasi waktu efektif pelaksanaan ini menyebabkan beberapa rencana belanja (khususnya belanja pemeliharaan dan pengadaan yang memerlukan proses kontraktual) tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan karena risiko ketidaktuntasan pekerjaan dan administrasi pelaporan sebelum tutup buku kas. 2. Kendala Waktu Pelaksanaan Diklat: Capaian komponen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (93,87%) belum mencapai 100%	1. Percepatan Pra-Administrasi (Parallel Processing): Untuk mengantisipasi keterlambatan pengesahan DPA Perubahan di masa mendatang, Biro Umum akan menyiapkan dokumen pendukung (seperti Kerangka Acuan Kerja/KAK, Spesifikasi Teknis, dan draft HPS) lebih awal atau sebelum ketok palu anggaran. Sehingga, saat DPA Perubahan disahkan, proses pengadaan dapat langsung dieksekusi tanpa jeda waktu administrasi yang lama. 2. Penerapan Metode Pelatihan Fleksibel: Mengarahkan pegawai untuk mengikuti pengembangan	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
										dikarenakan adanya benturan jadwal pelaksanaan diklat teknis dengan pekerjaan lapangan, sehingga beberapa pegawai yang ditargetkan terpaksa menunda keikutsertaannya demi tugas pelayanan kedinasan. 3. Proses Administrasi BMD: Pada komponen BMD, masih terdapat kendala teknis dalam proses penghapusan aset lama yang rusak berat, yang menunggu persetujuan teknis dan penilaian dari instansi terkait, sehingga mempengaruhi optimalisasi data aset di akhir tahun.	kompetensi berbasis daring (Webinar/E-Learning) atau In-House Training yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sehingga pegawai tetap mendapatkan jam pelajaran (JP) tanpa meninggalkan tugas pelayanan rutin secara penuh. 3. Percepatan Inventarisasi Aset: Membentuk Tim Satgas Internal BMD Biro Umum untuk melakukan inventarisasi dan usulan penghapusan barang lebih awal (di Semester 1), serta berkoordinasi intensif dengan BPKAD untuk percepatan proses lelang/pemusnahan aset rusak.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Persentase Keluhan Pimpinan yang Ditindaklanjuti (Biro Umum)	**%**	**100**	**100**			Variabilitas Permintaan Layanan: Keluhan atau permintaan layanan dari pimpinan seringkali bersifat mendadak (unpredictable) dan membutuhkan spesifikasi khusus (misalnya: menu jamuan tamu VVIP atau dekorasi ruang), yang terkadang stok barang persediaannya terbatas di gudang pada saat kejadian.	Manajemen Stok Penyangga (Buffer Stock): Menyediakan stok cadangan (buffer stock) untuk kebutuhan logistik vital dan melakukan kerjasama kontrak payung dengan penyedia jasa katering/dekorasi yang siap melayani kebutuhan mendadak 24 jam untuk mendukung kelancaran agenda pimpinan.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	Persentase	100	100	116.972.454.973	99.705.049.509	Terdapat kendala teknis pada sistem aplikasi keuangan pusat (SIPD-RI) yang terkadang mengalami gangguan koneksi (maintenance) atau lambat pada saat periode puncak pelaporan, sehingga menghambat percepatan input SPJ dan pencairan SP2D.	Melakukan koordinasi intensif dengan BPKAD dan menerapkan sistem kerja lembur (overtime) bagi staf keuangan saat sistem SIPD sedang stabil (seringkali di luar jam kerja normal) untuk mengejar tenggat waktu.	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	Persentase	100	100	726.787.205	620.129.232	Proses penghapusan aset rusak berat yang memakan waktu lama karena menunggu penilaian pihak berwenang, sehingga gudang penyimpanan aset menjadi penuh (overload).	Membentuk tim khusus percepatan inventarisasi barang rusak berat dan secara aktif berkoordinasi dengan Bidang Aset BPKAD untuk mempercepat penerbitan SK Penghapusan.	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	Persentase	100	100	1.631.442.000	1.424.948.595	Dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat (BKN/MenpanRB) yang menuntut penyesuaian cepat pada sistem aplikasi kepegawaian daerah.	Sosialisasi internal secara rutin mengenai aturan kepegawaian terbaru agar seluruh ASN/Non-ASN memahami kewajiban administrasinya.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	Persentase	100	100	33.148.840.916	32.242.590.955	Volume surat masuk dan keluar yang sangat tinggi setiap harinya seringkali menyebabkan kesulitan dalam pencarian arsip fisik lama yang dibutuhkan secara mendadak.	Penataan ulang tata letak depo arsip (Restrukturisasi Arsip) dan digitalisasi arsip-arsip penting tahun sebelumnya.	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100	100	29.326.754.640	26.767.733.671	Fluktuasi harga pasar yang cepat berubah dibandingkan dengan harga satuan yang telah ditetapkan dalam Standar Satuan Harga (SSH) perencanaan.	Melakukan negosiasi harga secara transparan melalui sistem pengadaan elektronik.	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100	100	50.842.929.184	34.680.048.240	Gangguan teknis dari penyedia utilitas publik (PDAM/PLN/Internet Provider) yang bersifat force majeure yang sempat mengganggu kenyamanan kerja sesaat.	Penyediaan sarana cadangan (backup) seperti Genset otomatis dan tangki air cadangan yang selalu terisi penuh.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Persentase	100	100	37.776.591.107	31.463.259.255	Sebaran Aset yang Luas: Posisi aset (AC/TV/Kulkas) tersebar di banyak ruangan dan gedung yang berbeda, menyulitkan petugas teknisi untuk melakukan pengecekan rutin satu per satu tanpa adanya laporan kerusakan dari pengguna.	Layanan Pengaduan Satu Pintu: Mengoptimalkan WA "Helpdesk Sarana" agar pengguna ruangan bisa segera melapor disertai foto aset, sehingga teknisi bisa membawa sparepart yang tepat tanpa bolak-balik.	
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase	100	100	18.090.531.915	17.518.598.868	Kesulitan dalam menyingkronkan jadwal kosong Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan jadwal Tim Dokter Spesialis Rumah Sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin (General Check-Up) secara menyeluruh, dikarenakan padatnya agenda pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan.	Berkoordinasi dengan Direktur RSUD untuk memberikan layanan "VIP Fast Track" atau layanan jemput bola (Home Care Service) untuk pengambilan sampel darah/pemeriksaan fisik di kediaman dinas pada jam istirahat pimpinan, guna menyiasati keterbatasan waktu.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase	100	100	54.140.771.525	49.819.980.976	Permintaan fasilitasi jamuan tamu VVIP yang seringkali mendadak dengan jumlah yang melampaui estimasi awal, menyebabkan tantangan dalam penyediaan konsumsi yang berkualitas dalam waktu singkat.	Menjalin kerjasama dengan beberapa penyedia katering premium yang sanggup melayani pesanan urgent 24 jam.	
		Biro Administrasi Pimpinan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (Biro Administrasi Pimpinan)**	**undefine dundefin ed**	**0**	**0,00**	**24.488.515.538**	**24.005.544.735**			
				Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	**Indeks**	**100**	**0**					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	persen	90	90,00	742.044.000	686.976.113			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90	90	341.400.000	311.819.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90	90	617.268.000	497.063.552			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90	90	1.126.063.249	1.087.447.416			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90	90,00	329.098.853	289.080.900			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90	90	44.359.380	9.795.500			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	90	90	156.107.704	125.079.483			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	%	100	100	18.860.808.673	18.745.373.928			
			Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	%	100	100	2.271.365.679	2.252.908.843			
		Biro Hukum	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitasi Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum**	**Indeks**	**88**	**0**	**913.153.920**	**1.731.441.798**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	%	100	12	104.362.808	190.520.000			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Hukum)	%	100	100	8.122.808	8.960.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi	%	100	100	30.000.000	41.841.448			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Kepegawaian (Biro Hukum)								
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	0	619.001.304	1.196.773.652			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unir	10	10	126.667.000	246.776.698			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	%	100	0	5.000.000	7.000.000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Hukum)	%	100	100	20.000.000	39.570.000			
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	**Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum**	**%**	**100**	**0**	**3.359.824.944**	**5.902.126.346**			
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	%	100	122,93	1.759.928.434	3.204.517.444			
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di	%	100	120	1.599.896.510	2.697.608.902			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Setiap Tingkat Peradilan								
		Biro Organisasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi**	**Indeks**	**89,74**	**90,83**	**1.528.970.161**	**1.238.459.839**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	%	100	58,17	124918580	111340000			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Biro Organisasi)	%	100	100	7265220	5367500			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	%	100	0	0	0			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro Organisasi)	%	92	90	809523832	598322876			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah (Biro Organisasi)	%	100	100	517.880.529	463.544.497			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	%	100	0	770.000	0			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Biro Organisasi)	%	100	90	68.612.000	59.884.966			
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	**Indeks Kematangan Organisasi**	**Indeks**	**48**	**48,6**	**3.864.642.295**	**1.898.959.568**			
				Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	**Perangkat Daerah**	**5**	**4**					
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	**%**	**96**	**96**					
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	%	100	100	2.576.802.107	1.165.377.608			
				Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi	%	100	100					
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana	%	100	100	1.287.840.188	733.581.960			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Aksi SAKIP Pertriwulan								
				Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90	67					
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**Indeks**	**87**	**87**	**1.734.648.491**	**1.677.157.153**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	%	95	95	140.520.000	133.830.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	%	100	100	26.963.488	26.400.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	%	100	100	1.471.705.446	1.437.886.093			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi pada Biro POD	%	100	100	40.982.057	40.756.980			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	%	100	100	5.091.500	4.900.000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik (Biro POD)	%	100	100	49.386.000	33.384.080			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	**Persentase kerja sama daerah yang difasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**9.836.847.358**	**9.655.207.976**			
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	%	100	100	2.225.890.600	2.128.494.978			
			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	%	95	95	6.727.719.672	6.679.145.102			
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	398	883.237.086	847.567.896			
		Biro Kesejahteraan Rakyat	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat**	**Indeks**	**100**	**84,38**	**1.623.026.732**	**1.568.754.363**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	%	93	50	339.807.430	339.807.430			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	32.767.320	32.741.520			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	Bulan	12	12	1.056.824.382	1.002.577.813			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Penunjang	Bulan	12	12	20.000.000	20.000.000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	68,17	173.627.600	173.627.600			
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi**	**%**	**100**	**71,75**	**442.222.171.874**	**366.888.219.796**			
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	%	100	70,8	151.541.524.006	143.476.504.115			
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	%	100	52,77	288.237.574.687	220.967.831.360			
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persantase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan	%	100	100	2.443.073.181	2.443.884.321			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti								
		Biro Perekonomian	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian**	**Indeks**	**82**	**82**	**1.060.419.184**	**1.901.574.299**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	Persentase	95	95	130.914.000	230.360.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase	100	100	48.454.485	71.120.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	Persentase	100	100	633.507.818	1.203.574.453			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	190.034.617	325.684.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	14.425.264	26.000.000			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase	100	100	43.083.000	44.835.846			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemerintahan Daerah								
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi**	**%**	**100**	**100**	**2.724.885.027**	**5.270.740.709**			
				Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	**%**	**100**	**97,5**					
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Laporan	1	1	595.300.533	1.154.149.652			
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	395.824.385	688.920.924			
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Laporan	1	1	1.733.760.109	3.427.670.133			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
		Biro Administrasi Pembangunan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan**	**Indeks**	**83**	**84,08**	**2.442.816.079**	**1.863.595.833**	Tidak Ada Hambatan dalam Pelaksanaannnya	Telah dilaksanakan Perhitungan dari 4 Variabel Pelayanan Biro, Yaitu dari Segi Perencanaan, Realisasi Keuangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Bimtek Pegawai seuai dengan tugas dan fungsinya	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	100	100	224.928.000	186.771.858	Tidak Ada Hambatan dalam Pelaksanaannnya	Telah dilaksanakan Pembuatan Laporan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	100	100	149.812.100	145.291.421	Tidak Ada Hambatan dalam Pelaksanaannnya	Telah dilaksanakan Bimtek Kepegawaian sesuai tugas dan fungsinya terkait Monitoring Pembangunan Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	82	100	1.216.073.119	946.304.457	Tidak Ada Hambatan dalam Pelaksanaannnya	Telah dilaksanakan Administrasi Pengadaan ATK, dan Peralatan	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											Kantor, Cetak dan Penggandaan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang (Biro Administrasi Pembangunan)	%	92	100	265.299.760	256.251.492	Tidak Ada Hambatan dalam Pelaksanaannnya	Telah dilaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Biro Administrasi Pembangunan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	%	82	100	326.727.100	217.278.500	Tidak Ada Hambatan dalam Pelaksanaannnya	Telah dilaksanakan Pengadaan Sewa Internet dan Jasa Surat menuyurat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	%	85	100	259.976.000	111.698.105	Menunggu Kerusakan Barang	Telah dilaksanakan Pemeliharaan Barang Komputer, Printer dan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	**Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah**	**%**	**85**	**100**	**15.487.086.095**	**6.581.013.049**	Menunggu Usulan dari SKPD terkait Permasalahan Pembangunan Daerah	Telah dilaksanakan Pemberian Kesempatan berdasarkan Usulan SKPD	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	%	85	100	13.548.763.888	4.718.883.758	Menunggu Laporan Realisasi Pembangunan Daerah dari SKPD	Telah dilaksanakan Monitoring dan Fasilitasi	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pembangunan Daerah							Pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN	
				Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	%	85	100			Menunggu List Paket Pekerjaan dari SKPD dan Kab/Kota	Telah dilaksanakan Radalok Benkeu Kab/Kota dan Monitoring Kunker terkait Pembangunan Daerah	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	85	100	1.938.322.207	1.862.129.291	Menunggu Operator mengisi data di Aplikasi SIRA	Telah dilaksanakan Radalok Pembangunan Daerah	
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	**Indeks**	**78**	**85**	**3.724.401.347**	**3.148.150.150**	Secara umum tidak ada kendala mengingat kegiatan dalam program penunjang berupa kegiatan rutin seperti pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan BMD yang di laksanakan setiap tahun dan mengikuti kebijakan yang berlaku secara umum pada seluruh perangkat daerah	Melaksanakan rapat secara berkala untuk memastikan semua pekerjaan berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan jadwal yang telah di susun	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan (Biro PBJ)	%	88	88	141.980.013	128.820.000	Proses verifikasi dokumen pendukung yang masih bersifat manual sering kali menyebabkan keterlambatan pencairan hak keuangan ASN seperti gaji, tunjangan, maupun perjalanan dinas.	Mengimplementasikan sistem administrasi keuangan berbasis digital yang terintegrasi dengan data kepegawaian untuk mempercepat proses validasi dan memastikan seluruh hak keuangan ASN terbayarkan secara tepat waktu.	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	60	60	20.998.414	8.059.999	Keterbatasan alokasi anggaran dan sulitnya mengatur jadwal operasional kantor mengakibatkan banyak ASN tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat pengembangan kompetensi secara merata	Mengoptimalkan metode pembelajaran jarak jauh (e-learning) dan sistem pembelajaran mandiri yang terintegrasi agar setiap aparatur dapat meningkatkan kompetensi tanpa mengganggu kelancaran layanan publik di perangkat daerah.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan (Biro PBJ)	%	83	83	883.773.830	826.630.649	Kesenjangan antara kebutuhan riil dengan ketersediaan sarpras sering terjadi akibat perencanaan pengadaan yang kurang akurat serta keterbatasan anggaran pemeliharaan yang menyebabkan banyak fasilitas kantor dalam kondisi rusak atau tidak layak pakai.	Melakukan inventarisasi aset secara digital dan penyusunan skala prioritas pengadaan sarpras yang berbasis pada kebutuhan fungsional unit kerja guna memastikan pendistribusian fasilitas kantor tepat sasaran dan berkelanjutan.	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi (Biro PBJ)	%	88	88	2.056.068.766	1.689.607.217	Sering terjadi ketidaksesuaian antara realisasi pengadaan dengan rencana kebutuhan akibat fluktuasi harga pasar yang tidak terprediksi serta adanya perubahan prioritas anggaran secara mendadak di tengah tahun berjalan.	Meningkatkan akurasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) melalui sinkronisasi data aset yang lebih valid dan pemanfaatan e-katalog untuk menjamin kepastian harga serta ketersediaan barang sesuai perencanaan.	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Administarsi Umum (Biro PBJ)	%	83	83	514.476.324	421.097.771	Secara umum tidak ada kendala yang berarti mengingat kegiatan rutin seperti surat menyurat, pembayaran jasa komunikasi dan pelayanan umum kantor	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan memastikan semua berjalan sesuai dengan yang di rencanakan	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Biro PBJ)	%	83	83	107.104.000	73.934.514	Banyaknya sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan dini akibat tidak adanya jadwal pemeliharaan rutin yang terprogram serta terbatasnya alokasi biaya perbaikan yang proporsional dibandingkan jumlah aset yang dimiliki.	Menyusun database kartu pemeliharaan aset secara digital untuk memantau kondisi sarpras secara berkala serta mengalokasikan anggaran pemeliharaan preventif guna memperpanjang usia pakai dan menjamin kesiapan fasilitas penunjang kerja.	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	**Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)**	**Level**	**3**	**3**	**5.160.822.403**	**4.544.296.740**	Stagnasi tingkat kematangan UKPBJ terjadi karena pemenuhan indikator penilaian masih sebatas formalitas administratif tanpa adanya perubahan budaya kerja serta dukungan kebijakan yang konkret	Mengakselerasi pemenuhan standar kompetensi dan tata kelola melalui pendampingan intensif dari LKPP serta penguatan peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pengadaan yang mandiri dan berbasis data.	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel domain proses yang di laksanakan	Variabel	4	4	2.460.521.488	2.146.192.364	perencanaan yang tidak sinkron dengan anggaran, spesifikasi teknis yang kurang akurat, serta lemahnya pengawasan terhadap performa penyedia dalam penyelesaian kontrak.	Memperkuat tata kelola pengadaan melalui sinkronisasi jadwal sejak dini serta peningkatan kompetensi SDM dalam penyusunan dokumen maupun pengawasan kontrak.	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel domain sistem informasi yang di laksanakan	Variabel	1	1	1.426.923.800	1.368.024.899	Sistem informasi pengadaan seringkali mengalami kendala sinkronisasi data antar platform dan rentan terhadap ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu integritas proses tender secara elektronik.	Mengintegrasikan seluruh database aplikasi pendukung pengadaan dalam satu ekosistem yang terpadu serta memperkuat sistem enkripsi data untuk memastikan keamanan dan kelancaran	

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pertukaran informasi bagi seluruh pengguna layanan.	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel domain kelembagaan dan SDM yang di laksanakan	Variabel	1	4	1.273.377.115	1.030.079.477	Beban kerja pengelola pengadaan yang sangat tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah tenaga ahli serta minimnya pendampingan advokasi yang membuat aparatur merasa rentan terhadap risiko hukum dan administratif.	Memperkuat formasi jabatan fungsional pengadaan melalui rekrutmen yang terukur dan menyediakan layanan konsultasi hukum serta pendampingan teknis yang proaktif untuk memberikan rasa aman bagi SDM dalam menjalankan tugasnya.	
2	**Sekretariat DPRD**	**Sekretariat DPRD Provinsi**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**90**	**84**	**199.873.446.624**	**186.062.074.403**			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.076.668.033	1.038.233.914			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	26.208.704.975	22.079.149.013			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	%	100	100	952.084.400	898.527.607			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	7.278.343.504	7.196.545.281			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	97	28.644.890.335	27.577.588.828			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	%	100	100	30.008.834.320	23.985.434.158			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	100	100	17.220.747.315	17.177.998.220			
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	100	54.137.725.879	52.066.268.566			
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	%	100	100	33.047.455.372	32.938.836.150			
				Persentase Keluhan Pengguna Layanan	**%**	**100**	**100**	**255.935.551.812**	**228.670.025.416**			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**yang ditindaklanjuti**								
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang-undangan	**Indeks**	**84**	**86,13**					
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	**Indeks**	**84**	**87,46**					
				Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	**Indeks**	**84**	**86,49**					
			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	%	100	100	39.704.607.726	36.146.214.397			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	%	100	100	5.039.118.500	3.138.500.190			
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	%	100	100	29.220.171.218	23.386.269.312			
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	%	100	100	127.720.612.136	122.254.095.720			

D. Urusan Pendukung

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	%	100	100	32.570.555.136	28.731.986.602			
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	%	100	100	1.473.294.284	1.137.836.753			
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	%	100	100	1.174.189.988	1.023.397.937			
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	%	100	100	19.033.002.824	12.851.724.505			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	Meningkatnya partisipasi Politik masyarakat		Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Indeks	78	85	67.368.905.686	67.213.392.365	-	-	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase	1,32	1,53	67.368.905.686	67.213.392.365			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	Dokumen	4	4	67.368.905.686	67.213.392.365			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Orang	1.725,00	2.580	67.069.003.958	66.954.307.995			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	4	4	299.901.728	259.084.370			
			Meningkatnya persatuan dan kesatuan		Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	Jumlah potensi konflik	90	69	15.218.917.412	12.014.886.699	1. Pembayaran Honorarium sisa triwulan IV	1. Sisa anggaran Makan dan Minum kegiatan	

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	83,33	7.969.488.092	7.551.121.438	(Oktober, November dan Desember) dan Bulan Januari tidak direalisasikan karena SK terbit bulan Febuari 2. Honorarium Ketua (Sekda) tidah di realisasikan 3. Menyesuaikan kondisi di lapangan 4. Latihan pengibaran bendera merah putih hanya 3 hari dikarenakan efesiensi anggaran 5. Anggota pasukan 45 sebagian tidak masuk Diklat 15 Hari	Kirab Bendera Merah Putih Menggunakan Anggaran Biro POD 2. Makan dan Minum kegiatan Kirab Bendera Merah Putih Menggunakan Anggaran Biro POD 3. Menggunakan kendaraan dinas Kesbangpol dan Biro Umum, anggaran dialihkan kegiatan lainnya 4. Anggaran dialihkan kegiatan lainnya	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	6	5	7.969.488.092	7.551.121.438			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2.497	7.607	1.255.524.508	1.189.552.365			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	4	4	66.045.616	62.816.870			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Ika dan Sejarah Kebangsaan									
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	1	1	126.842.602	123.644.682			
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	300	300	127.082.106	126040000			
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	1	1	1.757.696.242	1.709.118.010			
				Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	1	1	3.613.744.394	3.375.980.645			
				Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	1	251.247.000	222.072.320			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1	1	120.522.602	111.571.820			
				Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	40	40	650.783.022	630.324.726			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	%	33,58	33,70	1.155.441.565	1.116.519.454	-	-	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Dokumen	3	3	1.155.441.565	1.116.519.454			
				Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.270	818	1.037.785.949	1.000.044.229			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	4	4	117.655.616	116.475.225			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	%	100	100	891.273.240	822.739.772	-	-	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	1	891.273.240	822.739.772			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Orang	1.380	1.412	830.449.028	763.739.687			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	4	4	60.824.212	59.000.085			
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konfl ik sosial yang ditangani	%	100	100	5.202.714.515	2.524.506.035	Pembayaran honorarium Forkopimda menyesuaikan dengan jadwal pimpinan	dibayarkan sesuai rapat yang dilaksanakan	

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	4	4	5.202.714.515	2.524.506.035			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.865	1.275	991.077.975	805.704.080			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Laporan	4	4	167.400.000	151.148.300			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	12	12	4.044.236.540	1.567.653.655			
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	75,50	88,17	19.429.812.846	16.662.283.130	-	-	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,50	72,95					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	78,68	81,55	12.935.853.164	10.808.271.378			
					Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	%	100	100	6.493.959.682	5.854.011.752			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	222.088.980	207.789.485			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	6.892.808	3.283.000			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Perangkat Daerah									
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	2	0	0			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	2	0	0			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	1.001.404	600.000			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	214.194.768	203.906.485			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	96,75	93,51	12.492.668.750	10.405.481.893			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	55	50	11.999.049.094	9.967.161.893			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	486.360.000	438.320.000			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30	36	2.888.424	0			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	741.404	0			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	2.368.424	0			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	1.261.404	0			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	35	45,45	183.817.722	180.000.000			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	1	481.404	-			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	180.370.702	180.000.000			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	1.482.808,00	-			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	1.482.808	-			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	%	30	44,90	37.277.712	15.000.000			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	238.500	0			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	481.404	0			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	4	481.404	0			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	22	36.076.404	15.000.000			
				Administrasi Umum	Persentase pelaksanaan administrasi umum	%	96	100	2.477.184.178	2.198.736.172			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Perangkat Daerah									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2.386.618	1.599.510			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	953.152.398	882.888.810			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	131.635.120	37.965.600			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	6	1.153.192.294	1.071.170.902			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1.521.404	0			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	235.296.344	205.111.350			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	%	100	100	2.964.699.309	2.797.084.000			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	6	2.799.504.441	2.638.134.000			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	165.194.868	158.950.000			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	536.395.244	168.749.952			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	20.000.000	34.000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	76.264.773	84.982.347			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	440.130.471	83.733.605			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	100	100	346.930.999	321.796.336			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	1	1	72.741.999	70.448.757			

E. Pemerintahan Umum

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	10	154.939.000	151.016.579			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	70	25.400.000	17.331.000			
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	93.850.000	83.000.000			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti**	%	**100**	**100**	**7.008.441.477**	**6.439.020.838**	1. Adanya kebijakan/regulasi dari Pemerintah Pusat terhadap penggunaan Indikator Kinerja Sasaran 2. Penyesuaian metode perhitungan terhadap indikator kinerja Program Prioritas	Melakukan penyesuaian pada tahapan perencanaan berikutnya.	
					Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	%	**100**	**100**					

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025; 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029		**Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan**	**%**	**100**	**98,38**					
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Tepat Waktu	Dokumen	3	3	3.841.697.425	3.696.868.559	1. Proses penyesuaian secara substansi baik dalam hal penjenjangan kinerja maupun penyesuaian terhadap program prioritas. 2. Dinamika dari stakeholders kunci yang mempengaruhi timeline/flow dari rencana penetapan dokumen perencanaan melalui pergub dan perda	1. Penyusunan Kertas Kerja Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir RENSTRA PD 2025-2029 2. Melakukan evaluasi sebagai bahan masukan dan persiapan penyusunan Dokrenbangda tahun 2026, intensifkan koordinasi dengan stakeholder dalam penyusunan dokrenbangda tahun 2026	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi	120	125	881.881.186	808.838.875	Kedalaman data yang dibutuhkan masih cukup terbatas	Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder yang membidangi data dan informasi baik di tingkat provinsi maupun di kab/kota, terutama untuk beberapa data sektoral	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	Dokumen	2	2	2.284.862.866	1.933.313.404	1. Keterbatasan tim evaluator dalam melakukan validasi data yang dilaporkan atas hasil pelaksanaan RKPD/RPD oleh Perangkat Daerah 2. Masih diperlukan penyesuaian terhadap dokumen rencana pembanguna kabupaten/kota terutama untuk aspek-	1. Dilaksanakannya konsinyasi/pertemuan langsung antara Tim Evaluator dengan Perangkat Daerah untuk mengkonfirmasi pelaporan capaian hasil pelaksanaan RKPD/RPD 2. Melakukan inventarisasi hasil masukan/rekomendasi dari proses fasilitasi untuk kelengkapan cek ulang	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											aspek yang prioritas dan strategis		
					Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	**%**	**100**	**100**	**6.266.219.989**	**5.686.718.874**	**Tidak ada permasalahan**	**-**	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	**%**	**100**	**100**					
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	%	100	100	2.660.431.341	2.464.318.227	Dinamika stakeholders kunci dalam proses penyusunan dokrenbangda	Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan stakeholder sebagai kunci untuk percepatan penetapan dokumen perencanaan	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonom	%	100	100	2.428.881.181	2.118.042.897	Dinamika stakeholders kunci dalam proses penyusunan dokrenbangda	Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan stakeholder sebagai kunci untuk percepatan penetapan dokumen perencanaan	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					ian dan Sumber Daya Alam (SDA) dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)								
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA)	%	100	100	1.176.907.467	1.104.357.750	Dinamika stakeholders kunci dalam proses penyusunan dokrenbangda	Melakukan pendekatan dan koordinasi dengan stakeholder sebagai kunci untuk percepatan penetapan dokumen perencanaan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**47.914.435.961**	**43.771.653.447**	**Tidak ada permasalahan**	**-**	
					Indeks Kualitas Layanan	**Indeks**	**82**	**97,25**					

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Kesekretariatan								
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	%	98	100	573.253.110	555.431.914	1. Konsep evaluasi internal yang masih belum optimal; 2. Tingginya intensitas pegeseran anggaran	1. Trial and error dalam penerapan proses evaluasi; 2. Menyusun perencanaan yang realistis, menggunakan data historis, melakukan pemantauan rutin, evaluasi pengeluaran secara berkala, dan penentuan tujuan penggunaan anggaran yang jelas.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	27.107.614.334	25.393.673.254	Akses Aplikasi Penatausahaan Keuangan yang sering tidak stabil	Melakukan akses aplikasi penatausahaan keuangan diluar jam kerja	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	7	7	112.937.520	87.739.800	- Terdapat beberapa SHS belanja yang tidak sesuai dalam pengkategorian jenis Barang - belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pencetatan, pengamanan BMD	- Melakukan reklas pada saat rekonsiliasi BMD - Peningatan SDM pengelola BMD dan peningkatan pengelolaan BMD	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100	100	1.100.969.484	650.646.169	Tingginya intensitas pekerjaan dan padatnya jadwal sehingga tidak seluruh Pegawai berkesempatan mendapatkan peningkatan Kompetensi melalui tatap muka langsung.	Mengikuti peningkatan/pengembangan kompetensi melalui media daring/online	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Disediakan	%	97	100	2.063.136.287	2.014.484.448	Belum optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi publik	Optimalisasi pengelolaan PPID Pelaksana Bappeda	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Tepat Waktu								
				Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	6.642.125.830	6.280.152.052	Pada Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud, rencana Pembuatan aplikasi pengelolaan BMD untuk Bappeda di batalkan dikarenakan pengelolaan BMD dioptimalkan menggunakan spreadsheets Excel	Menyusun format database aset yang terstruktur dan komprehensif menggunakan Microsoft Excel, mencakup detail spesifikasi, lokasi, kondisi, dan riwayat perolehan barang.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	%	100	100	5.647.025.968	4.748.196.629	Tidak ada permasalahan	-	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	94	97,3	4.667.373.428	4.041.329.181	Cakupan pemeliharaan Barang milik daerah belum menyeluruh	Menyusun perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan kondisi terkini	
2	**Keuangan**	**Badan Pendapatan Daerah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks kualitas layanan kesekretariatan**	**Indeks**	**76**	**86,510**	**168.492.410.153**	**162.506.189.544**			
					Persentase Realisasi Retribusi Daerah	**%**	**100**	**103,51**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	658.170.800	556.251.697			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	85	87,6	100.232.761.629	88.535.041.662			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Rencana Kebutuhan dan Penatausah	Persen	100	100	143.004.000	111.300.216			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					aan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselesaikan tepat waktu								
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	MilyarRupiah	1070	1,11	1.426.010.500	1.430.908.098			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	35,36	909.376.000	608.065.595			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	14.101.826.240	14.260.967.700			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	Persen	100	100	7.240.060.615	7.861.795.876			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	100	100	35.182.752.661	39.168.346.790			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	Persen	100	100	8.598.447.708	9.973.511.910			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**%**	**100**	**304,26**	**1.023.514.000**	**927.475.153**			
					Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	**%**	**100**	**0**					
					Persentase Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**%**	**100**	**94,53**					
					Persentase Realisasi Pendapatan Transfer	**%**	**100**	**0**					
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Milliar Rupiah	377,458	367,98	213.342.000	208.955.797			
					Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Milliar Rupiah	136,519	348,01					

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Milliar Rupiah	305,172	2890					
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	TriliunRupiah	9,277	8,67	810.172.000	718.519.356			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase tercapainya target Pajak Daerah**	**%**	**100**	**86,78**	**21.094.607.168**	**23.460.572.503**			
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**					
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Realisasi Pajak Daerah	Triliun Rupiah	7,9	6,86	21.094.607.168	23.460.572.503			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah	Dokumen	3	0					
					Jumlah Pelayanan Berpredikat Zona Integritas menuju	Unit	2	2					

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					WBK/WBBM								
					Jumlah Sistem Elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	Unit	2	2					
					Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Daerah	Dokumen	22	22					
3		**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**86**	**86**	**60.951.157.812**	**60.951.157.812**	Dalam pelaksanaannya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi tidak mengalami kendala	Dalam pelaksanaan kegiatan per-triwulan dilaksanakan identifikasi permasalahan melalui evaluasi kinerja internal. Sehingga target-target yang sudah ditetapkan tercapai.	1. Juara I Keterbukaan Informasi Lingkup Perangkat Daerah oleh Komisi Informasi Prov. Kaltim Tahun 20252.

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**			signifikan. Pada setiap komponen penyusun kinerja telah mencapai target yang ditentukan.		Juara I Pengelolaan Arsip Dinamis Lingkup Perangkat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2025
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	1.127.250.379	1.127.250.379			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	%	100	100	27.477.745.274	27.477.745.274			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	%	100	100	229.936.993	209.666.093			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	%	100	100	480.114.521	439.595.805			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kaltim	%	100	91,03	9.971.110.528	9.947.591.078			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	983.050.512	982.041.512			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	7.457.814.456	7.420.393.634			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di lingkungan BPKAD Provinsi Kaltim	%	100	79,17	13.224.135.149	13.219.468.524			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Perda Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertanggugjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Pergub Kaltim Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Perda Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD TA 2025 Pergub Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**6.873.051.945.312**	**6.422.627.447.533**	Dalam pelaksanaan penyusunan Perda APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diperlukan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif.	Persamaan persepsi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif.	1. Juara III Aplikasi SIGERAK Kaltim, dan 2. Juara IV Aplikasi SIMFONI Pada Penganugerahan Riset dan Inovasi Tingkat Provinsi Tahun 2025 oleh Brida Prov. Kaltim.
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	%	100	100	5.645.256.000	4.046.966.950			
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	%	100	100	532.712.000	501.214.531			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	%	100	100	3.831.358.164	3.300.839.349			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	100	100	2.817.755.461	2.455.153.818			
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	90	73,47	6.859.844.872.389	6.412.045.800.566			
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	%	100	100	379.991.298	277.472.319			
			Pergub Kaltim Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Stamdar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanj**	**%**	**60**	**100**	**8.085.013.394**	**7.690.763.035**	Ketepatan dan kepatuhan OPD/Pengguna Barang dalam menyampaikan laporan BMD pengguna.	Melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan BMD kepada pengguna serta melakukan rekonsiliasi kepada pengguna barang tingkat OPD.	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					uti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)								
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	%	100	148,51	8.085.013.394	7.690.763.035			
4	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Penunjang**	**Badan Kepegawaian Daerah**	**1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 2. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029**	**Badan Kepegawaian Daerah + UPTD**					**47.027.107.760,00**	**45.383.069.504,00**			1. Piagam Penghargaan atas Dedikasi dan Komitmen Dalam Pengembangan Kompetensi ASN, dengan Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi pertahun bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Periode Anggaran Tahun 2024 dengan Kategori : Pemenuhan Minimal 20
				Badan Kepegawaian Daerah					**42.395.864.599,00**	**40.965.747.601,00**			
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan layanan publik	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Indeks kepuasan layanan kesekretariatan**	**Indeks**	**98,04**	**98,37**	**28.793.327.167,00**	**27.821.698.267,00**			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			perangkat daerah	**DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100,00**	**98,14**			**Realisasi Kinerja : Pertanyaan yang diterima pada aplikasi "SP4N LAPOR!" dan "HELPDESK BKD" telah dijawab, tetapi terdapat beberapa pertanyaan yang berulang terutama pada aplikasi "HELPDESK BKD", sehingga admin yang bertugas hanya menjawab pertanyaan yang pertama kali pengguna tanyakan dan tidak menjawab pertanyaan berulang tersebut.** **Realisasi Anggaran :**	**Pertanyaan pengguna pada aplikasi "SP4N LAPOR!" dan "HELPDESK BKD" telah dijawab oleh admin yang bertugas, namun admin hanya menjawab satu kali pertanyaan yang sama pada nama pengguna yang sama.**	JP Per-Tahun Tertinggi V (58,21%) (28 April 2025) 2. Piagam Penghargaan atas Terbaik III Perangkat Daerah Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Parade Gender 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (29 April 2025) 3. Plakat Award Gender Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Terbaik III

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											SILPA POSITIF		Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 4. Sertifikat Penghargaan atas Komitmen dan Kualitas Usulan Pensiun PNS oleh Kanreg VIII BKN (Surabaya, 19 Juni 2025) 5. Tahun 2025 Sertifikat Penghargaan atas Komitmen dan Kualitas Penyelenggaraan Penetapan NIP CASN T.A. 2024
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu**	**%**	**100,00**	**100,00**	**321.769.405,00**	**305.275.592,00**	**Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF**		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase realisasi anggaran**	**%**	**96,22**	**96,50**	**22.130.967.503,00**	**21.306.566.598,00**	**Terdapat Pegawai yang mutasi dan terdapat jabatan yang kosong, sehingga terdapat silpa**		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											pada gaji dan tunjangan		(Surabaya, 19 Juni 2025) 6. Sertifikat Penghargaan atas Dukungan dalam Percepatan Penyelesaian Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Aplikasi I-Mut BKN (Surabaya, 19 Juni 2025) 7. Sertifikat Penghargaan sebagai Penyelenggara Titik Lokasi Mandiri Instansi Pada Seleksi CASN T.A. 2024 Dengan Metode CAT BKN (Surabaya, 19 Juni 2025)
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang berfungsi dengan baik**	**%**	**98,53**	**98,53**	**5.000.000,00**	**4.988.000,00**	**Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF**		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**97,09**	**97,47**	**166.530.000,00**	**159.200.000,00**	**Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF**		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik**	**%**	**98,28**	**98,27**	**1.416.839.254,00**	**1.385.880.968,00**	**Realisasi Kinerja : Proses Penghapusan Barang Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF**	**Percepatan pencatatan BMD ketika selesai proses lelang BMD**	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu**	**%**	**100,00**	**100,00**	**3.565.675.632,00**	**3.502.777.860,00**	**Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF**		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Persentase BMD yang digunakan dan**	**%**	**98,53**	**98,53**	**1.186.545.373,00**	**1.157.009.249,00**	**Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF**		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pemerintahan Daerah	berfungsi baik								8. Piagam Penghargaan atas Pencapaian Penyelesaian Disparitas Data Terbanyak Sebesar 4.287 Data di Wilayah Kanreg VIII BKN 9. Sertifikat Penghargaan atas Dukungan Dalam Percepatan Proses Kenaikan Pangkat (KP) Di Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN
			Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan Kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam Melaksanakan Tugas Jabatan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan ASN sesuai perencanaan	%	89,00	91,07	3.540.923.571,00	3.510.090.533,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase pengembangan karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	%	94,26	93,68	812.894.423,00	729.071.457,00	Realisasi Kinerja : Belum Terlaksanaanya Seleksi Terbuka Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	87,05	90,54	6.397.270.111,00	6.063.386.040,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	97,36	98,35	2.851.449.327,00	2.841.501.304,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Perencanaan kebutuhan ASN yang terselesai	%	100,00	100,00	750.777.730,00	747.245.804,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					kan pada masing-masing Perangkat Daerah								
					Persentase Usulan Pensiun Pegawai Yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	362.713.702,00	342.811.225,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dokumen	5,00	5,00	2.001.812.838,00	1.996.665.689,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase kualitas pengolahan data dan kualitas informasi	%	84,23	89,80	425.619.301,00	423.367.815,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN Jabatan Non Manageria l sesuai dengan kebutuhan	%	92,68	93,10	156.462.426,00	155.105.871,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase Usulan Kenaikan Pangkat yang	%	94,29	95,58	157.931.033,00	156.673.806,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					terbit SKnya								
					Persentase Penempatan ASN Jabatan Manageriall sesuai dengan kebutuhan	%	95,83	77,78	498.500.964,00	417.291.780,00	Realisasi Kinerja : Belum Terlaksananya Seleksi Terbuka Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan ASN	%	86,64	86,64	712.320.799,00	662.260.175,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase penyelenggaraan manajemen ASN melalui peningkatan kompetensi ASN	%	88,16	95,55	5.446.046.534,00	5.184.132.365,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase Fasilitasi Pengembangan Karir ASN Dalam Jabatan	%	86,00	96,71	238.902.778,00	216.993.500,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Fungsional								
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kepatuhan Penyusunan SKP oleh Pegawai ASN	%	97,50	98,35	271.996.000,00	270.994.360,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase Pemberian Penghargaan Bagi ASN yang Berkinerja Baik	%	99,05	100,00	2.261.737.214,00	2.257.463.096,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Persentase permohonan pembinaan ASN yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	317.716.113,00	313.043.848,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai					4.631.243.161,00	4.417.321.903,00			
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	Indeks	95,54	98,37	3.017.926.151,00	2.909.855.232,00			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			perangkat daerah (UPTD)	DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100,00	98,14			Realisasi Kinerja : Pertanyaan yang diterima pada aplikasi "SP4N LAPOR!" dan "HELPDESK BKD" telah dijawab, tetapi terdapat beberapa pertanyaan yang berulang terutama pada aplikasi "HELPDESK BKD", sehingga admin yang bertugas hanya menjawab pertanyaan yang pertama kali pengguna tanyakan dan tidak menjawab pertanyaan berulang tersebut. Realisasi Anggaran :	Pertanyaan pengguna pada aplikasi "SP4N LAPOR!" dan "HELPDESK BKD" telah dijawab oleh admin yang bertugas, namun admin hanya menjawab satu kali pertanyaan yang sama pada nama pengguna yang sama.	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											SILPA POSITIF		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	116.049.200,00	112.388.000,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	98,93	100,00	1.226.456.681,00	1.206.544.996,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	%	0,00	0,00	0,00	0,00	Untuk Kegiatan Pengadaan Lift di Tahun 2026		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	%	100,00	100,00	994.351.200,00	931.565.927,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	%	98,93	100,00	681.069.070,00	659.356.309,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
			Meningkatnya Kualitas ASN berdasarkan Kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai ASN dalam Melaksanakan Tugas Jabatan (UPTD)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	%	69,60	81,94	1.613.317.010,00	1.507.466.671,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
				Pengembangan Kompetensi ASN	Laporan Pengembangan Instrumen Kompetensi Pegawai	Laporan	1,00	1,00	478.154.410,00	448.982.010,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		
					Laporan Pengujian dan Penilaian Kompeten	Laporan	1,00	1,00	1.135.162.600,00	1.058.484.661,00	Realisasi Anggaran : SILPA POSITIF		

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					si Pegawai								
5	**Pendidikan dan Pelatihan**	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Persen**	**90**	**87,2**	**42.467.404.383**	**41.726.882.420**			Terbaik ke-3 Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah dari LAN RI
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	**Persen**	**88**	**86,67**					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	85	100	425.089.319	421.185.450			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	Persen	80	95,66	16.099.052.633	15.987.041.778			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	80	100	6.310.000	6.310.000			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	Persen	70	282	28.136.250	28.103.500			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	60	56	554.960.043	528.768.015			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	90	90	4.680.894.628	4.506.373.190			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	Persen	90	100	6.663.002.129	6.420.315.908			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	Persen	82	100	6.228.817.401	6.187.729.682			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	Persen	90	92	7.781.141.980	7.641.054.897			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**Persen**	**87**	**129,85**	**27.830.776.402**	**25.725.606.939**	Dari 3 Indikator pada Program Pengembangan sumber daya manusia, yg belum mencapai target yang semula ditargetkan 130 namun yg	Memberikan pembekalan lebih intensif sebelum uji kompetensi dan melakukan pemanggilan ulang untuk mengikuti ujian kembali, untuk memenuhi kuota yang	
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti	Persen	88	102,91	9.083.798.974	8.476.321.013			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Pengembangan Kompetensi Teknis						mendapatkan sertifikat kompetensi hanya 108 peserta sementara sisanya sebnyak 22 orang tidak kompeten berdasarkan hasil uji tertulis dan uji wawancara	ada dengan memanggil peserta cadangan.	
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan/Pemerintahan daerah, manajerial dan fungsional	Persen	86	134,68	18.746.977.428	17.049.009.028			
					Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi	Persen	86	38,57					
6	**Penelitian dan Pengembangan**	**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah**	1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2025 Tentang Rencana Stratgeis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**84**	**88,17**	**20.358.840.406**	**19.084.221.494**	Internalisasi target indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melakukan evaluasi dan analisis jika target tidak tercapai	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	**%**	**100**	**100**					

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
			Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	85	79	365.247.312	99.180.000	Pembayaran honorarorium tidak dapat terlaksana	1. Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan 2. mengidentifikasi potensi SilPA sejak awal 3. Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala	Penghargaan dari Badan Riset fan Inovasi Nasional (BRIN): Piagam Penghargaan Pemprov Kaltim Sebagai BRIDA Optimal 2025 untuk Indikator Kajian Kenijakan yang Dimanfaatkan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	%	0,08	0,08	13.667.569.862	13.371.426.092			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunya Temuan Audit Barang Milik Daerah	%	15	0	8.710.000	3.588.000	Efisiensi anggaran	1. Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan 2. mengidentifikasi potensi SilPA sejak awal 3. Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	%	50	50	113.180.000	60.806.924	Efisiensi pada belanja perjalanan dinas (studi banding pendidikan dan pelatihan ke luar daerah)	1. Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pelaksanaan kegiatan 2. mengidentifikasi potensi SilPA sejak awal 3. Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	%	85	85	2.048.213.151	1.948.489.819			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	%	70	66,67	54.749.714	50.893.500			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	%	100	100	3.412.803.369	2.916.731.308			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfugsi baik	%	70	86	688.366.998	633.105.851			
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Presentase Hasil Inovasi yang Ditindaklanjuti Dalam**	**%**	**66**	**50**	**7.466.357.003**	**5.918.941.307**	Efisensi anggaran yang berpotensi SiLPA	1. Melakukan penyesuaian target kinerja sesuai dengan pelaksanaan program 2. mengidentifikasi potensi SilPA sejak	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Dokumen Anggaran							awal 3. Penguatan pengawasan dan evaluasi berkala	
					Presentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	**%**	**72**	**70**					
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	4	4	1.253.212.894	1.042.477.331	Keterlambatan penerbitan SK Gubernur	Melakukan perencanaan Tim Kegiatan Riset sebelum tahun n-1	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk	%	4	4	1.103.393.770	1.077.748.280	Keterlambatan penerbitan SK Gubernur	Melakukan perencanaan Tim Kegiatan Riset sebelum tahun n-1	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota								
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	4	4	2.915.068.670	2.251.786.673	1. Keterlambatan penerbitan SK Gubernur 2. Permasalahan administrasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan (KRIS dan Jurnal Internasional)	1. Melakukan perencanaan Tim Kegiatan Riset sebelum tahun n-1 2. memilih jurnal yang sesuai dengan scope penelitian dan waktu rata-rata publikasi 3. Mengidentifikasi jurnal dengan fast-track reviuw dapat mempercepat serapan anggaran	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	%	11	9	2.194.681.669	1.546.929.023	1, Keterlambatan penerbitan SK Gubernur 2. Efisiensi belanja barang dan jasa, makan dan minum rapat 3. Permasalahan administrasi dan keterbatasan	1. Melakukan perencanaan Tim Kegiatan Riset sebelum tahun n-1 2. memilih jurnal yang sesuai dengan scope penelitian dan waktu rata-rata publikasi 3. Mengidentifikasi jurnal dengan fast-track reviuw dapat mempercepat serapan anggaran	

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
											waktu pelaksanaan (KRIS dan Jurnal Internasional)		
7	**Penghubung**	**Badan Penghubung Provinsi**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**Indeks**	**83**	**91,14**	**17.417.276.470**	**14.486.628.851**			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	96,55	372.176.050	363.417.700			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	100	5.659.352.924	4.728.859.877			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik	%	100	100	5.714.746	4.458.400			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan								
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	74,04	94,12	123.320.000	110.360.776			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	100	96,77	1.224.009.433	1.209.882.538			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	%	100	97,37	655.838.861	602.804.780			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	%	100	100	6.693.253.356	4.891.674.475			

F. Urusan Penunjang

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
					dilaksanakan								
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	70,98	2.683.611.100	2.575.170.305			
				PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**2.972.351.988**	**2.801.357.521**			
				Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang Dilaksanakan	%	100	107,69	2.972.351.988	2.801.357.521			

G. Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan Strategis (Perda/Pergub)	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Kinerja	Pagu	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Penghargaan
1	**Inspektorat**	**Inspektorat**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**81.034.166.584**	**76.027.833.423**			
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**Indeks**	**100**	**100**					

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	667.448.000	666.432.616			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	%	100	100	32.478.869.130	30.056.143.080			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	%	100	100	133.056.000	132.453.800			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	%	100	100	3.647.694.380	3.204.489.388			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	%	100	100	6.006.578.153	5.386.276.127			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	%	100	98	27.051.384.294	26.199.559.827			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	%	100	100	5.821.622.827	5.318.434.955			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	%	100	97	5.227.513.800	5.064.043.630			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota**	**%**	**100**	**100**	**6.268.388.400**	**6.264.586.078**			

				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	100	100	2.639.505.800	2.636.421.752		
					Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah	%	100	88,88	2.639.505.800	2.636.421.752		
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	2.639.505.800	2.636.421.752		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	3.628.882.600	3.628.164.326		
					Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	3.628.882.600	3.628.164.326		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi**	**%**	**85**	**82**	**686.100.652**	**638.714.175**		
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	%	100	100	686.100.652	638.714.175		
					Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	100	100	686.100.652	638.714.175		
					Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	686.100.652	638.714.175		

					Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti	%	100	100	686.100.652	638.714.175		
					Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	%	100	100	686.100.652	638.714.175		
					Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani	%	100	100	686.100.652	638.714.175		
					Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	%	100	100	686.100.652	638.714.175		

3.5. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 disampaikan rekomendasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jawaban atas tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.68

Jawaban Atas Rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2025

A. REKOMENDASI MITRA KERJA BIDANG KOMISI I

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Bidang Pemerintahan Umum, Ketertiban, Pertahanan dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi, Hukum dan Peraturan Perundang Undangan, Pertanahan, Kepegawaian/ Aparatur, Sosial, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Kerjasama Antar Lembaga dan Perizinan, Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan, serta Sistem Pendukung dan	**Sekretaris Daerah**	**1.**	Gubernur menyusun kebijakan dan memerintahkan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektur Kalimantan Timur untuk melaksanakan sebagai berikut: **a.** Memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk segera menuntaskan tindak lanjut temuan dan rekomendasi LHP BPK yang belum diselesaikan. **b.** Menetapkan capaian tindak lanjut atas laporan temuan dan rekomendasi LHP BPK menjadi salah satu Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk memberikan *reward dan punishment* kepada Perangkat Daerah. **c.** Memantau dan merangkum laporan perkembangan	**Inspektorat**	a. Membuat surat pemberitahuan kepada SKPD yang belum menuntaskan tindak lanjut temuan dan rekomendas LHP BPK yang belum selesai dan sudah dilaksanakan Rekonsiliasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025 pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 10 s.d 12 Desember 2025, bertempat Auditorium Nusantara Lt.2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Jalan M.Yamin No.19 Samarinda. b. Penetapan Capaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi LHP BPK-RI sudah ditetapkan dan menjai salah satu indicator pada perangkat daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang di dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 s.d. 2030. Berkenaan dengan pemberian reward dan punishment kepada perangkat daerah ini akan dibuat surat ke Geburnur Kalimantan Timur untuk persetujuan hal ini. Sedangkan untuk progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi LHP BPK -RI pada setiap pelaksanaan Briefing dengan Bapak Gubernur hal ini selalu disampaikan terkait progresnya.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Kesekretariatan DPRD.			penyelesaian temuan dan rekomendasi LHP BPK di seluruh Perangkat Daerah dan menyampaikan tembusan laporannya ke DPRD. **d.** Membentuk gugus tugas atau *help desk* penyelesaian laporan temuan dan rekomendasi LHP BPK untuk membantu Perangkat Daerah mempercepat proses tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi LHP BPK. **e.** Mempublikasikan tingkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti laporan dan rekomendasi hasil pemeriksaan inspektorat dan hasil pemeriksaan BPK.		c. Pemantauan selalu dan sudah dilaksanakan setiap Semester I dan II ditahun berjalan dan tembusan akan disampaikan ke DPRD. d. Disetiap SKPD sudah ada masing-masing Tim dan PIC yang dikoordinir oleh Sekretaris SKPD, dan Inspektorat membuka help desk setiap hari / setiap saat dan apabila ada tindak lanjut yang disampaikan langsung diinput kedalam aplikasi SIPTL BPK-RI. e. Akan dipublis perkembangan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi baik LHP BPK-RI dan LHP Inspektorat. Hal ini sudah dilakukan pada setiap pelaksanaan Briefing dengan Bapak Gubernur dan SKPD.
		2.	Gubernur menyusun kebijakan dan memerintahkan Kepala BKD dan Kepala Perangkat Daerah untuk segera memproses pengisian pejabat definitif atas kekosongan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada di Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.	**BKD**	1. Pengisian jabatan pimpinan nggi pratama telah dilakukan melalui uji kompetensi. Saat ini dikoordinasikan kembali dengan BKN terkait rencana pengisian JPTP melalui Manajemen Talenta ataupun seleksi terbuka. Untuk pengisian jab administrtor dan pengawas, secara periodik dilakukan pembahasan oleh Tim Penilai Kinerja sehingga penempatan PNS pada jabatan bersesuaian dengan pola karir dan sistem merit.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					2. Dalam hal Jabatan Fungsional (JF) yang lowong dak serta merta dapat dilakukan pengisian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada karena Pengangkatan PNS dalam JF wajib memenuhi persyaratan beberapa diantaranya yaitu: a. memenuhi syarat usia paling nggi saat diangkat dalam jenjang JF yang akan diduduki; b. mengiku dan lulus uji kompetensi yangdiselenggarakan oleh Instansi Pembina c. memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai standar kompetensi JF yang akan diduduki; d. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun secara akumula f di bidang tugas JF yang akan diduduki bagi PNS yang akan diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain ataupun penyesuaian; Selain mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, pengisian kelowongan JF dapat dilakukan melalui mekanisme pengadaan dari Calon PNS pada jenjang ahli pertama, ahli muda, pemula, terampil, dan mahir berdasarkan penetapan kebutuhan pengadaan Calon PNS secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

<table>
<tr><th>Bidang/ Urusan</th><th>Tujuan Rekomendasi</th><th>No.</th><th>Rekomendasi</th><th>Penanggungjawab</th><th>Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.</td><td>Gubernur memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan permintaan kepada Kementerian terkait untuk sharing tenaga ahli perkapalan atau Jabatan Ahli Ukur Kapal yang menjadi kewenangan pusat agar dapat ditugaskan dalam membantu pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah terkait pengadaan kapal untuk bantuan nelayan.</td><td>Dinas Kelautan dan Perikanan</td><td>1. Berdasarkan Kepmen-PAN RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah tersedia nomenklatur jabatan pelaksana (Penata Kelola Kelautan dan Perikanan), salah satunya Teknik Perkapalan dan memiliki pengalaman dibidangnya min 1 tahun)
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim akan berkoordinasi dengan BKD dan BPSDM Kaltim mengenai nomenklatur dimaksud
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim mengusulkan Kajian Rancang Bangun Kapal ukuran < 5 GT Bagi Nelayan Kecil diwilayah Kalimantan Timur</td></tr>
<tr><td></td><td>Sekretaris Daerah</td><td>4.</td><td>Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah melanjutkan pengadaan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Kalimantan Timur yang masih kurang jumlahnya dibandingkan dengan beban tugas pengawasan dan audit internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.</td><td>BKD</td><td>Berdasarkan persetujuan Menteri PAN RB Nomor B/1246/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 rincian kebutuhan formasi JF Auditor sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Kebutuhan</th><th>Eksisting</th><th>Lowong</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Auditor Ahli Utama</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Auditor Ahli Madya</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Auditor Ahli Muda</td><td>36</td><td>21</td><td>15</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Auditor Ahli Pertama</td><td>52</td><td>27</td><td>25</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Auditor Penyelia</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Auditor Mahir</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Auditor Terampil</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>122</td><td>79</td><td>43</td></tr>
</table>
Penjelasan :
1. Bahwa untuk lowongan kebutuhan pada jenjang ahli muda sebanyak 15 tidak diisi oleh PNS</td></tr>
</table>

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain ataupun penyesuaian karena pertimbangan kebutuhan agar tidak terjadi stagnasi pengembangan karier bagi pemangku JF Auditor ahli pertama yang eksisting saat ini nantinya dipastikan dapat menduduki jenjang JF Auditor ahli muda. 2. Bahwa untuk lowongan kebutuhan pada jenjang ahli pertama sebanyak 25 telah diisi melalui mekanisme pengadaan Calon PNS Auditor sebanyak 24 orang yang selanjutnya akan diangkat dan dilantik dalam jabatannya sekurang kurangnya bersamaan pada saat diangkat sebagai PNS pada tanggal 1 Mei 2026. Sedangkan 1 lowongan yang tersisa dapat diisi melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain dari PNS maupun pejabat fungsional Auditor terampil yang eksis saat ini. 3. Dalam hal terdapat 2 lowongan kebutuhan jenjang penyelia hanya dapat diisi melalui kenaikan jenjang, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian atau melalui mutasi dari PNS jabatan Auditor penyelia dari Instansi lain. 4. Bahwa tidak tersedia kebutuhan pada jenjang mahir, maka harus dilakukan perhitungan ulang terhadap jenjang mahir oleh perangkat daerahnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar pejabat fungsional Auditor terampil tidak mengalami stagnasi karir karena tidak dapat naik jenjang ke Auditor mahir.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					5. Dalam hal persetujuan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB sebagaimana di atas dianggap masih kurang karena banyaknya beban tugas pengawasan dan audit internal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka perangkat daerahnya dapat melakukan perhitungan kembali kebutuhan JF Auditor sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan mengacu pada Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
		5.	Gubernur menyusun kebijakan yang memberikan kewenangan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk menyebarkan informasi tematik sesuai urusan Perangkat Daerah tidak harus terpusat melalui publikasi Diskominfo Kalimantan Timur.	**Diskominfo**	Untuk yang sifatnya tematik kegiatannya bisa didiseminasikan dari Organisasi Perangkat Daerah yang Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan
		6.	Gubernur menetapkan kebijakan dan memerintahkan kepada Kepala Biro Hukum untuk meningkatkan porsi anggaran bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur.	**Biro Hukum**	Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim telah menganggarkan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dalam APBD Provinsi Kaltim, yaitu: - pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar Rp200.000.000,00. - tahun 2026 ditingkatkan menjadi sebesar Rp350.000.000,00

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		7.	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah bersama Tim TAPD untuk menyusun formula dasar perencanaan perhitungan besaran bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota secara berkeadilan dan sesuai kebutuhan. Rancangan formula perhitungan tersebut agar dikonsultasikan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebelum ditetapkan dan dijalankan.	**BPKAD dan Tim TAPD**	Tim TAPD bersama dengan Universitas Mulawarman secara teknokratik telah menyusun formula dasar perhitungan besaran distribusi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang selanjutnya akan dikonsultasikan kepada DPRD. Formula tersebut memperhitungkan beberapa kriteria diantaranya kapasitas fiskal daerah, luas wilayah, kepadatan penduduk, karakteristik wilayah, indeks kemahalan harga, capaian indikator makro pembangunan, dan lain-lain
		8.	Gubernur memerintahkan Kepala Biro Hukum berkoordinasi dengan Kepala Biro Adminisitrasi Pembangunan melakukan evaluasi Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran, dengan memberikan penegasan kriteria yang jelas atas pekerjaan yang diberikan perpanjangan waktu, teknis pengajuan SP2D pekerjaan yang diperpanjang waktunya, dan pengawasan oleh Inspektorat untuk pekerjaan yang diperpanjang waktunya.	**Biro Hukum dan Biro Adbang**	Telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan / evaluasi Pergub 6/2024 tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran dengan hasil akhir bahwa perlu dilakukan revisi / penyusunan Peraturan Gubernur pengganti Pergub 6/2024. Hasil pembahasan terakhir tanggal 6 Nopember 2025, proses penyusunan Rancangan Pergub yang semula pemarakarsa adalah Biro Administrasi Pembangunan dialihkan kepada BPKAD provinsi Kaltim sebagaimana saran Biro Hukum.

B. REKOMENDASI MITRA BIDANG KOMISI II

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Bidang Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha, Keuangan, Investasi dan Penanaman Modal, Perusahaan Patungan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Kelautan, Potensi Sungai dan Danau, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi,	**Sekretaris Daerah**	**1.**	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menugaskan seluruh Perangkat Daerah menyusun formula optimalisasi aset yang dikelola Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Memerintahkan semua perangkat daerah menyusun informasi mengenai aset tanah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, disertai informasi kelengkapan surat tanah dan pengamanannya.	**BPKAD**	Terhadap Optimalisasi Aset dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, BPKAD telah mengikuti aturan Permendagri 7 Tahun 2024 tentang Atas Perubahan Permendagri no. 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur terkait pemanfaat aset berupa Retribusi, Sewa maupun Kerjasama Pemanfaatan dan Pergub Kaltim no. 58 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Kelistrikan, Kepelabuhanan, serta Kebandarudaraan .					
		2.	Gubernur memerintahkan BPKAD menyusun laporan perkembangan percepatan pembentukan UPTD pengamanan dan pemanfaatan Barang Milik Ddaerah, serta rencana aksi langkah selanjutnya.	**BPKAD**	Telah berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim dan dalam tahap Finalisasi Naskah Kajian Akademik sesuai dengan rekomendasi Kemendagri.
		3.	Gubernur mengeluarkan kebijakan percepatan penyelesaian penataan aset milik Pemerintah Provinsi (bidang tanah, gedung, mesin, kendaraan, aset non fisik, dan seterusnya) dan memerintahkan BPKAD selaku Penatausaha BMD bersama Pengguna	**BPKAD**	1. Untuk BMD berupa tanah sudah dilakukan validasi data tanah dan telah memiliki Web SERGAP ASET Kaltim yang didalamnya terdapat informasi mengenai tanah yang belum bersertipikat dan sudah bersertipikat yang di Input dan di Update oleh Pengguna Barang atau Pengurus Barang SKPD. 2. Untuk Gedung, mesin dan kendaraan di Input dan di Update di dalam Aplikasi SIPBMD oleh Pengguna Barang atau Pengurus Barang SKPD

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			Barang (Perangkat Daerah) untuk menginventarisasi lahan yang belum bersertipikat, gedung dan kondisinya, mesin dan kondisinya, kendaraan dan kondisinya, dan seterusnya.		
		4.	Gubernur mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan BPKAD dan Inspektorat memantau dan meminta hasil pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang dianggarkan tiap tahun pada masing-masing Perangkat Daerah, yang outputnya berupa informasi aset yang lengkap, cepat, terkini, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan	**BPKAD dan Inspektorat**	1. Inspektorat Daerah setiap tahun melaksanakan Reviu Tata Kelola BMD sebagaimana amanat MCSP KPK-RI. 2. BPKAD telah memerintahkan kepada SKPD untuk mengajukan RKBMD pada saat Pengajuan Perencanaan Kebutuhan Barang sesuai dengan Pergub Kaltim no. 58 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. BPKAD telah melakukan rekonsiliasi terhadap Belanja Modal yang menjadikan aset guna pemenuhan MCSPKPK dan melaksanakan Permendagri no. 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Aplikasi SIPBMD.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			kualitas pengambilan keputusan rencana pengadaan barang.		
		5.	Gubernur memerintahkan Kepala Biro Umum melaporkan perkembangan penyerahan pengelolaan aset kepada BPKAD yang tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, agar Biro Umum fokus pada pengelolaan aset yang mendukung penyelenggaraan kesekretariatan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.	**Biro Umum**	1. Biro Umum telah menyatakan kesediaan menyerahkan pengelolaan aset kepada BPKAD melalui Surat Nomor 000.1.7.3/6305/B.Um-II tanggal 23 Juli 2024 2. Pengelolaan aset yang diidentifikasi untuk diserahkan meliputi : a. Masjid Nurul Mu'minin b. Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center c. Convention Hall Samarinda d. Guest House (Hotel Royal Suite) 3. Verifikasi data dan penyerahan dokumen pendukung telah dilakukan 4. Penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dan laporan perkembangan akan disampaikan secara berkala kepada Gubernur 5. Biro Umum memfokuskan pengelolaan aset yang mendukung fungsi kesekretariatan Pemprov. Kaltim

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		6.	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menugaskan Biro Hukum dan BPKAD menyusun Pergub tentang panduan pengadaan tanah dan percepatan sertifikasinya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.	**BPKAD dan Biro Hukum**	Sudah terbit Instruksi Gubernur Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Sertipikasi BMD berupa tanah.
		7.	Gubernur membuat kebijakan dan memerintahkan Kepala BPKAD Bersama Biro Hukum, Biro Perekonomian, dan BUMD terkait untuk merumuskan pola pengelolaan jangka pendek (segera) terhadap Hotel Atlit Sempaja Samarinda dan pola pengelolaan jangka panjang dengan menyiapkan tambahan anggaran (untuk bangunan, kelengkapan dan	**BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian**	Pada saat ini hotel atlet Sempaja Samarinda untuk jangka pendeknya menggunakan mekanisme penugasan kepada BUMD (PT KT MBS) sampai dengan ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan. Biro Hukum telah melakukan fasilitasi terhadap usulan pembentukan Peraturan Gubernur tentang Penugasan BUMD PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dalam pengelolaan wisma atlet.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			fasilitas lainnya untuk pemenuhan standar hotel, serta perijinan) dalam rangka kerjasama manajemen dan pemasaran (operator) dengan pihak ketiga yang professional yang memiliki pengalaman, jaringan manajemen dan pemasaran hotel tingkat nasional /internasional.		
		8.	Gubernur membuat kebijakan dan memerintahkan Kepala BPKAD bersama Biro Hukum, Biro Perekonomian, dan BUMD terkait untuk merumuskan pola pengelolaan jangka pendek (segera) terhadap Lahan dan Bangunan Mall Lembuswana yang akan berakhir Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS)	**BPKAD, Biro Hukum dan Biro Perekonomian**	BPKAD sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Biro Hukum dan Biro Ekonomi terkait : 1. Inventarisasi aset yang dimilki PT. CSIS yang akan serahkan ke Pemrov. Kaltim sesuai hasil BOT sesuai dengan hasil perjanjian; 2. Mekanisme dan alternatif yang direncanakan pola pengelolaan jangka pendek yaitu : Sewa, Retribusi Pemanfaatan dan Penugasan BUMD. Pengelolaan Jangka Pendek (Segera): • Melakukan inventarisasi dan penilaian (appraisal) atas aset tanah dan bangunan Mall Lembuswana. • Menyiapkan mekanisme serah terima aset dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. • Melakukan kajian hukum untuk mengantisipasi potensi

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			pada tahun 2026 dan menyusun pola pengelolaan jangka panjang dalam rangka pemanfaatan dan optimalisasi aset yang dapat menambah pendapatan daerah.		• Menetapkan skema pengelolaan sementara oleh BUMD atau unit kerja terkait untuk menjamin keberlangsungan operasional. Pengelolaan Jangka Panjang: • Menyusun roadmap pemanfaatan aset pasca 2026 dengan mempertimbangkan berbagai skema, antara lain: a. Kerjasama Pemanfaatan dengan pihak ketiga melalui mekanisme lelang terbuka. b. Pengelolaan langsung oleh BUMD dengan skema penyertaan modal atau pengelolaan mandiri. c. Skema sewa atau kerja sama Build Operate Transfer (BOT) yang berorientasi pada optimalisasi nilai tambah aset. d. Revitalisasi aset dengan melibatkan investor strategis yang tetap mengutamakan kepentingan daerah. • Mengutamakan peningkatan PAD melalui kontribusi tetap, sharing profit, maupun bentuk lain yang sah.
		9	Gubernur memerintahkan PT. Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya (Persero) untuk melaksanakan: a. menyampaikan laporan perkembangan proses hukum Perjanjian	**Biro Perekonomian dan PT. Melati Bhakti Satya**	Pemprov Kaltim bersama Direksi PT Kaltim MBS telah melakukan evaluasi perjanjian kerjasama antara Pemprov Kaltim dan PT Kaltim MBS dengan PT Pelindo IV (Persero) tentang Pengelolaan Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan oleh PT KKT diantraranya sebagai berikut : a. Berkaitan dengan pengelolaan PT KKT, bahwa PT MBS telah melakukan koordinasi kepada Kejaksaan Agung (terlampir Pendapat Hukum/LO Jaksa Agung Muda Dan Tata Usaha Negara tanggal 16 Mei 2025) untuk meminta pendampingan terhadap perubahan kontrak perjanjian antara Pemprov Kaltim dengan PT Pelindo yang meliputi : (1) Subyek hukum perjanjian; (2) Lingkup wilayah perjanjian kerjasama; (3) Mengenai jangka waktu perjanjian

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			Kerjasama Sama pemanfaatan Lahan Puskib dan perkembangan terkini hasil dari kerjasama pemanfaatan lahan Puskib Balikpapan. b. menyampaikan laporan perkembangan terkini perjanjian kerjasama bisnis pengelolaan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau dengan Pelindo, sesuai rekomendasi BPK Tahun 2024.		; (4) Lingkup manajemen pengelolaan anak perusahaan; (5) Penilaian aset; (6) Pemanfaatan aset selain penggunaan pelabuhan. b. Pemprov Kaltim melalui Biro Perekonomian memfasilitasi untuk menyelesaikan persamasalahan tersebut diantaranya melakukan Pembahasan Tindak Lanjut Kerjasama Pengelolaan Terminal Peti Kemas Kariangau Pelabuhan Balikpapan Antara Pemprov Kaltim, PT Kaltim MBS dan PT Pelindo pada tanggal 23 Mei 2025 (terlampir Berita Acara Rapat) dan selanjutnya PT Kaltim MBS bersurat kepada PT Pelindo sebagai tindak lanjut rapat tanggal 23 Mei 2025 (terlampir surat tindak lanjut tersebut). c. Berkenaan dengan poin a dan b diatas, Pemprov Kaltim telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan bersurat kepada PT Pelindo melalui surat Gubernur terkait usulan perubahan perjanjian kerjasama antara Pemprov Kaltim dan PT Kaltim MBS dengan PT Pelindo tentang Pengelolaan Terminal Kariangau Pelabuhan Balikpapan oleh PT KKT pada tanggal 23 Juli 2025 dan telah ditanggapi oleh PT Pelindo pada tanggal 17 November 2025 (terlampir Surat Usulan Gubernur Kaltim dan Tanggapan dari PT Pelindo). https://drive.google.com/drive/folders/1aSv9yaJxG96sTevXNgNhEt14h2IgpYP-?usp=sharing
		10.	Gubernur mengevaluasi keberlanjutan operasional PT. Kelistrikan Kalimantan Timur sesuai rekomendasi	**Biro Perekonomian dan PT Kelistrikan Kaltim**	Pemprov. Kaltim melalui Biro Perekonomian telah mengavaluasi keberlanjutan operasional PT Listrik Kaltim, adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu : a. Koordinasi kepada PT. Listrik Kaltim, DPRD Prov. Kaltim dan mengajukan kepada BPKP Perwakilan Prov. Kaltim untuk melakukan audit kepada PT Cahaya Fajar Kaltim namun BPKP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut karena PT

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			BPK Tahun 2024, serta memerintahkan PT. Kelistrikan Kalimantan Timur menyampaikan laporan perkembangan terkini rencana penarikan saham atau penjualan saham di PT. Cahaya Fajar Kalimantan Timur.		Cahaya Fajar Kaltim merupakan Perusahaan yang Sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak Swasta (terlampir Surat ke BPKP). b. Pemprov Kaltim melalui Biro Perekonomian telah melakukan penggantian Penggantian Direksi PT Listrik Kaltim untuk periode 2025-2030 melalui proses biding sebagai upaya untuk keberlanjutan operasional PT Listrik Kaltim (terlampir hasil pengumuman seleksi Direksi PT Listrik Kaltim). c. Biro Perekonomian bersama PT Listrik Kaltim telah melakukan monitoring ke PLTU Tanjung Batu Kukar dan bertemu dengan Direktur Operasional PT CFK selaku pengelola PLTU tersebut bahwa sesuai dengan penjelasan Dir Ops PT CFK bahwa hingga saat ini PT CFK terus berbenah memperbaiki akibat permasalahan PKPU beberapa waktu yang lalu yang dihadapi PT CFK sehingga berdampak terhadap pembagian deviden kepada PT Listrik Kaltim selaku salah satu pemegang saham, dan PT Listrik Kaltim hingga saat ini terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intens dengan manajemen PT CFK sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut (terlampir dokumentasi lapangan). d. Pemprov Kaltim melalui Biro Perekonomian merekomendasikan kepada PT Listrik Kaltim untuk mencari sumber pendapatan lain sebagaimana disampaikan pada rapat evaluasi TW 4 2023 (terlampir surat evaluasi tw 4 2023), dan di triwulan I maupun II 2025 telah ditindaklanjuti oleh manajemen PT Listrik untuk mendapatkan pendapatan lain salah satunya trading batubara dengan pola kemitraan tanpa menggunakan modal dari PT Listrik Kaltim untuk kebutuhan PLTU Tanjung Batu Kukar (terlampir Surat Sekda kepada PT Ketenagalistrikan terkait tindak lanjut evaluasi TW II 2025). e. Sebagai upaya kedepannya Biro Perekomian telah berkoordinasi dengan Dirut PT Ketangalistrikan yang baru agar PT. Ketenagalistrikan segera membuat Proposal penambahan modal

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					setor kepada Pemprov Kaltim selaku Pemegang Saham (terlampir Proposal Penguatan Modal Tahun 2025-2030 dari PT Listrik Kaltim). Sebelumnya juga telah dilakukan dengan manajemen lama di tahun 2023 untuk mengajukan permohonan penambahan penyertaan modal kepada Pemprov Kaltim dan dilakukan kajian kelayakan usaha kepada Perusda sebelum melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD. (terlampir Risalah RUPS PT Listrik yang menyatakan menyetujui penambahan modal setor dan tanda terima dan proposal Pemenuhan Modal ke BPKAD Prov Kaltim). https://drive.google.com/drive/folders/1aSv9yaJxG96sTevXNgNhEt14h2IgpYP-?usp=sharing
		11.	Gubernur memerintahkan Biro Perekonomian, Biro Hukum, Dinas Perindustrian dan PT. Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya (Persero) melakukan percepatan penyusunan Ranperda tentang pendirian BUMD KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (BUMD KEK MBTK).	**Biro Perekonomian, Biro Hukum, Disperindagkop, PT. Kalimantan Timur Melati Bhakti Satya**	- Dinas PPKUKM Prov. Kaltim dapat melakukan perumuskan kebijakan, mengoordinasikan perencanaan, memfasilitasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri (KEK MBTK) termasuk koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung berbagai hal yang dapat menguatkan proses pendirian BUMD KEK MBTK. - Dari hasil evaluasi Kemendagri diminta menyelesaikan Kajian dulu, yang melibatkan beberapa pihak termasuk Pemda Kutim yang belum menyelesaikan hitungan aset tanah. Jika kajian sudah selesai disampaikan ke Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi sebagai persyaratan pembentukan Perusda KEK MBTK, untuk di Perdakan. - Pihak Pemprov Kaltim melalui Biro Perekonomian Setda Prov.Kaltim sudah mengajukan Dokumen Kajian Pendirian BUMD PT. MBTK (Perseroda) ke Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi,

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					namun ada revisi ke 2 terhadap dokumen Kajian tersebut, saat ini masih dilakukan perbaikan dokumen Kajian tersebut, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri baru diajukan usulan Raperda Pendirian BUMD PT. MBTK (Perseroda) tersebut melalui Biro Hukum setda Prov.Kaltim ke DPRD Prov.Kaltim.
		12.	Gubernur memerintahkan Biro Perekonomian mengkaji gagasan untuk membentuk Perusahaan Induk BUMD satu rumpun bidang usaha dalam rangka penguatan modal dan SDM BUMD, misalnya satu Rumpun Perusahaan Bidang Perdagangan, Perkebunan dan Kehutanan; satu Rumpun Perusahaan Bidang Pertambangan Batubara dan Migas.	**Biro Perekonomian**	Kami akan menelaah dan mengkaji lebih terdahulu gagasan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan Pemprov Kaltim
		13.	Gubernur memerintahkan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bersinergi	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas PUPR**	Sinergi Dinas Pangan TPH dan Dinas PUPR PERA dalam Menyusun rencana pencetakan sawah yang terintegrasi dengan irigasi teknis, serta sarana dan prasarana pertanian lainnya mendukung kebijakan swasembada beras sebelum tahun 2029 sudah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			dengan Dinas PUPR PERA untuk menyusun rencana pencetakan sawah yang terintegrasi dengan irigasi teknis, serta sarana dan prasarana pertanian lainnya untuk mendukung kebijakan swasembada beras sebelum tahun 2029.		1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim telah melakukan inventarisasi usulan percetakan sawah dari Kab/Kota dan potensi cetak sawah di Kawasan non pertanian (kehutanan). 2. Tahun 2025, melalui sumber dana APBD pada Satker Dinas Pangan TPH Kaltim akan melaksanakan percetakan sawah seluas 1.890 Hektar. Lokus tersebar di 4 Kabupaten, yaitu di Kab. Paser, Mahakam Ulu, Kutai Timur dan Berau. Pembahasan berjenjang dilakukan melalui unsur Dinas PUPR PERA terkait sinkronisasi peta jaringan irigasi mendukung infrastruktur pengairan sesuai kewenangan PUPR PERA ke wilayah rencana percetakan sawah. 3. Selanjutnya dilakukan Survey Invenstigasi Desain (SID) Cetak Sawah dari bulan Juli – September 2025 menghasilkan SID Cetak Sawah seluas 1.050 Hektar untuk Kab. Kutim dan Kab. Paser. 4. Usulan pencetakan sawah tahun 2026 dari Kab. Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau dan Kutai Timur Tahun 2027-2028 pada Kawasan Non Pertanian/Kehutanan yang nantinya akan melibatkan Dinas Kehutanan, Dinas PUPR PERA, BPN/ATR Kaltim dan Calon Kabupaten pelaksana.
		14.	Gubernur memerintahkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM untuk menyusun rancangan pemanfaatan Gedung Galeri UKM di Balikpapan yang tepat	**Disperindagkop**	- Galeri UMKM Balikpapan dibangun dalam rangka menjalankan Tupoksi Dinas Perindagkop dan UKM, khususnya dalam hal pembinaan UMKM di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pembinaan dan pemberian fasilitas dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			fungsi dan sasaran, tanpa membebani APBD Provinsi Kalimantan Timur.		promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. - Galeri UMKM Balikpapan berfungsi sebagai outlet penjualan atau pusat oleh-oleh dari produk-produk UMKM se Kalimantan Timur yang sudah dikurasi dan juga sebagai sarana promosi untuk pasar lokal, nasional dan bahkan ekspor, dimana para pelaku UMKM dikenakan biaya sewa yang tidak memberatkan UMKM sesuai regulasi yang akan disusun sehingga memberikan daya saing yang kompetitif khususnya dari segi harga. - Disamping sebagai pusat oleh-oleh dan promosi produk UMKM, Bangunan Galeri juga difungsikan sebagai kantor EKSPOR CENTER dan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA BALIKPAPAN (BPSK). - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur akan merumuskan regulasi pemanfaatan Galeri UKM sebagai pusat promosi, pemasaran, display produk, edukasi, kurasi, dan ruang pemasaran digital bagi pelaku UMKM daerah. - Dimungkinkan beberapa space/area dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa/retribusi untuk membantu biaya operasional Galeri UMKM. - Untuk pengembangan Galeri UMKM dimungkinkan melakukan kerjasama dengan marketplace nasional/regional, lembaga pembiayaan mikro, inkubator bisnis, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		15.	Gubernur memerintahkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk membangun sinergitas dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dalam rangka memperkuat Program pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT), melalui pembentukan badan hukum misalnya Koperasi Merah Putih dan penyediaan bahan pokok untuk pakan ternak.	**Disperindagkop**	1. Dalam rangka memperkuat program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) dan mendukung pembentukan badan hukum korporasi DPKH telah membuat Komitmen Bersama dengan Disperindagkop UKM Prov. Kaltim Nomor 500.7/504/DPKH-I/Nomor 500.7.5/1760/DP2KUKM-I.1/2025 tentang *Sinergi Program Pembangunan Peternakan untuk Peningkatan Produksi, Pengolahan, Kelembagaan dan Pemasaran di Provinsi Kalimantan Timur*, melalui upaya: - Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas hasil peternakan yang berkualitas dan berdaya saing; - Mengembangkan industri pengolahan hasil peternakan yang bernilai tambah; - Memperluas akses pasar dan jejaring pemasaran produk peternakan baik di tingkat lokal, regional maupun internasional; - Memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM di subsektor peternakan; dan mendorong PDKT dalam beradaptasi di situasi nasional seperti memperkuat kemitraan melalui pendanaan diluar APBD, mendorong kolaborasi dan integrasi konsep PDKT dengan Koperasi Merah Putih. 2. Dalam rangka memperkuat Sinergitas Dinas Pangan TPH untuk mendukung penguatan Program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) ataupun kegiatan pembangunan peternakan kedepan oleh DPKH Prov. Kaltim, maka perlu dilakukan komitmen bersama dalam upaya kerjasama penyediaan bahan baku pakan ternak, meliputi: - Integrasi program ketahanan pangan dengan penyediaan sumber pakan berkelanjutan, seperti: jagung, kedelai, singkong, berdasarkan hitungan kebutuhan dan kriteria pakan ternak di Kaltim; - Peningkatan kapasitas petani dalam budidaya tanaman pakan;

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					- Pemanfaatan limbah hasil pertanian (dedaunan, limbah sayur, dan buah non-grade) sebagai tambahan pakan ternak; dan mendorong sistem *crop-livestock farming* di desa, yaitu hasil tanaman pangan dan hortikultura dimanfaatkan untuk ternak, sedangkan kotoran ternak diolah kembali menjadi pupuk organik untuk pertanian. - Seluruh Koperasi PDKT telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun kekurangan yang teridentifikasi adalah belum terlaksananya pelatihan koperasi secara menyeluruh (misalnya, selama satu hari penuh atau hingga tiga hari). Diharapkan agar pelatihan perkoperasian khusus ini dapat diselenggarakan oleh DPPKUKM untuk seluruh Koperasi PDKT se-Kalimantan Timur. - Saat ini sudah terbentuk 1037 KDMP/KLMP di 10 Kab/Kota dan dapat bermitra dengan PDKT untuk menunjang usahanya.
		16.	Gubernur selaku pemegang saham mayoritas PT. BPD Kalimantan Timur Kaltara, untuk segera menetapkan Komisaris Utama yang memiliki pengalaman mengelola perbankan daerah di Kalimantan Timur dan sertifikat ahli perbankan yang dipersyaratkan oleh OJK, guna mendorong	**Biro Perekonomian**	Pihak Pemprov Kaltim melalui pihak PT. BPD Kaltimtara sudah melakukan tahapan tahapan seleksi untuk calon komisaris utama dan saat ini tahapan terakhir oleh OJK

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			peningkatan pengawasan terhadap tata kelola dan menekan timbulnya *fraud* pada PT. BPD Kalimantan Timur Kaltara dalam rangka membangun bank pembangunan daerah yang sehat, kuat dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang lebih maksimal dan signifikan.		
	Sekretaris Daerah	**17.**	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah melakukan langkah tegas dan terukur untuk mengambil alih sepenuhnya aset Guest House Pemprov Kalimantan Timur (yang saat ini menjadi Hotel Royal Suite Balikpapan) dan memerintahkan Kepala Biro Umum	**Biro Umum**	1. Telah melaksanakan koordinasi dengan BPKAD dan Biro Hukum untuk memastikan status hukum dan proses pengambilalihan aset sesuai ketentuan. 2. Pengelolaan Guest House saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Balikpapan akibat wanprestasi Mitra Kerja Sama Pemanfaatan. 3. Biro Umum akan menyusun telaahan serta rencana teknis pengelolaan Guest House setelah adanya kepastian hukum. 4. Untuk proses hibah selanjutnya adalah menjadi Tugas dan Fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			untuk menyusun telaahan dan persiapan pengelolaan Hotel Royal Suite Balikpapan kembali menjadi fungsi semula yaitu Guest House (Mess) Pemprov Kalimantan Timur.		
		18.	Gubernur memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan percepatan saling hibah lahan yang ditempati hotel Royal Suite milik Pemerintah Kota Balikpapan dengan lahan Eks. Kantor Pembantu Gubernur Wilayah Selatan (Eks. Tugub) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.	**Biro Umum**	1. Telah melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum dan Jaksa sebagai Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kaltim, dalam pengambil alihan Pengelolaan aset Hotel Royal Suite, melalui mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan sesuai surat perjanjian. 2. Permasalahan pengelolaan Guest House melalui gugatan berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/4658-HK/BKM tanggal 28 Februari 2025, Gugatan Wanprestasi antara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat melawan PT. Timur Borneo Indonesia sebagai Tergugat di pengadilan, saat ini masih dalam proses upaya hukum banding yang diajukan oleh PT. Timur Borneo Indonesia selaku tergugat. 3. Setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas gugatan Pemprov Kaltim, terkait salah satu tuntutan adalah pengosongan Guest House oleh PT. Timur Borneo Indonesia dikabulkan. Maka Biro Umum akan mengembalikan fungsi awal Aset tersebut kembali menjadi Guest House.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		19.	Gubernur memerintahkan Dinas Pertanian Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyusun laporan mengenai data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, meliputi luasan LP2B per Kabupaten/Kota (ha), Lokasi (Kecamatan/Desa), peta dan titik koordinat tiap hamparan, dan mendata Perda/Perkada LP2B setiap Kabupaten/Kota.	**Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Penyusunan laporan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dari Kab/Kota se Kaltim mencakup luasan LP2B per Kab/Kota (ha), lokasi (Kecamatan/Desa), peta dan titik koordinat tiap hamparan dan mendata Perda/Perkada LP2B setiap Kab/Kota sudah dilakukan, sebagai berikut : 1. Inventarisasi data LP2B dari Kab/Kota Se-Kaltim berdasarkan : – Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B. – Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kaltim Tahun 2023-2042. – SK Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Baku Sawah Nasional Tahun 2024. Berdasarkan RTRW Kaltim tersebut, luas Kawasan Pertanian ± 3.469.408 Ha. KP2B seluas 41.975 Ha dan LP2B seluas 10.636,24 Ha. LP2B Kab/Kota yang dalam proses luasnya 5.784,01 Ha (Data Kab/Kota). 2. Penerbitan regulasi LP2B merupakan kewenangan Kab/Kota, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim mendukung dan telah melaksanakan pendampingan, pembinaan dan koordinasi secara tertulis dan lapangan melalui APBN dan APBD dengan kegiatan antara lain : – Pengendalian Alih Fungsi Lahan Skala Provinsi; – Fasilitasi dan pembinaan penyusunan dan pengelolaan LP2B dengan pihak Kab/Kota; – Monitoring dan Evaluasi capaian luas LP2B; – Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-256/HK.120/M/12/2024 Hal Percepatan Penetapan Perda LP2B; – Surat Gubernur Kaltim Nomor 500.6/1703/DPTPH-III/2024 tanggal 27 Desember 2024 Hal Tindak Lanjut Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B0;

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					– Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-193/SR.020/M/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Larangan Arih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Lain (Non Pertanian). 3. Perkembangan LP2B Kab/Kota berdasarkan regulasi sebagai berikut : o Perda Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2023-2042, luasan 1.012 Ha. o Perda Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Bontang Tahun 2019-2039, luasan 9,24 Ha. o Perda Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luasan 9.047 Ha (belum dilengkapi dengan peta Shp). o Peraturan Bupati Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang LP2B, luasan 2.311,10 Ha dan berbasis geospasial. o Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 520/K.119b/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, luasan LP2B 568 Ha dan luasan LCP2B 2.650,70 Ha. o Perda Kabupaten Kutai Timur LP2B dengan luas 2.764,01 Ha (proses sudah di Bagian Hukum). o KP2B Kabupaten Kutai Kartanegara luas 12.000 Ha (proses di Dinas Penataaan Ruang Kukar). o LP2B Kabupaten Kutai Barat proses revisi luasan menjadi 3.000 Ha. o LP2B Kota Balikpapan proses revisi penambahan menjadi 20 Ha (di Dinas PUPR Balikpapan). o LP2B Kabupaten Penajam Paser Utara masih proses tahap inventarisir wilayah.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		20	Gubernur memerintahkan BAPENDA melanjutkan upaya perjuangan ke Pemerintah Pusat untuk merevisi peraturan terkait **dana bagi hasil** atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Denda Administrasi, Penjualan Hasil Tambang (PHT), agar anggaran bagi hasil yang diterima daerah dapat lebih besar sehingga dapat digunakan juga untuk mengatasi dampak eksternalitas negatif yang diterima dari sektor kehutanan dan pertambangan di daerah penghasil.	**Bapenda**	Upaya Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dalam Memperjuangkan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) : a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Bapenda Prov. Kaltim telah bersurat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.14.3/10373/Bapenda-IV tanggal 15 Mei 2025 perihal Usulan Dana Bagi Hasil Sektor Minerba dari Penjualan Hasil Tambang. b. Telah diadakan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Guna Penguatan Fiskal Daerah” pada tanggal 09 Juli 2025 yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Perwakilan Gubernur Riau, Perwakilan Gubernur Sumatera Selatan, Perwakilan Gubernur Jawa Timur, Perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah, Perwakilan Gubernur Sulawesi Tenggara, Perwakilan Gubernur Maluku Utara, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Rapat koordinasi ini menghasilkan penandatanganan Komitmen Bersama sebagai bentuk dukungan terkait upaya-upaya untuk memperjuangkan dana bagi hasil sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. c. Bapenda Provinsi Kalimantan Timur saat ini sedang memproses pengajuan Nota Dinas kepada Gubernur terkait usulan DBH Sektor Kehutanan dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
	Sekretaris Daerah	**21.**	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah menyiapkan kajian dan langkah upaya	**Dinas Pariwisata, Dinas PUPR PERA, Dinas Lingkungan Hidup**	**Dinas Lingkungan Hidup :** a. Data pemantauan kualitas air Sungai dan kualitas air laut dapat dijadikan data rona awal untuk penyusunan kajian alur sungai Mahakam dan wilayah laut (0–12 Mil) berdasarkan Peraturan

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			untuk dapat mengelola alur sungai Mahakam, alur sungai lainnya, serta wilayah laut 0-12 mil yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian untuk pariwisata, sumber air baku, pengendali banjir, sumber keseimbangan biota air dan lingkungan bagi perikanan air tawar.		Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1) KLH, DLH Prov. Kaltim dan DLH Kota Samarinda secara rutin telah melaksanakan pemantauan kualitas air Sungai Mahakam sebanyak 2 kali dalam setahun, dimana untuk titik pemantauan kualitas air yang dilaksanakan sebagai berikut: ✓ KLH sebanyak 5 titik (Titik Melak; Muara Pahu; Batuq; Muara Muntai; Kota Bangun) ✓ DLH Prov. Kaltim sebanyak 10 titik (Titik Nyan; Batoq Kelu; Long Bagun; Tering; Bloro; Kumala; Kalamur; Kantor Gubernur; Palaran; Anggana). ✓ DLH Kota Samarinda sebanyak 3 titik (Mahakam Intake Selili; Mahakam Hilir Pulau Atas; Mahakam Hulu Dermaga Loa Janan) ✓ Seluruh titik pantau hasil uji dari laboratorium lingkungan masih didominasi dengan status mutu air adalah Cemar Ringan berdasarkan Kepmen LH Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 2) DLH Prov. Kaltim secara rutin telah melaksanakan pemantauan kualitas air laut sebanyak 2 kali dalam setahun, dimana untuk titik pemantauan kualitas air laut yang dilaksanakan 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota yang memeliki pesisir laut sebanyak 26 titik: ✓ Kabupaten Berau sebanyak 2 titik ✓ Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3 titik; ✓ Kota Bontang sebanyak 4 titik; ✓ Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 6 titik; ✓ Kota Balikpapan sebanyak 7 titik; ✓ Kabupaten Penajam Paser Utara 3 titik; ✓ Kabupaten Paser 1 titik.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					✓ Seluruh titik pantau hasil uji dari laboratorium lingkungan masih didominasi dengan kriteria Baik berdasarkan Permen LH No. 4 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. b. Terkait pengelolaan alur Sungai Mahakam, salah satu yang dapat dilakukan melalui pengerukan sedimen sungai untuk meningkatkan kapasitas daya tampung Sungai Mahakam (untuk pengendali banjir) dan memperbaiki alur transportasi Sungai Mahakam (peningkatan perekonomian). Dengan demikian diharapkan akan turut mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan PAD. c. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pengerukan alur sungai tersebut diperlukan Persetujuan Lingkungan atas rencana kegiatan dimaksud. Dimana Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim merupakan OPD yang salah satu tugasnya adalah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. d. Terkait kewenangan proses penilaian Persetujuan Lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, dimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, bahwa Gubernur berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di perairan darat dengan ketentuan berupa sungai dan/atau danau yang melintas atau melingkupi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi), dan/atau berlokasi di perairan laut dengan ketentuan tapak proyek yang berada di perairan laut diukur dengan jarak kurang dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					e. Untuk menyusun Persetujuan Lingkungan terkait kegiatan pengerukan alur Sungai Mahakam, diperlukan kajian dasar diantaranya: 1) Kajian Bathimetri untuk memetakan topografi, kedalaman, dan bentuk dasar perairan (sungai dan laut) guna mendukung keselamatan navigasi, pembangunan infrastruktur, pemodelan oseanografi, serta manajemen sumber daya air sungai/laut, dan menghitung volume pengerukan sedimen yang dibutuhkan; 2) Survey lokasi dan penetapan area penumpukan hasil pengerukan sedimen sungai; 3) Rekomendasi teknis dari BWS Wilayah IV Samarinda terkait rencana kegiatan pengerukan Sungai Mahakam; 4) Advis teknis dari KSOP Kelas I Samarinda; 5) Advis teknis dari Distrik Navigasi Kelas I Samarinda. f. Sementara untuk Persyaratan Dasar yang wajib dimiliki dalam proses Persetujuan Lingkungan, diantaranya: 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk area darat dan sungai 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk area laut 3) Persetujuan awal (Rekomtek BWS Wilayah IV)

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		22.	Gubernur memerintahkan BAPENDA melakukan pemutakhiran sistem yang mampu mendeteksi otomatis adanya wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan lebih dari satu atau berpotensi dikenakan pajak progresif, khususnya UPTD PPRD Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Barat, Paser dan Kutai Timur.	**Bapenda**	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemutakhiran system di aplikasi samsat yang terintegrasi dengan Electronic Registration and Identification (ERI), atau Sistem Pendaftaran dan Identifikasi Elektronik, yang dikembangkan oleh Korlantas POLRI dengan menambahkan kolom (field) baru yaitu Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang merepresentasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pemilik kendaraan dalam database kesamsatan. Dengan adanya penginputan data NIK pada saat pendaftaran kendaraan bermotor maka wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan mudah dapat dideteksi
		23.	Gubernur memerintahkan BAPENDA berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk segera menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat yang NJABnya belum ditetapkan dalam Permendagri Nomor 8	**Bapenda dan Biro Hukum**	Telah ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Jual Alat Berat belum ditetapkan dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 dan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			Tahun 2024 dan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Tahun 2024		
		24.	Gubernur memerintahkan BAPENDA meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait kewajiban setiap wajib Pajak Alat Berat atau agen Tunggal pemegang merk alat berat untuk mendaftarkan alat berat mereka masing-masing kepada Bapenda dalam rangka penyusunan database Pajak Alat Berat.	**Bapenda**	Sosialisasi Pajak Alat Berat telah dilakukan Bapenda Provinsi dan UPTD PPRD se Kalimantan Timur dengan melibatkan unsur Kejaksaan dan Kepolisian kepada perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan serta kepada agen tunggal pemegang merk.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		25.	Gubernur memerintahkan BAPENDA membentuk Gugus Tugas dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Pajak Alat Berat, serta optimalisasi PKB dan PBBKB. Gugus Tugas tersebut terdiri dari: a. Unsur Perangkat Daerah yang terkait b. Komisi II DPRD Kalimantan Timur c. Kepolisian, dan d. Kejaksaan	**Bapenda**	Bapenda telah membentuk dan mengusulkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pendataan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dengan melibatkan unsur forkompimda dan OPD terkait.
		26.	Gubernur memerintahkan Direksi PT. MMP-KT untuk melakukan upaya serius menyelesaikan piutang dan uang muka Kerjasama yang mengalami permasalahan hukum sesuai rekomendasi BPK, dan	**Biro Perekonomian, Biro Hukum, PT. MMP-KT**	Monitoring terhadap penyelesaian piutang dan uang muka kerjasama yang mengalami permasalahan hukum pada PT MMPKT adapun upaya yang dilakukan berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk melakukan penagihan terhadap Piutang PT MMPKT. Selain itu PT MMPKT telah memiliki SOP untuk Kerjasama dan kemitraan sehingga mengurangi tingkat risiko kegagalan dan memudahkan melakukan penelusuran dalam hal terjadinya ketidakberhasilan dalam Kerjasama dan kemitraan yang dilakukan (terlampir SOP Kerjasama Kemitraan oleh PT MMPKT dan Perjanjian Kerjasama antara PT MMPKT dengan Kejati Kaltim).

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			memberikan sanksi/hukuman kepada direksi bila tidak tuntas dalam jangka waktu yang diperjanjikan.		https://drive.google.com/drive/folders/1aSv9yaJxG96sTevXNgNhEt14h2IgpYP-?usp=sharing
		27.	Gubernur memerintahkan Kepala Biro Perekonomian segera melakukan evaluasi penyajian penyertaan modal pemerintah pada PT. Agro Kalimantan Timur Utama.	**Biro Perekonomian**	Terkait mengevaluasi penyajian penyertaan modal pemerintah pada PT Agro Kaltim Utama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemprov Kaltim melalui Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap nilai kekayaan PT Agro Kaltim Utama. Selain itu, dilakukan pembahasan oleh Biro Perekonomian dengan melibatkan BPKP, DJKN, BPKAD, dan Biro Hukum untuk menindaklanjuti kelanjutan PT Agro Kaltim Utama (terlampir notulen rapat). https://drive.google.com/drive/folders/1aSv9yaJxG96sTevXNgNhEt14h2IgpYP-?usp=sharing

C. REKOMENDASI MITRA BIDANG KOMISI III

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral dan Migas, serta Administrasi dan Pembangunan.	**Sekretaris Daerah**	**1.**	Gubernur memerintahkan Kepala Biro Administrasi Pembangunan melaksanakan sebagai berikut: a. menyampaikan tembusan laporan setiap hasil monitoring pembangunan per semester kepada DPRD sebagai bahan pengawasan oleh Komisi-Komisi di DPRD. b. Menyampaikan perkembangan upaya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perumusan SOP mekanisme pemberian uang muka terhadap penawaran dengan selisih di atas 15 persen dari HPS, dalam rangka mencegah ekses negatif dari niat penyedia yang tidak bertanggungjawab dan tak berintegritas.	**Biro Adbang**	a. Biro Adbang akan menyampaikan hasil Radalok (Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan) per semester kepada DPRD. b. SOP mekanisme pemberian uang muka dalam proses kajian awal. Proses perumusan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait akan dilaksanakan pada tahun 2026.
		2.	Gubernur memerintahkan Kepala BAPPEDA bersama Kepala Dinas PUPR PERA untuk Menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan biaya pemeliharaan rutin dan berkala per tahun untuk semua ruas jalan provinsi, jembatan, saluran *drainase*,	**BAPPEDA dan Dinas PUPR PERA**	Terkait pemeliharaan saluran irigasi sudah terdapat kajian Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (OP) tahun 2024 di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi. **UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah I, II, dan III** :

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			longsoran, saluran irigasi, dan bangunan ke PU-an lainnya untuk perencanaan tahun 2026 s/d 2030 sebelum Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.		Dalam melakukan peyusunan estimasi biaya UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, II dan III telah melakukan survey dan pengumpulan data kondisi fisik infrastruktur saat ini di lapangan pada Wilayah Kerja I (Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU), wilayah kerja II (Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahulu,) dan Wilayah kerja III (Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), termasuk volume kerusakan, tingkat kebutuhan perawatan, dan estimasi biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan rutin dan berkala dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan maupun saluran Irigasi dan drainase pada tahun anggaran 2026 s/d 2030 dan telah dicatatkan dalam Rencana Strategis UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I, II dan III.
		3.	Gubernur memerintahkan Kepala Dinas PUPR PERA menyusun *Data Base* dan *Master Plan* Jaringan Jalan Provinsi dan Jembatan.	**Dinas PUPR PERA**	Masterplan Jaringan Jalan Provinsi telah disusun pada tahun 2025
		4.	Gubernur memerintahkan Kepala Dinas PUPR PERA menyampaikan laporan mengenai perkembangan kinerja perawatan Jalan dan Jembatan, Drainase, Irigasi, dan longsoran pada Wilayah I, II dan III dalam rangka merumuskan kebijakan kebutuhan anggaran	**Dinas PUPR PERA**	Dinas PUPR PERA telah menyampaikan laporan perkembangan kinerja perawatan Jalan dan Jembatan, Drainase, Irigasi, dan longsoran pada Wilayah I, II dan III. Dan telah merumuskan kebijakan kebutuhan anggaran tahun 2025 s/d 2030 yang tertuang dalam dokumen Renstra 2025 - 2029.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			tahun 2025 s/d 2030.		
		5.	Gubernur memerintahkan Kadis PUPR memaksimalkan peran UPTD PUPR agar lebih responsif dalam perawatan Jalan dan Jembatan, Drainase, Irigasi, dan longsoran pada Wilayah I, II dan III.	**Dinas PUPR PERA**	Dinas PUPR PERA telah menyampaikan laporan perkembangan kinerja perawatan Jalan dan Jembatan, Drainase, Irigasi, dan longsoran pada Wilayah I, II dan III. Dan telah merumuskan kebijakan kebutuhan anggaran tahun 2025 s/d 2030 yang tertuang dalam dokumen Renstra 2025 - 2029.
		6.	Gubernur memerintahkan Kepala Bappeda Bersama Kepala BRIDA menyampaikan laporan mengenai perkembangan koordinasi dan sinergitas hasil riset dan inovasi dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pembangunan 2025 s/d 2030 yang akurat dan komprehensif di Kalimantan Timur.	**BAPPEDA dan BRIDA**	Telah menyampaikan hasil riset tahun 2021-2024 ke Bappeda oleh BRIDA dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah baik RPD 2024-2026 maupun RPJMD 2025-2029. Sehingga dalam dokumen RPJMD Kaltim tahun 2025-2029, telah dimuat strategi pembangunan daerah yang mengedepankan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan hasil Litbang, baik yang telah disusun maupun yang akan disusun.
		7.	Gubernur memerintahkan Kepala Dinas PUPR PERA menyampaikan laporan mengenai perkembangan pembangunan ruas jalan, marka dan rambu-rambu jalan yang dikerjakan oleh PT. GAM, sebagai pengganti yang setara jalan provinsi (**jalan aspal atau jalan rigid**) yang ditambang oleh PT GAM sesuai perjanjian dengan Pemprov Kalimantan	**Dinas PUPR PERA**	Berkaitan dengan ruas jalan pengganti di ruas Jalan Sp. Kaliorang – Bts Berau yang dikerjakan oleh PT. GAM, dapat disampaikan bahwa ruas jalan pengganti tersebut lebih baik kondisinya dibandingkan dengan ruas jalan eksisting dan telah sesuai dengan standar jalan yang diminta oleh Dinas PUPR PERA.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			Timur.		
		8.	Gubernur memerintahkan Dinas PUPR-PERA untuk segera menyelesaikan Pembangunan Jembatan Sei Nibung dan dioperasikan pada tahun 2025, termasuk Pembangunan Jalan Pendekat dan Jaringan jalan penghubung ke Jembatan Sei Nibung karena jembatan ini merupakan penghubung Kabupaten Kutai Timur dan Berau.	**Dinas PUPR PERA**	Berkenaan dengan penyelesaian Jembatan Sungai Nibung, dapat disampaikan bahwa pekerjaan konstruksi Jembatan Sungai Nibung tuntas di tahun 2026.
		9.	Gubernur memerintahkan Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas PUPR PERA menyampaikan laporan mengenai perkembangan penyusunan rencana alokasi anggaran dan 618anjang penanganan yang mampu ditangani tiap tahun dalam rangka mendukung pembangunan jalan (non status) Tering – Ujoh Bilang Tahun 2026-2029 serta memastikan terbangunnya bandara di Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Ulu.	**Bappeda dan Dinas PUPR PERA**	Berkenaan dengan pembangunan ruas Jalan Tering – Ujoh Bilang, dapat disampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Dinas PUPR PERA Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 17,5 km. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan pembangunan lanjutan sepanjang 5,5 km, termasuk penanganan titik-titik longsoran yang terdapat pada ruas jalan tersebut guna meningkatkan kemantapan jalan dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Adapun terkait dukungan pendanaan melalui APBN, dapat diinformasikan bahwa pada Tahun 2026 terdapat alokasi kegiatan rehabilitasi jalan aspal dan

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					jalan tanah pada ruas Jalan Tering – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai, sehingga diharapkan penanganan ruas tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal dan ditargetkan tuntas di tahun 2027. Terkait dengan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran di Tahun 2025 untuk pembangunan sisi darat
		10.	Gubernur memerintahkan Kepala BAPPEDA Bersama Kepala BPBD menyampaikan laporan mengenai informasi perkembangan rencana kegiatan studi kelayakan untuk mendapatkan titik lokasi Pembangunan Kantor BPBD Kalimantan Timur yang mudah dan cepat diakses alternatif melalui alur Sungai dan Jalan darat ketika terjadi bencana.	**Bappeda dan BPBD**	1. Dalam Rencana Strategis BPBD Prov. Kaltim 2025-2029, belum menganggarkan kegiatan studi kelayakan untuk mendapatkan titik lokasi pembangunan kantor BPBD Kalimantan Timur, dikarenakan anggaran yang tersedia dioptimalkan pada upaya pengurangan risiko bencana, yang setiap tahunnya Provinsi Kalimantan Timur wajib menurunkan 5 (lima) point pertahunnya. 2. Sebagai refrensentatif terhadap kelayakan meliputi Respon Time Penanganan, Jalur Koordinasi, dan Akses Mobilitas, maka kami usulkan sebagai tahap awal jika adanya penambahan anggaran untuk kegiatan studi kelayakan sebagimana yang dimaksud : a. Usulan lokasi berada di 3 lokasi yaitu Bandara Temindung, Jalan Perjuangan 7 (Samping Gudang BPKAD) dan Lahan Eks. Rumah Sakit Jiwa. b. Bahwa lokasi yg dimaksud sudah merupakan asset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					c. Dalam melaksanakan aktivitas operasional BPBD dekat dengan pusat pemerintahan yaitu Kantor Gubernur dan kantor pemerintahan lainnya. d. Lokasi relatif jauh dari lokasi perkampungan sehingga dalam melaksanakan aktivitas tidak menggangu masyarakat, serta akses menuju kantor relatif cepat terutama untuk lokasi Bandara Temindung dan samping Gudang BPKAD di Jl. Perjuangan 7, sedangkan untuk lokasi Eks. Rumah Sakit Jiwa Akses dalam penanggulangan bencana mudah diakses melalui darat dan sungai dekat dengan Sungai Karang Mumus dan Sungai Mahakam, e. Luas tanah yg tersedia dari lokasi tersebut sangat memadai untuk standar pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur f. pembangunan gedung di lokasi tersebut pada saat tahap pembangunan tidak memerlukan biaya tambahan seperti pematangan lahan (land clearing dan atau penimbunan) dikarenakan merupakan bekas bangunan lama.
		11.	Gubernur mengevaluasi kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait permasalahan banyaknya pemenang lelang tidak berintegritas dan tidak bertanggung jawab, sehingga	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	1. Persyaratan Administrasi/Kualifikasi secara teknis disusun oleh PPK, sehingga Pokja terbatas dalam menentukan Kualitas pemenang dalam proses pemilihan; 2. Perencanaan dan Pengendalian Kontrak tidak melibatkan Fungsional Pengelola Pengadaan

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			muncul ekses pekerjaan kurang berkualitas, dan banyak pekerjaan yang putus kontrak.		Barang/Jasa (Fungsional PPBJ) yang memiliki Kompetensi sesuai Sertifikasi LKPP; 3. Untuk Tahun 2026 Gubernur akan mengeluarkan edaran yang menetapkan Fungsional PPBJ yang tersertifikasi LKPP sebagai Tim Teknis, Tim Ahli, dan/atau Tim Pendukung PA/KPA/PPK SKPD di Lingkungan Pemprov Kaltim untuk mengoptimalkan Perencanaan dan Pengendalian Kontrak.
	Sekretaris Daerah	**12.**	Terkait banyaknya pekerjaan yang putus kontrak, Gubernur mengeluarkan kebijakan mitigasi dan memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR PERA dan Inspektorat untuk menerapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat 5 huruf (i) untuk percepatan penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas akibat putus kontrak pada tahun 2024, antara lain pekerjaan yang ditemukan saat uji petik di UMKT Tanah Grogrot, SMKN 1 Babulu Darat, dan SMKN 2 Sangatta Utara	**Dinas PUPR PERA dan Inspektorat**	Penerapan pasal 38 ayat (5) Perpres No. 12 Tahun 2021 dapat diterapkan pada pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang putus kontrak sepanjang proses dan prosedurnya mengikuti ketentuan yang di atur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Untuk Pekerjaan UMKT Tanah Grogot akibat dari penyedia gagal menyerahkan jaminan akhir tahun anggaran dan melakukan pengembalian sisa uang muka secara keseluruhan sedangkan realisasi progress baru mencapai 50 %, maka dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 31 Desember 2024. sehingga tidak dimungkinkan menunjuk penyedia lainnya untuk melanjutkan penyelesaian pekerjaan. Dinas PUPR PERA telah mengusulkan kembali kegiatan Pekerjaan UMKT Tanah Grogot pada tanggal 23 Mei 2025 sebagai usulan tambahan perubahan RKPD Tahun 2025 namun dengan kondisi kemampuan keuangan Pemprov Kaltim kegiatan tersebut tidak teralokasikan anggarannya

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		13.	Gubernur memerintahkan Dinas PUPR PERA menyampaikan laporan mengenai seluruh pekerjaan fisik tahun 2024 yang belum mencapai 100 persen.	**Dinas PUPR PERA**	Dinas PUPR PERA telah menyampaikan Laporan Penyelesaian atas Kegiatan-kegiatan Fisik tahun 2024 yang belum mencapai 100 persen
		14.	Gubernur meminta Dinas PUPR PERA berkoordinasi dengan BBPJN terkait rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang untuk mempercepat realisasi pembangunannya.	**Dinas PUPR PERA**	Dinas PUPR PERA melalui bidang Bina Marga akan berkoordinasi dengan BBPJN terkait dengan percepatan Pembangunan Jalan Tol Samarinda - Bontang.
		15.	Gubernur memerintahkan Dinas PUPR PERA memperbaiki atau berkoordinasi dengan Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional atau berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Samarinda, sesuai dengan kewenangan pengelolaan jalan dalam wilayah Kota Samarinda yang tergenang air pada saat air laut pasang dan terjadi bertahun-tahun hingga kini, sehingga mengakibatkan kemacetan lalulintas dititik tersebut, meliputi titik di Jalan Gajah Mada seberang jalan depan Markas Korem 091/ASN, titik di Jalan Gajah Mada seberang depan kantor Gubernur, titik di jalan Slamet Riyadi turunan	**Dinas PUPR PERA**	Dinas PUPR PERA melalui bidang Bina Marga akan berkoordinasi dengan BBPJN dan Pemerintah Kota /Kabupaten terkait dengan percepatan perbaikan ruas jalan nasional dan ruas jalan kabupaten/kota khususnya ruas jalan yang padat masyarakat dan berada di daerah perkotaan. Genangan Banjir di kawasan tersebut masuk dalam Daerah Aliran Sungai Karangmumus dan Pemerintah Provinsi telah melakukan intervensi penanganan banjir di Kota Samarinda dengan melakukan normalisasi sungai Karangmumus.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			jembatan pertigaan Antasari-RE Martadinata, dan titik di Jalan Slamet Riyadi sebelum taman tepian – setelah dekat depo Pertamina di Sungai Mahakam, titik sekitar citra niaga, titik di jalan Dr. Sutomo dekat Gang Nibung, titik di jalan S. Parman dekat The Hotel, titik di Jalan Gatot Subroto dari Hotel Golden s/d Jembatan JB, titik di Jalan Ahmad Dahlan depan SMKN – sampai Jembatan Lambung Mangkurat, titik di Jalan Diponegoro Depan Hotel Senyiur, titik di jalan Agus Salim depan Hotel JB.		
		16.	Gubernur memerintahkan BAPPEDA untuk menyusun dokumen tahunan hasil survei tingkat layanan infrastruktur per wilayah kabupaten/kota se Kalimantan Timur, juga keseluruhan wilayah Kalimantan Timur, yang menggambarkan layanan infrastruktur yang bersifat komprehensif, sesuai dengan narasi yang disampaikan Pansus LKPJ dan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Dan	**Bappeda**	Dalam dokumen RPJMD Prov. Kaltim 2025 – 2029 terdapat sasaran “terbangunnya infrastruktur berkualitas” dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) yang menggambarkan kinerja layanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, dan ketenagalistrikan. Metode perhitungan IKLI didapat dari peumbobotan capaian indiaktor prioritas urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, dan ketenagalistrikian. Bappeda akan melaporkan capaian IKLI setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan kepada Fraksi Dewan yang terhormat.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			melaporkan tiap tahun hasil survey kepada Gubernur dan tembusan laporan kepada DPRD.		
		17.	Gubernur memerintahkan BAPPEDA untuk Menyusun dokumen metadata Indikator pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk kebutuhan evaluasi pembangunan periode 2025 – 2029, yang terinci atas Institusi penghasil atau penyedia data, definisi indikator, interpretasi, metode/rumus penghitungan indikator, ukuran atau satuan, judul publikasi, tahun data tersedia, level estimasi, dan frekwensi pengumpulan data. Dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur dan tembusan laporan ke DPRD.	**Bappeda**	Bappeda telah menyusun buku metadata RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang memuat mengenai nama indikator, definisi operasional, rumus perhitungan, interpretasi, dan sumber data. Buku metadata ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan capaian kinerja dalam proses evaluasi pembangunan daerah tahun 2026-2030. Buku metadata ini selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur dan ditembuskan ke DPRD.
	Sekretaris Daerah	**18.**	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah untuk membuat kebijakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung diserahkan kepada Dinas PUPR-PERA, kecuali pekerjaan rehabilitasi gedung dapat diserahkan kepada Perangkat Daerah yang tidak memiliki tugas	**Bappeda**	Akan ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pelaksanaan pembangungan Gedung diserahkan ke Dinas PUPR-PERA.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			pokok dan fungsi teknis bangunan gedung.		
		19.	Gubernur memerintahkan BAPPEDA dan Biro Organisasi mengawal dan mendampingi penyusunan dokumen renstra perangkat daerah yang sinkron dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD 2025 – 2029, sejalan dan mendukung 7 kegiatan unggulan program Gratispol dan 9 arah kebijakan program Jospol.	**Bappeda dan Biro Organisasi**	Bappeda telah melakukan upaya pengendalian sinkronisasi muatan RENSTRA PD bersama dengan seluruh perangkat daerah sesuai dengan amanat Permendagri no. 86 tahun 2017 dan Inmendagri 2 Tahun 2025. Disamping itu, Bappeda juga telah melibatkan Inspektorat Kaltim untuk melakukan Reviu terhadap rancangan akhir Renstra PD sebelum ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah maupun Program Unggulan Gratispol dan Jospol telah tersinkronisasi di dalam RPJMD Kaltim Tahun 2025-2029.

D. REKOMENDASI MITRA BIDANG KOMISI IV

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Lingkungan Hidup, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah.	**Sektretaris Daerah**	**1.**	Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan BPKAD melaporkan perkembangan per semester kepada Gubernur dan tembusan laporan kepada DPRD mengenai hasil penyusunan *database* jumlah bidang tanah, luasan, status tanah dan perkembangan penyerahan/ pengurusan surat tanah masing-masing sekolah SMKN, SMAN dan SLB per wilayah Kabupaten/Kota.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan & BPKAD**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk membuat Database jumlah bidang tanah, luasan, status tanah dan perkembangan penyerahan/pengurusan surat tanah masing-masing sekolah SMKN, SMA dan SLB per wilayah Kabupaten/Kota yang telah selesai penyerahan Kota Bontang tahun 2025 dengan Berita Acara Serah Terima Lanjutan P3D No. 134.4.03/55/PEM/2025 dan No. 100.1/15534/B.POD-II/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dan Kabupaten Panajam Paser Utara direncanakan bulan Februari tahun 2026. Database jumlah bidang tanah, luasan, status tanah dan perkembangan penyerahan/pengurusan surat tanah masing-masing sekolah SMK, SMA dan SLB per wilayah Kabupaten/kota per semeste dapat diunduh melalui tautan link pendukung : ***http://tiny.cc/qmvt 001***
		2.	Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan mengenai penyusunan data sebaran jumlah SMA Negeri dan SMA swasta, SMK Negeri dan SMK swasta, SLB di masing-masing	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	Bersama ini terlampir kami kirimkan Data Sebaran Jumlah SMA, SMK dan SLB Negeri dan Swasta pada masing-masing Kecamatan per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur beserta rasio jumlah penduduk tingkat usia sekolah terhadap jumlah sekolah per kecamatan di seluruh Kabupatan/Kota di

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			Kecamatan per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, serta rasio jumlah penduduk tingkat usia sekolah terhadap Jumlah sekolah Negeri dan Swasta (termasuk jumlah ruang kelas) per kecamatan di seluruh Kabupaten/Kota.		Kalimantan Timur. Laporan dapat diunduh melalui link pendukung : ***http://tiny.cc/qmvt 001***
	Sekretaris Daerah	**3.**	Gubernur memerintahkan Sekretaris Daerah bersama Dinas Kesehatan menyampaikan laporan mengenai kebijakan, program/kegiatan, dan percepatan aksi pemenuhan 7 jenis dokter spesialis (4 spesialis utama dan 3 spesialis penunjang) di Rumah Sakit Umum Daerah.	**Dinas Kesehatan**	Terkait percepatan aksi pemenuhan 7 dokter Spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang) Dinas Kesehatan Provinsi telah mengalokasikan anggaran pengadaan Jasa Tenaga Kesehatan dalam sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan (Pemberian Insentif bagi Dokter Spesialis), yang saat ini sedang berproses untuk dasar hukum/payung hukum yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat yakni dengan Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Penugasan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten/Kota (draft telah dibahas bersama dengan Biro POD Prov, Biro Kerjasama Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan RS Milik Pemerintah Daerah), selanjutnya dilaksanakan Pertemuan Penandatanganan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota pada 15 September 2025 di Hotel Aston Samarinda
		4.	Gubernur mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan Sekretaris Daerah bersama Dinas	**Dinas Kesehatan**	Terkait penempatan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
			Kesehatan menyampaikan laporan mengenai kebijakan, program/kegiatan, dan percepatan aksi penempatan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.		lanjut, yang selama ini sudah berjalan yakni melalui program kemenkes RI Seperti Penugasan Khusus Individu, Program Afirmasi dokter dan Dokter Gigi, dan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (untuk Provinsi Kalimantan Timur belum disusun kebijakan terkait hal tersebut)
		5.	Gubernur mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pemenuhan dokter, tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana guna menunjang pemenuhan persyaratan akreditasi tingkat internasional di RSUD Provinsi Kalimantan Timur.	**Dinas Kesehatan, BKD, Biro Organisasi**	Pemenuhan Sarana & Prasarana bagi RS milik Pemprov telah dilakukan melalui usulan APBD & APBD P tahun 2025 dan APBD 2026, regulasi pemenuhan SPA sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI dengan Permenkes 31 tahun 2018. Regulasi terkait Akreditasi Rumah Sakit secara nasional maupun internasional telah diatur dalam Permenkes 12 tahun 2020.
		6.	Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan perusahaan agar memberikan bantuan kendaraan dan alat berat bekas yang sudah tidak terpakai untuk dihibahkan kepada SMKN sebagai bahan praktikum.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim telah mendapat bantuan proses alih status Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dengan beberapa perangkat daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai bahan praktik kerja siswa di SMK. BAST dapat diunduh melalui tautan link pendukung : ***http://tiny.cc/qmvt 001***

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		7.	Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk SMKN unggulan di Kalimantan Timur sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan dunia kerja.	**Dinas Pendidikan dan kebudayaan**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini menyiapkan draft peta pengembangan SMK berbasis geospasial dan geoekonomi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sependapat dengan pandangan Tim Pansus LKPJ Gubernur untuk mengembangkan SMK sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan dunia kerja.
		8	Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendata dan menindaklanjuti kebutuhan penambahan daya Listrik yang belum tercukupi di SMKN di Kalimantan Timur, seperti di SMKN 3 Babulu.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	Data kebutuhan penambahan Daya listrik sudah kami petakan termasuk sekolah-sekolah di PPU seperti SMKN 3 PPU, hanya masih terkendala efisiensi anggaran sehingga belum bisa kami realisasikan.
		9.	Gubernur memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan dan segera memenuhi kebutuhan alat medik dan meubelair Gedung Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan agar segera dibuka dan diresmikan oleh Gubernur untuk melayani masyarakat padan akhir tahun 2025.	**Dinas Kesehatan**	Dinas Kesehatan dengan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo akan melakukan 1. Pendataan Kebutuhan Alat Medik dan Meubelair untuk melakukan inventarisasi rinci kebutuhan alat kesehatan penunjang pelayanan jantung terpadu, termasuk peralatan diagnostik, intervensi, rawat intensif, serta alat pendukung lainnya. Daftar kebutuhan meubelair untuk ruang pelayanan, ruang rawat, ruang tunggu, serta ruang administrasi telah disusun sesuai standar pelayanan kardiovaskular. 2. Penyusunan Rencana Pemenuhan yang akan dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan telah diajukan untuk penganggaran melalui APBD Perubahan 2025 serta diusulkan

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					pada APBD Tahun Anggaran 2026 serta melakukan kajian prioritas pemenuhan alat medik utama yang harus tersedia sebelum peresmian, seperti Cath Lab, echocardiography, treadmill test, ventilator ICU, serta sistem monitoring pasien. 3. Proses Pengadaan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk efisiensi waktu, pengadaan meubelair direncanakan melalui e-katalog nasional/daerah.
		10.	Gubernur memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Guru/P3K untuk SLB yang tidak linier atau belum sesuai dengan aturan tenaga pengajar SLB.	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	Dinas Pendidikan telah membuat Nota Dinas terhadap guru yang tidak linier agar dikembalikan ke SLB asal, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Guru pada SLB.
		11.	Gubernur memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera menyelesaikan *feasibility study* untuk pendirian Rumah Sakit serta *roadmap* kebutuhan Rumah Sakit sampai 5 tahun ke depan berdasarkan estimasi pertambahan jumlah penduduk.	**Dinas Kesehatan**	1. Dinas Kesehatan telah melakukan Penyusunan Feasibility Study (FS), Master Plan (MP) dan Detail Engineering Design (DED) Pendirian Rumah Sakit di kota Samarinda dan kab. Kutai Barat bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Hasanuddin Makassar yang akan diselesaikan akhir tahun 2025. 2. Akan melakukan penyusunan Roadmap Kebutuhan Rumah Sakit 5 Tahun ke Depan dengan melakukan analisis tren pertumbuhan penduduk, pola penyakit, serta distribusi fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten/kota. Penyusunan roadmap akan memuat proyeksi kebutuhan jumlah rumah sakit, kapasitas tempat

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					tidur, layanan prioritas (misalnya jantung, kanker, trauma, dan maternal neonatal), serta kebutuhan SDM kesehatan. Roadmap akan disusun terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah Bidang Kesehatan.
		12.	Gubernur memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan menyesuaikan regulasi dalam bidang kesehatan yang terbaru untuk bisa dimasukan dalam Propemperda tahun 2026.	**Dinas Kesehatan**	Penyusunan revisi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sudah berproses sejak tahun 2024 dengan pendampingan konsultan Pakar dari Universitas Gajah Mada dan akan ditindaklanjuti di tahun 2026

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		13.	Gubernur memerintahkan Dinas Kesehatan untuk segera menyelesaiakan draft peraturan gubernur tentang besaran insentif tenaga dokter spesialis yang ditempatkan pada rumah sakit pemerintah sebagai skema *supporting* penempatan tenaga medis.	**Dinas Kesehatan**	Saat ini dilaksanakan yakni penyusunan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Penugasan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten/Kota (draft sudah di bahas dan akan dilaksanakan Penandatanganan di bulan September)
		14.	Gubernur memerintahkan Dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan mandiri di RS Korpri tentang belum berfungsinya *fire alarm*, *hydrant*, *grounding* Gedung dan penangkal petir, lampu penerangan halaman dan kebocoran bak sediman pengolahan air limbah.	**Dinas Kesehatan**	Untuk Fire Alarm dtindaklanjuti dengan usulan pengadaan baterai panel fire Alarm, untuk Hydrant mengusulkan perbaikan pada saluran perpipaan Hydrant. Mengusulkan perbaikan sistem elektrikal fire alarm, Grounding Gedung Sudah Terpasang, Penangkal Petir Sudah Terpasang, mengusulkan pemasangan lampu penerangan, serta Usulan perbaikan pengolahan air limbah.
		15.	Gubernur memerintahkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Diskominfo untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalisasikan Indikator pada aplikasi dimaksud untuk mengacu pada indikator pendataan yang sesuai dengan aplikasi SIDATA.	**Diskominfo dan Dinas Pemuda & Olahraga**	1. Dispora dan Diskominfo telah berkoordinasi dalam penyempurnaan data secara berkala setiap tahunnya. 2. Telah dilakukan Optimalisasi Indikator dan telah disesuaikan dengan Indikator pada Aplikasi SIDATA.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
		16.	Gubernur memerintahkan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera menindak lanjuti dan melaporkan hasil kajian perubahan SKOI Kalimantan Timur menjadi Sentra Pendidikan Olahraga Kalimantan Timur.	**Dinas Pemuda & Olahraga**	1. Dispora telah melakukan rapat koordinasi bersama pihak SKOI, Akademisi dan Lembaga Olahraga lainnya; 2. Dispora telah melakukan Kajian Ilmiah bersama pihak-pihak yang terkait; 3. Saat ini Dispora sedang Menyusun dan melengkapi administrasi persyaratan sesuai arahan hasil rapat dan Kajian Ilmiah yang telah dipaparkan dan dibahas; 4. Dispora akan mengadakan rapat lanjutan bersama pihak-pihak yang terkait, sebagai langkah penyempurnaan untuk tahapan berikutnya.
		17.	Gubernur memerintahkan Dinas Perpustakaan dan Dinas PUPR-PERA untuk segera menindaklajuti tentang progres pemindahan Gedung Perpustakaan Daerah Kalimantan Timur ke lahan eks bandara Temindung.	**Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah dan Dinas PUPR PERA**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada prinsipnya menyetujui relokasi Gedung perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan aturan dan kesepakatan, upaya dari Dinas Perpustakaan dan Keasipan 1. Telah dilakukan identifikasi Bangunan Negara yang menjadi kepentingan strategis Provinsi Kalimantan Timur. 2. Telah dilakukan Peninjauan lapangan dan diberikannya rekomendasi oleh PUPR PERA nomor 600.1.15.2/3678/BID-CK 3. Bersurat kepada PUPR PERA untuk permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek). Dengan nomor surat 000.1.8.3/2838/DPK-I/2025 Berdasarkan persoalan : 1. Lokasi yang sudah tidak refresentatif karena berada tepat di simpang jalan,terdapat traffic

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					light dan flyover sehingga akses keluar masuk kendaraan terganggu 2. Struktur bangunan yang sudah mengalami kerusakan-kerusakan beberapa elemen 3. Gedung terletak pada lokasi rawan banjir.
		18.	Gubernur memerintahkan Disnakertrans untuk menerapkan sistem kartu kuning pekerja secara online untuk mengontrol tingkat pengangguran dan ketersediaan tenaga kerja serta informasi lapangan kerja yang tersedia.	**Disnakertrans**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang membuat sistem informasi terintegrasi yang disebut Etam Kerja dimana sistem ini akan mempertemukan para pencari kerja dan Perusahaan secara *Real Time* dan sistem ini akan dipakai di seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Timur sehingga pencari kerja tidak perlu lagi mengisi dan mendapatkan kartu kuning karena sudah terintegrasi antara kebutuhan dan persediaan lapangan kerja dan menjadi bahan informasi untuk mengambil kebijakan mengenai ketenagakerjaan yang perlu dilakukan.
		19.	Gubernur memerintahkan kepada DKP3A dan Dinas PUPR-PERA untuk segera menindaklanjuti tentang pengajuan Pembangunan Gedung Kantor baru yang representatif.	**DP3A dan Dinas PUPR PERA**	Dinas PUPR PERA melalui bidang Cipta Karya telah melaksanakan kegiatan Perencanaan Gedung DKP3A pada tahun 2021 dan Dokumen Perencanaan telah diserah terimakan kepada DKP3A dengan surat Nomor 080/099/CK-I/2022 tanggal 19 Januari 2022, agar dapat ditindaklanjuti oleh OPD tersebut untuk pengusulan anggaran DKP3A Prov. Kaltim telah mengajukan/mengusulkan Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor yang representative melalui surat kepala Dinas Nomor 050/365/I/DKP3A/2022 tanggal 13 Juni 2022 perihal

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					Permohonan Pembangunan Gedung Kantor DKP3A di Tahun 2024, kemudian disusul dengan surat kepala Dinas Nomor 000.7.7/248/DKP3A-1 tanggal 28 Pebruari 2023 dengan perihal yang sama, dan hal ini telah mendapatkan disposisi dari gubernur pada saat itu tertanggal 24 Juni 2022, kemudian melalui surat kepada dinas nomor 600/790/DKP3A-I tanggal 5 September 2023 DKP3A kembali bersurat kepada Sekretaris Daerah selaku Tim TAPD, namun sampai dengan saat ini rencana pembangunan gedung kantor DKP3A belum terealisasi.
		20.	Gubernur membuat kebijakan dan memerintahkan Sekretaris Daerah bersama perangkat daerah terkait merumuskan Peraturan Gubernur tentang pedoman pencegahan, deteksi dini, dan tata laksana untuk menangani stunting.	**Dinas Kesehatan**	Penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya telah memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif pada tingkat nasional, sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai bahwa tidak diperlukan lagi pembentukan Peraturan Gubernur baru. Hal ini karena regulasi terkait pencegahan, deteksi dini, dan tata laksana stunting sudah diatur secara jelas dalam: 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menjadi dasar hukum utama percepatan penurunan stunting secara nasional. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, di mana pelayanan kesehatan ibu hamil, kesehatan anak, dan gizi masyarakat termasuk layanan dasar wajib yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang mencakup intervensi gizi spesifik dan upaya kesehatan masyarakat dalam pencegahan stunting. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Kegiatan Bidang Kesehatan, yang turut memuat target dan strategi penurunan stunting. 5. Pedoman Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator percepatan penurunan stunting, termasuk Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting). Berdasarkan regulasi tersebut, arah kebijakan dan pedoman teknis penanganan stunting pada dasarnya sudah tersedia secara nasional dan berlaku bagi seluruh daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, upaya yang lebih tepat untuk dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah: • Menguatkan implementasi regulasi nasional melalui koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah terkait (Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas P3A, TP-PKK, dan lain-lain).

Bidang/ Urusan	Tujuan Rekomendasi	No.	Rekomendasi	Penanggungjawab	Jawaban Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
					• Meningkatkan kapasitas pelaksana di daerah, termasuk tenaga kesehatan dan kader, dalam upaya deteksi dini, pencegahan, serta tata laksana stunting. • Mengoptimalkan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai amanat Perpres 72/2021. • Memperkuat dukungan kebijakan operasional melalui Surat Edaran atau Instruksi Gubernur bila diperlukan, untuk memastikan percepatan implementasi regulasi nasional di tingkat daerah. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk tidak membuat regulasi baru yang bersifat duplikasi, melainkan fokus pada penerapan secara konsisten regulasi yang telah ada, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan keberlanjutan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam rangka percepatan penurunan stunting di daerah.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Perarturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi

Tugas Pembantuan adalah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan tugas pembantuan bertujuan untuk pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, diperlukan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dengan APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi

yang dibiayai dari APBD. Pengalokasian dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk menjamin tersedianya sebagian anggaran Kementerian/Lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menerima dana tugas pembantuan masing-masing dari:

a. Kementerian Pertanian;
b. Kementerian Pekerjaan Umum;
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
d. Kementerian Transmigrasi;
e. Kementerian Perindustrian;
f. Kementerian Perdagangan;

4.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

4.3.1 Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim

a. Target Kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2025 menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 192.649.869.000,-, bersumber dari 6 (enam) Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dengan 3 Satker yaitu satker 169112, 169121 dan satker 691359**, menerima alokasi anggaran pada tahun 2025 dengan total pagu sebesar Rp. 156.276.683.000 dengan total pagu blokir sebesar Rp. 1.015.428.000, total realisasi keuangan sebesar Rp. 135.041.125.910,- dengan pencapaian kinerja sebesar 86,98% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   1) Pengelolaan Produksi Tanaman Seralia Tanaman Pangan;
   2) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan; dengan pekerjaan pembayaran honorarium.
   3) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, dengan pekerjaan SID (Perencanaan) cetak sawah seluas 2.460 Ha di Kabupaten Berau (2.000 Ha) dan Kutai Barat (460 Ha), pelaksanaan cetak sawah di kabupaten Berau dengan melibatkan TNI dengan luas 425 Ha, pekerjaan optimasi lahan (swakelola tipe IV) di Kabupaten Paser seluas 3.150 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 5.896 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 2.392 Ha, Kabupaten Kutai Timur

seluas 1.200 Ha, Kabupaten Berau seluas 895 Ha, Kota Samarinda seluas 450 Ha.

4) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; dengan pekerjaan pembayaran honorarium mantri pangan dan perjalanan dinas.
6) Penyediaan dan Pengawasan Pestisida;
7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP, dengan pekerjaan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

2. **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur** dengan 1 Satker yaitu 169115, menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 148.788.000 dengan pagu blokir hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp. 58.340.000, realisasi keuangan mencapai Rp. 89.694.500 dengan capaian kinerja sebesar 99,17%, untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan, berupa penyusunan laporan BMN dan pengumpulan serta pengolahan data Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Tingkat Provinsi.
3. **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dengan 2 (dua) Satker yaitu 690158 dan 691129** menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 961.825.000 dengan pagu blokir hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp. 961.825.000 sehingga realisasi keuangan Rp. 0 dan capaian kinerja 0%.

4. **Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan 1 (satu) satker yaitu satker 691023** menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 142.305.000 dengan pagu blokir hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp. 142.305.0000 sehingga realisasi keuangan Rp. 0 dan capaian kinerja sebesar 0%.

5. **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur** dengan 1 (satu) satker yaitu 691656 menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 7.910.770.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.317.939.280 dan capaian kinerja sebesar 92,51% dengan kegiatan sebagai berikut :
   1) Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi berupa Pekerjaan Inventarisasi HPL (Hak Pengelolaan).
   2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi antara lain berupa pekerjaan Bantuan Catu Pangan (alat pertanian, alat pertukangan, alat dapur, alat tidur dan chainsaw, meja kursi tamu dan sandang), pekerjaan Sarana Penerangan Listrik Tenaga Surya Portable/ PLTS, pekerjaan Pengadaan Catu Pangan Beras dan Non Beras, pekerjaan Pengadaan Produksi Lahan Usaha (T1) berupa bibit,

pupuk dan lainnya, kegiatan ini untuk mendukung program di Kawasan Transmigrasi Keladen di Kabupaten Paser.

3) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berupa belanja operasional, belanja non operasional, belanja pegawai dan belanja barang.

6. **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dengan 1 (satu) satker yaitu satker 693766** menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 27.209.498.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 27.207.117.429 dengan capaian kinerja sebesar 99,99%, kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional berupa pekerjaan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 35,25 km dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 81,90 meter dalam kota Samarinda, Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 29,89 km dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 169,6 meter dalam kota Balikpapan serta Penanganan Longsoran/amblas Jl. H.A.M.M. Rifaddin kota Samarinda sepanjang 15 meter.

2) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga, berupa belanja operasional, belanja non operasional, belanja pegawai dan belanja barang.

b. Realisasi

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2025 yang diterima Provinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 192.649.869.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 169.655.877.119 atau sebesar 89,07% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1

Realisasi Sumber Dana Tugas Pembantuan (APBN)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
					Fisik	Keuangan
1	a.169112 b.691359 c.691359	Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	156.276.683.000	135.041.125.910	100	86,98
2	169115	Dinas Petenakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	148.788.000	89.694.500	100	99,17
3	a. 691659	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	7.910.770.000	7.317.939.280	100	92,51

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	TOTAL PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
					Fisik	Keuangan
4	a. 693766	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur	27.209.498.000	27.207.117.429	100	99,99
T O T A L			**192.649.869.000**	**169.655.877.119**	**100**	**89,07**

Sumber data : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim data diolah oleh Biro Adbang Setda Prov. Kaltim, Desember 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Fisik (Pekerjaan) pada Dana Tugas Pembantuan di Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,07%.

Tabel 4.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

NO.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	**Kementerian Pertanian**		1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan 2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan 3. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 4. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 7. Penyediaan dan Pengawasan Pestisida 8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Ditjen LIP	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tanaman Pangan, Pangan dan Hortikultura; (Satker 169112, 169121, 691359)	**Rp.*156.276.683.000 (blokir Rp. 1.015.428.000)***	Rp. ***135.041.125.910***	86,98%	Terlaksana	100%	
2	**Kementerian Pertanian**		1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan ;	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan	Rp. ***148.788.000*** ,- ***(blokir Rp. 58.340.000)***	Rp. ***89.694.500*** ,-	99,17%	Terlaksana	100%	

NO.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					Timur (Satker 169115)						
3	Kementerian Pekerjaan Umum		1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; 2) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga.	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas PUPR dan PERA Prov. Kaltim (Satker 693766)	Rp. ***27.209.498.000***	Rp. ***27.207.117.429***	99,99%	Terlaksana	100%	
4	Kementerian Transmigrasi		1) Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi 2)Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 2) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.	Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (Satker 691659)	Rp. ***7.910.770.000***	Rp. ***7.317.939.280***	92,51%	Terlaksana	100%	

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan dan olah data Biro POD Setda Prov. Kaltim 2025

4.3.3 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

a. Target Kinerja

Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Paser pada Tahun 2025 menerima alokasi anggaran Tugas Pembantuan sebesar Rp. 33.020.029.000,- Dana tersebut bersumber dari 1 (satu) Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur dengan 2 (dua) satker yaitu satker 691660 dan 691696** menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 12.343.257.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.846.347.224 dan capaian kinerja sebesar 47,36% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   1) Pembangunan Kawasan Transmigrasi; berupa pekerjaan rehab gedung sekolah dasar sebanyak 3 unit dan berada dikawasan Kaliorang, pembangunan toilet sekolah sebanyak 3 unit yaitu SD 006 Kaliorang, SMP 1 Kaliorang, dan SMPN 4 Kaubun, supervisi pembangunan toilet di Kawasan Maloy Kaliorang, penambahan ruang kelas baru sebanyak 1 unit di kawasan Maloy Kaliorang, supervisi penambahan ruang kelas baru di Kawasan Maloy Kaliorang, jalan non tatus yang dikembangkan di Kawasan transmigrasi yaitu peningkatan jalan aspal di Desa Bumi Sejahtera Kawasan Maloy Kaliorang sepanjang 2,5 KM.
   2) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berupa honorarium.
   3) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, berupa pekerjaan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan pekerjaan pengembangan produk unggulan transmigrasi yaitu peralatan produksi dan rumah produksi ditunda dan akan dilaksanakan ditahun 2026, berdasarkan surat Kementerian Transmigrasi RI Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor: 174/PET.02.02/X/2025, tanggal 22 Oktober 2025 dengan Pagu Rp. 6.050.000.000
   4) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal pekerjaan berupa honorarium.

2. **Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Paser** menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 20.676.772.000 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 20.355.230.523 dengan capaian kinerja sebesar 98,44% untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   1) Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi dengan pekerjaan pengukuran dan pembagian lahan.

2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi; berupa pekerjaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kawasan transmigrasi, sarana permukiman yang dikembangkan dikawasan transmigrasi yaitu pembangunan toilet sekolah sebanyak 3 unit dan rehab sekolah sebanyak 5 paket dikawasan Muara Komam, sarana permukiman yang dibangun di kawasan transmigrasi yaitu pembangunan rumah transmigran sebanyak 50 unit dikawasan transmigrasi Keladen, pembangunan SAB perpipaan di Keladen, dan pembukaan lahan di lokasi Keladen, sarana permukiman yang dikembangkan di SP dan Pusat SKP yaitu rehab gedung sekolah dan peningkatan toilet di UPT Keladen, sarana permukiman yang dikembangkan di kawasan transmigrasi yaitu pembangunan toilet sekolah sebanyak 3 unit dikawasan Kerang, rehab Sekolah sebanyak 1 unit di kawasan Kerang, jalan non status yang dikembangkan yaitu rehab jalan di kawasan Kerang sepanjang 1 km, pembangunan jalan di satuan permukiman pembangunan berupa pembangunan jalan lingkungan sepanjang 3 Km dikawasan Keladen, jalan non status yang dikembangkan di SP dan Pusat SKP yaitu peningkatan jalan SP Keladen sepanjang 2,25 km, jembatan yang dibangun yaitu pembangunan Box Cuilvert sebanyak 4 Unit di Keladen.

3) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi berupa layanan perkantoran dan layanan organisasi dan tata Kelola internal.

b. Realisasi

Alokasi Anggaran Dana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2025 yang diterima Provinsi Kalimantan Timur dan dilaksanakan oleh dan 2 (dua) Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten sebesar Rp. 33.020.029.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.201.577.747 atau sebesar 72,9% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Dana Tugas Pembantuan (APBN) Kabupaten Tahun 2025

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
					Fisik	Keuangan
1	a. 691660 b. 691696	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur	12.343.257.000	5.846.347.224	50	47,36
2	a. 694566	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser	20.676.772.000	20.355.230.523	100	98,44
T O T A L			**33.020.029.000**	**26.201.577.747**	**75**	**72,9**

Sumber data : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim data diolah oleh Biro Adbang Setda Prov. Kaltim, Desember 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi Fisik (Pekerjaan) pada Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota Tahun 2025 mencapai 75% dan realisasi anggaran sebesar 72,9%.

4.4 Permasalahan dan Kendala

1. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran tidak melibatkan Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas Pembantuan sehingga program kegiatan yang disusun tidak menjawab isu yang terjadi didaerah.
2. Mekanisme koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi dari Pusat sampai ke Daerah masih belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak pada tidak efektifnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi kegiatan di daerah.
3. Ketidaksesuaian antara alokasi dana dalam DIPA dengan usulan alokasi dana kegiatan yang telah diusulkan oleh daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan optimal.
4. Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan ke daerah sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan di daerah karena minimnya waktu pelaksanaan dan tidak adanya acuan untuk menjalankan kegiatan;
5. Keterlambatan pergerakan anggaran & penetapan pejabat pengelola keuangan.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menjalankan program/kegiatan Tugas Pembantuan di daerah, dikarenakan pejabat pengelola keuangan harus bersertifikasi.
7. Beragamnya format pelaporan yang dikeluarkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga menghambat dalam proses pelaporan.
8. Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana di daerah, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala.
9. Standarisasi biaya APBN (perjalanan dinas dalam daerah, transportasi, konsumsi dan lain-lain) yang dialokasikan terhitung rendah dan tidak relevan dengan kondisi didaerah terutama biaya perjalanan dinas atau biaya monitoring ke daerah pedalaman di Kalimantan Timur, sehingga kegiatan menjadi terkendala.
10. Terdapat Blokir pada Pagu tanpa adanya kordinasi dan sosialisasi bagi Perangkat Daerah yang mengampu Dana Tugas Pembantuan.

4.5 Saran dan Tindak Lanjut

1. Isu-isu strategis perlu disusun sebelum membuat RKA-KL sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar mengakomodir apa yang menjadi isu strategis di daerah sehingga bentuk kegiatan yang dilakukan dapat sinergi dengan kebijakan dan usulan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar Perangkat Daerah Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien;
3. Pemerintah Pusat sebaiknya lebih memperhatikan dan mengakomodir dengan lebih baik setiap usulan kegiatan dan anggaran yang telah diajukan oleh daerah.
4. Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan penyampaian DIPA, juklak dan juknis ke daerah secara lebih cepat dan tepat waktu;
5. Satker segera melakukan pergerakan anggaran & menetapkan pejabat pengelola keuangan.
6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelaksana Tugas Pembantuan didaerah melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, workshop serta bimtek secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan karena aparatur yang bertugas seringkali mengalami mutasi/dipindahkan ke Perangkat Daerah lain;
7. Perlu penyeragaman format pelaporan APBN secara *on line*, sehingga fungsi pengendalian evaluasi dapat berjalan dengan optimal;
8. Sinkronisasi struktur Organisasi/Kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat;
9. Evaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan, sebagai feedback untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
10. Melakukan Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah yang mendapatkan anggaran tugas pembantuan apabila terdapat Pagu Blokir yang berada pada DIPA masing-masing Perangkat Daerah pengampu Tugas Pembantuan.

BAB V

P E N U T U P

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan tersebut memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang mencakup seluruh penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya pemecahan masalah setiap urusan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2025 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tingkat Nasional di Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dari LAN RI;
2. Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025;
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2025;
4. TPID Awards Regional Kalimantan 2025 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI;
5. Championship TP2DD 2025 – Provinsi Terbaik Regional Kalimantan dari Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI;
6. TPAKD Award 2025 Nominator Terbaik Wilayah Kalimantan dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Dalam Negeri RI;
7. Top Pembina BUMD Award 2025;
8. Peringkat 1 Nasional – Sutami Award 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum RI;
9. Indeks Ketahanan Pangan – Peringkat 2 Nasional dari Badan Pangan Nasional;
10. Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2025 dari Kementerian Perindustrian RI;
11. CNN Award 2025 – Leader in Sports Excellence and Agricultural Empowerment;
12. Terbaik II Indkes Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) – Provinsi Sedang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI;

13. Naker Inspirational Leadership Awards 2025 – Penghargaan Pembina Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan RI;
14. Penghargaan Pencapaian Intervensi Spesifik Tahun 2025;
15. Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama RI;
16. Juara Umum STQH Nasional dari Kementerian Agama RI;
17. Baznas Award 2025 dari Baznas RI;
18. Juara Harapan IV Kategori Desa Wisata Terbaik Nasional, Desa Wisata Pringgondani (Balikpapan) – Wonderful Indonesia Awards 2025 dari Kementerian Pariwisata RI;
19. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 – Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat RI;
20. Daerah Peduli Perlindungan Konsumen (DPPK) Tahun 2025 dari Kementerian Perdagangan RI;
21. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025, Untuk 2 (dua) Kategori, yakni Desa dan Kelurahan, Bentuk Apresiasi atas Komitmen Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Kementerian Dalam Negeri RI;
22. Peringkat 1 Lomba Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tingkal Nasional Regional III (Kalimantan adn Sulawesi) Yaitu Desa Padang Jaya Kabupaten Paser dan Kelurahan Satimpo Kota Bontang dari Kementerian Dalam Negeri RI;
23. Juara 3 Nasional Kategori Desa ketahanan Pangan, Desa Loa Duri Ilir Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
24. Peringkat 5 BUMDesa Terinspiratif yaitu BUMDesa Tepian Bina Bersama, Desa Tepian Langsat Kabupaten Kutai Timur dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;

Penyelenggaraan Pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Akhir Tahun Anggaran 2025. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur tersebut semata-mata karena atas dukungan, kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh komponen masyarakat Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan damai. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melanjutkan, meningkatkan dan

menuntaskan program pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam terbarukan yang berdaya saing dan pro rakyat dan akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik.

Demikian penyampaian LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua.